



KABUPATEN LUWU TIMUR



LKPJ

LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023





KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga kami dapat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 tepat waktu sesuai amanah perundang-undangan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ. Hal ini senada dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 19 ayat (1) bahwa Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran.

Berdasarkan laporan hasil kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam LKPJ Tahun 2023 ini, telah banyak target kinerja yang tercapai walaupun masih terdapat beberapa capaian yang belum optimal. Harus disadari masih terdapat sejumlah persoalan yang harus dipecahkan, agar seluruh target kinerja dapat tercapai. Berkaitan dengan hal tersebut, masukan dan rekomendasi hasil pembahasan DPRD diharapkan menjadi pertimbangan yang penting dalam melakukan sejumlah perbaikan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur pada tahun – tahun selanjutnya

Demikian pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Luwu Timur Tahun Anggaran 2023, semoga Laporan ini dapat memberi perbaikan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa akan datang yang pada akhirnya dapat mewujudkan kolaborasi dan harmonisasi bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Luwu Timur.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Malili, Maret 2024
BUPATI LUWU TIMUR,

H. Budiman, M.Pd



DAFTAR ISI

	hal
HALAMAN JUDUL -----	i
KATA PENGANTAR -----	ii
DAFTAR ISI -----	iii
DAFTAR TABEL -----	iv
BAB I PENDAHULUAN -----	1
DASAR HUKUM -----	2
VISI DAN MISI KEPALA DAERAH -----	3
DATA UMUM DAERAH -----	13
1. Data geografis wilayah -----	13
2. Topografi -----	14
3. Kependudukan -----	15
4. Pertumbuhan Penduduk -----	15
5. Kepadatan Penduduk -----	16
6. Struktur Usia Penduduk -----	17
7. ASN -----	19
8. Jumlah PNS -----	20
9. Jumlah PPPK -----	25
10. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan -----	25
11. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja -----	32
12. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan -----	35
13. Realisasi Belanja Perangkat Daerah -----	36
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH -----	41
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH -----	139
3.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO -----	139
3.2 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN -	143
3.2.1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR -----	143
a) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan -----	143
b) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan -----	155
c) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang -----	175
d) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan -----	190
e) Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat -----	196
f) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial -----	225
3.2.2 URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR -----	229
a) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja -----	229
b) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak -----	236
c) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan -----	242
d) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan -----	249



e)	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup-----	254
f)	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil-----	263
g)	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa-----	271
h)	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana -----	279
i)	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan-----	288
j)	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika-----	298
k)	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah-----	303
l)	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal-----	311
m)	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga -----	317
n)	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik -----	321
o)	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian-----	321
p)	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan -----	322
q)	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan -----	323
r)	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan -----	325
3.2.3	URUSAN PILIHAN -----	331
a)	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan-----	331
b)	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata -----	340
c)	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian-----	345
d)	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan-----	357
e)	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian -----	360
f)	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi-----	362
3.2.4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN -----	364
a)	Unsur Sekretariat Daerah-----	364
b)	Unsur Sekretariat DPRD -----	378
3.2.5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN-----	389
a)	Unsur Keuangan -----	389
b)	Unsur Kepegawaian-----	404
c)	Pendidikan,dan Pelatihan-----	411
d)	Unsur Penelitian dan Pengembangan-----	413
e)	Unsur Perencanaan -----	416
f)	Kesatuan Bangsa dan Politik-----	424
3.2.6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN-----	432
a)	Unsur Pengawasan-----	432
3.2.7	UNSUR KEWILAYAHAN -----	439
a)	Unsur Kewilayahan -----	439
3.3	KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN-----	519
3.4	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA -----	522
BAB IV	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN-----	523
4.1	URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS-PEMBANTUAN --	523
4.2	HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN -----	531
BAB V	PENUTUP -----	535



DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	6
Tabel 1.2 Capaian Indikator Kinerja Utama.....	9
Tabel 1.3 Luas Wilayah dan Persentase menurut Kecamatan Kabupaten Luwu Timur.....	13
Tabel 1.4 Panjang Sungai Utama di Kabupaten Luwu Timur.....	14
Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2019 – 2023.....	15
Tabel 1.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.....	16
Tabel 1.7 Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2023.....	17
Tabel 1.8 Struktur Usia Penduduk Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.....	18
Tabel 1.9 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2023.....	19
Tabel 1.10 Jumlah PNS Berdasarkan OPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2023.....	20
Tabel 1.11 Jumlah PNS berdasarkan Golongan, Eselon, dan Pendidikan Tahun 2020 –2022.....	23
Tabel 1.12 Klasifikasi PNS Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2020-2023.....	24
Tabel 1.13 Jumlah PPPK Berdasarkan Jabatan, Pendidikan dan Jenis Kelamin Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2023.....	25
Tabel 1.14 Anggaran dan Realisasi Penerimaan PAD Tahun Anggaran 2023.....	27
Tabel 1.15 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023.....	29
Tabel 1.16 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023.....	31
Tabel 1.17 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023.....	32
Tabel 1.18 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023.....	33
Tabel 1.19 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023.....	34
Tabel 1.20 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023.....	35
Tabel 1.21 Anggaran dan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan T.A 2023.....	35
Tabel 1.22 Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.....	37
Tabel 2.1 Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.....	44
Tabel 2.2 Perubahan Pendapatan Tahun Anggaran 2023.....	46
Tabel 2.3 Perubahan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023.....	48
Tabel 2.4 Perubahan Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023.....	51
Tabel 2.5 Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2023.....	53
Tabel 2.6 Perubahan Pendapatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.....	53
Tabel 2.7 Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.....	55
Tabel 2.8 Perubahan Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023.....	57
Tabel 2.9 Perubahan Belanja Modal Tahun Anggaran 2023.....	59
Tabel 2.10 Perubahan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023.....	60
Tabel 2.11 Perubahan Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023	60
Tabel 2.12 Perubahan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023.....	61
Tabel 2.13 Perubahan Rincian Anggaran Belanja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur	63



	Tahun Anggaran 2023.....	
Tabel 2.14	Perubahan Anggaran Program/Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	65
Tabel 2.15	Perubahan Anggaran Program/Kegiatan Dinas Kesehatan.....	68
Tabel 2.16	Perubahan Anggaran Program/Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo	71
Tabel 2.17	Perubahan Anggaran Program/Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	72
Tabel 2.18	Perubahan Anggaran Program/Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan.....	75
Tabel 2.19	Perubahan Anggaran Program/Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja.....	78
Tabel 2.20	Perubahan Program /Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	79
Tabel 2.21	Perubahan Anggaran Program/ Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana.....	82
Tabel 2.22	Perubahan Anggaran Program/Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	83
Tabel 2.23	Perubahan Anggaran Program/Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.....	85
Tabel 2.24	Perubahan Anggaran Program/Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup.....	88
Tabel 2.25	Perubahan Anggaran Program/ Kegiatan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	91
Tabel 2.26	Perubahan Anggaran Program Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	93
Tabel 2.27	Perubahan Anggaran Program/Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.....	94
Tabel 2.28	Perubahan Anggaran Program/ Kegiatan Dinas Perhubungan.....	96
Tabel 2.29	Perubahan Anggaran Program /Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian.....	98
Tabel 2.30	Perubahan Program/ Kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	100
Tabel 2.31	Perubahan Anggaran Program/Kegiatan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan.....	102
Tabel 2.32	Perubahan Anggaran Program / Kegiatan Dinas Perikanan.....	104
Tabel 2.33	Perubahan Anggaran/Kegiatan Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga.....	107
Tabel 2.34	Perubahan Anggaran Program /Kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	110
Tabel 2.35	Perubahan Anggaran Program/Kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian.....	113
Tabel 2.36	Perubahan Anggaran Program / Kegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.....	116
Tabel 2.37	Perubahan Anggaran Program / Kegiatan Sekretariat Daerah.....	119
Tabel 2.38	Perubahan Anggaran Program / Kegiatan Sekretariat DPRD	123
Tabel 2.39	Perubahan Anggaran Program Kegiatan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah.....	126
Tabel 2.40	Perubahan Anggaran Program dan Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah.....	129
Tabel 2.41	Perubahan Anggaran Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.....	131
Tabel 2.42	Perubahan Anggaran Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.....	133
Tabel 2.43	Perubahan Anggaran Program / Kegiatan Inspektorat.....	135
Tabel 2.44	Perubahan Rincian Anggaran Belanja Kecamatan Kecamatan Se Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022.....	137
Tabel 2.45	Perubahan Rincian Anggaran Belanja Puskesmas Puskesmas Se Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022.....	138
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Makro Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.....	142



Tabel 3.2	Pelaksanaan Wajib Urusan Dasar Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.....	143
Tabel 3.3	Pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kab. Luwu Timur Tahun 2023.....	229
Tabel 3.4	Urusan Pilihan Kab. Luwu Timur tahun 2023.....	331
Tabel 3.5	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun 2023.....	364
Tabel 3.6	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun 2023.....	389
Tabel 3.7	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun 2023.....	432
Tabel 3.8	Unsur Kewilayahan Kab. Luwu Timur Tahun 2023.....	439
Tabel 3.9	Kebijakan Strategis Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.....	518
Tabel 3.10	Rekomendasi DPRD dan Tindak Lanjut Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.....	522
Tabel 4.1	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.....	530
Tabel 4.2	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.....	534
Tabel 4.3	Uraian Capaian Kinerja, Permasalahan Dan Solusi Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Dan Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.....	537



BAB I PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tersebut didasarkan pada asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan dan keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya dalam Pasal 71 ayat (2) diamanatkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ Berdasarkan Pasal (1) Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

LKPJ Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencanan Kerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023, yang merupakan penjabaran tahunan dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. LKPJ Bupati Luwu Timur Akhir Tahun Anggaran 2023 adalah tolok ukur terhadap pencapaian kinerja pembangunan tahunan yang disusun bersama melalui serangkaian tahapan dan mekanisme berbasis Rencana Kerja Pembangunan yang menjadi pedoman, sebagai bahan penyusunan perencanaan



dan penganggaran selanjutnya.

1. 1 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Luwu Timur Akhir Tahun Anggaran 2023 adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.
13. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023;



1.2 Visi dan Misi

Visi adalah sebuah cita-cita luhur yang diharapkan sebagai arahan dan tujuan dari suatu entitas. Dalam suatu pemerintahan, visi diartikan sebagai cita-cita luhur yang menjadi arah dan tujuan utama yang hendak dicapai sebagai pengejawantahan kehendak rakyat. Visi pembangunan Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 dibangun diatas kondisi, potensi, kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan Kabupaten Luwu Timur yang akan dihadapi hingga tahun 2026.

Visi pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 Tahap IV serta penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Perumusan visi RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 ini disamping mengacu pada RPJPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 Tahap IV, juga mengacu kepada Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur periode 2021 – 2026 adalah

“Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya” .

Visi tersebut memiliki arti dan makna pada setiap pokok visi, yaitu:

Berkelanjutan : Mengandung makna bahwa apa yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari masa lalu. Penekanan pokok visi ini adalah keberlanjutan sumberdaya alam yang menjadi andalan pembangunan Kabupaten Luwu Timur serta keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Lebih Maju : Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan ke depan diupayakan agar hasilnya menjadi lebih baik dari capaian di masa lalu. Capaian-capaian yang menggembirakan di masa lalu, tidak boleh membuat Luwu Timur menjadi lengah, melainkan ini sejatinya menjadi motivasi untuk terus bergerak menjadi lebih baik lagi. Demikian juga, terhadap apa yang masih kurang dan menjadi kelemahan di masa lalu, menjadi pemberi semangat agar di masa depan Luwu Timur berbenah atas kekurangan dan kelemahan tersebut, sehingga dapat berbalik menjadi



keunggulan daerah. Aspek penting yang terkandung dalam pokok visi maju adalah kesejahteraan masyarakat secara umum.

Berlandas nilai agama dan budaya : mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk terus berbenah menjadi lebih maju hanya akan mewujudkan ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan kemasyarakatan untuk menjabarkan visi pembangunan tahun 2021-2026, maka telah dirumuskan 6 (enam) misi pembangunan daerah, yang terdiri dari:

Misi 1. Meningkatkan Kesejahteraan dan Taraf Hidup Masyarakat Secara Menyeluruh. dimaksudkan bahwa dalam kurun waktu 2021-2026 akan dilaksanakan upaya umum agar masyarakat Luwu Timur semakin meningkat kesejahteraan dan taraf hidupnya dengan ditandai oleh meningkatnya PDRB per kapita, menurunnya angka pengangguran, menurunnya rasio jumlah penduduk miskin, meningkatnya indeks pendidikan dan kesehatan, serta meningkatnya daya beli masyarakat

Misi 2. Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas. dimaksudkan sebagai upaya umum agar perekonomian Luwu Timur terus berkembang. Selain itu juga memiliki kapasitas daya saing yang berbasis pada pertanian olahan mendukung hilirisasi yang pada akhirnya meningkatkan nilai tambah, serta menguatkan struktur ekonomi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Perekonomian Luwu Timur tersebut diupayakan berkembang dengan rantai pasok yang luas karena memiliki berbagai jaringan dalam konteks regional, nasional dan global.

Misi 3. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik. dimaksudkan bahwa dalam periode 2021-2026 tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Luwu Timur didorong untuk menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik. Ini ditandai dengan upaya-upaya untuk terkelolanya pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan dan partisipatif, serta pengembangan kerjasama yang fungsional dan produktif antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa serta dengan berbagai pihak. Misi ini juga mencakup



upaya perluasan jangkauan dan intensitas layanan public serta meningkatkan pendapatan asli daerah.

Misi 4. *Menyediakan Infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas.* dimaksudkan sebagai upaya umum dalam menyediakan infrastruktur wilayah pada berbagai sektor sehingga ketersediaanya lebih memadai dan terakses sampai pada daerah terisolasi. Misi ini juga mencakup upaya dalam menciptakan kondisi lingkungan yang lebih berkualitas dan responsif bencana. Misi ini termanifestasikan dalam bentuk meningkatnya indeks lingkungan hidup, terciptanya kepatuhan multipihak terhadap Rencana Tata ruang dan Rencana Wilayah (RTRW), serta peningkatan pada Indeks Kepuasan Masyarakat atas ketersediaan infrastruktur wilayah.

Misi 5. *Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat.* Misi ini mencakup upaya umum dalam menjamin ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat. Dalam misi ini, ketenteraman dan ketertiban ditempatkan sebagai prasyarat bagi berlangsungnya upaya pembangunan. Dalam konteks itu, mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat seperti mata uang dengan dua sisi yang tak terpisahkan dari pelaksanaan pembangunan

Misi 6. *Menjamin Keberlangsungan Pembangunan yang Berbasis pada agama dan budaya.* dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat memberi jaminan terhadap keberlangsungan pembangunan di masa depan. Misi ini mengasumsikan bahwa ketersediaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia lebih prospektif lagi bagi masa depan Luwu Timur ketika proses atau pelaksanaan pembangunan didasari dengan nilai-nilai agama dan budaya. Nilai-nilai agama dan budaya tersebut menjadi sangat penting artinya. Ini telah ditunjukkan oleh sejarah perkembangan Luwu Timur di masa lalu yang masyarakatnya hidup dan berkembang dengan keberagamaan yang kuat serta penghayatan dan praktik budaya yang tinggi. Nilai-nilai agama dan budaya ini juga relevan dalam konteks keberlanjutan pembangunan, karena dari keduanya para penyelenggara pembangunan dapat termotivasi untuk mengendalikan diri terhadap berbagai kemungkinan rusaknya tatanan keluarga, masyarakat, dan lingkungan fisik manusia.



Adapun hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan kabupaten Luwu Timur berdasarkan RPJMD kabupaten Luwu Timur 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan sosial masyarakat yang berbasis sumber daya dan didukung oleh stabilitas keamanan wilayah dan nilai-nilai budaya			
1	Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat (T1)	Meningkatnya Kualitas manusia yang berdaya saing (S1)	Mendorong kontribusi dunia usaha, kesadaran kritis kolektif, dan dukungan sarana/prasarana dalam meningkatkan derajat pendidikan dan literasi, lama hidup dan kesehatan, serta daya beli masyarakat. (St1)
		Meningkatnya kualitas pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan (S2)	Mengoptimalkan pemanfaatan dana dan koordinasi perangkat daerah dengan pemerintah desa dalam memperkuat ketahanan ekonomi, sosial dan ekologi desa dalam kerangka pemenuhan SDGs Desa (St2)
		Meningkatnya Pemberdayaan Gender (S3)	Menguatkan Peran dan Kapasitas Perempuan dalam Pembangunan (St3)
Misi 2 Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas (M2)			
2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan (T2)	Meningkatnya realisasi investasi Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan daerah (S4)	Memanfaatkan teknologi terkini dan spirit milenial dalam meningkatkan produktivitas komoditas unggulan dengan didukung oleh inovasi daerah dan prasarana/sarana perdagangan(S4)
		ketersediaan lapangan pekerjaan dan lapangan usaha	Meningkatkan daya saing tenaga kerja dan perkembangan start-up UMKM berbasis digital yang didukung oleh iklim investasi dan persaingan usaha yang baik (St5)



No	Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 3 Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas (M3)			
3	Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah secara berkelanjutan (T3)	Meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah (S6)	Meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan dalam menjaga dan memelihara fungsi infrastruktur pekerjaan umum, perhubungan, pemukiman dan perumahan, serta sumberdaya air secara berkualitas diiringi dengan kepatuhan terhadap RTRW (St6)
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana (S7)	Memperkuat sistem pengelolaan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati berbasis kontribusi multi pemangku kepentingan diiringi dengan peningkatan kapasitas dalam adaptasi dan mitigasi terhadap risiko bencana dan perubahan iklim (St7)
Misi 4 Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik (M4)			
4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani (T4)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan (S8)	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan perbaikan tata kelola keuangan daerah diiringi dengan peningkatan profesionalisme SDM aparatur berbasis jabatan fungsional (St8)
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S9)	Meningkatkan akurasi data, kesiapan sarana dan fasilitas, serta kesiapan SDM aparatur diiringi dengan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi serta standar operasional prosedur dalam pemenuhan SPM pelayanan dasar dan perbaikan kualitas pelayanan non SPM (St9)
Misi 5 Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat (M5)			
5	Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap norma ketertiban dan	Terpeliharanya Rasa Aman dan damai dalam masyarakat	Menguatkan peran kelembagaan masyarakat secara bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban serta rasa



No	Tujuan	Sasaran	Strategi
	ketentraman (T5)		aman dan damai dalam masyarakat (St10)
Misi 6 Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya (M6)			
6	Meningkatkan toleransi dan kualitas kehidupan beragama serta ketahanan budaya daerah (T6)	Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya sebagai landasan pembangunan (S11)	Memperkuat peran forum kerukunan umat beragama serta pembinaan mental-spiritual diiringi dengan penguatan modal keragaman etnik dan suku dalam pemajuan kebudayaan (St11)

Adapun capaian misi RPJMD 2021-2026 dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 1.2
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Indikator	Satuan	Target Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7
Visi: Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya						
1	Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh (M1)	Tujuan-1:				
		Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat (T1)	1 Angka Kemiskinan	%	6,44	6,93
		Sasaran-1:				
		Meningkatnya Kualitas manusia yang berdaya saing (S1)	2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	74,1	75,84
		Sasaran-2:				
		Meningkatnya kualitas pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan (S2)	3 Indeks Desa Membangun (IDM)	Status Desa	Maju	Maju
		Sasaran-3:				
2	Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas (M2)	Meningkatnya Pemberdayaan Gender (S3)	4 Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Nilai	90	90,34**
		Tujuan-2:				
		Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan (T2)	5 Pertumbuhan Ekonomi	%	2,72-3,63	9,66
			6 Rasio Gini	Nilai	0,264	0,392
		Sasaran-4				
		Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah (S4)	7 Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	%	0.10	1,19



No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Indikator	Satuan	Target Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023
		Sasaran-5:				
		ketersediaan lapangan pekerjaan dan lapangan usaha (S5)	8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,05	5,42
3	Menyediaan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas (M3)	Tujuan-3:				
		Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah secara berkelanjutan (T3)	9 Indeks daya saing infrastruktur daerah	nilai	20.66	60,44
		Sasaran-6:				
		Meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah (S6)	10 Indeks kepuasan layanan infrastruktur	Nilai	74,93	84,27**
		Sasaran-7:				
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana (S7)	11 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH)	Point	88.1	80.09
			12 Indeks Risiko Bencana (IRB)	Nilai	202 (Tinggi)	152.28 (Tinggi)9
4	Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik (M4)	Tujuan-4:				
		Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani (T4)	13 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Predikat	B	



No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Indikator	Satuan	Target Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023
		Sasaran-8:				
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan (S8)	14 Indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD)	Predikat	A	A (2022)
			15 Nilai SAKIP Daerah	Predikat	BB (71,0)	B (66,51)
		Sasaran-9:				
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S9)	16 IKM Pelayanan SPM (Nilai)	Nilai	84,75	98,49**
			17 IKM Pelayanan Perijinan dan non Perijinan (Nilai)	Nilai	85,3	87.84
5	Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat (M5)	Tujuan-5:				
		Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap norma ketertiban dan ketenteraman (T5)	18 Angka Kriminalitas	Point	0,00056	0,0003469
		Sasaran-10:				
		Terpeliharanya Rasa Aman dan damai dalam masyarakat	19 Indeks Ketertiban dan Ketenteraman	Nilai	78	81,67
6	Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya (M6)	Tujuan-6:				
		Meningkatkan toleransi dan kualitas kehidupan beragama serta ketahanan budaya daerah (T6)	20 Indeks kerukunan umat beragama	Nilai	75,92	79,49
			21 Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	54,77	-
		Sasaran-11:				



No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Indikator	Satuan	Target Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023
		Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya sebagai landasan pembangunan (S11)	22 Cakupan penerapan nilai Agama dalam masyarakat	%	95	100
			23 Cakupan penerapan nilai budaya dalam masyarakat	%	95	89,14



1.3. Data Umum Daerah

1.3.1. Data Geografis Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah 6.748,62 Km² atau sekitar 14,76 persen dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. dan berada ditinggikan 0–1.20 m di atas permukaan laut (dpl).

Kabupaten Luwu Timur secara administratif terdiri dari 11 Kecamatan, 124 Desa dan 3 Kelurahan. Adapun 11 Kecamatan, yaitu Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni, Tomoni Timur, Angkona, Malili, Towuti, Nuha, Wasuponda, Mangkutana, dan Kalaena. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Towuti yang mencapai 2.079,89 km² atau sekitar 30,82 persen dari luas wilayah Kabupaten Luwu Timur. Malili merupakan ibu kota Kabupaten Luwu Timur terletak ±550 km sebelah utara kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dan dapat dicapai dengan perjalanan darat (±12 jam) ataupun udara (Bandara Sorowako ±45 menit dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar). Adapun luas wilayah berdasarkan kecamatan sebagai berikut:

Tabel 1.3
Luas Wilayah dan Persentase menurut Kecamatan
Kabupaten Luwu Timur

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Luas Wilayah (Ha)	(%)
1	2	3	4	5
1	Burau	298,13	29.813,89	4,42
2	Wotu	146,81	14.681,61	2,18
3	Tomoni	251,52	25.152,21	3,73
4	Tomoni Timur	49,43	4.943,41	0,73
5	Angkona	293,96	29.396,53	4,36
6	Malili	746,93	74.693,21	11,07
7	Towuti	2.078,89	207.989,91	30,82
8	Nuha	756,71	75.671,60	11,21
9	Wasuponda	920,67	92.067,87	13,64
10	Mangkutana	1.119,59	111.959,07	16,59
11	Kalaena	84,93	8.493,48	1,26
Total		6.748,62	674.862,99	100,00

Sumber data : Dokumen Matek Revisi RTRW Kabupaten Luwu Timur 2022-2042 ,2023

Kemiringan lereng diatas 40persen perlu ditetapkan sebagai kawasan lindung/konservasi untuk tujuan perlindungan terhadap areal yang ada dibawahnya dan tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pertanian terutama kegiatan ekstensifikasi pertanian. Terdapat 14 sungai yang mengalir di Wilayah Kabupaten Luwu Timur, 9 diantaranya adalah sungai utama. Sungai terpanjang



adalah sungai Kalaena dengan panjang 85 Km. Sedangkan sungai terpendek adalah sungai Bambalu dengan panjang 15 Km. Panjang sungai utama Kabupaten Luwu Timur dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.4
Panjang Sungai Utama di Kabupaten Luwu Timur

Nama Sungai	Daerah Aliran	Panjang Sungai (Km)
1	2	3
Larona	Kec. Nuha	60
Ussu	Kec. Wasuponda dan Malili	30
Cerekang	Kec. Wasponda dan Malili	50
Angkona	Kec. Angkona	48
Kalaena	Kec. Mangkutana, Tomoni dan Kalaena	85
Powosoi	Kec. Mangkutana, Tomoni, Wotu	18
Singgeni	Kec. Burau	24
Bambalu	Kec. Burau	15
Pongkeru	Kec. Malili	33,5

Sumber: Profil Kab Luwu Timur Tahun 2023

Selain itu, di Kabupaten Luwu Timur juga terdapat 5 danau. Kelima danau tersebut adalah Danau Matano (dengan luas 245,70 km²) terletak di Kecamatan Nuha, Danau Mahalona (25 km²), Danau Towuti (585 km²), Danau Tapparang Masapi (2,43 km²) dan Danau Lantoa (1,72 km²) terletak di Kecamatan Towuti.

1.3.2 Topografi

Kabupaten Luwu Timur yang sebagian besar wilayahnya berada pada kawasan Pegunungan Verbeck merupakan daerah yang bertopografi pegunungan. Namun di beberapa tempat merupakan daerah dataran hingga rawa-rawa. Wilayah-wilayah yang bergunung adalah bagian utara dan barat sedangkan wilayah dataran adalah bagian selatan dan barat. Kondisi datar sampai landai terdapat pada semua wilayah kecamatan dengan yang terluas di Kecamatan Angkona, Burau, Wotu, Malili dan Mangkutana. Sedangkan kondisi bergelombang dan bergunung yang terluas di Kecamatan Nuha, Mangkutana dan Towuti.

Kabupaten Luwu Timur didominasi oleh wilayah pegunungan (422.306,86 Ha), hal ini menandakan bahwa sebagian besar wilayah ini berada pada ketinggian. Jika dilihat posisi wilayah ini dari permukaan laut, maka Kabupaten Luwu Timur dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu: 0 – 25 m, 25 – 100m, 100 – 500m, 500 – 1000m dan >1000m. Sebagian besar wilayah Kecamatan Nuha berada pada daerah pegunungan, sedangkan Angkona dan Wotu didominasi oleh daerah dataran. Sesuai



dengan kondisi topografi, maka ketinggian juga menunjukkan bahwa Kecamatan Nuha dan Kecamatan Towuti didominasi oleh pegunungan berada pada ketinggian di atas 1000 mdpl.

1.3.3 Kependudukan

1.3.3.1 Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 sangat dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu perpindahan penduduk (mutasi) dari atau/keluar Kabupaten Luwu Timur, kelahiran dan kematian. Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Timur berdasarkan data semester II Tahun 2023 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Penduduk, sebanyak 313.404 jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, terdapat pertumbuhan jumlah penduduk sebesar 1,5 persen atau bertambah sebanyak 4.874 Jiwa.

Dari tabel dibawah menyajikan Jumlah Penduduk menurut Kecamatan Jumlah penduduk di Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 tercatat sebesar 313.404 jiwa . Hal ini berarti terjadi kenaikan sebesar 4.874 jiwa jika dibandingkan dengan data jumlah penduduk pada tahun sebelumnya. jika di lihat pertambahan jumlah penduduk dalam kurun 5 tahun sejak 2019 sd 2023 jumlah pertambahan penduduk terbanyak terjadi di tahun 2023.

Tabel 1.5
Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2019 – 2023

No	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Mangkutana	22.523	22.437	22.363	22.351	22.551
2	Nuha	23.769	23.755	23.962	24.356	24.486
3	Towuti	42.391	43.597	44.899	46.120	48.076
4	Malili	42.882	43.421	44.096	45.178	45.833
5	Angkona	25.377	25.303	25.432	25.556	25.814
6	Wotu	33.569	33.732	33.925	34.171	24.723
7	Burau	35.197	35.100	35.292	35.303	35.655
8	Tomoni	26.578	26.773	26.930	27.346	27.727
9	Tomoni Timur	13.699	13.649	13.679	13.748	13.900
10	Kalaena	12.337	12.297	12.345	12.259	12.262
11	Wasuponda	22.052	21.975	22.015	22.142	22.357
	Jumlah	300.374	302.039	304.938	308.530	313.404

Sumber: Disdukcapil Kab. Luwu Timur, Semester II Tahun 2023



Jumlah penduduk di Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 tercatat sebesar 313.404 jiwa terdiri dari 161.542 jiwa laki-laki dan 151.862 jiwa perempuan. Adapun Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi berada di Kecamatan Towuti dengan jumlah penduduk yaitu 48.076 jiwa yang terdiri dari 25.460 jiwa laki-laki dan 22.616 jiwa perempuan, di susul kecamatan Malili dengan jumlah penduduk sebesar 45.853 jiwa yang terdiri dari 23.712 jiwa laki-laki dan 22.141 jiwa perempuan.

Adapun Jumlah penduduk terkecil di Kabupaten Luwu Timur berada di Kecamatan Kalaena dengan jumlah penduduk 12.262 jiwa yang terdiri dari 6.157 jiwa laki-laki dan 6.105 jiwa perempuan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 6
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	Mangkutana	11.409	11.142	22.551
2	Nuha	13.221	11.265	24.486
3	Towuti	25.460	22.616	48.076
4	Malili	23.712	22.141	45.853
5	Angkona	13.185	12.629	25.814
6	Wotu	17.346	17.377	34.723
7	Burau	18.018	17.637	35.655
8	Tomoni	14.058	13.669	27.727
9	Tomoni Timur	7.097	6.803	13.900
10	Kalaena	6.157	6.105	12.262
11	Wasuponda	11.879	10.478	22.357
Luwu Timur		161.542	151.862	313.404

Sumber: Disdukcapil Kab. Luwu Timur, Semester II Tahun 2023

1.3.3.2 Kepadatan Penduduk

Kepadatan Penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas lahan. Secara umum tingkat kepadatan penduduk (population density) adalah perbandingan banyaknya jumlah penduduk dengan luas daerah berdasarkan satuan luas tertentu. Angka Kepadatan penduduk Kabupaten Luwu Timur adalah 46.44 artinya setiap km², di huni oleh 46 jiwa. Terdapat perubahan luas wilayah Kabupaten Luwu Timur, dikarenakan data dimutakhirkan melalui Dokumen Matek Revisi RTRW



Kabupaten Luwu Timur 2022-2042 tahun 2022, luas wilayah Kabupaten Luwu Timur menjadi 6.748,62 km².

Dapat di lihat pada tabel di bawah ini dari persebaran penduduk di setiap kecamatan, Kecamatan Tomoni Timur merupakan kecamatan yang paling padat di wilayah Kabupaten Luwu Timur dengan kepadatan mencapai 281.21 jiwa/km². Adapun kecamatan yang memiliki kepadatan terendah adalah Kecamatan Mangkutana yaitu 20.14 jiwa/km². Salah satu dampak dari tingginya kepadatan penduduk adalah penurunan kualitas penduduk antara lain dalam hal pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pendapatan penduduk. Rasio kepadatan penduduk menjadi salah satu perhatian pemerintah demi keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan dalam perencanaan tata ruang dan tata kelola lingkungan.

Tabel 1.7
Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)*	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan
1	2	3	4	5
1	Mangkutana	1.119,59	22.551	20.14
2	Nuha	756,71	24.486	32.36
3	Towuti	2.078,89	48.076	23.13
4	Malili	746,93	45.853	61.39
5	Angkona	293,96	25.814	87.81
6	Wotu	146,81	34.723	236.52
7	Burau	298,13	35.655	119.60
8	Tomoni	251,52	27.727	110.24
9	Tomoni Timur	49,43	13.900	281.21
10	Kalaena	84,93	12.262	144.38
11	Wasuponda	920,67	22.357	24.28
LUWU TIMUR		6.748,62	313.404	46.44

Sumber: Disdukcapil Kab. Luwu Timur, Semester II Tahun 2023

1.3.3.3 Struktur Usia Penduduk

Pembagian penduduk pada kategori ini akan membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai kebutuhan kelompok umur masing-masing, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, atau yang lainnya.



Tabel 1.8
Struktur Usia Penduduk Kab. Luwu Timur Tahun 2023

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
		Laki-Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	0 - 4	13.673	12.548	26.211
2	5 - 9	15.609	14.401	30.010
3	10 - 14	15.683	14.475	30.158
4	15 - 19	12.222	11.841	24.063
5	20 - 24	15.493	14.557	30.050
6	25 - 29	13.581	12.761	26.342
7	30 - 34	11.673	11.030	22.703
8	35 - 39	11.880	11.524	23.404
9	40 - 44	12.655	11.900	24.555
10	45 - 49	10.893	10.094	20.987
11	50 - 54	9.478	8.291	17.769
12	55 - 59	6.176	5.716	11.892
13	60 - 64	4.321	4.372	8.693
14	65 -69	3.147	3.237	6.384
15	70 - 74	2.462	2.278	4.470
16	>=75	2.596	2.837	5.433
TOTAL		161.542	151.862	313.404

sumber: Disdukcapil Kab. Luwu Timur, Semester II Tahun 2023

Pada Tabel di atas tahun 2023 menunjukkan jumlah penduduk kelompok umur Balita (0-4) sebesar 26.211 jiwa. Hal ini menuntut perhatian pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam penanganan penduduk balita terutama dalam segi gizi dan kesehatan. Komposisi penduduk usia anak-anak dan remaja yang berumur 5-19 tahun sebanyak 84.231 jiwa, pemerintah Kabupaten Luwu Timur juga memberikan perhatian besar berkaitan dengan pendidikan terhadap anak usia sekolah ini.

Rasio Ketergantungan atau *Dependency Ratio* adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 1.9
Rasio Ketergantungan di Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2021- 2023

Kelompok Umur	Tahun		
	2021	2022	2023
1	2	3	4
0 - 14 tahun	86.160	86,481	86.389
15 - 64 tahun	203.754	206.492	210.458
65+	15.024	15.557	16.557
Jumlah penduduk Usia tidak Produktif	101.184	102,038	102.946
Rasio Ketergantungan	49,65	49,41	48.92

Sumber: Disdukcapil Kab. Luwu Timur, Semester I Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas secara keseluruhan Kabupaten Luwu Timur di Tahun 2023 memiliki rasio ketergantungan sebesar 48,92, yang dapat diartikan setiap 100 penduduk Kabupaten Luwu Timur yang produktif memiliki tanggungan sebanyak 48-49 jiwa penduduk yang belum produktif dan yang dianggap tidak produktif lagi. Indikator ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2023 penduduk usia kerja di Kabupaten Luwu Timur masih dibebani tanggung jawab akan penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk usia tua.

Penduduk muda berusia 0-14 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Sementara penduduk berusia di atas 65 tahun dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun merupakan penduduk usia kerja yang sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

1.3.4. Aparatur Sipil Negara (ASN)

Merujuk pada Pasal (1) Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah.



ASN Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2023 sebanyak 5.101 orang yang terdiri dari 3.795 orang PNS dan 1.306 orang PPPK. Bertambah 595 orang jika dibandingkan dengan data ASN pada tahun 2022 yaitu sebanyak 4.506 orang

1.3.4.1 Jumlah PNS

PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur ini tersebar di beberapa unit kerja/Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jumlah PNS Kabupaten Luwu Timur tahun 2020-2023 yang tersebar di beberapa OPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.10
Jumlah PNS Berdasarkan OPD Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2020 – 2023

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai			
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat Daerah	78	81	82	80
2	Sekretariat DPRD	25	22	21	22
3	Inspektorat	46	44	45	48
4	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	56	50	56	48
5	Dinas Kesehatan	58	69	73	73
6	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	87	85	87	88
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	23	19	18	19
8	Satuan Polisi Pamong Praja	44	40	39	39
9	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0	9	14	20
10	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	23	20	19	18
11	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	26	27	25	23
12	Dinas Perikanan	27	30	24	24
13	Dinas Lingkungan Hidup	26	22	25	25
14	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	20	20	18	18
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	21	17	16	15



No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai			
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6
16	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	17	17	19	20
17	Dinas Perhubungan	24	27	28	27
18	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian	19	21	21	22
19	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perindustrian	22	22	23	26
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18	21	19	18
21	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga	24	23	21	20
22	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	24	30	28	28
23	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	196	193	196	190
24	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	24	26	26	25
25	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	44	34	27	28
26	Badan Pendapatan Daerah	0	11	24	25
27	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	27	28	27	25
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15	15	11	12
29	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	9	11	12	13
30	Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo	213	23	228	228
31	Kec. Burau	24	22	23	19
32	Kec. Wotu	23	22	21	19
33	Kec. Tomoni	18	19	17	15
34	Kec. Mangkutana	22	18	18	18
35	Kec. Tomoni Timur	16	15	15	14
36	Kec. Kalaena	14	16	17	13
37	Kec. Angkona	18	17	19	16
38	Kec. Malili	17	16	14	13



No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai			
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6
39	Kec. Wasuponda	16	16	16	16
40	Kec. Nuha	15	16	15	14
41	Kec. Towuti	25	27	25	20
42	Kel. Magani	8	7	8	7
43	Kel. Malili	6	5	7	8
44	Kel. Tomoni	8	10	11	9
45	Puskesmas Burau	56	43	40	36
46	Puskesmas Wotu	59	55	60	58
47	Puskesmas Tomoni	55	60	57	59
48	Puskesmas Mangkutana	57	58	57	56
49	Puskesmas Tomoni Timur	40	43	42	42
50	Puskesmas Kalaena	37	37	38	40
51	Puskesmas Angkona	47	41	40	38
52	Puskesmas Lakawali Kec. Malili	24	29	37	34
53	Puskesmas Malili	72	74	76	79
54	Puskesmas Lampia Kec. Malili	36	35	33	33
55	Puskesmas Wasuponda	44	47	48	46
56	Puskesmas Parumpanai Kec. Wasuponda	12	17	19	18
57	Puskesmas Nuha	64	62	62	59
58	Puskesmas Wawondula Kec. Towuti	51	53	55	56
59	Puskesmas Timampu Kec. Towuti	32	31	32	35
60	Puskesmas Mahalona Kec. Towuti	23	21	22	18
61	Puskesmas Bantilang Kec. Towuti	21	21	24	22
62	Puskesmas Bone Pute	0	24	33	36
63	Taman Kanak Kanak (Tk)	48	47	47	45
64	Sekolah Dasar (Sd)	1093	1095	1061	1007
65	Sekolah Menengah Pertama (Smp)	550	559	530	510
Jumlah		3887	3935	3911	3795

Sumber: BKPSDM Luwu Timur Tahun 2023



Sumber daya manusia ASN Kabupaten Luwu Timur adalah salah faktor penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Distribusi ASN ke beberapa OPD Kabupaten Luwu Timur telah dilakukan secara proporsional sehingga diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi organisasi.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berstatus aktif di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 sebanyak 3.795 Orang. Jumlah ini berkurang jika dibandingkan dengan jumlah PNS pada tahun 2022 yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain purnabakti, mutasi dan lain-lain. Jumlah PNS berdasarkan golongan, eselon dan pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.11
Jumlah PNS berdasarkan golongan, eselon, dan pendidikan
Tahun 2020 – 2023

No	Berdasarkan	Uraian	Jenis Kelamin 2020		Total Tahun 2020	Jenis Kelamin 2021		Total Tahun 2021	Jenis Kelamin 2022		Total Tahun 2022	Jenis Kelamin 2023		Total Tahun 2023
			L	P		L	P		L	P		L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Golongan	I	2	7	3887	7	1	3935	7	0	3911	6	0	3795
		II	224	271		261	234		202	180		158	123	
		III	1788	798		801	1815		827	1826		808	1730	
		IV	418	379		372	444		378	491		382	588	
3	Eselon	II-A	1	0	528	1	0	375	1	0	398	1	0	407
		II-B	4	22		22	5		25	5		26	5	
		III-A	11	35		41	12		40	13		39	14	
		III-B	24	67		67	34		71	33		67	37	
		IV-A	173	145		67	91		73	99		82	93	
		IV-B	19	27		21	14		22	16		19	24	
		NON ESELON	2201	1158	3359	1222	2338	3560	1182	2331	3513	1120	2268	3388
4	Pendidikan	SD	10	0	3887	9	0	3935	5	0	3911	3	0	3795
		SLTP	3	10		11	2		6	1		5	1	
		SLTA	157	285		273	155		227	120		208	106	
		DI-DIII	538	150		147	554		138	538		129	514	
		S1	1684	941		930	1710		959	1756		931	1736	
		S2	50	58		70	73		78	82		77	84	
		S3	1	0		1			1	0		1	0	
5	Fungsional	Ahli	1022	1025	2559	738	1524	2757	741	1652	2936	707	1620	2826
		Terampil	398	114		226	269		415	128		102	397	

Sumber: BKPSDM Luwu Timur Tahun 2023



Sesuai tabel di atas, pada tahun 2023 eselon (tingkatan jabatan struktural) II sebanyak 32 orang, eselon III sebanyak 157 orang, dan eselon IV sebanyak 218 orang, dan non eselon sebanyak 3.388 orang. PNS yang menduduki eselon pada tahun 2023 sebanyak 407 orang. Tenaga fungsional berkurang dari 2.936 orang pada tahun 2022 turun menjadi 2.826 orang yang disebabkan oleh beberapa factor antara lain pelantikan pejabat fungsional menjadi pejabat struktural, mutasi dan lain sebagainya.

Klasifikasi PNS menurut usia berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Aparatur (BKPSDM) Kabupaten Luwu Timur tahun 2023, memperlihatkan bahwa usia 36 – 40 tahun merupakan usia yang paling banyak dari jumlah seluruh PNS yaitu mencapai 836 orang (22,03persen). PNS dengan usia 61-65 tahun sebanyak 1 orang (0,03%) merupakan PNS dengan usia yang paling sedikit. Klasifikasi PNS berdasarkan usia dan jenis kelamin tahun 2020 – 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.12
Klasifikasi PNS Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2020-2023

No	Usia	Tahun											
		2020			2021			2022			2023		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	20 - 25	3	1	4	5	9	14	7	18	25	1	7	8
2	26 - 30	30	75	105	45	109	154	55	124	179	42	108	150
3	31 - 35	85	263	348	94	291	385	98	301	399	90	222	312
4	36 - 40	220	632	852	222	640	862	223	641	864	212	624	836
5	41 - 45	281	276	828	288	542	830	289	542	831	271	543	814
6	46 - 50	281	353	634	281	353	634	279	352	631	273	392	665
7	51 - 55	282	347	629	280	343	623	277	343	620	273	356	629
8	56 - 60	236	206	442	218	203	421	186	176	362	191	189	380
9	61 - 65	28	17	45	9	3	12	0	0	0	1	0	1
Jumlah Total				3887			3935			3911			3795

Sumber: BKPSDM Luwu Timur Tahun 2023

Berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 2017 tentang manajemen PNS, usia pensiun PNS bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, fungsional ahli pertama dan pejabat fungsional keterampilan adalah berusia 58 tahun. usia 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya serta usia 65 tahun bagi pejabat fungsional ahli utama. Dari tabel 1.12 tersebut diatas, terdapat pengurangan



jumlah pegawai pada tahun 2023 sebanyak 116 orang karena sudah masuk masa pensiun serta terdapat juga meninggal dunia.

1.3.4.2 Jumlah PPPK

ASN Kabupaten Luwu Timur dengan status PPPK sampai dengan tahun 2023 berjumlah 1.306 orang. Bertambah 711 orang jika dibandingkan pada tahun 2022 yang berjumlah 595 orang. Jumlah PPPK berdasarkan kualifikasi jabatan, pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.13
Jumlah PPPK Berdasarkan Jabatan, Pendidikan dan Jenis Kelamin
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2023

No	Kualifikasi Jabatan	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												Total		
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ Sederajat		SLTP/ Se derajat		SD/ Se derajat				
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L+P
Tahun 2021																
1	Kesehatan					1	1							1	1	2
2	Guru			22	85									22	85	107
3	Teknis			3					1					3	1	4
Jumlah		0	0	25	85	1	1	0	1	0	0	0	0	26	87	113
Tahun 2022																
1	Guru			92	387									92	387	479
Jumlah		0	0	92	387	0	0	0	0	0	0	0	0	92	387	479
Tahun 2023																
1	Kesehatan			17	71	18	145							35	216	251
2	Guru			86	318									86	318	404
3	Teknis			24	32			3						27	32	59
Jumlah		0	0	127	421	18	145	3	0	0	0	0	0	148	566	714
Total sampai dengan Tahun 2023		0	0	244	893	19	146	3	1	0	0	0	0	266	1040	1306

Sumber: BKPSDM Kab. Luwu Timur Tahun 2023

Pada tahun 2021, pengangkatan PPPK dibuka untuk 3 jenis formasi yakni formasi Kesehatan, Guru dan Teknis. Adapun tenaga PPPK yang lulus untuk formasi



Kesehatan sebanyak 2 orang, guru sebanyak 107 orang dan teknis sebanyak 4 Orang. Sementara pada tahun 2022 formasi penerimaan hanya terbuka untuk guru dan yang dinyatakan lulus sebanyak 479 orang. Kemudian pada tahun 2023 formasi penerimaan kembali dibuka untuk 3 jenis formasi yakni formasi Kesehatan, Guru dan Teknis. Untuk formasi Kesehatan yang diterima sebanyak 251 orang, formasi guru sebanyak 404 orang, dan formasi Teknis sebanyak 59 orang.

1.3.5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Berdasarkan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 ditetapkan bahwa target total Pendapatan sebesar Rp1.776.608.283.423,00, dan target tersebut dapat terealisasi sebesar Rp1.778.351.165.911,33 atau 100,10. Komponen jenis pendapatan tersebut diurai sebagai berikut :

1. *Pendapatan Asli Daerah (PAD)*

Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu indikator dalam menilai peran dan kemampuan daerah yang memiliki posisi strategis dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah, karena digunakan untuk membiayai belanja pembangunan daerah setiap tahunnya. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah meliputi 22,21 persen dari total realisasi Pendapatan tahun 2023.

Adapun rincian PAD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 sebagaimana pada tabel sebagai berikut :



Tabel 1.14
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) T.A. 2023*)

Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	%
4.1	Pendapatan Asli Daerah	390.691.353.806,00	394.961.876.615,58	4.270.522.809,58	101,09
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	238.588.526.149,00	246.712.996.066,59	8.124.469.917,59	103,41
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	5.177.658.500,00	2.981.187.069,00	(2.196.471.431,00)	57,58
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	23.588.575.458,00	23.588.575.458,00	0	100,00
4.1.4	Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	123.336.593.699,00	121.679.118.021,99	(1.657.475.677,01)	98,66

Sumber : LRA BKAD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 (laporan keuangan belum diaudit BPK-RI)

Dari tabel di atas terlihat bahwa total Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp390.691.353.806,00 dengan realisasi sebesar Rp394.961.876.615,58 atau 101,09 persen yang terdiri dari Pendapatan yang bersumber dari Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp238.588.526.149,00 dapat direalisasi sebesar Rp246.712.996.066,59 atau 103,41 persen. Dimana Pajak Daerah yang berkontribusi lebih besar dari target yang ditetapkan yaitu Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan untuk Pajak Daerah yang tidak mencapai target yang ditetapkan terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Air Tanah dan Pajak PBB-P2. Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp5.177.658.500,00 dengan realisasi sebesar Rp2.981.187.069,00 atau 57,58 persen. Dari capaian Retribusi Daerah ini yang tidak tercapai sesuai target di pengaruhi oleh tidak terpenuhinya target Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, untuk Retribusi jasa usaha seperti Retribusi penyewaan kekayaan daerah, Retribusi Terminal dan Restribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Retribusi Perizinan Tertentu yang bersumber dari Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan. Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang dianggarkan sebesar Rp23.588.575.458,00 terealisasi sebesar Rp23.588.575.458,00 atau 100,00 persen, dan Lain-lain



Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang dianggarkan sebesar Rp123.336.593.699,00 terealisasi sebesar Rp121.679.118.021,99 atau 98,66 persen.

Berdasarkan nilai realisasi, maka kontribusi masing-masing jenis pendapatan terhadap total Penerimaan PAD yaitu, persentase tertinggi terdapat pada Pajak Daerah sebesar 62,47 persen, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 30,81 persen, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 5,97 persen dan Hasil Retribusi Daerah sebesar 0,75 persen dari realisasi anggaran pendapatan asli daerah.

Terhadap beberapa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang realisasinya lebih dari 100% dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya jumlah kunjungan pada objek pajak daerah dan retribusi daerah yang tinggi yang disebabkan karena adanya kegiatan yang dilaksanakan tahun 2023, jumlah transaksi pembayaran pajak daerah yang melampaui dari target yang ditetapkan dan penerapan system pembayaran non tunai yang maksimal penggunaannya serta penyebaran saluran pembayaran sehingga memudahkan masyarakat dalam bertransaksi.

2. *Pendapatan Transfer*

Pendapatan Transfer adalah pendapatan daerah yang diterima dari Pemerintah pusat maupun antar daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah dalam mendanai kebutuhan daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin baik. Pendapatan Transfer terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBD Provinsi yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan Keputusan Gubernur. Realisasi pendapatan transfer meliputi 74,88 persen dari total realisasi pendapatan tahun 2023. Target dan Realisasi Pendapatan dari Dana Transfer dalam APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 1.15
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer T.A. 2023*)

Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang	%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.323.464.643.617,00	1.331.700.405.097,75	8.235.761.480,75	100,62
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.073.605.505.598,00	1.080.940.374.581,00	7.334.868.983,00	100,68
4.2.1.01	Dana Perimbangan	950.972.873.598,00	958.307.742.581,00	7.334.868.983,00	100,77
4.2.1.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	251.916.136.898,00	265.544.756.904,00	13.628.620.006,00	105,41
4.2.1.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	538.151.782.000,00	538.151.648.274,00	(133.726,00)	100,00
4.2.1.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	25.658.610.700,00	25.834.967.779,00	176.357.079,00	100,69
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	135.246.344.000,00	128.776.369.624,00	6.469.974.376,00	95,22
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	11.794.502.000,00	11.794.502.000,00	0	100
4.2.02.04	Dana Desa	110.838.130.000,00	110.838.130.000,00	0	100,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	249.859.138.019,00	250.760.030.516,75	900.892.497,75	100,36
4.2.03.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	233.198.402.019,00	243.656.469.516,75	10.458.067.497,75	104,48
4.2.2.02	Bantuan Keuangan	16.660.736.000,00	7.103.561.000,00	(9.557.175.000,00)	42,64

Sumber : * LRA BKAD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 (laporan keuangan belum diaudit BPK-RI)

Dari tabel di atas Total Anggaran Dana Transfer Kabupaten Luwu Timur pada Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp1.323.464.643.617,00 dan terealisasi sebesar Rp1.331.700.405.097,75 atau 100,62 persen. Terdiri dari Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp950.972.873.598,00 dan terealisasi sebesar Rp958.307.742.581,00, atau 100,68 persen. Dana Transfer berupa Dana Bagi Hasil ditargetkan sebesar Rp251.916.136.898,00 terealisasi sebesar Rp265.544.756.904,00 atau 105,41 persen, Dana alokasi umum (DAU) ditargetkan sebesar Rp538.151.782.000,00 terealisasi sebesar Rp538.151.648.274,00 atau 100,00 persen, Dana alokasi khusus (DAK) Fisik dianggarkan sebesar Rp25.658.610.700,00 terealisasi sebesar Rp 25.834.967.779,00 atau 100,69 persen, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dianggarkan sebesar Rp135.246.344.000,00 terealisasi sebesar Rp128.776.369.624,00 atau 95,22 persen. Dana insentif daerah



ditargetkan Rp11.794.502.000,00 dan terealisasi sebesar Rp11.794.502.000,00 atau 100,00 persen. dan Dana Desa ditargetkan sebesar Rp110.838.130.000,00 terealisasi sebesar Rp110.838.130.000,00 atau 100,00 persen.

Pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp249.859.138.019,00 dan terealisasi sebesar Rp250.760.030.516,75 atau 100,36 persen, yang terdiri dari dana bagi hasil pajak daerah dianggarkan Rp233.198.402.019,00 dan terealisasi sebesar Rp243.656.469.516,75 atau 104,44 persen dan bantuan keuangan dianggarkan sebesar Rp16.660.736.000,00 terealisasi Rp7.103.561.000,00 atau sebesar 42,64 persen.

Untuk Terhadap Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 2 jenis Bantuan Keuangan yaitu Bantuan Keuangan Khusus berupa Kesehatan Gratis dan Bantuan Keuangan Umum berupa bantuan untuk pekerjaan Pembangunan ruang terbuka public (Malili River site) Tahun 2023. Untuk tidak tercapainya realisasi Bantuan Keuangan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

a. Bantuan Keuangan Khusus Kesehatan Gratis

Untuk Bantuan Keuangan Khusus Kesehatan Gratis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum menyalurkan ke Bantuan Kesehatan Gratis Triwulan III dan IV Tahun 2023 sehingga dalam Laporan Keuangan TA. 2023 dicatat sebagai Piutang sebesar Rp2.909.718.000,00

b. Bantuan Keuangan Umum untuk Pembangunan ruang terbuka public (Malili River site)

Untuk pekerjaan Pembangunan ruang terbuka public (Malili River site) Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah berkontrak dengan Pihak Ketiga an CV. Citra Lestari Mandiri sesuai kontrak nomor 602.1/10/SP-KONT/CK.ID/PUPR/IX/2023 tgl 21 September 2023 dengan nilai kontrak Rp7.387.684.463,55. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah menerima penyaluran BKK tahap pertama dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp4.193.843.000,00. Untuk tahap kedua Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah mengajukan permohonan pencairan namun hingga 31 Desember 2023 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak mencairkan bantuan tersebut,



sehingga di dalam Laporan Keuangan TA. 2023 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mencatatkan sebagai piutang pada Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp3.693.841.464,00.

3. Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan penerimaan dari hibah, dana darurat, dan/atau lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Komponen Pendapatan ini meliputi 2,91 persen dari total realisasi pendapatan tahun 2023. Adapun rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah Tahun Anggaran 2023, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.16
Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah T.A. 2023*)

Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/ kurang	%
4.3	Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah	62.452.286.000,00	51.688.884.198,00	(10.763.401.802,00)	82,77
4.3.01	Pendapatan Hibah	62.452.286.000,00	51.688.884.198,00	(10.763.401.802,00)	82,77
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	11.548.286.000,00	5.511.525.592,00	(6.036.760.408,00)	47,73
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	50.904.000.000,00	46.177.358.606,00	(4.726.641.394,00)	90,71

Sumber : LRA BKAD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 (laporan keuangan belum diaudit BPK-RI)

Dari tabel di atas, penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp62.452.286.000,00 terealisasi sebesar Rp51.688.884.198,00 atau 82,77 persen. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat ditargetkan sebesar Rp11.548.286.000,00 terealisasi sebesar Rp5.511.525.592,00 atau 47,73 persen dan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri ditargetkan sebesar Rp50.904.000.000,00 terealisasi sebesar Rp46.177.358.606,00 atau 90,71 persen.

Untuk Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat disebabkan Penerimaan Hibah READSI-IFAD tidak tersalurkan sepenuhnya disebabkan terdapat Belanja Alsintan yang tidak realisasi karena ketersediaan Dana Sharing Kelompok Tani yang sebesar 30 persen tidak tersedia, sehingga tidak dapat di realisasikan dan terdapat Belanja Honor Narasumber Pelatihan Sekolah Lapang Tidak terealisasi karena ada



beberapa Narasumber tidak bisa dibayarkan seperti Narasumber Dari PT MARS yang tidak mau untuk dibayarkan karena Salah satu Bentuk kerjasama Antara PT MARS dan Program READSI, termasuk narasumber yang berasal dari SKPD (Dinas Pertanian itu sendiri) serta untuk Hibah dari Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri disebabkan masih terdapat Hibah Scrap periode Nopember 2023 dan Desember 2023 yang belum dibayarkan oleh PT. Vale Indonesia Tbk. Kendala/hambatan yang dihadapi karena proses pencairan Hibah pada PT. Vale Indonesia Tbk membutuhkan waktu yang Panjang karena harus mendapatkan persetujuan (*legal standing*) dari Vale yang ada di Luar Negeri sehingga akan ditagihkan kembali pada Tahun 2024.

1.3.6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp1.937.326.930.321,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.837.814.042.138,01 atau mencapai 94,86 persen. Realisasi Komponen Belanja daerah tersebut diurai sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.266.763.111.781,00 dengan realisasi sebesar Rp1.192.242.124.850,66 atau 94,12 persen. Realisasi Belanja Operasi ini meliputi 64,88 persen dari total realisasi belanja Tahun 2023. Uraian realisasi belanja operasi sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 1.17
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi T.A. 2023*)

Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang	%
5.1	Belanja Operasi	1.266.763.111.781,00	1.192.242.124.850,66	(74.520.986.930,34)	94,12
5.1.1	Belanja Pegawai	578.128.606.600,00	537.360.420.558,47	(40.768.186.041,53)	92,95
5.1.3	Belanja Barang dan Jasa	604.888.818.571,00	572.932.914.512,27	(31.955.904.058,73)	94,72
5.1.5	Belanja Hibah	78.765.886.585,00	77.372.989.779,92	(1.392.896.805,08)	98,23
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4.979.800.025,00	4.575.800.000,00	(404.000.025,00)	91,89

Sumber : LRA BKAD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 (laporan keuangan belum diaudit BPK-RI)



Belanja Berdasarkan tabel di atas, belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp578.128.606.600,00 terealisasi Rp537.360.420.558,47 atau 92,95 persen. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp604.888.818.571,00 terealisasi Rp572.932.914.512,27 atau 94,72 persen, Belanja Hibah ditargetkan sebesar Rp78.765.886.585,00 terealisasi Rp77.372.989.779,92 atau 98,23 persen dan Belanja Bantuan Sosial ditargetkan sebesar Rp4.979.800.025,00 dan terealisasi Rp4.575.800.000,00 atau 91,89 persen.

2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja Modal meliputi belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Dalam APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023, Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp 334.306.920.202,00 terealisasi sebesar Rp 313.767.765.805,75 atau 93,86 persen sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 1.18
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal T.A. 2023*)

Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang	%
5.2	BELANJA MODAL	334.306.920.202,00	313.767.765.805,75	(20.539.154.396,25)	93,86
5.2.01	Belanja Modal Tanah	707.459.000,00	343.256.122,00	(364.202.878,00)	48,52
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.815.482.938,00	46.103.713.018,52	(2.711.769.919,48)	94,44
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	109.701.868.665,00	105.765.564.552,59	(3.936.304.112,41)	96,41
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	173.095.468.299,00	160.649.281.012,64	(12.446.187.286,36)	92,81
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.986.641.300,00	905.951.100,00	(1.080.690.200,00)	45,60

Sumber : LRA BKAD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 (laporan keuangan belum diaudit BPK-RI)

Berdasarkan tabel di atas, belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah yang ditargetkan sebesar Rp707.459.000,00 terealisasi Rp343.256.122,00 atau 48,52 persen, Belanja Modal tanah tidak terealisasi secara optimal karena salah satu



rencana alokasi untuk pengadaan tanah yang diajukan oleh Dinas pemadam kebakaran dibatalkan karena status lokasi belum memenuhi persyaratan secara administrasi hingga akhir tahun. Belanja Modal Peralatan dan Mesin ditargetkan sebesar Rp48.815.482.938,00 terealisasi Rp46.103.713.018,52 atau 94,44 persen, dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan ditargetkan sebesar Rp109.701.868.665,00 terealisasi Rp105.765.564.552,59 atau 96,41 persen, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi ditargetkan Rp173.095.468.299,00 terealisasi Rp160.649.281.012,64 atau 92,81 persen dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp1.986.641.300,00 terealisasi Rp905.951.100,00 atau 45,60 persen

3. Belanja Tak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Dalam APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023, Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp548.000.000,00 atau 10,96 persen. Realisasi tidak tercapai karena anggarannya hanya bersifat disediakan dan direalisasikan sesuai mekanisme belanja tak terduga antara lain penting dan mendesak, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 1.19
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga T.A. 2023*)

Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang	%
5.3.	Belanja Tak Terduga	5.000.000.000,00	548.000.000,00	(4.452.000.000,00)	10,96
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	548.000.000,00	(4.452.000.000,00)	10,96

Sumber : LRA BKAD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 (laporan keuangan belum diaudit BPK-RI)

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Dalam APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023, Belanja Transfer ditargetkan Rp331.256.898.338,00 terealisasi sebesar Rp331.256.151.481,60 atau 100,00 persen. Realisasi Belanja transfer meliputi 18,01 persen dari total realisasi belanja tahun 2023. Uraian realisasi belanja transfer diurai sebagaimana pada tabel



berikut:

Tabel 1.20
Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer T.A. 2023*)

Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang	%
5.4	BELANJA TRANSFER	331.256.898.338,00	331.256.151.481,60	(746.856,40)	100,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	20.599.461.495,00	20.599.397.923,00	(63.572,00)	100,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	310.657.436.843,00	310.656.753.558,60	(683.284,40)	100,00

Sumber : LRA BKAD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 (laporan keuangan belum diaudit BPK-RI)

1.3.7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran berkenaan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Komponen pembiayaan dipergunakan untuk mengantisipasi surplus/(defisit) anggaran sebesar Rp(59.462.876.226,68). Dalam arti bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi Keuangan Daerah untuk menutupi selisih antara Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah. dengan rincian anggaran dan realisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.21
Anggaran dan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan T.A 2023*)

Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang	%
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	173.616.646.898,00	173.616.122.250,24	524.647,76	100,00
6.1.1	Sisa lebih perhitungan Tahun Anggaran sebelumnya	173.616.646.898,00	173.616.122.250,24	524.647,76	100,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	12.898.000.000,00	10.576.000.000,00	(2.322.000.000,00)	82,00
6.2.1	Penyertaan Modal	12.898.000.000,00	10.576.000.000,00	(2.322.000.000,00)	82,00
	Pembiayaan Netto	160.718.646.898,00	163.040.122.250,24	(2.321.475.352,23)	101,44
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenan	0	103.577.246.023,56	103.577.246.023,56	0

Sumber : LRA BKAD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 (laporan keuangan belum diaudit BPK-RI)



Beberapa hal yang menjadi bagian dari pembentuk SiLPA yaitu tingkat capaian realisasi anggaran belanja tidak mencapai 100 persen, sementara realisasi pendapatan tercapai 100 persen atau lebih.

Penerimaan Pembiayaan Daerah.

Penerimaan Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp 173.616.646.898,00 dengan realisasi sebesar Rp173.616.122.250,24 atau 100 persen. Jumlah Penerimaan Daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp12.898.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp Rp10.576.000.000,00 atau 82,00 persen.

Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan yang dipergunakan untuk menutupi defisit anggaran.

1.3.8. Realisasi Belanja Perangkat Daerah

Realisasi belanja perangkat daerah pada umumnya berada diatas 90 persen. Tingkat realisasi perangkat daerah yang terdiri dari 59 OPD, belum diaudit digambarkan dalam tabel realisasi sebagai berikut;



Tabel 1.22
Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023**

NO	OPD	APBD-P	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6=(4/3)x100
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	366,673,976,775.00	351,948,445,138.30	(14,725,531,636.70)	95.98
2	Dinas Kesehatan	224,079,180,557.00	216,186,175,369.45	(7,893,005,187.55)	96.48
3	RSUD I Lagaligo	149,161,659,091.00	143,977,282,000.00	(5,184,377,091.00)	96.52
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	223,348,460,479.00	203,154,592,366.79	(20,193,868,112.21)	90.96
5	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	48,627,889,600.00	47,053,489,971.48	(1,574,399,628.52)	96.76
6	Satuan Polisi Pamong Praja	13,491,134,750.00	13,045,274,584.00	(445,860,166.00)	96.70
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	24,262,004,159.00	24,183,784,231.00	(78,219,928.00)	99.68
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4,721,373,550.00	4,037,253,180.00	(684,120,370.00)	85.51
9	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	10,650,629,425.00	10,447,453,081.00	(203,176,344.00)	98.09
10	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12,329,880,200.00	12,004,430,918.00	(325,449,282.00)	97.36
11	Dinas Lingkungan Hidup	9,531,102,050.00	8,960,920,493.00	(570,181,557.00)	94.02
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6,443,957,850.00	6,338,285,044.00	(105,672,806.00)	98.36
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5,609,165,991.00	5,284,270,439.00	(324,895,552.00)	94.21
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10,606,709,882.00	10,482,595,177.00	(124,114,705.00)	98.83



NO	OPD	APBD-P	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6=(4/3)x100
15	Dinas Perhubungan	15,551,021,700.00	14,988,175,807.51	(562,845,892.49)	96.38
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	12,550,954,750.00	12,302,740,316.00	(248,214,434.00)	98.02
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4,756,588,125.00	4,442,538,832.00	(314,049,293.00)	93.40
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6,214,629,325.00	6,073,056,947.18	(141,572,377.82)	97.72
19	Dinas Perikanan	23,899,838,200.00	23,117,207,928.37	(782,630,271.63)	96.73
20	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	23,716,757,458.00	22,587,438,147.45	(1,129,319,310.55)	95.24
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	58,188,323,351.00	54,949,499,393.53	(3,238,823,957.47)	94.43
22	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian	9,777,173,750.00	9,543,790,649.59	(233,383,100.41)	97.61
23	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	7,138,404,200.00	7,031,869,983.00	(106,534,217.00)	98.51
24	Sekretariat Daerah	84,909,694,397.00	79,026,255,800.47	(5,883,438,596.53)	93.07
25	Sekretariat DPRD	44,813,897,559.00	39,875,375,354.70	(4,938,522,204.30)	88.98
26	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	9,491,129,600.00	8,646,781,287.00	(844,348,313.00)	91.10
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	386,745,823,716.00	366,928,823,560.81	(19,817,000,155.19)	94.88
28	Badan Pendapatan Daerah	15,841,470,050.00	15,355,522,722.72	(485,947,327.28)	96.93
29	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11,296,528,798.00	10,856,106,991.00	(440,421,807.00)	96.10
30	Inspektorat	13,996,770,485.00	12,889,731,478.00	(1,107,039,007.00)	92.09
31	Kecamatan Burau	3,157,724,050.00	3,102,610,823.00	(55,113,227.00)	98.25



NO	OPD	APBD-P	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6=(4/3)x100
32	Kecamatan Wotu	3,086,769,775.00	3,054,435,966.00	(32,333,809.00)	98.95
33	Kecamatan Tomoni	4,738,183,425.00	4,557,367,148.00	(180,816,277.00)	96.18
34	Kecamatan Mangkutana	3,089,376,664.00	3,030,651,507.00	(58,725,157.00)	98.10
35	Kecamatan Tomoni Timur	2,661,733,250.00	2,624,183,918.00	(37,549,332.00)	98.59
36	Kecamatan Kalaena	2,727,830,700.00	2,691,183,025.00	(36,647,675.00)	98.66
37	Kecamatan Angkona	2,792,183,900.00	2,715,669,934.00	(76,513,966.00)	97.26
38	Kecamatan Malili	4,023,196,250.00	3,952,265,620.00	(70,930,630.00)	98.24
39	Kecamatan Wasuponda	2,807,821,400.00	2,629,486,896.00	(178,334,504.00)	93.65
40	Kecamatan Towuti	3,813,748,600.00	3,668,505,868.09	(145,242,731.91)	96.19
41	Kecamatan Nuha	4,100,691,250.00	3,852,584,541.00	(248,106,709.00)	93.95
42	Puskesmas Burau	3,605,906,304.00	3,309,080,272.00	(296,826,032.00)	91.77
43	Puskesmas Wotu	4,790,606,911.00	4,387,091,213.00	(403,515,698.00)	91.58
44	Puskesmas Mangkutana	4,208,129,000.00	3,932,741,807.00	(275,387,193.00)	93.46
45	Puskesmas Tomoni	4,095,760,000.00	3,703,258,032.00	(392,501,968.00)	90.42
46	Puskesmas Tomoni Timur	3,370,938,000.00	3,006,102,448.00	(364,835,552.00)	89.18
47	Puskesmas Kalaena	3,283,685,278.00	3,010,479,289.00	(273,205,989.00)	91.68
48	Puskesmas Angkona	4,152,287,549.00	3,897,227,234.10	(255,060,314.90)	93.86



NO	OPD	APBD-P	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6=(4/3)x100
49	Puskesmas Lakawali	2,913,932,264.00	2,728,408,625.20	(185,523,638.80)	93.63
50	Puskesmas Parumpanai	2,291,368,000.00	1,828,842,312.00	(462,525,688.00)	79.81
51	Puskesmas Malili	5,320,939,482.00	5,002,391,593.27	(318,547,888.73)	94.01
52	Puskesmas Lampia	2,637,883,719.00	2,386,816,278.00	(251,067,441.00)	90.48
53	Puskesmas Wasuponda	3,403,226,574.00	3,119,198,137.00	(284,028,437.00)	91.65
54	Puskesmas Nuha	3,157,474,500.00	2,697,025,643.00	(460,448,857.00)	85.42
55	Puskesmas Wawondula	4,230,716,408.00	3,956,904,672.00	(273,811,736.00)	93.53
56	Puskesmas Timampu	2,274,938,000.00	2,003,040,414.00	(271,897,586.00)	88.05
57	Puskesmas Mahalona	2,348,523,850.00	2,072,961,863.00	(275,561,987.00)	88.27
58	Puskesmas Bantilang	2,822,885,395.00	2,474,421,448.00	(348,463,947.00)	87.66
59	Puskesmas Bonepute	2,992,340,000.00	2,699,938,419.00	(292,401,581.00)	90.23
Total		1,937,326,930,321.00	1,837,814,042,138.01	(99,512,888,182.99)	94.86

Sumber : LRA BKAD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 (laporan keuangan belum diaudit BPK-RI)



BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

Peraturan Daerah No.8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur No.78 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang memuat rincian-rincian Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023. Perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023 didasarkan pada adanya perubahan asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam tahun berjalan.

Pendapatan daerah mengalami perubahan asumsi pendapatan yang telah dituangkan Perubahan RKPD Tahun 2023, demikianpun belanja mengalami perubahan seiring dengan perubahan asumsi pendapatan. Selain itu Perubahan APBD juga mengakomodir pergeseran-pergeseran belanja yang telah dilakukan dalam tahun berjalan, demikian pula pembiayaan mengalami perubahan antara lain dengan menyesuaikan dengan hasil audit BPK terkait Silpa tahun sebelumnya. Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2023 terjadi 4 kali pergeseran anggaran yang dituangkan dalam Peraturan Bupati sesuai dengan amanah perundang-undangan.

Pergeseran I dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun 2023, serta perubahan nomenklatur belanja pada SKPD yang bersifat mendesak, untuk itu telah ditetapkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Ada 18 SKPD yang mengalami proses pergeseran anggaran yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Puskesmas Nuha, Puskesmas Timampu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Sosial, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Sekretariat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga, Sekretariat DPRD, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Malili, Kecamatan Nuha, Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

Pergeseran II dalam rangka menindaklanjuti Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.14.3/1483/SJ Tanggal 10 Maret 2023 tentang hasil pemetaan, klasifikasi,



nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait penggunaan DBH CHT, DBH DR dan DAK TA. 2023, penyesuaian Juknis Alokasi DAK serta perubahan nomenklatur belanja pada SKPD yang bersifat mendesak, dan untuk itu ditetapkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Ada 10 SKPD dan 18 Puskesmas yang mengalami proses pergeseran anggaran yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, 18 Puskesmas se Kabupaten Luwu Timur, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Sekretariat DPRD, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kecamatan Tomoni.

Pergeseran III dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 154 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Alokasi Hibah Kepada Daerah Tahun Anggaran 2023 Tahap I dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun Dalam Ne dan keuangan daerah terkait penggunaan DBH CHT, DBH DR dan DAK TA. 2023, penyesuaian Juknis Alokasi DAK serta perubahan nomenklatur belanja pada SKPD yang bersifat mendesak, perubahan tersebut ditetapkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Ada 13 SKPD yang mengalami perubahan yaitu Dinas pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Sekretariat Daerah, Kecamatan Wasuponda, Kecamatan Towuti dan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Pergeseran IV dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Sul-Sel Nomor 1093/VII/Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023. Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebesar Rp8.000.000.000,- yang diperuntukkan untuk *Malili River Side* pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Penanganan stunting pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kegiatan UMKM pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM. Pergeseran anggaran hanya pada Dinas PUPR, dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 75 Tahun 2023



tentang perubahan keempat dari Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang APBD TA. 2023.

Komposisi Pergeseran Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dalam tahun berkenaan di gambarkan dalam tabel berikut :



Tabel 2. 1
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah T.A. 2023

Uraian	APBD	Pergeseran I	Pergeseran II	Pergeseran III	Pergeseran IV	P-APBD	% Bertambah/ Berkurang ((7- 2/2)*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
Pendapatan	1,714,005,834,919	1.714.005.834.919	1.714.005.834.919	1.716.083.804.198	1.723.583.604.198	1,776,608,283,423	3,8
Pendapatan Asli Daerah	384,403,489,900	384.403.489.900	384.403.489.900	384.403.489.900	384.403.489.900	390,691,353,806	1,6
Pendapatan Transfer	1,273,572,345,019	1.273.572.345.019	1.273.572.345.019	1.273.572.345.019	1.281.072.345.019	1,323,464,643,617	3,9
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	56,030,000,000	56.030.000.000	56.030.000.000	58.107.969.279	58.107.969.279	62,452,286,000	11,5
Belanja	1,763,745,393,187	1.763.745.393.187	1.763.745.393.187	1.765.823.362.466	1.773.323.362.466	1,937,326,930,321	9,8
Belanja Operasi	1,158,800,457,493	1.159.105.497.493	1.159.176.957.493	1.158.341.231.826	583.629.377.855	1,266,763,111,781	9,3
Belanja Modal	269,272,220,164	269.114.720.164	268.895.720.164	271.809.415.110	276.395.720.164	334,306,920,202	24,2
Belanja Tidak Terduga	3,500,000,000	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	5,000,000,000	42,9
Belanja Transfer	332,172,715,530	332.025.175.530	332.172.715.530	332.172.715.530	332.172.715.530	331,256,898,338	(0,3)
Surplus/(Defisit)	(49.739.558.268)	(49.739.558.268)	(49.739.558.268)	(49.739.558.268)	(49.739.558.268)	(160.718.646.898)	223
Pembiayaan	49.739.558.268	49.739.558.268	49.739.558.268	49.739.558.268	49.739.558.268	160.718.646.898	223
Penerimaan Pembiayaan	59,739,558,268	59.739.558.268	59.739.558.268	59.739.558.268	59.739.558.268	173,616,646,898	191
Pengeluaran Pembiayaan	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10.000.000.000	10.000.000.000	12,898,000,000	29

Sumber: BKAD (Data Olahan Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2023)



2.1. Perubahan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran berkenaan. Pendapatan tersebut membiayai pelaksanaan pembangunan, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik.

Melihat dinamika dan kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional, serta memperhatikan realisasi APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 dan evaluasi kinerja pendapatan sampai dengan bulan Juni 2023, maka dilaksanakan perubahan pendapatan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2023 mempertimbangkan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan berdasarkan realisasi PAD sampai dengan Juni 2023 dan proyeksi potensi penerimaan pendapatan sampai dengan akhir tahun.
- b. Penyesuaian terhadap silpa tahun anggaran sebelumnya.
- c. Penyesuaian Dana Perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari 3 komponen utama yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan Daerah sebelum perubahan sebesar Rp1.714.005.834.919.00 dan sesudah perubahan mengalami kenaikan sebesar 3,8 persen atau Rp62.602.448.504,00 sehingga menjadi Rp1.776.608.283.423.00. Adapun perubahan struktur pendapatan dalam Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah digambarkan dalam tabel berikut :



Tabel 2.2
Perubahan Pendapatan Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1,714,005,834,919	1,776,608,283,423	65,759,782,372.00	3.8
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	384,403,489,900	390,691,353,806	6,287,863,906	1.6
4.1.01	Pajak Daerah	203,728,578,900	238,588,526,149	34,859,947,249	17.1
4.1.02	Retribusi Daerah	8,747,034,000	5,177,658,500	-3,569,375,500	(40.8)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	47,391,000,000	23,588,575,458	-23,802,424,542	(50.2)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	124,536,877,000	123,336,593,699	-1,200,283,301	(1.0)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,273,572,345,019	1,323,464,643,617	49,892,298,598	3.9
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,050,013,207,000	1,073,605,505,598	23,592,298,598	2.2
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	223,559,138,019	249,859,138,019	26,300,000,000	11.8
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	56,030,000,000	62,452,286,000	6,422,286,000	11.5
4.3.01	Pendapatan Hibah	56,030,000,000	62,452,286,000	6,422,286,000	11.5
4.3.02	Dana Darurat	0	0	0	-
	Jumlah Pendapatan	1,714,005,834,919	1,776,608,283,423	65,759,782,372	3.8

Sumber: BKAD (Data Olahan Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2023)

Komponen pendapatan dalam Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah digambarkan sebagai berikut :

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah sumber pendapatan yang berasal dari wilayah atau daerah tertentu, yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan, pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan daerah.

Dalam Perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 secara umum Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 1,6 persen atau sebesar Rp6,287,863,906.00, yaitu dari Rp384,403,489,900.00 pada APBD Tahun 2023 menjadi Rp390,691,353,806.00 pada Perubahan APBD Tahun 2023.

Pendapatan Asli Daerah terbagi dalam 4 komponen utama yaitu Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Bertambah berkurang terjadi pada sebagian besar obyek pendapatan dengan memperhatikan tingkat capaian realisasi sampai dengan semester I



Tahun 2023 dan potensi pendapatan yang masih bisa ditingkatkan sampai dengan Desember 2023. Beberapa penambahan target antara lain pada ;

- a. Pajak Daerah perubahan dari Rp203,728,578,900.00 menjadi Rp238,588,526,148.00 atau meningkat sebesar Rp34,859,947,249.00 atau 17 persen. Penambahan komponen pajak daerah yang sangat signifikan terjadi pada Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dimana terjadi kenaikan target pajak sebesar 581 persen atau sebesar Rp69,756,467,249.00, dimana target tersebut diasumsikan antara lain diperoleh dari pembayaran BPHTB dari PT.Vale.tbk. Namun terdapat pula koreksi target pendapatan pada Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan yaitu turun sebesar 29 persen atau Rp35,000,000,000.00 dengan pertimbangan Penyesuaian realisasi s.d Juni 2023, dan potensi penerimaan dari beberapa wajib pajak yang sudah ada dan beberapa wajib pajak baru.
- b. Restribusi Daerah ditargetkan mengalami perubahan dari Rp8,747,034,000.00 menjadi Rp5,177,658,500.00 atau turun sebesar Rp3,569,375,500.00 atau minus 41 persen. Dimana terjadi penurunan pada hampir semua yaitu objek retribusi jasa umum minus 14 persen, Restribusi jasa usaha minus 27 persen dan retribusi Perizinan tertentu minus 62 persen. Salah satu penyebab terjadinya penyesuaian target pendapatan pada retribusi daerah adalah sebagai konsekuensi dari Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No.28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung. Dalam aturan ini disebutkan bahwa Pemerintah menghapus izin mendirikan bangunan (IMB) dan menggantinya dengan persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan untuk itu SKPD teknis PUPR perlu menyesuaikan persyaratan teknis dalam pengelolaan retribusi PBG.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan mengalami perubahan target dari Rp47,391,000,000.00 menjadi Rp23,588,575,458.00 atau turun sebesar Rp 23,802,424,542.00 atau minus 50 persen. Hal tersebut terjadi pada obyek Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah mengalami perubahan target dari Rp124,536,877,000.00 menjadi Rp123,336,593,699.00, atau turun sebesar Rp1,200,283,301.00 atau minus 1 persen dari anggaran pokok. Hal tersebut dipengaruhi oleh menurunnya pendapatan jasa layanan BLUD.

Lebih lanjut Perubahan target pendapatan pada Komponen Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.2
Perubahan Pendapatan Asli Daerah T.A. 2023

No	Uraian	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN ASLI DAERAH	384,403,489,900	390,691,353,806	6,287,863,906	1.6	
4.1	Pajak Daerah	203,728,578,900	238,588,526,149	34,859,947,249	17.1	
4.1.01	Pajak Hotel	1,500,000,000	1,257,080,000	(242,920,000)	(16.2)	Penyesuaian realisasi s.d Juni 2023 dan kurangnya tingkat occupancy yang disebabkan masih minimnya event-event yang diasumsikan dapat mendatangkan pengunjung.
4.1.01.07	Pajak Restoran	9,700,000,000	10,036,400,000	336,400,000	3.5	Masih sejalan dengan realisasi sd.Juni 2023 dan asumsi penerimaan s.d desember 2023
4.1.01.08	Pajak Hiburan	55,000,000	55,000,000	-	-	Masih sejalan dengan tingkat realisasi dan objek pajak dipengaruhi oleh faktor cuaca dan potensi yang ada.
4.1.01.09	Pajak Reklame	1,500,000,000	1,500,000,000	-	-	Menargetkan objek pajak baru reklame yang terpasang dan yang akan diperpanjang
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	52,948,578,900	53,448,578,900	500,000,000	0.9	peningkatan setoran PPJ oleh PT PLN, PT. Vale Indonesia dan beberapa perusahaan lainnya.
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	25,000,000	35,000,000	10,000,000	40.0	peningkatan volume penggunaan air tanah oleh pengusaha dan bertambahnya wajib pajak baru
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	120,000,000,000	85,000,000,000	(35,000,000,000)	(29.2)	Penyesuaian realisasi s.d Juni 2023, dan penerimaan dari beberapa wajib pajak yang sudah ada dan beberapa wajib pajak baru.
4.1.01.15	Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBBP2)	6,000,000,000	5,500,000,000	(500,000,000)	(8.3)	Penyesuaian realisasi s.d juni 2023 dan beberapa piutang pajak PBB-P2 yang diasumsikan tidak terbayarkan ditahun 2023.
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)	12,000,000,000	81,756,467,249	69,756,467,249	581.3	peningkatan jumlah rata2 transaksi perbulan dan berapa sertifikat PT.Vale Indonesia yang mengalami pembaharuan serta adanya penerimaan BPHTB PT.Vale Indonesia.
4.1.02	Retribusi Daerah	8,747,034,000	5,177,658,500	(3,569,375,500)	(40.8)	



No	Uraian	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1,668,875,000	1,433,999,500	(234,875,500)	(14.1)	Penyesuaian realisasi s.d Juni 2023, dan beberapa objek retribusi jasa umum khususnya parkir yang mengalami penurunan penerimaan.
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3,076,159,000	2,241,659,000	(834,500,000)	(27.1)	Penyesuaian trend realisasi penerimaan, dan penyesuaian potensi yang ada.
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	4,002,000,000	1,502,000,000	(2,500,000,000)	(62.5)	Penurunan pada retribusi PBG yang dulunya IMB, dimana SKPD teknis PUPR masih perlu menyesuaikan persyaratan teknis dalam pengelolaan retribusi PBG
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	47,391,000,000	23,588,575,458	(23,802,424,542)	(50.2)	
4.1.03.02	Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal Pada BUMD	47,391,000,000	23,588,575,458	(23,802,424,542)	(50.2)	Penurunan target disebabkan asumsi persentase saham meningkat dengan adanya penambahan modal di Tahun 2023, namun dalam perjalanannya terdapat kabupaten/kota yang menambah penyertaan modalnya dan ada yang tidak mengambil devidennya tetapi menambah penyertaan modalnya pada PT. Bank Sulselbar
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	124,536,877,000	123,336,593,699	(1,200,283,301)	(1.0)	Menyesuaikan dengan penerimaan yang disetorkan ke kas daerah
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		821,778,522	821,778,522	100.0	Menyesuaikan dengan penerimaan yang disetorkan ke kas daerah
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah		222,466,365	222,466,365	100.0	Menyesuaikan dengan penerimaan yang disetorkan ke kas daerah
4.1.04.05	Jasa Giro	5,000,000,000	5,000,000,000	-	-	Menyesuaikan karena jasa giro yang diterima menyesuaikan dengan kondisi kas setiap bulannya
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		1,894,367,863	1,894,367,863	100.0	Menyesuaikan dengan penerimaan yang disetorkan ke kas daerah
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah		11,155,654	11,155,654	100.0	Menyesuaikan dengan penerimaan yang disetorkan ke kas daerah
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian		61,967,206	61,967,206	100.0	Menyesuaikan dengan penerimaan yang disetorkan ke kas daerah
4.1.04.16	Pendapatan BLUD				(6.9)	Penurunan target disebabkan oleh karena



No	Uraian	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
		117,772,607,458	109,588,487,537	(8,184,119,921)		melihat trend penerimaan yang sudah diasumsikan akan mengalami penurunan atau tidak terealisasi.
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	1,764,269,542	5,735,865,552	3,971,596,010	225.1	peningkatan jumlah jasa layanan pada PKM
4.1.04.20	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)		505,000	505,000	100.0	Menyesuaikan dengan penerimaan yang disetorkan ke kas daerah

Sumber; BAPENDA (Data Olah Perubahan Penjabaran APBD 2023)



2.1.2. Pendapatan Transfer

Dalam Perubahan Penjabaran APBD untuk Pendapatan Transfer sebelum perubahan sebesar Rp1,273,572,345,019.00 dan sesudah perubahan menjadi Rp 1,323,464,643,617.00 atau mengalami kenaikan 3,9 persen yaitu sebesar Rp 49,892,298,598.00. Pendapatan Transfer secara umum terdiri dari 2 komponen pendapatan yaitu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami kenaikan sebesar 2,2 persen atau Rp23,592,298,598.00 dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar 11,8 persen atau Rp 26,300,000,000.00. Bertambah berkurang pada Pendapatan Transfer ditetapkan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Dana Perimbangan mengalami penambahan target pendapatan sebesar 1persen atau Rp8,296,746,598.00 yang merupakan hasil dari bertambah berkurang pada Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sehingga Dana Perimbangan pada Penjabaran perubahan APBD menjadi Rp950,972,873,598.00. Perubahan pendapatan juga terjadi pada Dana Desa yaitu mengalami perubahan target dari Rp107,277,080.00 menjadi Rp110,838,130.00 atau naik sebesar Rp3,561,050,000.00 atau 3,3 persen.

Selanjutnya Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami perubahan diproyeksikan bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil pada jenis obyek Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp18,300,000.000 (9 persen). Disamping itu juga terjadi peningkatan Bantuan Keuangan pada obyek Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp8,000,000,000.00. Uraian pendapatan transfer dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 3
Perubahan Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,273,572,345,019	1,323,464,643,617	49,892,298,598	3.9	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,050,013,207,000	1,073,605,505,598	23,592,298,598	2.2	
4.2.01.01	Dana Perimbangan	942,736,127,000	950,972,873,598	8,236,746,598	0.9	Kenaikan tersebut menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan alokasi kurang/lebih
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	238,836,825,000	251,916,136,898	13,079,311,898	5.5	
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	538,151,782,000	538,151,782,000	-	-	



No	Uraian	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang		Keterangan
				Rp	%	
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	28,525,900,000	25,658,610,700	(2,867,289,300)	(10.1)	salur untuk dana bagi hasil tahun 2023
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	137,221,620,000	135,246,344,000	(1,975,276,000)	(1.4)	
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0	11,794,502,000	11,794,502,000	100.0	
4.2.01.05	Dana Desa	107,277,080,000	110,838,130,000	3,561,050,000	3.3	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	223,559,138,019	249,859,138,019	26,300,000,000	11.8	
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	214,898,402,019	233,198,402,019	18,300,000,000	8.5	
4.2.02.01.01.001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	19,075,604,000	19,075,604,000	-	-	
4.2.02.01.01.002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	18,500,000,000	18,500,000,000	-	-	
4.2.02.01.01.003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	39,119,348,019	41,419,348,019	2,300,000,000	5.9	
4.2.02.01.01.004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	121,703,450,000	134,203,450,000	12,500,000,000	10.3	
4.2.02.01.01.005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	16,500,000,000	20,000,000,000	3,500,000,000	21.2	Menyesuaikan SK Gubernur terkait pajak rokok 2023
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	8,660,736,000	16,660,736,000	8,000,000,000	92.4	
4.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	8,660,736,000	8,660,736,000	-	-	Menyesuaikan SK Gubernur yang keluar dalam tahun berjalan
4.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		8,000,000,000	8,000,000,000	100.0	Menyesuaikan bantuan keuangan khusus dari provinsi Sulawesi selatan

Sumber: BAPENDA (Data Olah Perubahan Penjabaran APBD)

2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebelum perubahan sebesar Rp56,030,000,000.00 dan sesudah perubahan menjadi Rp62,452,286,000.00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp6,422,286,000.00 atau 11 persen. Kenaikan tersebut ditargetkan pada obyek pendapatan hibah sebesar Rp6.422,286,000.00.

Uraian Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2. 4
Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang		Keterangan
				(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	56,030,000,000	62,452,286,000	6,422,286,000	11.5	
4.3.01	Pendapatan Hibah	56,030,000,000	62,452,286,000	6,422,286,000	11.5	
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	8,126,000,000	11,548,286,000	3,422,286,000	42.1	Penyesuaian pendapatan hibah dari pemerintah pusat
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	47,904,000,000	50,904,000,000	3,000,000,000	6.3	menyesuaikan dengan jumlah rata2 penerimaan dari PT. PLN dan potensi dari hasil lelang scrab/besi tua tahun 2023 oleh PT. Vale Indonesia Tbk

Sumber: BAPENDA (Data Olah Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2023)

Perubahan Pendapatan pada penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ditopang oleh kinerja Perangkat Daerah yang mengelolah sumber-sumber Pendapatan yaitu 19 OPD mengalami perubahan target pendapatan sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perubahan Pendapatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023

No	Perangkat Daerah	APBD	APBD-P	Jenis pendapatan
1	2	3	4	5
1	Dinas Kesehatan	1,844,269,542	5,991,372,912	Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas (3 PKM yang belum BLUD)
2	Puskesmas Burau	1,668,000,000	1,980,587,804	Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas
3	Puskesmas Wotu	2,346,084,000	2,683,576,311	Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas
4	Puskesmas Mangkutana	1,944,000,000	2,098,600,000	Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas
5	Puskesmas Tomoni	1,992,000,000	2,243,765,400	Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas
6	Puskesmas Tomoni Timur	1,103,123,200	1,382,500,000	Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas
7	Puskesmas Kalaena	1,260,000,000	1,600,053,678	Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas
8	Puskesmas Angkona	1,849,582,500	2,180,468,948	Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas
9	Puskesmas Lakawali	902,000,000	1,192,372,264	Retribusi Pelayanan



No	Perangkat Daerah	APBD	APBD-P	Jenis pendapatan
1	2	3	4	5
				Kesehatan Di Puskesmas
10	Puskesmas Malili	2,537,559,808	3,064,038,476	Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas
11	Puskesmas Lampia	935,493,850	933,405,569	Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas
12	Puskesmas Wasuponda	1,408,858,000	1,662,739,574	Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas
13	Puskesmas Nuha	1,212,000,000	1,345,000,000	Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas
14	Puskesmas Wawondula	1,536,000,000	2,125,376,218	Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas
15	Puskesmas Mahalona	1,045,906,100	1,045,906,100	Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas
16	Puskesmas Bantilang	1,032,000,000	1,065,452,195	Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas
17	RSUD I LAGALIGO	95,000,000,000	83,000,000,000	Pendapatan BLUD
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5,000,000,000	3,036,188,322	Retribusi Pemakaian Kekayaan Alat
19	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	604,800,000	604,800,000	Retribusi Penyewaan Bangunan
20	Satuan Polisi Pamong Praja	-	505,000	Lain-lain PAD yang sah (berdasarkan inkhract)
21	Dinas Lingkungan Hidup	20,000,000	40,000,000	Retribusi Pengujian Sampel Laboratorium
22	Dinas Perhubungan	1,108,080,000	958,080,000	Retribusi Jasa Umum, Restribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu
23	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	700,000,000	625,504,500	Retribusi Pengawasan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
24	Dinas Perikanan	491,750,000	280,000,000	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Retribusi Penyewaan Bangunan
25	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	255,000,000	399,199,268	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
26	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian	100,000,000	100,000,000	Retribusi Pelayanan Tera Ulang
27	Sekretariat Daerah	152,529,000	135,779,000	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Retribusi Penyewaan Tanah
28	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1,286,698,345,019	1,341,073,408,314	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Antar Daerah
29	Badan Pendapatan Daerah	299,023,578,900	313,512,463,570	Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal Pada BUMD, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Lain-Lain



No	Perangkat Daerah	APBD	APBD-P	Jenis pendapatan
1	2	3	4	5
				Pendapatan Daerah Yang Sah
30	Kecamatan Wotu	10,080,000	10,080,000	Retribusi Sewa Losd Pasar
31	Kecamatan Tomoni	62,500,000	63,500,000	Retribusi Sewa Losd Pasar
32	Kecamatan Kalaena	13,000,000	21,300,000	Retribusi Sewa Losd Pasar
33	Kecamatan Malili	80,915,000	83,880,000	Retribusi Sewa Losd Pasar, Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
34	Kecamatan Towuti	68,380,000	68,380,000	Retribusi Sewa Losd Pasar
Total Pendapatan		1,714,005,834,919	1,776,608,283,423	

Sumber; BAPENDA (Data Olah Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2023)

2.2. Perubahan Belanja Daerah

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Perubahan Belanja Daerah yang tertuang dalam Peraturan Bupati Luwu Timur No. 78 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 , memuat selisih bertambah berkurang pada 4 komponen Belanja Daerah tersebut. Total anggaran belanja daerah mengalami kenaikan sebesar Rp173,581,537,134 atau 9,8 persen dari rencana belanja daerah yang ditetapkan pada APBD Pokok 2023. Hal tersebut dipengaruhi oleh pelampauan asumsi Silpa tahun sebelumnya yang tetapkan dalam APBD Pokok Tahun Anggaran 2023 serta perubahan asumsi pendapatan tahun berjalan yang perlu dialokasikan dalam tahun berkenaan. Perubahan komponen Belanja digambarkan sebagai berikut

Tabel 2.7
Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	APBD	APBD-P	Bertambah/(Berkurang)	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA	1,763,745,393,187	1,937,326,930,321	173,581,537,134	9.8
5.1	BELANJA OPERASI	1,158,800,457,493	1,266,763,111,781	107,962,654,288	9.3
5.1.01	Belanja Pegawai	588,679,377,855	578,128,606,600	(10,550,771,255)	(1.8)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	524,545,360,877	604,888,818,571	80,343,457,694	15.3



Kode	Uraian	APBD	APBD-P	Bertambah/(Berkurang)	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.05	Belanja Hibah	41,845,918,761	78,765,886,585	36,919,967,824	88.2
5.1.01	Belanja Bantuan Sosial	3,729,800,000	4,979,800,025	1,250,000,025	33.5
5.2	BELANJA MODAL	269,272,220,164	334,306,920,202	65,034,700,038	24.2
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	707,459,000	707,459,000	100.0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30,732,973,365	48,815,482,938	18,082,509,573	58.8
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	90,114,665,520	109,701,868,665	19,587,203,145	21.7
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	148,121,031,279	173,095,468,299	24,974,437,020	16.9
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	303,550,000	1,986,641,300	1,683,091,300	554.5
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3,500,000,000	5,000,000,000	1,500,000,000	42.9
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3,500,000,000	5,000,000,000	1,500,000,000	42.9
5.4	BELANJA TRANSFER	332,172,715,530	331,256,898,338	(915,817,192)	(0.3)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	22,067,095,530	20,599,461,495	(1,467,634,035)	(6.7)
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	310,105,620,000	310,657,436,843	551,816,843	0.2

Sumber: BKAD (Data Olah Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2023)

2.2.1. Belanja Operasi

Perubahan Komponen Belanja Operasi direncanakan terjadi pada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Operasi sebelum perubahan sebesar Rp1,158,800,457,493,00 bertambah sebesar 9,3 persen atau Rp107,962,654,288,00 sehingga menjadi Rp1,266,763,111,781,00. Perubahan pada masing-masing jenis belanja operasi sebagai berikut :

- Belanja Pegawai mengalami perubahan menjadi Rp578,128,606,600,00 menurun 1,8persen atau minus Rp10,550,771,255,00
- Belanja Barang dan Jasa mengalami perubahan menjadi Rp604,888,818,571 meningkat 15,3persen atau Rp80,343,457,694,00
- Belanja Hibah mengalami perubahan menjadi Rp78,765,886,585 meningkat 88,2persen atau Rp36,919,967,824,00
- Belanja Bantuan Sosial mengalami perubahan menjadi Rp4,979,800,025,00 atau meningkat 33,5persen atau Rp1,250,000,



Tabel 2.8
Perubahan Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.1	BELANJA OPERASI	1,158,800,457,493	1,266,763,111,781	107,962,654,288	9.3	
5.1.1	Belanja Pegawai	588,679,377,855	578,128,606,600	(10,550,771,255)	(1.8)	Penyesuaian realisasi alokasi Gaji PPPK Pada dinas Pendidikan dan dan Dinas Kesehatan
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	524,545,360,877	604,888,818,571	80,343,457,694	15.3	Penyesuaian belanja pada : alokasi Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3, Penanganan/ Penurunan Stunting, pada Dinas Kesehatan, Belanja Bahan Medis Habis Pakai pada Rumah Sakit Umum Ilagaligo, Belanja Barang untuk dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Pada Dinas Perikanan dan Dinas Pertanian dan ketahanan pangan dan penyesuaian alokasi Beasiswa Pada Sekretariat Daerah
5.1.5	Belanja Hibah	41,845,918,761	78,765,886,585	36,919,967,824	88.2	Kenaikan tersebut disebabkan: a. Penyesuaian alokasi Hibah pada (BAWASLU dan KPU) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik b. Belanja Hibah Pada Dinas Pendidikan c. Belanja Hibah Pengalokasian hibah pada rumah ibadah dan Hibah kepada Lembaga Pada Sekretariat Daerah
5.1.6	Belanja Bantuan	3,729,800,000	4,979,800,025	1,250,000,025	33.5	Kenaikan tersebut



Kode	Uraian	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
	Sosial					disebabkan: Terdapat Penambahan Anggaran Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat Pada Dinas Sosial

Sumber; BKAD (Data Olah Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2023)

2.2.2. Belanja Modal

Alokasi Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar Rp65,034,700,038,00 atau 24,2persen sehingga menjadi Rp 334,306,920,202,00. Belanja Modal terdiri dari 6 jenis komponen belanja sebagai berikut :

- Belanja Tanah sebelumnya 0 mengalami perubahan menjadi Rp707,459,000,00 atau 100persen yang diperuntukan untuk penambahan Pengalokasian pembebasan lahan.
- Belanja Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami perubahan menjadi Rp48,815,482,938,00 meningkat 58,8persen atau Rp18,082,509,573,00 yang antara lain diperuntukan untuk antara lain Belanja Modal Alat Angkutan berupa pengadaan kendaraan Dinas dan Operasional.serta Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga dan Belanja Modal alat Kantor.
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami perubahan menjadi Rp109,701,868,665,00 meningkat 21,7persen atau Rp19,587,203,145,00 berupa Rehabilitasi Kantor dan Rumah Jabatan,
- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi mengalami perubahan menjadi Rp173,095,468,299 meningkat 16,9persen atau Rp24,974,437,020,00 yang dialokasikan untuk penambahan paket pembangunan Jalan, jaringan, irigasi termasuk memuat Retensi Tahun 2022 yang dianggarkan pada Perubahan Penjabaran APBD.
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya mengalami perubahan menjadi Rp1,986,641,300 ,00 meningkat 554,5persen atau Rp1,683,091,300,00 yaitu penambahan belanja Alat peraga Kesenian, belanja modal buku dan belanja modal goodwill dan penambahan Belanja Modal Aset Lainnya, belanja Modal BLUD, yang sebelumnya tidak ada di Anggaran APBD Pokok.



Tabel 2.9
Perubahan Belanja Modal Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	APBD	APBD-P	Bertambah/(Berkurang)		Keterangan
				(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.2	BELANJA MODAL	269.272.220.164	334.306.920.202	65.034.700.038	24%	
2.2.1	Belanja Modal Tanah		707.459.000	707.459.000	100%	Pemyesuaian alokasi pada Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Pada Dinas Kesehatan dan Dinas Perumahan
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.732.973.365	48.815.482.938	18.082.509.573	59%	Penyesuaian belanja pada : Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Belanja Modal Mebel Pada Dinas Pendidikan Belanja Modal Personal Komputer Pada Dinas Kesehatan, Penambahan pada pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk operasional Kantor
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	90.114.665.520	109.701.868.665	19.587.203.145	22%	Penyesuaian Belanja pada Penambahan Anggaran Belanja Modal Bangunan Terbuka pada Dinas Pekerjaan Umum, Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Pada Dinas Pendidikan, Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga Pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	148.121.031.279	173.095.468.299	24.974.437.020	17%	Penyesuaian alokasi Belanja Pembangunan jalan, jembatan dan Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Pada Dinas PKPP dan Dinas PUPR
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	303.550.000	1.986.641.300	1.683.091.300	554%	Penyesuaian alokasi : Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Pada Dinas Pendidikan

Sumber; BKAD (Data Olah Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2023)



2.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja Tidak Terduga mengalami perubahan menjadi Rp5,000,000,000,- atau naik sebesar 42,9 persen.

Tabel 2.10
Perubahan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	APBD	APBD-P	Bertambah/(Berkurang)		Keterangan
				(RP)		
1	2	3	4	5	6	7
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3,500,000,000	5,000,000,000	1,500,000,000	42.9	
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	3,500,000,000	5,000,000,000	1,500,000,000	42.9	Rekomendasi hasil Evaluasi RAPBD Prov Sulsel

Sumber; BKAD (Data Olah Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2023)

2.2.4. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah kepada Pemerintah desa. Alokasi Belanja Transfer turun sebesar 0,3 persen atau minus Rp915,817,192,00 sehingga menjadi Rp 331,256,898,338,00.

Tabel 2.11
Perubahan Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	APBD	APBD-P	Bertambah/(Berkurang)		Keterangan
				(RP)	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.4	BELANJA TRANSFER	332,172,715,530	331,256,898,338	(915,817,192)	(0.3)	
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	22,067,095,530	20,599,461,495	(1,467,634,035)	(6.7)	Penyesuaian Keputusan Bupati Luwu Timur No 252/F-05/VII/ Tahun 2023 Tentang Penetapan Besarnya Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	310,105,620,000	310,657,436,843	551,816,843	0.2	Adanya Penambahan Belanja untuk Dana Desa tiap desa yang bersumber dari APBN maupun APBD

Sumber; BKAD (Data Olah Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2023)



2.3. Perubahan Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit.

Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diperoleh dari penyertaan modal pada PT. Bank SulselBar dan Perusahaan Air Minum Daerah.

Penerimaan Pembiayaan pada Perubahan Tahun 2023 yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Silpa) sebesar Rp.173.616.646.898, atau melampaui Rp113,877,088,630,- atau 191% asumsi silpa yang ditetapkan pada APBD pokok. Naiknya penerimaan pembiayaan ini berdasarkan hasil Audit BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022. Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan pada perubahan tahun 2023, arah kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur pada perubahan ditargetkan sebesar Rp.12,898,000,000- mengalami kenaikan sebesar Rp.2.898.000.000,00 atau 29 persen. Berikut di sajikan Target Pembiayaan sebelum perubahan dan sesudah Perubahan pembiayaan pada Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022.

Tabel. 2.12
Perubahan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
6	PEMBIAYAAN	49,739,558,268	160,718,646,898	110,978,088,630	223	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	59,739,558,268	173,616,646,898	113,877,088,630	191	
6.1.01	Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (silpa)	59,739,558,268	173,616,646,898	113,877,088,630	191	Penambahan anggaran menyesuaikan silpa tahun sebelumnya
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	10,000,000,000	12,898,000,000	2,898,000,000	29	
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi)	10,000,000,000	12,898,000,000	2,898,000,000	29	Kebijakan penambahan investasi pada Bank Sul-Selbar

Sumber; BKAD (Data Olah Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2023)



2.4. Perubahan Belanja Perangkat Daerah

Seiring dengan peningkatan pendapatan pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023 serta penggunaan silpa tahun sebelumnya, terjadi perubahan alokasi anggaran pada seluruh perangkat daerah. Persentase Peningkatan anggaran terbesar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang diakibatkan oleh adanya alokasi penambahan Hibah pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam rangka penyelenggaraan pemilu 2023 dan 2024. Peningkatan anggaran yang cukup signifikan terjadi pada beberapa OPD antara Dinas Kesehatan dan Puskesmas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pemukiman dan pertanahan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Sekretariat Daerah, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.



Tabel 2.13
Perubahan Rincian Anggaran Belanja Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

NO	OPD	APBD	APBD-P	Bertambah/Berkurang		% pagu OPD Terhadap Total APBD-P
				(Rp)	%	
1	2	3	4	5=(4-3)	6=(5/3)x100	7
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	359,830,007,025.00	366,673,976,775.00	6,843,969,750.00	1.90	18.93
2	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	260,592,846,558.00	285,980,721,791.00	25,387,875,233.00	9.74	14.76
3	RSUD I Lagaligo	138,017,989,450.00	149,161,659,091.00	11,143,669,641.00	8.07	7.70
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	208,974,640,750.00	223,348,460,479.00	14,373,819,729.00	6.88	11.53
5	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	27,933,889,600.00	48,627,889,600.00	20,694,000,000.00	74.08	2.51
6	Satuan Polisi Pamong Praja	12,504,299,900.00	13,491,134,750.00	986,834,850.00	7.89	0.70
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5,028,909,339.00	24,262,004,159.00	19,233,094,820.00	382.45	1.25
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4,565,959,550.00	4,721,373,550.00	155,414,000.00	3.40	0.24
9	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	7,723,718,450.00	10,650,629,425.00	2,926,910,975.00	37.90	0.55
10	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11,314,880,200.00	12,329,880,200.00	1,015,000,000.00	8.97	0.64
11	Dinas Lingkungan Hidup	8,619,315,850.00	9,531,102,050.00	911,786,200.00	10.58	0.49
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5,886,971,750.00	6,443,957,850.00	556,986,100.00	9.46	0.33
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4,888,595,991.00	5,609,165,991.00	720,570,000.00	14.74	0.29
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10,591,563,425.00	10,606,709,882.00	15,146,457.00	0.14	0.55
15	Dinas Perhubungan	14,841,980,400.00	15,551,021,700.00	709,041,300.00	4.78	0.80
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	9,774,544,750.00	12,550,954,750.00	2,776,410,000.00	28.40	0.65
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4,721,588,125.00	4,756,588,125.00	35,000,000.00	0.74	0.25
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5,353,839,325.00	6,214,629,325.00	860,790,000.00	16.08	0.32



NO	OPD	APBD	APBD-P	Bertambah/Berkurang		% pagu OPD Terhadap Total APBD-P
				(Rp)	%	
1	2	3	4	5=(4-3)	6=(5/3)x100	7
19	Dinas Perikanan	14,031,942,200.00	23,899,838,200.00	9,867,896,000.00	70.32	1.23
20	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	15,421,477,425.00	23,716,757,458.00	8,295,280,033.00	53.79	1.22
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	46,488,783,600.00	58,188,323,351.00	11,699,539,751.00	25.17	3.00
22	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian	8,724,002,750.00	9,777,173,750.00	1,053,171,000.00	12.07	0.50
23	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	6,340,934,200.00	7,138,404,200.00	797,470,000.00	12.58	0.37
24	Sekretariat Daerah	65,415,826,750.00	84,909,694,397.00	19,493,867,647.00	29.80	4.38
25	Sekretariat DPRD	38,781,897,559.00	44,813,897,559.00	6,032,000,000.00	15.55	2.31
26	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	9,048,679,600.00	9,491,129,600.00	442,450,000.00	4.89	0.49
27	Badan Keuangan dan Aset	383,505,627,565.00	386,745,823,716.00	3,240,196,151.00	0.84	19.96
28	Badan Pendapatan Daerah	15,641,470,050.00	15,841,470,050.00	200,000,000.00	1.28	0.82
29	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10,801,258,050.00	11,296,528,798.00	495,270,748.00	4.59	0.58
30	Inspektorat	13,194,351,300.00	13,996,770,485.00	802,419,185.00	6.08	0.72
31	Kecamatan	35,183,601,700.00	36,999,259,264.00	1,815,657,564.00	5.16	1.91
Total		1,763,745,393,187.00	1,937,326,930,321.00	173,581,537,134.00	9.84	100.00



2.4.1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Alokasi Belanja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebelum Perubahan sebesar Rp359.830.007.025,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp366.673.976.775,00 bertambah Rp6.843.969.750,00 atau 1,90 persen. Dengan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp329.588.706.605,00 sesudah perubahan Rp331.205.876.505,00 Belanja Modal sebelum perubahan Rp28.624.130.520,00 dan sesudah perubahan Rp39.048.661.205,00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 14
Perubahan Anggaran Program/Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TA.2023

No	Program/Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang	persen	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	358.212.837.125	364.442.762.875	6.229.925.750	1,74	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	244.937.421.466	245.006.619.582	69.198.116	0,03	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	231.224.071	278.204.000	46.979.929	20,32	Penambahan Anggaran Pada Belanja Cetak Dan Perjalanan Dinas
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	241.669.773.545	240.562.685.801	(1.107.087.744)	(0,46)	Penyesuaian Gaji P3K
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	651.601.600	690.421.600	38.820.000	5,96	Penambahan Perjalanan Dinas
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	908.389.250	1.349.542.450	441.153.200	48,56	Penambahan Anggaran Rapat Koordinasi, Alat Listrik Kantor, Pembelian Tinta Komputer, Alat Kebersihan Kantor, Belanja Surat Kabar (Koran), Makan Minum Tamu.
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	540.000.000	1.163.012.397	623.012.397	115,37	Penambahan Anggaran Pada Pembelian AC, Kursi, Meja, Hardisk, Laptop, Printer, Scanner, Kulkas, Tangga Lipat, Sound System, Kursi Roda, Dispenser, Filling Kabinet.



No	Program/Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang	persen	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	730.283.000	708.673.000	(21.610.000)	(2,96)	Adapun Kegiatan Yang Berkurang Pada Kegiatan Ini Adalah Belanja Upah Jasa
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	206.150.000	254.080.334	47.930.334	23,25	Penambahan Anggaran Pemeliharaan Pajak, Dan Belanja Pembuatan PPID
2	Program Pengelolaan Pendidikan	113.275.415.659	119.436.143.293	6.160.727.634	5,44	
2.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	64.456.560.449	68.576.527.486	4.119.967.037	6,39	Penambahan Anggaran Pada Penambahan Pagar Dan Lanjutan Pembangunan Pagar, Lanjutan Penataan Halaman, Rehab Ruang Kelas, Rehab Perpustakaan, Penambahan Mebel, Pengadaan Tik, Alat Praktik, Penambahan Minat Bakat, Penambahan Dana BOS, Penambahan Laboratorium
2.2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	34.679.576.080	35.546.041.407	866.465.327	2,50	Penambahan Anggaran Kegiatan Ini Adalah Lanjutan Pembangunan Pagar, Penataan Halaman Dan Rehab Gedung, Rehab Ruang Kelas, Pengadaan Mebel, Perlengkapan Sekolah (Alat Tik), Penambahan Seragam, Alat Praktik.
2.3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	10.849.619.130	11.943.798.400	1.094.179.270	10,08	Penambahan Anggaran Kegiatan Ini Adalah Pembangunan Gedung PAUD, Pembangunan Area Bermain, Pengadaan Mebel, Gaji BOSDA, BOP PAUD Dan Penambahan Cetak Raport TK.
2.4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	3.289.660.000	3.369.776.000	80.116.000	2,44	Penambahan Anggaran Kegiatan Ini Adalah Penambahan BOP Kesetaraan Dan Penambahan Anggaran Untuk Pendataan Anak Tidak Sekolah
	URUSAN PEMERINTAHAN	1.617.169.900	2.231.213.900	614.044.000	37,97	



No	Program/Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang	persen	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	BIDANG KEBUDAYAAN					
3	Program Pengembangan Kebudayaan	1.415.164.900	2.029.208.900	614.044.000	43,39	
3.1	Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.415.164.900	2.029.208.900	614.044.000	43,39	Penambahan Anggaran Pembangunan Aula Adat, Bantuan Alat Musik, Dan Pembangunan Pagar Rumah Adat
4	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	71.999.600	71.999.600	0	0,00	
4.1	Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	71.999.600	71.999.600	0	0,00	
5	Program Pembinaan Sejarah	30.020.400	30.020.400	0	0,00	
5.1	Pembinaan Sejarah Lokal Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.020.400	30.020.400	0	0,00	
6	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	99.985.000	99.985.000	0	0,00	
6.1	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	99.985.000	99.985.000	0	0,00	
Total Belanja		359.830.007.025	366.673.976.775	6.843.969.750	1,90	

Sumber ; Data Olah DPPA Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan TA. 2023

2.4.2. Dinas Kesehatan

Alokasi Belanja pada Dinas Kesehatan sebelum Perubahan sebesar Rp204.850.772.050,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp224.079.180.557,00 bertambah Rp19.228.408.507,00 atau 9,39 persen. Dengan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp182.012.001.101,00 sesudah perubahan Rp199.289.556.586,00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp22.838.770.949,00 dan sesudah perubahan Rp24.789.623.971,00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 2.15
Perubahan Anggaran Program/Kegiatan Dinas Kesehatan TA.2023

NO	Program / Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah / Berkurang		Keterangan
				(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	109.079.185.331	113.059.188.402	3.980.003.071	3,11	
1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	169.839.000	169.839.000	0	0,00	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	102.450.434.444	106.006.330.515	3.555.896.071	3,47	Penambahan untuk gaji dan tunjangan PNS dan Penambahan untuk TPP PPPK 20% selama 9 bulan serta penambahan perjalanan dinas untuk studi tiru
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25.925.000	48.235.000	22.310.000	86,06	penyesuaian harga satuannya serta penambahan perjalanan dinas luar daerah
1.4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	9.240.000	9.240.000	0	0,00	
1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	277.471.100	368.211.700	90.740.600	32,70	bimbingan teknis service exelent untuk para petugas puskesmas dan perjalanan dinas
1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	507.287.410	609.068.810	101.781.400	20,06	Penambahan untuk penyediaan komponen listrik, makan minum tamu serta belanja perjalanan dinas
1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.285.118.377	1.784.518.377	499.400.000	38,86	Penambahan untuk belanja kursi rapat, LCD, mikropon, LCD untuk sekretariat KKS serta belanja komputer, laptop dan printer kantor
1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.937.470.000	3.634.345.000	(303.125.000)	(7,70)	Pengurangan untuk belanja tenaga upah jasa



NO	Program / Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah / Berkurang		Keterangan
				(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						administrasi untuk di alihkan ke belanja tenaga upah jasa bidan
1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	416.400.000	429.400.000	13.000.000	3,12	Penyesuaian kebutuhan belanja pemeliharaan kantor
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	90.152.566.719	103.396.136.155	13.243.569.436	14,69	
2.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	28.840.289.572	31.764.364.294	2.924.074.722	10,14	penambahan untuk rehab pagar PKM malili, Penataan Halaman dan Pembangunan Pagar UTD Malili, Rehab Halaman PKM Nuha dan Pembangunan Selasar Penghubung PKM Nuha, alkes UTD Malili, pengadaan obat dan multivitamin untuk ibu hamil dan balita
2.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	61.255.607.147	71.480.457.861	10.224.850.714	16,69	penambahan untuk premi asuransi, serta belanja PMT susu untuk ibu hamil dan balita stunting (Insentif fiskal)
2.3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	45.000.000	63.180.000	18.180.000	40,49	Penyesuaian perjalanan dinas pengawasan terhadap klinik - klinik kesehatan
2.4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.670.000	88.134.000	76.464.000	655,22	Penyesuaian nomenklatur DAK
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	4.917.828.000	6.851.064.000	1.933.236.000	39,31	
3.1	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di	55.730.500	139.850.500	84.120.000	150,94	menyesuaikan Penyesuaian



NO	Program / Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah / Berkurang		Keterangan
				(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
	Wilayah Kabupaten/Kota					nomenklatur DAK
3.2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	4.530.000.000	5.978.116.000	1.448.116.000	31,97	Penambahan untuk tenaga upah jasa tenaga kesehatan yang ada di puskesmas
3.3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	332.097.500	733.097.500	401.000.000	120,75	Penyesuaian nomenklatur DAK
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	574.573.000	503.733.000	(70.840.000)	(12,33)	
4.1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	137.450.000	137.450.000	0	0,00	
4.2	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	437.123.000	248.163.000	118.960.000	(43,23)	Penyesuaian nomenklatur DAK
4.3	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	0	118.120.000	118.120.000	100,00	Penyesuaian nomenklatur DAK
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	126.619.000	269.059.000	142.440.000	112,49	
5.1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	70.840.000	70.840.000	100,00	Penyesuaian nomenklatur DAK
5.2	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	126.619.000	198.219.000	71.600.000	56,54	Penyesuaian nomenklatur DAK
Total Belanja		204.850.772.050	224.079.180.557	19.228.408.507	93,9	

Sumber; Data olah DPPA Dinas Kesehatan TA. 2023



2.4.3. Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo

Alokasi Belanja pada Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo sebelum Perubahan sebesar Rp138.017.989.450,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp149.161.659.091,00 bertambah Rp11.143.669.641,00 atau 8,07 persen. Dengan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp129.637.692.815,00 sesudah perubahan Rp 145.284.409.122,00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp8.380.296.635,00 dan sesudah perubahan Rp3.877.249.969,00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.16
Perubahan Anggaran Program/Kegiatan
Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo TA.2023

NO	Program / Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah / Berkurang		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN	138.017.989.450	149.161.659.091	11.143.669.641	8,07	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	132.441.828.815	127.248.451.286	(5.193.377.529)	(3,92)	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.057.750	51.059.750	1.002.000	2,00	Penambahan Belanja Makan dan minum rapat, alat tulis kantor dan perjalanan dinas
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.687.343.036	29.677.032.895	(10.310.141)	(0,03)	Pengurangan Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan kelangkaan profesi PNS (Dokter Spesialis Pindah)
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.000.000	8.000.000	0	0,00	
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.696.428.029	7.602.200.000	(94.228.029)	(1,22)	Pengurangan upah jasa
1.5	Peningkatan Pelayanan BLUD	95.000.000.000	89.910.158.641	(5.089.841.359)	(5,36)	Pengurangan disesuaikan dengan Capaian Pendapatan BLUD RS
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	5.576.160.635	21.913.207.805	16.337.047.170	292,98	
2.1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	380.296.635	1.169.329.060	789.032.425	207,48	Penambahan Pembangunan Gedung Fisik (Gudang IPSRS)
2.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.195.864.000	20.743.878.745	15.548.014.745	299,24	Penambahan untuk Belanja Obat, BHP, Bahan Kimia
Total Belanja		138.017.989.450	149.161.659.091	11.143.669.641	8,07	

Sumber; Data olah DPPA Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo TA. 2023



2.4.4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi Belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebelum Perubahan sebesar Rp208.974.640.750,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp223.348.460.479,00 bertambah Rp14.373.819.729,00 atau 6,88 persen. Dengan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp54.526.164.296,00 sesudah perubahan Rp54.182.472.675,00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp154.448.476.454,00 dan sesudah perubahan Rp169.165.987.804,00

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.17
Perubahan Anggaran Program/Kegiatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA.2023

No	Program/Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	208.974.640.750	223.348.460.479	14.373.819.729	6,88	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.106.693.006	16.326.705.930	1.220.012.924	8,08	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	92.299.290	217.869.290	125.570.000	136,05	Penyesuaian satuan E Katalog, kebutuhan perjalanan dinas, penambahan volume rapat
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.870.551.086	8.866.286.110	(4.264.976)	(0,05)	Penyesuaian alokasi gaji dan tunjangan
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25.569.400	49.849.400	24.280.000	94,95	Penyesuaian realisasi
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	149.712.714	177.892.714	28.180.000	18,82	Penyesuaian kebutuhan volume perjalanan dinas
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	694.059.050	1.072.082.350	378.023.300	54,47	Penyesuaian realisasi dan kebutuhan perjalanan dinas
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.573.500.000	3.937.800.000	364.300.000	10,19	Penyesuaian nilai kontrak dan penambahan kendaraan dinas
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	394.715.766	453.390.366	58.674.600	14,87	Penyesuaian realisasi Gaji upah jasa
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.306.285.700	1.551.535.700	245.250.000	18,77	Penambahan suku cadang dan pemeliharaan kendaraan operasional
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	19.663.314.362	21.202.693.637	1.539.379.275	7,82	
2.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman	16.581.836.408	17.646.451.650	1.064.615.242	6,42	Penyesuaian nilai kontrak, penambahan



No	Program/Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					volumen pemeliharaan dan Belanja Modal Kegiatan pengelolaan SDA
2.2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.081.477.954	3.556.241.987	474.764.033	15,41	Penyesuaian biaya pemeliharaan dan kebutuhan operasional
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	13.452.460.000	10.182.251.121	(3.270.208.879)	(2,43)	
3.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota	13.452.460.000	10.182.251.121	(3.270.208.879)	(2,43)	Penyesuaian nilai kontrak dan Pergalihan kegiatan terkait nomenklatur kewenangan
4	Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Regional	862.200.000	1.146.450.000	284.250.000	32,97	
4.1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	862.200.000	1.146.450.000	284.250.000	32,97	Penambahan sarana persampahan
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	7.263.960.000	7.110.675.154	(153.284.846)	(2,11)	
5.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.263.960.000	7.110.675.154	(153.284.846)	(2,11)	Penyesuaian Belanja Hibah
6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	2.608.216.580	5.601.225.080	2.993.008.500	114,75	
6.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.608.216.580	5.601.225.080	2.993.008.500	114,75	Penambahan volume kegiatan dan pemeliharaan sistem drainase
7	Program Penataan Bangunan Gedung	28.893.890.415	26.982.987.825	(1.910.902.590)	(6,61)	
7.1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	28.893.890.415	26.982.987.825	(1.910.902.590)	(6,61)	Penyesuaian nilai kontrak
8	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	3.027.395.000	12.323.387.240	9.295.992.240	307,06	
8.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	3.027.395.000	12.323.387.240	9.295.992.240	307,06	Penyesuaian nilai kontrak dan penambahan volume kegiatan



No	Program/Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
9	Program Penyelenggaraan Jalan	114.575.808.000	119.582.537.880	5.006.729.880	4,37	
9.1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	114.575.808.000	119.582.537.880	5.006.729.880	4,37	Penyesuaian nilai kontrak dan penambahan volume kegiatan
10	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.415.774.887	1.375.976.887	(39.798.000)	(2,83)	
10.1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	846.878.270	802.728.270	(44.150.000)	(5,21)	Pengurangan belanja ATK, honorarium, dan belanja
10.2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	112.331.237	102.691.237	(9.640.000)	(8,58)	Pengurangan belanja ATK, honorarium, dan belanja
10.3	Pengawasan Terbit Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	456.565.380	470.557.380	13.992.000	3,06	Pengurangan belanja ATK, honorarium, dan belanja
11	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.104.928.500	1.513.569.725	(591.358.775)	(28,09)	
11.1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.653.429.000	1.057.555.000	(595.874.000)	(36,04)	Pengurangan belanja ATK, honorarium, dan belanja
11.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	55.267.500	55.910.000	55.910.000	101,16	penambahan belanja ATK, honorarium, dan belanja
11.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	70.490.000	70.490.000	0	0,00	Penyesuaian belanja ATK,
11.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah kabupaten/Kota	325.742.000	329.614.725	3.872.725	1,19	Penambahan belanja jasa tenaga ahli, belanja sewa hotel, dan perjalanan dinas
TOTAL BELANJA		208.974.640.750	223.348.460.479	14.373.819.729	6,88	

Sumber : Data Olah DPPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA. 2023

2.4.5. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Alokasi Belanja pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebelum Perubahan sebesar Rp27.933.889.600,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp48.627.889.600,00 bertambah Rp20.694.000.000,00 atau 74,08 persen, Dengan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp6.922.289.600,00 sesudah perubahan Rp7.714.655.209,00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp21.011.600.000,00 dan sesudah perubahan Rp40.913.234.391,00.



Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.18
Perubahan Anggaran Program/Kegiatan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan TA.2023

No	Program / Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	27.065.624.350	47.473.917.286	20.408.292.936	75,40	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.332.284.750	4.622.226.515	289.941.765	6,69	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	92.960.000	157.680.000	64.720.000	69,62	Penambahan anggaran belanja perjalanan dinas
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.046.809.892	2.246.513.965	(800.295.927)	(26,27)	Pengurangan gaji menyesuaikan kebutuhan karena ketidak terisian pejabat eselon II
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19.070.000	19.070.000	0	0,00	
1.4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	7.799.780	7.799.780	0	0,00	
1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	234.360.500	207.584.500	(26.776.000)	(11,43)	Penyesuaian anggaran karena beberapa bimtek dibiayai oleh BKPSDM
1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	478.810.400	665.332.200	186.521.800	38,95	Penambahan anggaran belanja pengadaan tablet dan asesoris 1 unit, scanner 2 unit dan GPS 1 unit, alat pemanas air
1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47.200.000	622.100.000	574.900.000	1218,01	Pembelian 1 unit mobil jenis double, meja pelayanan PPID, Ac split dan UPS
1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.414.828	171.886.720	(9.528.108)	(5,25)	menyesuaikan kebutuhan
1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	223.859.350	524.259.350	300.400.000	134,19	Penambahan untuk pemeliharaan rusun PNS dan Rusunawa Sumasang, interior kantor renovasi plafon dan ruang bermain anak
2	Program Pengembangan Perumahan	582.530.500	402.140.500	(180.390.000)	(30,97)	



No	Program / Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp	%	
2.1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	45.726.000	45.726.000	0	0,00	
2.2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	215.000.000	0	(215.000.000)	(100,00)	Penyesuaian anggaran karena Tidak ada SK penetapan status bencana pada tahun 2023
2.3	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	269.131.000	269.131.000	0	0,00	
2.4	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	52.673.500	87.283.500	34.610.000	65,71	Penambahan Volume koordinasi yang dilaksanakan diluar daerah
3	Program Kawasan Permukiman	4.607.009.100	7.242.236.935	2.635.227.835	57,20	
3.1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	88.119.000	295.973.920	207.854.920	235,88	Penambahan Volume koordinasi yang dilaksanakan diluar daerah
3.2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	4.518.890.100	6.946.263.015	2.427.372.915	53,72	Penambahan Volume perjalanan Dinas untuk identifikasi calon penerima manfaat bedah rumah dalam rangka pencapaian penanganan kawasan kumuh
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	17,543,800,000	35,207,313,336	17,663,513,336	100,68	
4.1	penyelenggaraan PSU Perumahan	17,543,800,000	35,207,313,336	17,663,513,336	100,68	Penambahan anggaran disebabkan adanya kegiatan baru dalam rangka capaian penanganan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	868.265.250	1.153.972.314	285.707.064	32,91	
5	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	37.524.675	22.880.000	(14.644.675)	(39,03)	
5.1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	37.524.675	22.880.000	(14.644.675)	(39,03)	Penyesuaian Anggaran kebutuhan dan waktu sisa anggaran pengurangan dalam bentuk perjalanan dinas, makan minum dan alat tulis kantor
6	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan	213.748.025	649.131.000	435.382.975	203,69	



No	Program / Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp	%	
	Santunan Tanah Untuk Pembangunan					
6.1	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	213.748.025	649.131.000	435.382.975	203,69	Penambahan anggaran untuk belanja modal pengadaan tanah pos pelabuhan lampia Dinas Perhubungan dan pos pemadam Kebakaran Dinas Pemadam kebakaran
7	Program Pengelolaan Tanah Kosong	132.608.025	132.608.025	0	0,00	
7.1	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	132.608.025	132.608.025	0	0,00	
8	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	11.848.025	6.886.789	(4.961.236)	(41,87)	
8.1	Penerbitan Izin Membuka Tanah	11.848.025	6.886.789	(4.961.236)	(41,87)	Pengurangan anggaran perjalanan dinas, makan minum dan atk
9	Program Penatagunaan Tanah	472.536.500	342.466.500	(130.070.000)	(27,53)	
9.1	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	472.536.500	342.466.500	(130.070.000)	(27,53)	Penyesuaian anggaran sesuai capaian realisasi dan penambahan pada belanja perjalanan untuk fasilitasi persertifikatan asrama mahasiswa di Palu
Total Belanja		27.933.889.600	48.627.889.600	20.694.000.000	74,08	

Sumber : Data DPPA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan TA.2023

2.4.6. Satuan Polisi Pamong Praja

Alokasi Belanja pada Satuan Polisi Pamong Praja sebelum Perubahan sebesar Rp12.504.299.900,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp 13.491.134.750,00 bertambah Rp986.834.850,00 atau 7,89 persen. Dengan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp11.649.099.900,00 sesudah perubahan Rp12.599.134.750,00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp855.200.000,00 dan sesudah perubahan Rp892.000.000,00

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 2.19
Perubahan Anggaran Program/Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja TA.2023

No.	Program/Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.422.674.460	5.695.161.710	272.487.250	5,02	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	82.336.480	122.736.480	40.400.000	49,06	Penyesuaian kebutuhan volume perjalanan dinas
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.070.683.024	4.115.985.004	45.301.980	1,11	Terdapat 10 orang PNS Satpol PP penyesuaian Tunjangan Fungsional
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	27.039.006	36.329.526	9.290.520	34,36	Penyesuaian harga satuan dan volumen perjalanan dinas.
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	211.655.500	156.905.500	(54.750.000)	(25,87)	Pergeseran anggaran dikarenakan terdapat Diklat PPNS yang tak diikuti
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	446.437.650	627.170.400	180.732.750	40,48	Penyesuaian kebutuhan Volume perjalanan
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	259.100.000	325.100.000	66.000.000	25,47	Penambahan Anggaran untuk pengadaan Laptop bagi Koordinator Satpol PP
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.657.800	95.219.800	(13.438.000)	(12,37)	pengurangan 1 orang tenaga CS
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	216.765.000	215.715.000	(1.050.000)	(0,48)	Pergeseran nomenklatur belanja
2	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	7.081.625.440	7.795.973.040	714.347.600	10,09	
2.1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.671.318.700	7.213.603.300	542.284.600	8,13	Penambahan Anggaran pada kegiatan Kunjungan Presiden, Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan bagi 247 Personil Satpol PP, pengadaan Pakaian Korsi sebanyak 45 Orang dan pengadaan pakaian Pataka sebanyak 10 Orang
2.2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	377.375.740	542.048.740	164.673.000	43,64	penambahan anggaran untuk pemanfaatan dana bagi hasil pajak rokok dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk penegakan hukum
2.3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	32.931.000	40.321.000	7.390.000	22,44	Penambahan anggaran untuk pelaksanaan koordinasi dan konsultasi PPNS



No.	Program/Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
						dengan lembaga yang terkait
Total Belanja		12.504.299.900	13.491.134.750	986.834.850	7,89	
Sumber : Data olah DPPA Satuan Polisi Pamong Praja TA.2023						

2.4.7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Alokasi Belanja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebelum Perubahan sebesar Rp5.028.909.339,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp24.262.004.159,00 tetap Rp19.233.094.820,00 atau 382,45 persen. Rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp954.109.339,00 sesudah perubahan Rp20.783.503.659,00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp74.800.000,00 dan sesudah perubahan Rp3.478.500.500,00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.20
Perubahan Program /Kegiatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik TA.2023

No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota	2.441.463.124	5.732.948.124	3.291.485.000	134,82	
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.229.003	48.209.903	12.980.900	36,85	Penambahan anggaran pada kegiatan ini meliputi : belanja Alat tulis kantor; belanja makanan dan minuman rapat; serta perjalanan dinas
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.746.550.493	1.510.446.160	(236.104.333)	(13,52)	menyesuaikan dengan realisasi gaji dan tunjangan ASN, yang mana jabatan Sekretaris Badan yang masih lowong sampai dengan bulan agustus 2023
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.498.900	1.498.900	0	0,00	
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.872.100	74.330.600	23.458.500	46,11	Penambahan anggaran pada kegiatan ini meliputi anggaran



No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
						kontribusi bimtek dan dan perjalanan dinas bimtek pada sub kegiatan bimtek dan implementasi peraturan perundang-undangan
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	367.312.628	533.852.061	166.539.433	45,34	Penambahan anggaran pada belanja peralatan dan perlengkapan kantor (laptop dan gorden kantor); belanja perjalanan dinas
1.6	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	74.800.000	3.391.260.500	3.316.460.500	4433,77	Penambahan anggaran pada pengadaan kendaraan dinas/operasional lapangan (5 unit Kendaraan) kepada Anggota Forkopimda dan Kementerian Agama Kab. Luwu Timur dan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	106.300.000	91.450.000	(14.850.000)	(13,97)	menyesuaikan realisasi belanja penyediaan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang direalisasikan sesuai dengan tagihan atau real cost
1.8	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	58.900.000	81.900.000	23.000.000	39,05	Penambahan anggaran pada penataan lobby kantor untuk ruangan PPID
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	761.425.870	1.103.705.870	342.280.000	44,95	
2.1	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	761.425.870	1.103.705.870	342.280.000	44,95	Penambahan anggaran untuk STUDY WAWASAN NUSANTARA bagi Anggota Paskibraka Tahun 2023
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	846.666.335	16.345.381.155	15.498.714.820	1830,56	
3.1	Perumusan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	846.666.335	16.345.381.155	15.498.714.820	1830,56	Penambahan anggaran pada dana Hibah kepada KPU dan BAWASLU Kabupaten Luwu Timur dalam rangka Pemilihan Umum (Presiden dan Pemilihan Anggota Legislatif) dan Pemilihan Kepala Daerah
4	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	44.943.600	79.663.600	34.720.000	77,25	
4.1	Perumusan kebijakan teknis	44.943.600	79.663.600	34.720.000	77,25	Penambahan anggaran



No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan					pada Hibah Dana kepada Organisasi Kemasyarakatan (PEPABRI) dan penambahan anggaran untuk belanja perjalanan dinas
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	348.130.960	361.850.960	13.720.000	3,94	
5.1	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	348.130.960	361.850.960	13.720.000	3,94	Penambahan anggaran untuk belanja Cetak Baliho Himbauan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)
6	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	586.279.450	638.454.450	52.175.000	8,90	
6.1	Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	586.279.450	638.454.450	52.175.000	8,90	Penambahan anggaran pada kegiatan ini adalah penambahan anggaran untuk belanja honorarium TIM FORKOPIMDA Kabupaten Luwu Timur
	Total	5.028.909.339	24.262.004.159	19.233.094.820	382,45	

Sumber ; Data olah DPPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik TA.2023

2.4.8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Alokasi Belanja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebelum Perubahan sebesar Rp4.565.959.550,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp4.721.373.550,00 bertambah Rp155.414.000,00 atau 3,40 persen. Dengan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp4.307.629.550,00 sesudah perubahan Rp4.204.733.550,00 Belanja Modal sebelum perubahan Rp258.330.000,00 dan sesudah perubahan Rp516.640.000,00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 2.21
Perubahan Anggaran Program/ Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana TA.2023

No	Program/Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	3.005.325.018	2.847.919.108	157.405.910	(5,24)	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.031.920	105.451.420	27.419.500	35,14	Penambahan anggaran perjalanan dinas untuk coaching penganggaran APE dan KLA
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.107.340.335	1.626.778.373	(480.561.962)	(22,80)	Penambahan anggaran perjalanan dinas untuk coaching SIPD Penatausahaan keuangan dan Aplikasi SIM Gaji
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	17.949.800	20.559.800	2.610.000	14,54	Penambahan anggaran perjalanan dinas untuk coaching aplikasi BMD
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.500.000	73.160.000	37.660.000	106,08	Penambahan anggaran perjalanan dinas 2 org LATPIM III dan IV dan disediakan untuk bimtek/diklat
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	393.759.800	576.909.800	183.150.000	46,51	Penyesuaian anggaran belanja
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	163.500.000	201.240.000	37.740.000	23,08	Penambahan anggaran untuk BM. Pengadaan Meja Receptionis, Notebook, Scanner dan Komputer PC
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.403.163	79.459.715	(6.943.448)	(8,04)	Penyesuaian sisa anggaran untuk Honor Pejabat pengadaan yang berlaku Februari 2023.
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	122.840.000	164.360.000	41.520.000	33,80	perbaikan kendaraan dinas rescue dan hilux, perbaikan peralatan kantor (Laptop dan PC) pengecutan atap kantor BPBD dan ruang PPID
2	Program Penanggulangan Bencana	1.560.634.532	1.873.454.442	312.819.910	20,04	
2.1	Kegiatan Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	200201742	194640642	(5.561.100)	(2,78)	Penyesuaian sisa belanja
2.2	Kegiatan Pelayanan	485.492.590	480.740.600	(4.751.990)	(0,98)	Penyesuaian



No	Program/Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					anggaran BM. Pengadaan perahu Karet, menyesuaikan Perubahan target dari 2 Destana menjadi 4 Destana
2.3	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	755.000.000	797.928.000	42.928.000	5,69	Penambahan anggaran untuk pengadaan sepatu dan baju lapangan TRC, dan perjalanan dinas
2.4	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	119.940.200	400.145.200	280.205.000	233,62	Pengadaan Baju Pelatihan dan Perjalanan dinas luar daerah, BM. Perencanaan dan Administrasi untuk Dana Hibah RR
Total		4.565.959.550	4.721.373.550	155.414.000	3,40	

Sumber : Data Olah DPPA Badan Penanggulangan Bencana TA.2023

2.4.9. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Alokasi Belanja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebelum Perubahan sebesar Rp7.723.718.450,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp10.650.629.425,00, bertambah Rp2.926.910.975,00 atau 37,90 persen, dengan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp7.030.561.135,00 sesudah perubahan Rp7.841.322.110,00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp 693.157.315,00 dan sesudah perubahan Rp2.809.307.315,00

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.22
Perubahan Anggaran Program/Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan TA.2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.035.361.737	5.787.825.992	2.752.464.255	90,68	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95.728.262	117.349.862	21.621.600	22,59	Penambahan Volume Koordinasi dan Konsultasi



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.722.755.620	2.122.304.050	399.548.430	23,19	Penambahan gaji dan tunjangan pegawai
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	15.882.752	20.082.752	4.200.000	26,44	Penambahan anggaran untuk honorarium pengelola BMD
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	142.454.928	429.650.928	287.196.000	201,60	pengadaan pakaian PDL anggota Damkar
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	374.566.450	447.644.850	73.078.400	19,51	Penambahan anggaran pada belanja alat kebersihan, cetak spanduk dan perjalanan dinas
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	298.523.000	2.230.273.000	1.931.750.000	647,10	Penambahan anggaran untuk pembelian 1 unit mobil pemadam kebakaran kapasitas 4.000 Liter
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.740.725	57.740.550	(50.000.175)	(46,41)	Menyesuaikan anggaran untuk sub kegiatan lainnya
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	277.710.000	362.780.000	85.070.000	30,63	Penambahan anggaran untuk perbaikan 2 unit mobil, yaitu mobil operasional eselon II dan mobil operasional lapangan dan perbaikan tempat parkir kepala dinas.
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	4.688.356.713	4.862.803.433	174.446.720	3,72	
2.1	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.388.034.238	4.555.277.958	167.243.720	3,81	Penambahan anggaran untuk BBM mobil Damkar, perjalanan dinas, peralatan sarana prasarana penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri, cetak dan penggandaan
2.2	Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	9.702.190	9.702.190	0	0,00	
2.3	Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	5.043.380	8433.380	3.390.000	67,22	Penambahan anggaran perjalanan dinas
2.4	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	56.335.790	56.335.790	0	0,00	
2.5	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	229.241.115	233.054.115	3.813.000	1,66	Penambahan belanja perjalanan dinas diklat
Total Belanja		7.723.718.450	10.650.629.425	2.926.910.975	37,90	

Sumber ; Data Olah DPPA Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan TA.2023



2.4.10. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Alokasi Belanja pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebelum Perubahan sebesar Rp11.314.880.200,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp12.329.880.200,00 atau bertambah Rp1.015.000.000,00 atau 8,97 persen. Perubahan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp10.733.987.346,00 sesudah perubahan Rp12.167.681.370,00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp580.892.854,00 dan sesudah perubahan Rp162.198.830,00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.23
Perubahan Anggaran Program/Kegiatan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak TA.2023

No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	9.847.923.031	10.459.008.031	611.085.000	6,21	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	4.240.895.203	3.719.667.127	(521.228.076)	(12,29)	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	125.106.500	133.116.500	8.010.000	6,40	Penambahan Anggaran untuk perjalanan dinas
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.254.585.693	2.400.052.817	(854.532.876)	(26,26)	Penyesuaian alokasi belanja pegawai
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	59.530.000	54.530.000	(5.000.000)	(8,40)	Anggaran Berkurang untuk rekening belanja kursus singkat/pelatihan bimbingan teknis PNS
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	483.112.010	680.896.810	197.784.800	40,94	perjalanan dinas luar daerah
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	6.000.000	6.000.000	100,00	Penambahan anggaran digunakan untuk pengadaan desain taman
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.310.000	110.270.000	960.000	0,88	Penyesuaian kebutuhan belanja air kantor
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	209.251.000	334.801.000	125.550.000	60,00	Penyesuaian pemeliharaan Kebutuhan pemeliharaan
2	Program Pemberdayaan Sosial	3.607.399.203	4.656.912.704	1.049.513.501	29,09	



No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	3.607.399.203	4.656.912.704	1.049.513.501	29,09	Penambahan anggaran untuk Palang Merah Indonesia dan Karang Taruna.
3	Program Rehabilitasi Sosial	1.086.323.525	1.079.879.900	(6.443.625)	(0,59)	
3.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	163.165.000	193.155.000	29.990.000	18,38	Anggaran berkurang karena jumlah kouta pada bimbingan fisik berkurang
3.2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	923.158.525	886.724.900	(36.433.625)	(3,95)	
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	407.536.200	415.836.200	8.300.000	2,04	
4.1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	407.536.200	415.836.200	8.300.000	2,04	Penambahan Upah Pendamping PKH sebanyak 3 orang selama 6 bulan
5	Program Penanganan Bencana	205.528.900	286.472.100	80.943.200	39,38	
5.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	205.528.900	286.472.100	80.943.200	39,38	Anggaran ditambahkan karena dana yang digunakan untuk bencana habis, sedangkan masih ada dana untuk bencana belum teralokasi
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	300.240.000	300.240.000	0	0,00	
6.1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	300.240.000	300.240.000	0	0,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.466.957.169	1.870.872.169	403.915.000	27,53	
7	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	253.449.484	349,124,384	95.674.900	37,75	
7.1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga	101.078.284	156.753.184	55.674.900	55,08	Penambahan Anggaran untuk kegiatan makan minum kegiatan pengharaan APE dan



No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota					penambahan kegiatan perjalanan dinas biasa
7.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	152.371.200	192,371,200	40.000.000	26,25	Penambahana Anggaran untuk HUT DWP dan kegiatan seminar DWP di Jakarta
8	Program Perlindungan Perempuan	940.683.007	1.090.453.107	149.770.100	15,92	
8.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	307.248.956	307.249.056	100	0,00	
8.2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	633.434.051	783.204.051	149.770.000	23,64	Penambahan Anggaran untuk kegiatan belanja Baliho melalui Media Billboard yang tersebar di 11 Kecamatan. Belanja makan minum untuk kegiatan sosialisasi
9	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	72.681.526	94.371.526	21.690.000	29,84	
9.1	Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) Dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	72.681.526	94.371.526	21.690.000	29,84	Anggaran bertambah pada rekening sewa hotel dan belanja perjalanan dinas
10	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	40.775.100	40.775.100	0	0,00	
10.1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.775.100	40.775.100	0	0,00	
11	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	159.368.052	296.148.052	136.780.000	85,83	
11.1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	54.383.052	169.223.052	114.840.000	211,17	Anggaran bertambah untuk pelatihan tenaga pendamping dengan rincian rekening yang bertambah yaitu makan minum, uang transport dan sewa hotel. Penambahan anggaran juga dikarenakan kegiatan sosialisasi TATBN dan perjalanan dinas
11.2	Penguatan dan Pengembangan	104.985.000	126.925.000	21.940.000	20,90	Anggaran bertambah digunakan untuk makan



No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					minum hari anak dan perjalanan dinas
	Total Belanja	11.314.880.200	12.329.880.200	1.015.000.000	8,97	

Sumber : Data Olah DPPA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak TA 2023

2.4.11. Dinas Lingkungan Hidup

Alokasi Belanja pada Dinas Dinas Lingkungan Hidup sebelum Perubahan sebesar Rp8.619.315.850,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp9.531.102.050,00 atau bertambah Rp911.786.200,00 atau 10,58 persen. Perubahan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp8.324.065.850,00 sesudah perubahan Rp8.691.172.050,00. Belanja Modal sebelum perubahan Rp295.250.000,00 dan sesudah perubahan Rp839.930.000,00

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.24
Perubahan Anggaran Program/Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup TA.2023

No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp	persen	
1	2	3	4	5	6	7
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	8.619.315.850	9.531.102.050	911.786.200	10,58	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	3.744.328.656	4.117.729.856	373.401.200	9,97	
1.1	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.429.500	140.342.500	49.913.000	55,20	Penambahan anggaran pada belanja perjalanan dinas untuk kegiatan Perencanaan
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.986.698.728	2.871.096.192	(115.602.536)	(3,87)	Penyesuaian anggaran untuk kebutuhan gaji dan tunjangan
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Skpd	18.855.000	27.095.000	8.240.000	43,70	Penambahan anggaran belanja perjalanan dinas
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	66.886.540	133.446.540	66.560.000	99,51	Pengadaan Pakaian dinas lapangan untuk semua personil DLH dan penambahan biaya kontribusi dan



No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp	persen	
1	2	3	4	5	6	7
						perjalanan dinas Blmtek
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	255.739.600	374.311.200	118.571.600	46,36	Penambahan anggaran biaya perjalanan dinas
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	76.250.000	201.740.000	125.490.000	164,58	Penambahan anggaran untuk belanja meja kerja, kursi kerja, lemari arsip, laptop, PC, printer, AC
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.409.288	158.408.424	(864)	0,00	
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.060.000	211.290.000	120.230.000	132,03	Penambahan anggaran untuk pemeliharaan dan pembangunan loket PPID dan Loket Pelayanan Laboratorium
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	324.576.940	203.846.940	(120.730.000)	(37,20)	
2.1	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	324.576.940	203.846.940	(120.730.000)	(37,20)	Penyusunan Dokumen KLHS RDTR tidak dilaksanakan dikarenakan kegiatan RDTR oleh Dinas PUPR tidak dijalankan
3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	618.975.412	804.305.412	185.330.000	29,94	
3.1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	578.973.550	732.503.550	153.530.000	26,52	Penambahan anggaran untuk biaya jasa pembuatan peta tutupan lahan; biaya analisa laboratorium untuk sampel yang awalnya 44 sampel menjadi 50 sampel dan pembelian box sampel dan botol sampel, belanja bahan kimia, perbaikan alat AAS dan UV-VIS, pengadaan alat laboratorium Peralatan sampling laboratorium; dan penambahan volume koordinasi dan konsultasi
3.2	Pemulihan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lh Kabupaten/Kota	40.001.862	71.801.862	31.800.000	79,50	Penambahan volume konsultasi dan koordinasi
4	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	147.909.060	147.909.060	0	0,00	
4.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	147.909.060	147.909.060	0	0,00	
5	Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	59.854.060	59.854.060	0	0,00	
5.1	Penyimpanan Sementara Limbah B3	59.854.060	59.854.060	0	0,00	



No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp	persen	
1	2	3	4	5	6	7
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	109.303.000	126.208.000	16.905.000	15,47	
6.1	Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	109.303.000	126.208.000	16.905.000	15,47	Penambahan volume konsultasi dan koordinasi, belanja makan dan minum dan belanja alat tulis kantor
7	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	15.290.000	27.095.000	11.805.000	77,21	
7.1	Pengakuan Mha, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	15.290.000	27.095.000	11.805.000	77,21	Penambahan volume konsultasi dan koordinasi
8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	33.543.262	55.683.262	22.140.000	66,00	
8.1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	33.543.262	55.683.262	22.140.000	66,00	Penambahan volume konsultasi dan koordinasi untuk adiwiyata dan proklamasi
9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	10.920.000	18.595.000	7.675.000	70,28	
9.1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	10.920.000	18.595.000	7.675.000	70,28	penambahan anggaran perjalanan dinas dan makan minum rapat serta biaya jasa pemeriksaan laboratorium
10	Program Pengelolaan Persampahan	3.554.615.460	3.969.875.460	415.260.000	11,68	
10.1	Pengelolaan Sampah	3.554.615.460	3.969.875.460	415.260.000	11,68	Penyesuaian harga BBM terbaru dan Penambahan anggaran perbaikan kontainer sebanyak 14 unit
Total Belanja		8.619.315.850	9.531.102.050	911.786.200	10,58	

Sumber : Data Olah DPPA Dinas Lingkungan Hidup TA.2023

2.4.12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Alokasi Belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebelum Perubahan sebesar Rp5.886.971.750,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp6.443.957.850,00 atau bertambah Rp556.986.100,00 atau 9,46 persen. Perubahan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp5.742.682.613,00 sesudah perubahan Rp5.723.818.713,00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp144.289.137,00 dan sesudah perubahan Rp720.139.137,00.



Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.25
Perubahan Anggaran Program/ Kegiatan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil TA.2023

NO	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp	persen	
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	4.488.227.415	4.927.239.515	439.012.100	9,78	
1.1	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.738.463	47.738.463	0	0,00	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.471.162.870	2.269.930.470	(201.232.400)	(8,14)	Penyesuaian anggaran Tunjangan Fungsional PNS dan TPP + Kondisi Kerja Disesuaikan dengan Jumlah ASN
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.386.095	16.386.095	0	0,00	
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	81.818.100	91.818.100	10.000.000	12,22	Penambahan pada kontribusi bimtek
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.025.133.950	1.093.437.250	68.303.300	6,66	Penambahan volume konsultasi dan kordinasi dan Penyesuaian kebutuhan anggaran belanja alat penunjang penerbitan dokumen kependudukan
1.6	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	144.289.137	720.139.137	575.850.000	399,09	Penambahan Anggaran dalam rangka pembelian Camera, Scanner, penambahan anggaran PC untuk perekaman dan pencetakan pembelian Laptop untuk pelayanan mobile, kendaraan dinas roda 4 (Empat) dan DED Pembangunan Gedung Kantor
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	562.648.800	546.240.000	(16.408.800)	(2,92)	Penyesuaian kebutuhan anggaran internet kantor berdasarkan kontrak dengan telkomsel
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	139.050.000	141.550.000	2.500.000	1,80	Penambahan anggaran untuk pembayaran Pengantian plat kendaraan dinas roda Empat dan Roda 2 (dua)
2	Program Pendaftaran Penduduk	435.650.800	458.784.800	23.134.000	5,31	



NO	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp	persen	
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	435.650.800	458.784.800	23.134.000	5,31	Penambahan Anggaran pada pelayanan untuk stelsel aktif perekaman ke sekolah sekolah berjumlah 92 orang termasuk pendamping dan pelatih. Penyesuaian kebutuhan anggaran Tunjangan fotocopy
3	Program Pencatatan Sipil	458.091.635	503.501.635	45.410.000	9,91	
3.1	Pelayanan Pencatatan Sipil	389.821.635	435.231.635	45.410.000	11,65	Penambahan Anggaran dalam rangka pencapaian target Nasional terkait kepemilikan akte kelahiran 0-18 tahun
3.2	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	68.270.000	68.270.000	0	0,00	
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	112.365.000	119.955.000	7.590.000	6,75	
4.1	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan penyajian Database Kependudukan	46.820.000	61000..000	14.180.000	30,29	Penambahan Volume konsultasi dan koordinasi terkait hak akses pemanfaatan data kependudukan
4.2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	65.545.000	58.955.000	(6.590.000)	(10,05)	Penyesuaian kebutuhan anggaran pada Belanja Jasa honorarium narasumber, moderator
5	Program Pengelolaan Propil Kependudukan	392.636.900	434.476.900	41.840.000	10,66	
5.1	Penyusunan Propil Kependudukan	392.636.900	434.476.900	41.840.000	10,66	Penambahan Anggaran dalam rangka aktivasi IKD dan Pemadanan Data Kependudukan
Total Belanja		5.886.971.750	6.443.957.850	556.986.100	9,46	

Sumber : Data Olah DPPA Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil TA.2023

2.4.13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Alokasi Belanja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebelum Perubahan sebesar Rp4.888.595.991,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp5.609.165.991,00 atau bertambah Rp720.570.000,00 atau 14,74 persen. Perubahan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp4.823.689.391,00 sesudah perubahan Rp5.212.422.391,00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp64.906.600,00 dan sesudah perubahan Rp396.743.600,00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada



tabel berikut ini :

Tabel 2.26
Perubahan Anggaran Program Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa TA.2023

No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.416.059.706	3.649.193.601	233.133.895	6,82	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	89.935.650	113.695.650	23.760.000	26,42	Penambahan Anggaran untuk Studi Tiru/Coaching Clinic Perencanaan
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.478.452.656	1.967.895.551	(510.557.105)	(20,60)	disesuaikan dengan pembayaran gaji dan tunjangan Pegawai DPMD
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	16.184.300	16.184.300	0	0,00	
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	74,037,000	141,359,000	67,322,000	90,93	Penambahan anggaran Volumen perjalanan dinas dan bimbingan teknis
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	399333..300	694.685.300	295.352.000	73,96	Penambahan Anggaran Perjalanan Dinas
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	69.706.600	392.543.600	322.837.000	463,14	Penambahan Anggaran untuk belanja Gorden, pengadaan Komputer PC 1 Unit untuk PPID, Meja dan kursi PPID, Notebook Samsung 10 inch, LCD Kantor DPMD, Perencanaan Gedung APDESI dan BPD, Penambahan ruang kantin PKK
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.610.200	161.820.200	19.210.000	13,47	Penambahan anggaran untuk pembayaran Air dan Listrik
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.800.000	161.010.000	15.210.000	10,43	Penambahan anggaran untuk Pemeliharaan Mobil PKK
2	Program Penataan Desa	20.328.060	44.873.160	24.545.100	120,74	
2.1	Penyelenggaraan Penataan Desa	20.328.060	44.873.160	24.545.100	120,74	Penyesuaian kebutuhan anggaran
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	686.181.095	791.552.400	105.371.305	15,36	
3.1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	686.181.095	791.552.400	105.371.305	15,36	Penambahan anggaran untuk BKK
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	766.027.130	1.123.546.830	357.519.700	46,67	
4.1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa	766.027.130	1.123.546.830	357.519.700	46,67	Penambahan alokasi Kegiatan Posyandu/Pokjandal



No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota					di Provinsi, Kegiatan Jambore PKK, BKK stunting dari DPMD Prov. SulSel, pendampingan BKK Stunting
	Total Belanja	4.888.595.991	5.609.165.991	720.570.000	14,74	

Sumber : Data Olah DPPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa TA.2023

2.4.14. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Alokasi Belanja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebelum Perubahan sebesar Rp10.591.563.425,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp10.606.709.882,00, atau bertambah Rp15.146.457,00 atau 0,14 persen. Perubahan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp9.660.248.425,00 sesudah perubahan Rp9.981.194.882,00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp931.315.000,00 dan sesudah perubahan Rp625.515.000,00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada belanja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.27

Perubahan Anggaran Program/Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana TA.2023

No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.064.238.275	3.433.414.732	369.176.457	12,05	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.610.000	56.620.000	8.010.000	16,48	Penambahan Anggaran perjalanan dinas
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.211.718.875	2.353.380.837	141.661.962	6,41	Penambahan Belanja Gaji dan Tunjangan pegawai masuk
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.290.000	16.290.000	0		
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	84.270.000	62.930.000	(21.340.000)	(25,32)	Penyesuaian anggaran
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	447.270.000	505.723.400	158.453.000	35,43	Penambahan volume koordinasi dan konsultasi
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.199.000	110.670.495	4.471.495	4,21	Penambahan Belanja Listrik
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	149.880.000	227.800.000	77.920.000	52,01	Pemeliharaan kendaraan, n perbaikan



No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
						peralatan ,pemeliharaan Gedung kantor untuk biaya pengecatan
2	Program Pengendalian Penduduk	389.353.050	380.848.050	(8.505.000)	(2,19)	
2.1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	74.940.600	66.435.600	(8.505.000)	(11,35)	Penyesuaian anggaran
2.2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	314.412.450	314.412.450	0	0,00	
3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	4.929.143.100	4.639.401.100	(289.742.100)	(5,88)	
3.1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.213.687.000	1.222.410.000	8.723.000	0,72	penambahan anggaran untuk Honor Audit Kasus Stunting
3.2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.493.689.000	1.499.484.000	5.795.000	0,39	Pergeseran anggaran dari sub kegiatan lain
3.3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	1.778.827.100	1.473.027.100	(305.800.000)	(17,19)	penyesuaian Kontrak
3.4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	442.940.000	444.480.000	1.540.000	0,35	
4	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	2.208.829.000	2.153.046.000	(55.783.000)	(2,53)	
4.1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.192.229.000	2.137.446.000	(54.783.000)	(2,50)	menyesuaikan dengan kontrak dan kebutuhan
4.2	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	16.600.000	15.600.000	(1.000.000)	(6,02)	disesuaikan dengan kebutuhan
Total Belanja		10.591.563.425	10.606.709.882	15.146.457	0,14	

Sumber : Data Olah DPPA Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana TA.2023



2.4.15. Dinas Perhubungan

Alokasi Belanja pada Dinas Perhubungan sebelum Perubahan sebesar Rp14.841.980.400,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp15.551.021.700,00 atau bertambah Rp709.041.300,00 atau 4,78 persen. Belanja Operasi sebelum perubahan Rp11.368.080.400,00 sesudah perubahan Rp12.381.771.700,00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp3.473.900.000,00 dan sesudah perubahan Rp3.169.250.000,00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada belanja Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.28
Perubahan Anggaran Program/ Kegiatan Dinas Perhubungan TA.2023

No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.075.644.314	4.180.344.450	104.700.136	2,6	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	82.440.100	85.351.700	2.911.600	3,5	Penambahan anggaran volume koordinasi dan konsultasi
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.061.831.764	3.043.176.225	18.655.539	(0,6)	Pengurangan pada Upah Jasa Tenaga Administrasi yang tidak dibayarkan selama 12 bulan
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.451.200	19.056.200	3.605.000	23,3	Penambahan Honor Pengurus Barang
1.4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	10.522.800	10.585.800	63.000	0,6	
1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	71.043.200	72.872.900	1.829.700	2,6	Penambahan Belanja Kursus Bimtek
1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	470.157.950	579.595.300	109.437.350	23,3	Penambahan Belanja Bahan Bakar dan perjalanan dinas
1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.400.000	63.250.000	19.850.000	45,7	Penambahan Anggaran belanja Gorden
1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.172.300	141.151.325	(4.020.975)	(2,8)	Penyesuaian anggaran pada Upah Jasa Tenaga Administrasi yang tidak dibayarkan selama 6 bulan
1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	175.625.000	165.305.000	(10.320.000)	(5,9)	Pengurangan anggaran pemeliharaan kendaraan dinas
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan	10.127.082.350	10.747.854.850	620.772.500	6,1	



No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	Jalan (LLAJ)					
2.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3.250.519.250	4.389.778.250	1.139.259.000	35,0	Penambahan Pemasangan Marka jalan dan Rambu-Rambu Lalu Lintas, tagihan listrik PJU
2.2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	3.181.720.000	3.052.820.000	(128.900.000)	(4,1)	Pengurangan anggaran sesuai dengan nilai kontrak, dan Penambahan uang makan minum petugas jaga terminal
2.3	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	212.264.000	28.256.400	(184.007.600)	(86,7)	Pengurangan anggaran yang disiapkan untuk Belanja Jasa Petugas Parkir namun tidak dilakukan pengangkatan petugas parkir
2.4	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	155.928.000	335.198.000	179.270.000	115,0	Penambahan anggaran untuk pengadaan kartu uji, Dan perbaikan alat PKB
2.5	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	340.435.000	397.589.500	57.154.500	17,6	Penambahan anggaran perjalanan dinas dan perlengkapan operasional Lapangan
2.6	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.743.117.100	2.321.003.700	(422.113.400)	(15,4)	Pengurangan belanja BBM Bus sekolah
2.7	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	243.099.000	223.209.000	(19.890.000)	(8,2)	Pengurangan anggaran upah jasa yang tidak terbayarkan
3	Program Pengelolaan Pelayaran	639.253.736	622.822.400	(16.431.336)	(2,6)	
3.1	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	239.396.900	241.896.900	2.500.000	1,0	
3.2	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	399.856.836	380.925.500	(18.931.336)	(4,7)	Pengurangan belanja pemeliharaan dermaga



No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	Total Belanja	14.841.980.400	15.551.021.700	709.041.300	4,78	

Sumber : Data Olah DPPA Dinas Perhubungan TA.2023

2.4.16. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Alokasi Belanja pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebelum Perubahan Rp9.774.544.750,00 dan sesudah perubahan menjadi Rp12.550.954.750,00 atau bertambah Rp2.776.410.000,00 atau 28,40 persen. Perubahan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp9.129.893.750,00 sesudah perubahan Rp10.886.822.750,00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp644.651.000,00 dan sesudah perubahan Rp1.664.132.000,00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.29
Perubahan Anggaran Program /Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian TA.2023

No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.931.115.832	4.879.590.515	948.474.683	24,13	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	101.442.705	118.952.705	17.510.000	17,26	penambahan anggaran diperuntukkan untuk belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.633.167.645	2.638.255.328	5.087.683	0,19	penambahan anggaran pada belanja perjalanan dinas luar daerah luar provinsi terkait studi tiru bendahara, PPK SKPD, dan Bendahara barang
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	32.666.800	29.366.800	(3.300.000)	(10,10)	pengurangan anggaran dari belanja hardisk
1.4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	51.970.000	85.060.000	33.090.000	63,67	penambahan anggaran diperuntukkan untuk belanja perjalanan dinas
1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	79.804.682	164.144.682	84.340.000	105,68	penambahan anggaran diperuntukkan untuk belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan belanja biaya kontribusi
1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	300.443.000	433.589.000	133.146.000	44,32	Penambahan anggaran untuk belanja alat listrik kantor (lampu selang), cetak banner dan belanja



No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
						perjalanann dinas
1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	366.311.000	998.792.000	632.481.000	172,66	penambahan anggaran untuk belanja pengadaan kendaraan dinas roda empat (mobi), belanja mebel (kursi pejabat kantor), belanja peralatan studio audio dan belanja modal peralatan studio video dan film) dan alat kantor lainnya (gorden)
1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	291.300.000	309.420.000	18.120.000	6,22	penambahan anggaran untuk belanja perjalanann dinas dan belanja tagihan air
1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.010.000	102.010.000	28.000.000	37,83	penambahan anggaran untuk branding mobil dinas roda empat, pemeliharaan bangunan gedung kantor (interior kantor)
2	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	2.752.777.120	3.051.557.120	298.780.000	10,85	
2.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.752.777.120	3.051.557.120	298.780.000	10,85	penambahan anggaran untuk belanja perjalanann dinas penguatan kapasitas PPID dan studi wawasan media partner,
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.698.343.483	4.049.773.800	1.351.430.317	50,08	
3.1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.247.802.683	2.536.711.000	288.908.317	12,85	penambahan anggaran untuk belanja kawat faksimili/internet (layanan bandwidth backup dan pengadaan peralatan jaringan, alat rumah tangga dan belanja modal jaringan telkom)
3.2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	450.540.800	1.513.062.800	1.062.522.000	235,83	penambahan anggaran untuk belanja jasa tenaga informasi dan teknologi (untuk 13 aplikasi) dan coaching clinic aplikasi srikandi
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	355.129.315	532.854.315	177.725.000	50,05	
4.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	355.129.315	532.854.315	177.725.000	50,05	penambahan anggaran untuk kegiatan coaching clinic standarisasi pengumpulan dan pengolahan metadata statistik sektoral
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	37.179.000	37.179.000	0	0,00	
5.1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	37.179.000	37.179.000	0	0,00	
Total Belanja		9.774.544.750	12.550.954.750	2.776.410.000	28,40	



No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7

Sumber : Data Olah DPPA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian TA.2023

2.4.17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Alokasi Belanja pada Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebelum Perubahan sebesar Rp4.721.588.125,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp4.756.588.125,00 atau bertambah Rp35.000.000.00 atau 0,74 persen. Perubahan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp4.713.388.125,00 sesudah perubahan Rp4.623.588.125,00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp8.200.000,00 dan sesudah perubahan Rp133.000.000,00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada belanja Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 pada tabel berikut ini :

Tabel 2.30
Perubahan Program/ Kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu TA.2023

No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.488.787.495	3.586.287.495	97.500.000	2,79	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74.204.265	92.584.265	18.380.000	24,77	Penambahan anggaran untuk Koordinasi SAKIP dan Pendampingan evaluasi
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.774.052.601	2.565.854.603	(208.197.998)	(7,51)	Penyesuaian belanja gaji dan tunjangan kekosongan Jabatan Fungsional (pensun) dan Sekretaris Dinas
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.421.981	16.421.981	0	0,00	
1.4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	10.623.710	0	(10.623.710)	(100)	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran Karena PAD (IMB) dipindahkan ke Dinas PUPR, sehingga kegiatan ini dihapuskan
1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	81.910.000	93.510.000	11.600.000	14,16	Penambahan Anggaran untuk belanja kontribusi Bimtek SAKIP



No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
						dan Pendampingan Kepegawaian.
1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	298.351.700	458.512.700	160.161.000	53,68	Penambahan Anggaran untuk belanja Konsultasi dan perjalanan Dinas
1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	83.000.000	83.000.000		Penambahan Anggaran untuk Pengadaan Lemari, Mesin babat, laptop dan print PPID, Pengadaan Mesin Antrian Perizinan dan scanner
1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156.310.438	149.491.146	(6.819.292)	(4,36)	Penyesuaian kebutuhan Anggaran bulan Juni - desember untuk beban jasa Listrik
1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.912.800	126.912.800	50.000.000	65,01	Penambahan anggaran untuk Pengadaan DED Mall Pelayanan Publik
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	284.194.290	161.694.290	(122.500.000)	(43,10)	
2.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	284.194.290	161.694.290	(122.500.000)	(43,10)	Penyesuaian kebutuhan Anggaran untuk belanja jasa Tenaga Ahli Pengadaan MPP
3	Program Promosi Penanaman Modal	155.998.490	180.998.490	25.000.000	16,03	
3.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	155.998.490	180.998.490	25.000.000	16,03	Penambahan Anggaran untuk Perjalanan Dinas
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	298.108.350	333.108.350	35.000.000	11,74	
4.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	298.108.350	333.108.350	35.000.000	11,74	Penambahan Anggaran belanja Perjalanan Dinas untuk pendampingan PERDA Aspirasi Dewan
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	469.500.000	469.500.000	0	0,00	
5.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi	469.500.000	469.500.000	0	0,00	



No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
6	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	24.999.500	24.999.500	0	0,00	
6.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.999.500	24.999.500	0	0,00	
Total Belanja		4.721.588.125	4.756.588.125	35.000.000	0,74	

Sumber : Data Olah DPPA Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu TA.2023

2.4.18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Alokasi Belanja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebelum Perubahan sebesar Rp5.353.839.325,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp6.214.629.325,00 atau bertambah Rp860.790.000,00 atau 16,08 persen. Perubahan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp5.094.679.325,00 sesudah perubahan Rp5.541.289.325,00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp259.160.000,00 dan sesudah perubahan Rp673.340.000,00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada belanja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.31
Perubahan Anggaran Program/Kegiatan
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan TA.2023

No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	5.070.888.325	5.926.248.325	855.360.000	16,86	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.520.731.825	5.163.471.825	642.740.000	14,22	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	104.645.727	173.526.381	68.880.654	65,82	Penambahan anggaran pada belanja perjalanan dinas dan bahan cetak
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.443.686.398	3.339.351.423	(104.334.975)	(3,03)	Anggaran berkurang pada tunjangan keluarga ASN , belanja tunjangan jabatan ASN, dan belanja tunjangan khusus PNS
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	20.238.200	22.238.200	2.000.000	9,88	Penambahan anggaran pada belanja perjalanan dinas biasa



No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55.240.000	75.544.500	20.304.500	36,76	Penambahan anggaran pada belanja bimbingan teknis, dan belanja perjalanan dinas biasa
1.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	258.298.500	444.011.732	185.713.232	71,90	Penambahan anggaran pada belanja bahan bakar dan pelumas, belanja jasa tenaga kebersihan, surat kabar dan belanja perjalanan dinas
1.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	176.210.000	676.390.000	500.180.000	283,85	Penambahan anggaran pada belanja modal antara lain alat rumah tangga lainnya, alat studio, belanja modal bangunan parkir.
1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	340.553.000	307.549.589	(33.003.411)	(9,69)	penyesuaian belanja tagihan iair, belanja tagihan listrik dan belanja penambahan daya
1.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.860.000	124.860.000	3.000.000	2,46	Penyesuaian kebutuhan pemeliharaan alat kantor-alat pendingin
2	Program Pembinaan Perpustakaan	550.156.500	762.776.500	212.620.000	38,65	
2.1	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	332.142.000	460.114.500	127.972.500	38,53	Penambahan anggaran pada belanja makanan dan minuman rapat, honorarium, belanja sewa alat angkutan darat bermotor lainnya,
2.2	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	218.014.500	302.662.000	84.647.500	38,83	Penambahan anggaran pada belanja alat tulis kantor, belanja perjalanan dinas biasa dan belanja hadiah yang bersifat perlombaan, belanja makan dan minum r
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	282.951.000	288.381.000	5.430.000	1,92	
3	Program Pengelolaan Arsip	230.190.000	235.620.000	5.430.000	2,36	
3.1	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	76.000.000	81.430.000	5.430.000	7,14	Penambahan anggaran pada belanja Alat Tulis Kantor dan perjalanan dinas



No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.2	Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	12.000.000	12.000.000	0	0,00	
3.3	Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	142.190.000	142.190.000	0	0,00	
4	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	40.521.000	40.521.000	0	0,00	
4.1	Kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	40.521.000	40.521.000	0	0,00	
5	Program Perizinan Penggunaan Arsip	12.240.000	12.240.000	0	0,00	
5.1	Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	12.240.000	12.240.000	0	0,00	
Total Belanja		5.353.839.325	6.214.629.325,00	860.790.000	16,07	

Sumber : Data Olah DPPA Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan TA.2023

2.4.19. Dinas Perikanan

Alokasi Belanja pada Dinas Perikanan sebelum Perubahan Rp14.031.942.200,00 dan sesudah perubahan menjadi Rp23.899.838.200,00 atau bertambah Rp9.867.896.000,00 atau 70,32 persen. Perubahan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp12.301.942.200,00 sesudah perubahan Rp21.660.608.200,00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp1.730.000.000,00 dan sesudah perubahan Rp2.239.230.000,00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada belanja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.32
Perubahan Anggaran Program / Kegiatan Dinas Perikanan TA.2023

No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.960.017.690	5.562.757.690	602.740.000	12,15	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	79.459.500	109.199.500	29.740.000	37,43	Penambahan anggaran perjalanan Dinas
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.117.847.290	3.111.387.990	(6.459.300)	(0,21)	Penyesuaian kebutuhan anggaran gaji dan tunjangan



No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	32.998.000	41.998.000	9.000.000	27,27	Penambahan anggaran untuk biaya lelang
1.4	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	13.209.000	13.203.900	(5.100)	(0,04)	penyesuaian yang dibelanjakan dalam proses e-katalog
1.5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	106.782.000	153.342.000	46.560.000	43,60	Penambahan anggaran untuk biaya perjalanan Bimtek Teknis
1.6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	733.161.900	816.954.300	83.792.400	11,43	Penambahan anggaran untuk biaya perjalanan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.000.000	517.500.000	512.500.000	10.250,00	Penambahan anggaran untuk pengadaan 1 unit Kendaraan Dinas Roda Empat
1.8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250.700.000	254.000.000	3.300.000	1,32	rekening Air dan Listrik serta biaya Honorarium pejabat pengadaan Barang/Jasa
1.9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	620.860.000	545.172.000	(75.688.000)	(12,19)	penyesuaian yang dibelanjakan dalam proses e-katalog
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	4.382.510.000	9.092.610.000	4.710.100.000	107,47	
2.1	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan	4.134.604.630	8.873.704.630	4.739.100.000	114,62	mengurangi dampak inflasi dengan memberikan bantuan ke masyarakat berupa sarana dan prasarana alat tangkap bagi nelayan
2.2	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	187.905.370	158.905.370	(29.000.000)	(15,43)	penyesuaian anggaran honorarium upah jasa yang mengundurkan diri
2.3	Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	60.000.000	60.000.000	0	0,00	
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.684.592.530	8.189.648.530	4.505.056.000	122,27	
3.1	Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	389.950.640	424.780.640	34.830.000	8,93	biaya pelatihan pengembangan Kapasitas bagi masyarakat pembudidaya ikan



No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.2	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.294.641.890	7.764.867.890	4.470.226.000	135,68	mengurangi dampak inflasi dengan memberikan bantuan ke masyarakat berupa Benih unggul serta sarana dan penunjangnya
4	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	78,407,500.00	78,407,500.00	0	0,00	
4.1	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	78,407,500.00	78,407,500.00	0	0,00	
5	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	926,414,480.00	976,414,480.00	50,000,000.00	5,40	
5.1	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	264,879,480.00	264,879,480.00	-	0,00	
5.2	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	137,295,000.00	137,295,000.00	-	0,00	
5.3	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	524,240,000.00	574,240,000.00	50,000,000.00	9,54	mengurangi dampak inflasi dengan memberikan bantuan ke masyarakat berupa sarana dan prasarana alat pengolahan ikan
JUMLAH BELANJA		14.031.942.200	23.899.838.200	9.867.896.000	70,32	

Sumber : Data Olah DPPA Dinas Perikanan TA.2023

2.4.20. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Alokasi Belanja pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur sebelum Perubahan sebesar Rp15.421.477.425,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp23.716.757.458,00 atau bertambah Rp8.295.280.033,00 atau 53,79 persen. Perubahan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp9.384.517.425,00 sesudah perubahan Rp11.095.530.850,00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp6.036.960.000,00 dan sesudah perubahan Rp12.621.226.608,00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Dinas Pariwisata,



Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.33
Perubahan Anggaran/Kegiatan
Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga TA.2023

No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	12.697.314.214	20.064.978.458	7.367.664.244	58.03	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,916,074,214	3,979,252,850	63,178,636	1.61	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61,473,900	99,683,900	38,210,000	62.16	Penambahan Anggaran untuk perjalanan dinas (Kegiatan Coaching Clinic)
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,019,066,723	2,584,004,850	(435,061,873)	(14.41)	pengurangan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan Pegawai Dinas Pamudora
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	20,894,145	24,493,900	3,599,755	17.23	Penambahan anggaran untuk kekurangan honorarium pengurus barang
1.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	120,707,819	184,392,700	63,684,881	52.76	Penambahan Anggaran untuk Perjalanan Dinas untuk persiapan Coaching Clinic dan Kontribusi dan Biaya perjalanan dinas Kegiatan BIMTEK
1.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	388,292,627	695,668,500	307,375,873	79.16	Penambahan anggaran untuk pengadaan 3 unit laptop, 1 unit tangga, Bahan Bakar minyak dan alat kantor lainnya dan perjalanan dinas Rakor
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	234,324,000	294,694,000	60,370,000	25.76	Penambahan anggaran untuk tagihan air dan listrik
1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71,315,000	96,315,000	25,000,000	35.06	Penambahan anggaran untuk Pergantian suku cadang kendaraan roda empat,



No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	3,666,836,000	3,992,185,000	325,349,000	8.87	
2.1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	3,549,212,000	3,924,561,000	375,349,000	10.58	Penambahan Anggaran untuk kegiatan pelatihan/bimtek dan perayaan
2.2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	117,624,000	67,624,000	(50,000,000)	(42.51)	Penyesuaian realisasi
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	4,864,404,000	11,843,540,608	6,979,136,608	43.47	
3.1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2,285,000,000	8,873,326,608	6,588,326,608	288.33	- Penambahan anggaran untuk : pembayaran utang kepada pihak ketiga (Lanjutan Pembangunan Stadion), uji kelayakan pembangunan tribun, Pemeliharaan tanah lapangan olahraga, belanja modal alat bantu lainnya, dan belanja modal peralatan olahraga lainnya
3.2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,379,611,000	1,765,421,000	385,810,000	27.97	Penambahan anggaran untuk kegiatan Porkab, pencak silat dan liga pelajar
3.3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	12,500,000	12,500,000	0	0.00	
3.4	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	921,710,000	921,710,000	0	0.00	
3.5	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	265,583,000	270,583,000	5,000,000	1.88	
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	250,000,000	250,000,000	0	0.00	



No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.1	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	250,000,000	250,000,000	0	0.00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	2.724.163.211	3.651.779.000	927.615.789	34.05	
5	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1,324,819,211	2,167,439,000	842,619,789	63.60	
5.1	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	266,859,211	744,479,000	477,619,789	178.98	Penambahan Anggaran untuk kegiatan FGD Geopark Matano dan Pengadaan Bahan Promosi Geopark Matano
5.2	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1,057,960,000	1,422,960,000	365,000,000	34.50	Penambahan Anggaran untuk Penataan Objek Wisata
6	Program Pemasaran Pariwisata	461,418,000	546,444,000	85,026,000	18.43	
6.1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	461,418,000	546,444,000	85,026,000	18.43	Penambahan Anggaran untuk Kegiatan Promosi Pariwisata dan kegiatan pemasaran
7	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	937,926,000	937,896,000	(30,000)	0.00	
7.1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	888,226,000	888,211,000	(15,000)	0.00	Penyesuaian Anggaran
7.2	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	49,700,000	49,685,000	(15,000)	(0.03)	
Total Belanja		15,421,477,425	23,716,757,458	8,295,280,033	53.79	

Sumber : Data Olah DPPA Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga TA.2023

2.4.21. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Alokasi Belanja pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebelum Perubahan sebesar Rp46,488,783,600,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp58.188.323.351,00 atau bertambah Rp11.699.539.751,00 atau 25,17 persen. Perubahan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp45.756.369.600,00 sesudah perubahan Rp56.787.004.351,00. Belanja Modal sebelum perubahan Rp732.414.000,00



dan sesudah perubahan Rp1.401.319.000,00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada belanja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.34
Perubahan Anggaran Program /Kegiatan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan TA.2023

NO	Program/Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	428,000,000	378,000,000	(50,000,000.00)	(11.68)	
1.1	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	428,000,000	378,000,000	(50,000,000.00)	(11.68)	Untuk efisiensi anggaran
2	Program Peningkatan Diserifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	450,695,900	450,552,400	(143,500.00)	(0.03)	
2.1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	223,834,800	224,044,800	210,000.00	0.09	
2.2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	77,084,600	75,531,100	(1,553,500.00)	(2.02)	
2.3	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	149,776,500	150,976,500	1,200,000.00	0.80	Penambahan anggaran untuk kegiatan PKK yang melekat pada kegiatan bidang ketahanan pangan
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	24,180,000	24,180,000	0	0,00	
3.1	Penanganan Kerawanan pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	24,180,000	24,180,000	0	0,00	
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	41,822,400	41,822,400	0	0,00	
4.1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	41,822,400	41,822,400	0	0,00	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25,503,016,674	26,454,787,146	951,770,472.00	3.73	
5.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	239.598.800	244.695.800	5.097.000	2.13	Penambahan anggaran yang digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan (penginputan Epmis)
5.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.510.104.174	22.469.871.646	(40.232.528)	(0,18)	Anggaran berkurang dan dialihkan pada kegiatan rapat-rapat koordinasi



NO	Program/Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	283.523.000	154.798.000	(128.725.000)	(45,40)	Anggaran berkurang dan dialihkan pada kegiatan rapat-rapat koordinasi
5.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	812,191,200	1,021,960,200	209,769,000.00	25,83	Penambahan anggaran untuk kegiatan rapat-rapat koordinasi yang mana kegiatannya sudah dilaksanakan lebih awal,
5.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	601.414.000	1.401.319.000	799.905.000	133,00	Penambahan anggaran untuk pengadaan meja PPID, Pembangunan pagar horti dan pembelian keperluan operasional BPP (Komputer pada 11 BPP di kecamatan)
5.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	286.620.500	290.508.500	3.888.000	1,36	Penambahan anggaran untuk pembayaran pemakaian air yang digunakan pada 2 kantor
5.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	769.565.000	871.634.000	102.069.000	13,26	Penambahan anggaran yang diperuntukan untuk rehab papan nama kantor
6	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	7,989,488,000	11,618,074,600	3,628,586,600.00	45.42	
6.1	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	2,629,835,800	5,803,246,400	3,173,410,600.00	120.67	Penambahan anggaran untuk pengadaan jenis alsintan (handspreyer 210 unit, Mitsblower 50 unit, handtraktor 7 unit) dan pendampingan pada 4 bidang pelaksana
6.2	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (Sdg) Hewan, Tumbuhan, Dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	2,994,105,200	3,049,381,200	55,276,000.00	1.85	Penambahan anggaran untuk kegiatan pendampingan
6.3	Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	2,365,547,000	2,765,447,000	399,900,000.00	16.91	Penambahan anggaran untuk pengadaan kambing dan unggas (Nak)
7	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana	6,616,430,626	11,648,677,526	5,032,246,900.00	76.06	



NO	Program/Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	Pertanian					
7.1	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	6,616,430,626	11,648,677,526	5,032,246,900.00	76.06	Penambahan anggaran untuk kegiatan fisik (Jides) dan kegiatan fisik (jalan usaha tani dan jalan produksi)
8	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	396,224,000	411,224,000	15,000,000.00	3.79	
8.1	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	334,374,000	349,374,000	15,000,000.00	4.49	Penambahan anggaran untuk pengadaan pembelian obat-obatan (Zoonosis AFS)
8.2	Kegiatan Penerapan Dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	61,850,000	61,850,000	-	0,00	
9	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	699,706,000	694,326,000	(5,380,000.00)	(0.77)	
9.1	Kegiatan Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	699,706,000	694,326,000	(5,380,000.00)	(0.77)	Anggaran persediaan
10	Program Penyuluhan Pertanian	4,339,220,000	6,466,679,279	2,127,459,279.00	49.03	
10.1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	4,339,220,000	6,466,679,279	2,127,459,279.00	49.03	Penambahan anggaran untuk tenaga penyuluh yang terangkat P3K (BOP), dan kegiatan Readsdi
Total Belanja		46,488,783,600	58,188,323,351	11,699,539,751.00	25.17	

Sumber : Data Olah DPPA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan TA.2023

2.4.22. Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian

Alokasi Belanja pada Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian sebelum Perubahan sebesar Rp8.724.002.750,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp9.777.173.750,00 atau bertambah Rp1.053.171.000,00 atau 12,07 persen. Perubahan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp7.056.802.750,00 sesudah perubahan Rp7.785.673.750,00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp1.667.200.000,00 dan sesudah perubahan Rp1.991.500.000,00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 2.35
Perubahan Anggaran Program/Kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian TA.2023

No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.419.839.431	4.435.979.431	16.140.000	0,36	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.927.000	84.125.200	(1.801.800)	(2,10)	Pergeseran Anggaran untuk kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.400.359.350	3.174.205.389	(226.153.961)	(7,12)	Anggaran disiapkan untuk 28 orang pegawai tapi terjadi mutasi sehingga hanya 27 orang sehingga terjadi kelebihan anggaran
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19.045.000	19.045.000	0	0,00	
1.4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	5.764.000	5.764.000	0	0,00	
1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99.956.000	120.756.000	20.800.000	20,81	Penambahan anggaran Kegiatan Bimbingan teknis
1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	464.355.031	572.657.831	108.302.800	23,32	Penambahan Anggaran karena Banyak Undangan untuk menghadiri kegiatan diluar daerah
1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	82.200.000	216.500.000	134.300.000	163,38	Penambahan Untuk Pengadaan Meja PPID, papan nama kantor.
1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.563.050	126.976.011	(18.587.039)	(12,77)	pengurangan Pembayaran Rekening listrik di yang di Desa Pekaloa Kec. Towuti
1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.670.000	115.950.000	(720.000)	(0,62)	
2	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	122.068.300	123.588.300	1.520.000	1,25	
2.1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	122.068.300	123.588.300	1.520.000	1,25	Penambahan anggaran Biaya Perjalanan dalam daerah untuk pengawasan koperasi.



No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	75.405.760	75.405.760	0	0,00	
3.1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	75.405.760	75.405.760	0	0,00	
4	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	75.526.000	75.526.000	0	0,00	
4.1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	75.526.000	75.526.000	0	0,00	
5	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	34.175.820	34.175.820	0	0,00	
5.1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	34.175.820	34.175.820	0	0,00	
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	504.195.740	693.525.740	189.330.000	37,55	
6.1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	504.195.740	693.525.740	189.330.000	37,55	Penambahan Anggaran yang bersumber dari Dana BKK Provinsi Sul-Sel yang dikerjasamakan dengan TP PKK Kabupaten
7	Program Pengembangan UMKM	142.325.000	224.825.000	82.500.000	57,97	
7.1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	142.325.000	224.825.000	82.500.000	57,97	Penambahan Anggaran untuk kegiatan expo dan pengembangan UMKM
8	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.872.600.200	2.167.740.200	295.140.000	15,76	
8.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.816.885.800	2.112.025.800	295.140.000	16,24	penambahan anggaran pekerjaan fisik pasar atas usulan pokok-pokok pikiran DPRD
8.2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	55.714.400	55.714.400	0	0,00	
9	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	362.823.156	382.823.156	20.000.000	5,51	



No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
9.1	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	335.933.600	335.933.600	0	0,00	
9.2	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	26.889.556	46.889.556	20.000.000	74,38	Penambahan anggaran untuk Lebih Intens Melakukan pemantauan dilapangan bersama Kejaksaan, Kepolisian dan Dinas Terkait
10	Program Pengembangan Ekspor	224.966.443	357.157.443	132.191.000	58,76	
10.1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	224.966.443	357.157.443	132.191.000	58,76	Penambahan anggaran Untuk mendukung Pelaksanaan Kegiatan Dekranasda Kab. Luwu Timur
11	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	157.336.100	157.336.100	0	0,00	
11.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	157.336.100	157.336.100	0	0,00	
12	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	658.085.800	974.435.800	316.350.000	48,07	
12.1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	658.085.800	974.435.800	316.350.000	48,07	Penambahan anggaran Sesuai Juknis Dari Provinsi Dana BKK Kegiatan Pelatihan dan Pameran dibebankan Pada Dinas Kabupaten/Kota
13	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	74.655.000	74.655.000	0	0,00	
13.1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	74.655.000	74.655.000	0	0,00	
Jumlah Belanja		8.724.002.750	9.777.173.750	1.053.171.000	12,07	
Sumber : Data Olah DPPA Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian TA.2023						

2.4.23. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Alokasi Belanja pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebelum Perubahan sebesar Rp6.340.934.200,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp7.138.404.200,00 atau



bertambah Rp797.470.000,00 atau 12,58 persen. Perubahan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp6.720.074.200,00 sesudah perubahan Rp6.720.074.200,00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp66.260.000,00 dan sesudah perubahan Rp418.330.000,00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.36
Perubahan Anggaran Program / Kegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja TA.2023

No	Program/Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5.840.559.696	6.287.299.696	446.740.000	7,65	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.947.098.041	4.157.750.041	210.652.000	5,34	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	87.372.295	125.412.295	38.040.000	43,54	Penambahan Anggaran Perjalanan Dinas untuk Studi Tiru Perencana terkait SAKIP dan SPIP
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.199.265.192	2.934.723.392	(264.541.800)	(8,27)	Penyesuaian anggaran Gaji. Tunjangan Fungsional
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.331.010	15.331.010	0	0,00	
1.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	63.857.460	88.107.460	24.250.000	37,98	Penambahan Anggaran Bimtek. Pada anggaran pokok 8 orang menjadi 12 orang pada anggaran perubahan
1.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	278.279.400	484.153.200	205.873.800	73,98	Penambahan Biaya makan minum tamu dan Perjalanan Dinas
1.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	66.260.000	198.310.000	132.050.000	199,29	Penambahan Anggaran pada Meja Rapat 1 paket serta Kursi Rapat 42 unit, Laptop 2 unit, PC 2 unit, Mic Rapat 1 Paket, LCD 1 unit, serta 1 unit mesin babat rumput.
1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.596.684	165.576.684	22.980.000	16,12	Penambahan Anggaran Perjalanan dinas dan penyesuaian belanja pada



No	Program/Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang		Keterangan
				Rp	%	
						Rekening Listrik
1.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.136.000	146.136.000	52.000.000	55,24	Penambahan anggaran untuk Pemeliharaan dan Rehab Aula kantor Dinas
2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.099.266.255	1.318.276.255	219.010.000	19,92	
2.1	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.099.266.255	1.318.276.255	219.010.000	19,92	Penambahan Anggaran Peserta Pelatihan Kompetensi K3 SIO sebanyak 40 orang
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	304.393.900	304.393.900	0	0,00	
3.1	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	218.420.800	218.420.800	0	0,00	
3.2	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	47.977.100	47.977.100	0	0,00	
3.3	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	37.996.000	37.996.000	0	0,00	
4	Program Hubungan Industrial	489.801.500	506.879.500	17.078.000	3,49	
4.1	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	110.578.300	118.316.300	7.738.000	7,00	Penambahan Anggaran Perjalanan Dinas
4.2	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	379.223.200	388.563.200	9.340.000	2,46	Penambahan Volume Konsultasi dan Penyesuaian anggaran Alat Tulis Kantor
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	500.374.504	851.104.504	350.730.000	70,09	
5	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	52.478.270	97.648.270	45.170.000	86,07	
5.1	Kegiatan Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi	52.478.270	97.648.270	45.170.000	86,07	Penambahan Anggaran untuk Pengadaan dan Pemasangan Patok Batas lahan Transmigrasi dan Pengukuran pada Lahan Transmigrasi



No	Program/Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang		Keterangan
				Rp	%	
6	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	242.731.850	348.291.850	105.560.000	43,49	
6.1	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	242.731.850	348.291.850	105.560.000	43,49	Penambahan Anggaran Perjalanan Dinas untuk Koordinasi terkait MoU Penempatan warga Transmigrasi, Fasilitas Pembangunan RTJK, seleksi warga transmigran lokal dan makan minum
7	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	205.164.384	405.164.384	200.000.000	97,48	
7.1	Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	205.164.384	405.164.384	200.000.000	97,48	Penambahan Anggaran terkait fasilitas dan pendampingan Dana TP dari Kementerian dan Pembangunan Parit Keliling Batas Lahan Transmigrasi sebanyak 2 Paket
Total Belanja		6.340.934.200	7.138.404.200	797.470.000	12,58	

Sumber : Data Olah DPPA Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja TA.2023

2.4.24. Sekretariat Daerah

Alokasi Belanja pada Sekretariat Daerah sebelum Perubahan sebesar Rp65.415.826.750,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp84.909.694.397,00 atau bertambah Rp19.493.867.647,00 atau 29,80 persen. Perubahan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp60.675.326.750,00 sesudah perubahan Rp77.677.914.289,00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp4.740.500.000,00 dan sesudah perubahan Rp7.231.780.108,00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 2.37

Perubahan Anggaran Program / Kegiatan Sekretariat Daerah TA.2023

NO	Program/Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	32,608,076,350.00	32,481,262,197.00	126,814,153.00	0.39	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	166,738,600.00	196,508,600.00	(29,770,000.00)	(17.85)	Penambahan Biaya Perjalanan Dinas Untuk Kegiatan Coaching Panganggaran
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13,842,398,892.00	10,717,425,320.00	3,124,973,572.00	22.58	Penyesuaian Gaji dan TPP pada Jabatan Struktural dan Fungsional yang kosong
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	108,533,200.00	126,433,200.00	(17,900,000.00)	(16.49)	Penambahan Biaya Perjalanan Dinas
1.4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	20,000,000.00	35,040,000.00	(15,040,000.00)	(75.20)	Penambahan Biaya Perjalanan Dinas
1.5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	167,571,585.00	185,571,585.00	(18,000,000.00)	(10.74)	Penambahan Biaya Kontribusi Kegiatan Bimtek
1.6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,912,812,605.00	3,471,198,065.00	(558,385,460.00)	(19.17)	Penambahan Pengadaan Karpas Ruang Bupati,, Wakil Bupati dan Sekda dan Pemanfaatan Biaya



NO	Program/Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Perjalanan Dinas
1.7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4,645,000,000.00	6,173,672,646.00	(1,528,672,646.00)	(32.91)	Penambahan Pengadaan Kendaraan Dinas SEKDA, Pengadaan AC Ruang Staf Ahli, Ruangan Staf Bupati, dan Rujab Bupati, Belanja Video Wall di Aula Sasana Praja.
1.8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,531,058,684.00	1,523,458,684.00	7,600,000.00	0.50	Pengurangan Belanja Telepon
1.9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,160,835,395.00	3,569,642,462.00	(1,408,807,067.00)	(65.20)	Penambahan DPAL Belanja Rehab Gedung Kantor, Pengawasan Rehab Gedung kantor, Pemeliharaan Rujab Bupati, Wakil Bupati, Pos Jaga Rujab KDH, Rujab WKDH dan Rujab Sekda.
1.10	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3,338,447,113.00	2,912,183,213.00	426,263,900.00	12.77	Penyesuaian Gaji, BOP KDH/WKDH dan Belanja Bimtek, Perjalanan Dinas Luar Negeri



NO	Program/Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
						KDH/WKDH
1.11	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	1,764,942,000.00	1,415,742,000.00	349,200,000.00	19.79	Penyesuaian Belanja Rumah Tangga WKDH
1.12	Kegiatan Penataan Organisasi	1,117,363,300.00	1,117,363,300.00	0.00	0.00	
1.13	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	832,374,976.00	1,037,023,122.00	(204,648,146.00)	(24.59)	Penambahan Biaya Pengawasan Pimpinan dan Penambahan Biaya Perjalanan Dinas
2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	31,072,690,747.00	50,048,357,547.00	(18,975,666,800.00)	(61.07)	
2.1	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	500,489,100.00	447,379,100.00	53,110,000.00	10.61	Penyesuaian Belanja Makan Minum Kegiatan dan Perjalanan Dinas
2.2	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	29,777,541,747.00	48,557,432,547.00	(18,779,890,800.00)	(63.07)	Penambahan Anggaran Belanja Beasiswa Beprestasi, Kegiatan Pekaraji dan Bantuan untuk Rumah Ibadah dan Lembaga Keagamaan
2.3	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	707,998,000.00	964,204,000.00	(256,206,000.00)	(36.19)	Penambahan Biaya Jasa Pendampingan Hukum dan Biaya Perjalanan Dinas



NO	Program/Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.4	Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah	86,661,900.00	79,341,900.00	7,320,000.00	8.45	Penyesuaian Belanja Makan dan Minum
3	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1,735,059,653.00	2,380,074,653.00	(645,015,000.00)	(37.18)	
3.1	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	421,186,806.00	678,571,806.00	(257,385,000.00)	(61.11)	Penambahan Belanja Konsultasi Penyusunan Rencana kerja BUMD, Biaya Seleksi Direksi dan Komisaris BUMD, Biaya Publikasi dan Belanja Perjalanan Dinas
3.2	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	112,163,162.00	122,663,162.00	(10,500,000.00)	(9.36)	Penambahan Biaya Perjalanan Dinas
3.3	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1,126,618,610.00	1,473,258,610.00	(346,640,000.00)	(30.77)	Penambahan Pelatihan Kompetensi PBJP Untuk PPK dan Biaya Perjalanan Dinas
3.4	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber daya alam	75,091,075.00	105,581,075.00	(30,490,000.00)	(40.60)	Penambahan Biaya Perjalanan Dinas
Total Belanja		65.415.826.750	84.909.694.397	19.493.867.647	29,80	
Sumber : Data Olah DPPA Sekretariat Daerah TA.2023						



2.4.25. Sekretariat DPRD

Alokasi Belanja pada Sekretariat DPRD sebelum Perubahan sebesar Rp38.781.897.559,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp44.813.897.559,00 atau bertambah Rp6.032.000.000,00 atau 15,55 persen. Perubahan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp34.135.897.559,00 sesudah perubahan Rp38.740.397.559,00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp4.646.000.000,00 dan sesudah perubahan Rp6.073.500.000,00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 2.38
Perubahan Anggaran Program / Kegiatan Sekretariat DPRD TA.2023

NO	Program/Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang		Keterangan
				Rp	%	
1	2	4	5	6	7	8
1	Program Penunjang Urusanpemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27.417.860.689	28.609.615.323	1.191.754.634	4,35	
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.465.700	65.236.700	4.771.000	7,89	bertambah pada belanja alat tulis kantor dan penggandaan
1.2	Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah	2.448.046.817	2.705.210.873	257.164.056	10,50	Bertambah Pada Gaji Tunjangan Jabatan, Belanja alat tulis kantor dan penggandaan.
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	22.154.100	23.315.100	1.161.000	5,24	Penyesuaian anggaran
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	581.689.550	520.089.550	(61.600.000)	(10,59)	Berkurang pada belanja perjadi dan belanja kursus atau bimtek



NO	Program/Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang		Keterangan
				Rp	%	
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.190.202.500	1.648.227.300	458.024.800	38,48	belanja balon lampu & alat listrik lainnya pada kantor , 3 rujab pimpinan, Mesjid dan Gudang kantor DPRD.
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.586.000.000	5.915.700.000	1.329.700.000	28,99	Bertambah untuk Pengadaan Kendaraan Dinas Sekwan 1 unit dan 3 Unit motor, meja ruang paripurna 4 unit,meja oval rujab waka II, Pembangunan Mushollah Sofa ruang dan belanja alat rumah tangga lainnya
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	868.487.800	1.006.705.800	138.218.000	15,91	Bertambah Pada Belanja Kertas dan Cover/Dos Arsip. Belanja Listrik Gedung kantor, Di rujab dan Mesjid.
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	587.200.000	1.084.800.000	497.600.000	84,74	Bertambah pasa belanja suku cadang kendraan dinas dan pemeliharaan Rujab Ketua DPRD , waka I dan waka II.



NO	Program/Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang		Keterangan
				Rp	%	
1.9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	15.688.114.222	14.266.980.000	(1.421.134.222)	(9,06)	Berkurang pada rincian belanja Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi dan tunjangan komunikasi intensif
1.10	Layanan Administrasi DPRD	1.385.500.000	1.373.350.000	(12.150.000)	(0,88)	Penyesuaian kebutuhan anggaran
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	11.364.036.870	16.204.282.236	4.840.245.366	42,59	
2.1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	2.234.932.506	2.284.932.506	50.000.000	2,24	bertambah pada rincian belanja perjadi
2.2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	969.738.750	788.058.750	(181.680.000)	(18,73)	Penyesuaian anggaran
2.3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	2.894.315.050	5.593.406.916	2.699.091.866	93,25	Penambahan belanja perjalanan dinas
2.4	Peningkatan Kapasitas DPRD	1.325.133.850	2.215.593.850	890.460.000	67,20	Bertambah pada Pelatihan ESQ) & Pendalaman Tugas DPRD
2.5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.481.749.130	1.470.509.130	(11.240.000)	(0,76)	Pengurangan belanja Sewa peralatan dan Mesin (sewa mobilitas air)
2.6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	37.818.810	37.818.810	0	0,00	



NO	Program/Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang		Keterangan
				Rp	%	
2.7	Pembahasan Kerja Sama Daerah	1.202.560.000	1.202.340.000	(220.000)	0,00	
2.8	Fasilitasi Tugas DPRD	1.217.788.774	2.611.622.274	1.393.833.500	114,46	Bertambah Pada, honorarium Dekorasi , Sewa Transportasi mobilitas darat , belanja sewa sound system dan perjalanan Dinas.
Total Belanja		38.781.897.559	44.813.897.559,00	6.032.000.000	15,55	

Sumber : Data Olah DPPA Sekretariat DPRD TA.2023

2.4.26. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Alokasi Belanja pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebelum Perubahan sebesar Rp9.048.679.600,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp9.491.129.600,00 atau bertambah Rp442.450.000,00 atau 4,89 persen. Perubahan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp9.020.679.600,00 sesudah perubahan Rp9.240.029.600,00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp28.000.000,00 dan sesudah perubahan Rp251.100.000,00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.39
Perubahan Anggaran Program Kegiatan
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah TA.2023

NO	Program/Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.836.845.600	5.449.682.000	612.836.400	11,25	



NO	Program/Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.740.000	74.450.000	4.710.000	6,33	Rasionalisasi kebutuhan anggaran s/d desember 2022
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.926.569.600	3.709.876.000	(216.693.600)	(5,84)	Penyesuaian Anggaran Gaji dan Tunjangan, Tunjangan Fungsional
1.3	Kegiatan Administrasi BMD Perangkat Daerah	15.400.000	13.000.000	(2.400.000)	(18,46)	Penambahan honorarium Bendahara Barang)
1.4	Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah	147.900.000	269.560.000	121.660.000	45,13	Penambahan anggaran keikutsertaan Bimtek LKPJ
1.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	423.006.000	671.106.000	248.100.000	36,97	Penyesuaian satuan media dan penambahan volume konsultasi
1.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28.000.000	251.100.000	223.100.000	88,85	Penambahan anggaran untuk meja kerja pejabat, kursi kerja pejabat dan lemari arsip, belanja PC, Laptop, Printer, AC, Scanner, smart TV
1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	142.800.000	157.560.000	14.760.000	9,37	Penambahan anggaran untuk belanja tagihan listrik
1.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	83.430.000	303.030.000	219.600.000	72,47	Penambahan anggaran untuk belanja suku cadang kendaraan dinas (double cabin), belanja pemeliharaan alat kantor lainnya, pemeliharaan toilet, papan nama kantor, ruang DWP, ruang arsip dan meteran air
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.853.224.000	1.750.655.100	(102.568.900)	(5,86)	
2.1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.213.909.000	1.089.090.100	(124.818.900)	(11,46)	Rasionalisasi kebutuhan anggaran s/d desember 2022 dan pergeseran rincian belanja ke belanja barang
2.2	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	135.743.000	115.233.000	(20.510.000)	(17,80)	Rasionalisasi kebutuhan anggaran s/d desember 2022
2.3	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	503,572,000	546,332,000	42,760,000	7,83	Penambahan anggaran untuk belanja honorarium TAPD dan pergeseran rincian



NO	Program/Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
						belanja
3	Program Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1,255,430,000	1,224,632,500	(30,797,500)		
3.1	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	569,830,000	587,972,500	18,142,500		Rasionalisasi kebutuhan anggaran s/d desember 2022, penambahan volume konsultasi, Penambahan anggaran dalam rangka coaching clinic PPRG
3.2	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	447,150,000	381,950,000	(65,200,000)		Rasionalisasi kebutuhan anggaran s/d desember 2022
3.3	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	238,450,000	254,710,000	16,260,000		Rasionalisasi kebutuhan anggaran s/d desember 2022, penambahan volume konsultasi dalam rangka penyusunan dokumen RTRW
4	Program Pengembangan dan Penelitian	1,103,180,000	1,066,160,000	(37,020,000)	(3,36)	
4.1	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penkajian Peraturan	270,000,000	247,780,000	(22,220,000)	(8,23)	Rasionalisasi kebutuhan anggaran s/d desember 2022
4.2	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	143,000,000	122,710,000	(20,290,000)	(14,19)	penambahan anggaran untuk belanja jasa konsultasi terkait kajian survey kinerja kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan
4.3	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah	339,400,000	306,660,000	(32,740,000)	(9,65)	Rasionalisasi kebutuhan anggaran s/d desember 2022
4.4	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan teknologi	350,780,000	389,010,000	38,230,000	10,90	penambahan anggaran untuk kebutuhan lomba inovasi dan penambahan volume konsultasi
Total Belanja		9,048,679,600	9,491,129,600	442,450,000	4,89	

Sumber : Data Olah DPPA **Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah TA.2023**



2.4.27. Badan Keuangan dan Aset Daerah

Alokasi Belanja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebelum Perubahan sebesar Rp383.505.627.565,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp386.745.823.716,00 atau bertambah Rp3.240.196.151,00 atau 0,84 persen. Perubahan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp47.251.572.035,00 sesudah perubahan Rp49.673.125.018,00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp581.340.000,00 dan sesudah perubahan Rp815.800.360,00, Belanja Tak Terduga sebelum perubahan sebesar Rp3.500.000.000,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp5.000.000.000,00, Belanja Transfer sebelum perubahan Rp332.172.715.530,00 dan sesudah perubahan menjadi Rp331.256.898.338,00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel 2.38 berikut ini;

Tabel 2.40
Perubahan Anggaran Program dan Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah TA.2023

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	43,573,086,449.00	45,681,426,692.00	2,108,340,243.00	4.84	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	168,282,000.00	167,919,500.00	(362,500.00)	(0.22)	Penyesuaian perjalanan dinas
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	41,038,088,249.00	42,420,946,832.00	1,382,858,583.00	3.37	Penyesuaian gaji dan tunjangan, dan belanja iuran jaminan/asuransi
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17,090,000.00	17,090,000.00	0	0,00	
1.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	465,940,500.00	1,023,122,500.00	557,182,000 .00	119.58	Penyesuaian belanja sesuai realisasi dan kebutuhan volume bimbingan teknis,
1.5	Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah	760,530,200.00	793,572,000.00	33,041,800 .00	4.34	Penyesuaian realisasi dan . bertambah belanja barang keperluan logistik kantor, belanja perjalanan dinas rapat koordinasi,
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	581,340,000.00	822,800,360.00	241,460,360 .00	41.54	Penambahan belanja pengadaan mebel, belanja pengadaan



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
						peralatan dan mesin (genset), dan belanja pengadaan sarana dan prasarana kantor
1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	323,125,500.00	229,125,500.00	(94,000,000.00)	(29.09)	Penyesuaian capaian realisasi,
1.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	218,690,000.00	206,850,000.00	(11,840,000.00)	(5.41)	Penyesuaian capaian realisasi
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	339,059,030,930.00	340,033,852,838.00	974,821,908	0.29	
2.1	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1,449,046,400	1,474,636,500	25,590,100	1.77	belanja honorarium narasumber,
2.2	Kegiatan dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	711,800,000.00	949,153,000.00	237,353,000	33.35	belanja perjalanan dinas, belanja makan minum rapat, dan belanja ATK
2.3	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1,225,469,000.00	1,353,165,000.00	127,696,000	10.42	belanja perjalanan dinas, belanja honorarium TAPD,
2.4	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	335,672,715,530.00	336,256,898,338.00	584,182,808	0.17	Penyesuaian belanja bantuan keuangan (APBN), belanja bantuan keuangan (APBD) dan belanja tidak terduga.
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	873,510,186.00	1,030,544,186.00	157,034,000	17.98	
3.1	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	873,510,186.00	1,030,544,186.00	157,034,000	17.98	Penyesuaian belanja perjalanan dinas, belanja makan minum rapat, belanja ATK, belanja jasa konsultasi non konstruksi, belanja honorarium narasumber, belanja sewa angkutan darat,
Total Belanja		383,505,627,565.00	386,745,823,716.00	3,240,196,151.00	0.84	
Sumber : Data Olah DPPA Badan Keuangan dan Aset Daerah TA.2023						



2.4.28. Badan Pendapatan Daerah

Alokasi Belanja pada Badan Pendapatan Daerah sebelum Perubahan sebesar Rp15.641.470.050,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp15.841.470.050,00 atau bertambah Rp 200.000.000,00 atau 1,28 persen. Perubahan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp14.340.770.050,00 sesudah perubahan Rp 14.154.705.550,00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp1.300.700.000,00 dan sesudah perubahan Rp1.686.764.500,00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.41
Perubahan Anggaran Program dan Kegiatan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur TA.2023

NO	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.917.344.050	12.214.238.750	(703.105.300)	(5,44)	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77.794.600	89.064.600	11.270.000	14,49	Penambahan biaya makan rapat
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.308.032.130	8.441.286.630	(1.866.745.500)	(18,11)	Penyesuaian gaji dan Tambahan Penghasilan Objektif Lainnya (Wakil Bupati) untuk pajak daerah dan retribusi daerah
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.581.000	13.581.000	-	0,00	
1.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	263.261.000	634.036.000	370.775.000	140,84	Penambahan biaya kontribusi Diklat peningkatan kapasitas SDM dan perjalanan dinas serta biaya perjalanan dinas coaching kepegawaian
1.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	494.090.800	879.317.200	385.226.400	77,97	Penambahan perjalanan dinas rapat - rapat koordinasi dalam dan luar propinsi serta penyesuaian realisasi bahan bacaan per bulan



NO	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.300.700.000	1.686.764.500	386.064.500	29,68	Penambahan pengadaan Meja PPD dan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	271.954.520	267.258.820	(4.695.700)	(1,73)	Pengurangan belanja paket/pengiriman dan penyesuaian realisasi belanja listrik dan air per bulan
1.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	187.930.000	202.930.000	15.000.000	7,98	Penambahan biaya suku cadang dan service 2 unit kendaraan dinas roda empat yang rusak berat/turun mesin
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.724.126.000	3.627.231.300	903.105.300	33,15	
2.1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.724.126.000	3.627.231.300	903.105.300	33,15	Penambahan biaya perjalanan dinas untuk lebih intens dalam mengidentifikasi potensi PAD harmonisasi aturan perundangan-undangan Pelaksanaan sosialisasi perda PDRD yang baru pendampingan penyusunan materi sengketa pajak, dan biaya reward (hadiah dan piagam) kepada wajib pajak daerah yang berprestasi sesuai kriteria yg ditetapkan dalam SK Bupati tahun 2022 dalam rangka mengoptimalkan penerimaan PAD
Total Belanja		15.641.470.050	15.841.470.050	200.000.000	1,28	

Sumber : Data Olah DPPA Badan Pendapatan Daerah TA.2023

2.4.29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Alokasi Belanja pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebelum Perubahan sebesar Rp10,801,258,050,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp11.296.528.798,00 atau bertambah Rp495,270,748,00 atau 4,59 persen.



Perubahan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp10.055.543.050,00 sesudah perubahan Rp10.423.105.798,00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp745.715.000,00 dan sesudah perubahan Rp873.423.000,00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.42
Perubahan Anggaran Program dan Kegiatan
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia TA.2023

No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5,003,543,350	5,481,033,928	477,490,578	9.54	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	134,483,300	205,068,000	70,584,700	52.49	Penyesuaian kebutuhan anggaran penambahan, makan minum rapat dan perjalanan dinas
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,222,066,450	3,068,412,652	(153,653,798)	(5.01)	Penyesuaian kebutuhan anggaran dan perjalanan dinas
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	11,289,000	12,489,000	1,200,000	10,63	Penyesuaian kebutuhan anggaran honorarium pengurus barang pengguna berdasarkan nilai pagu total asset
1.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	138,410,000	198,280,000	59,870,000	43,26	penambahan anggaran (makan dan minum tamu, honor narasumber, belanja goodie bag, akomodasi dan transportasi narasumber) untuk kegiatan Rakerda Kepegawaian dan perjalanan dinas.
1.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	369,872,600	675,501,000	305,628,400	82,63	Penambahan anggaran sesuai dengan kebutuhan perbaikan instalasi listrik ruangan perjalanan dinas dan, belanja makan dan minum rapat.



No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp	%	
1.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	743,915,000	876,573,000	132,658,000	17,83	Penambahan anggaran pada belanja modal Mebel, meja kerja pejabat, lemari dan arsip pejabat, belanja modal alat kantor, alat rumah tangga, home use, alat studio, dan komputer.
1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	232,589,000	251,492,276	18,903,276	8,13	Penyesuaian anggaran pada belanja tagihan air dan listrik
1.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150,918,000	193,218,000	42,300,000	28,03	Penambahan anggaran pada belanja suku cadang
2	Program Kepegawaian Daerah	3,624,431,700	3,403,429,870	(221,001,830)	(6,10)	
2.1	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN	941,882,900	810,048,900	(131,834,000)	(14,00)	
2.2	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	936,398,000	864,102,170	(72,295,830)	(7,72)	
2.3	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	1,361,366,800	1,211,444,800	(149,922,000)	(11,01)	
2.4	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	384,784,000	517,834,000	133,050,000	34,56	Penyesuaian kebutuhan anggaran penambahan untuk kegiatan sosialisasi aplikasi e-kinerja kepada guru-guru dan sosialisasi PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK
	Pendidikan Dan Pelatihan	2.173.283.000	2,412,065,000	238,782,000	10,99	
3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2,173,283,000	2,412,065,000	238,782,000	10,99	
3.1	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	1,066,732,500	1,642,952,500	576,220,000	54,02	Penambahan anggaran untuk diklat ESQ dan Bimtek MC,
3.2	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1,106,550,500	769,112,500	(337,438,000)	(30,49)	
Total Belanja		10,801,258,050	11,296,528,798	495,270,748	4,59	

Sumber : Data Olah DPPA **Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia TA.2023**

2.4.30. Inspektorat

Alokasi Belanja pada Inspektorat sebelum Perubahan sebesar Rp13.194.351.300,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp13.996.770.485,00 atau bertambah Rp802.419.185,00 atau 6,08 persen. Perubahan rincian Belanja Operasi



sebelum perubahan Rp12.881.075.200,00 sesudah perubahan Rp13.769.713.785,00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp313.276.100,00 dan sesudah perubahan Rp227.056.700,00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.43
Perubahan Anggaran Program / Kegiatan Inspektorat TA.2023

NO	Program/Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan/Kota	8.667.198.734	9.127.367.678	460.168.944	5,31	
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	142.707.336	178.477.141	35.769.805	25,06	Disediakan anggaran coaching clinic evaluasi register resiko yang disusun oleh OPD yang kemudian berdasarkan hasil evaluasi dilakukan pembobotan untuk penyusunan PKPT
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.281.277.047	6.318.427.378	37.150.331	0,59	Perubahan anggaran disebabkan karena adanya perubahan kelas jabatan Auditor dan Penambahan Gaji Serta Tunjangan
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	899.262.073	877.842.073	(21.420.000)	(2,38)	Dilakukan pergeseran anggaran
1.4	Administrasi Umum Perangkat daerah	1.018.254.050	1.378.483.050	360.229.000	35,37	Dianggarkan Kegiatan Studi Tiru terhadap Penyelenggaraan Maturitas SPIP
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100.000.000	100.000.000	0	0,00	
1.6	Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	135.198.228	159.668.036	24.469.808	18,09	kenaikan kebutuhan Listrik
1.7	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.500.000	114.470.000	23.970.000	26,48	perbaikan atap dan plafon yang bocor
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.083.748.566	3.527.868.807	444.120.241	14,40	
2.1	Penyelenggaraan pengawasan internal	2.464.057.666	2.749.167.907	285.110.241	11,57	Penyesuaian kebutuhan
2.2	Penyelenggaraan pengawasan dengan Tujuan Tertentu	619.690.900	778.700.900	159.010.000	25,65	Anggaran ditambahkan dikarenakan beberapa kegiatan yang belum terakomodir dan sifatnya disediakan
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.443.404.000	1.341.534.000	(101.870.000)	(7,05)	
3.1	Pendampingan dan Asistensi	1.443.404.000	1.341.534.000	(101.870.000)	(7,05)	Dilakukan Pergeseran Anggaran untuk



NO	Program/Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
						memenuhi kebutuhan lainnya
Total Belanja		13.194.351.300	13.996.770.485	802.419.185	6,08	

Sumber : Data Olah DPPA *Inspektorat TA.2023*

2.4.31. Kecamatan

Perubahan Alokasi Belanja Operasi dan Belanja Modal pada Kecamatan secara umum disebabkan oleh penyesuaian atas realisasi belanja selama tahun berjalan dalam upaya mengotimalkan realisasi di akhir tahun. Pada perubahan anggaran seluruh kecamatan melakukan penambahan alokasi anggaran yang antara lain pada penyediaan penunjang administrasi perkantoran berupa penyesuaian gaji dan tunjangan, penyediaan makan minum dan rapat-rapat koordinasi, selain itu ada 9 kecamatan melakukan penambahan belanja modal seperti peralatan kantor maupun penyediaan mobiler rumah dinas camat yang merupakan bangunan baru sebagaimana yang terjadi di kecamatan Mangkutana. Perubahan belanja pada kecamatan digambarkan sebagai berikut :



Tabel 2.44
Perubahan Komponen Anggaran Belanja Kecamatan

No	Kecamatan	APBD			APBD-P			Keterangan	
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Total	Belanja Operasi	Belanja Modal	Total	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%
1	Burau	3.040.965.850	0	3.040.965.850	3.104.724.050	53.000.000	3.157.724.050	116.758.200	3,84
2	Wotu	2.926.372.275	0	2.926.372.275	3.086.769.775	0	3.086.769.775	160.397.500	5,48
3	Tomoni	4.564.903.425	85.200.000	4.650.103.425	4.599.983.425	138.200.000	4.738.183.425	88.080.000	1,89
4	Mangkutana	2.778.872.800	0	2.778.872.800	2.859.976.664	229.400.000	3.089.376.664	310.503.864	11,17
5	Tomoni Timur	2.250.490.950	240.332.300	2.490.823.250	2.386.653.650	275.079.600	2.661.733.250	170.910.000	6,86
6	Kalaena	2.509.849.700	73.386.000	2.583.235.700	2.620.430.700	107.400.000	2.727.830.700	144.595.000	5,60
7	Angkona	2.633.560.600	48.623.300	2.682.183.900	2.712.560.600	79.623.300	2.792.183.900	110.000.000	4,10
8	Malili	3.827.936.550	106.000.000	3.933.936.550	3.954.196.250	69.000.000	4.023.196.250	89.259.700	2,27
9	Wasuponda	2.530.221.400	13.000.000	2.543.221.400	2.777.821.400	30.000.000	2.807.821.400	264.600.000	10,40
10	Towuti	3.512.468.600	160.500.000	3.672.968.600	3.617.648.600	196.100.000	3.813.748.600	140.780.000	3,83
11	Nuha	3.880.917.950	0	3.880.917.950	4.019.191.250	81.500.000	4.100.691.250	219.773.300	5,66

Sumber : Penjabaran APBD (data olah) Tahun Anggaran 2023



2.4.32. Puskesmas

Alokasi belanja pada puskesmas dipengaruhi oleh perubahan dana kapitalis dan non kapitasi pada masing-masing puskesmas.

Perubahan alokasi belanja operasi dan belanja modal pada puskesmas digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.45
Perubahan Rincian Anggaran Belanja Puskesmas
Se Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

NO	Perangkat Daerah	APBD			APBD-P			Keterangan	
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Total	Belanja Operasi	Belanja Modal	Total	Bertambah/ Berkurang	%
1	Puskesmas Burau	3.075.795.500	116.280.000	3.192.075.500	3.476.626.304	129.280.000	3.605.906.304	413.830.804	12,96
2	Puskesmas Wotu	4.168.328.900	218.800.000	4.387.128.900	4.495.553.411	295.053.500	4.790.606.911	403.478.011	9,20
3	Puskesmas Mangkutana	3.646.929.000	178.150.000	3.825.079.000	3.994.979.000	213.150.000	4.208.129.000	383.050.000	10,01
4	Puskesmas Tomoni	3.507.155.000	233.950.000	3.741.105.000	3.798.820.000	296.940.000	4.095.760.000	354.655.000	9,48
5	Puskesmas Tomoni Timur	2.960.534.200	66.927.000	3.027.461.200	3.168.293.470	202.644.530	3.370.938.000	343.476.800	11,35
6	Puskesmas Kalaena	2.698.921.600	134.750.000	2.833.671.600	3.108.322.778	175.362.500	3.283.685.278	450.013.678	15,88
7	Puskesmas Angkona	3.551.255.100	193.000.000	3.744.255.100	3.972.182.549	180.105.000	4.152.287.549	408.032.449	10,90
8	Puskesmas Lakawali	2.327.298.000	163.340.000	2.490.638.000	2.674.832.264	239.100.000	2.913.932.264	423.294.254	17,00
9	Puskesmas Parumpanai	2.006.758.000	152.710.000	2.159.468.000	2.084.658.000	206.710.000	2.291.368.000	131.900.000	6,11
10	Puskesmas Malili	4.430.625.118	251.250.000	4.681.875.118	4.974.314.482	346.625.000	5.320.939.482	639.064.364	13,65
11	Puskesmas Lampia	2.306.630.000	155.100.000	2.461.730.000	2.510.308.719	127.575.000	2.637.883.719	176.153.719	7,16
12	Puskesmas Wasuponda	3.043.943.000	70.000.000	3.113.943.000	3.331.726.574	71.500.000	3.403.226.574	289.283.574	9,29
13	Puskesmas Nuha	2.819.962.500	140.850.000	2.960.812.500	3.054.856.726	102.617.774	3.157.474.500	196.662.000	6,64
14	Puskesmas Wawondula	3.442.845.190	82.320.000	3.525.165.190	4.028.896.408	201.820.000	4.230.716.408	705.551.218	20,01
15	Puskesmas Timampu	2.011.963.000	6.200.000	2.018.163.000	2.198.938.000	76.000.000	2.274.938.000	76.000.000	3,46
16	Puskesmas Mahalona	2.272.388.550	40.000.000	2.312.388.550	2.277.023.850	71.500.000	2.348.523.850	36.135.300	1,56
17	Puskesmas Bantilang	2.543.924.200	45.850.000	2.589.774.200	2.742.045.395	80.840.000	2.822.885.395	283.111.195	9,00
18	Puskesmas Bonepute	2.557.330.650	120.010.000	2.677.340.650	2.668.030.000	324.310.000	2.992.340.000	314.999.350	11,77

Sumber : Data Olah DPPA Puskemas TA.2023



BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan azas otonomi. Sejak berlakunya kewenangan otonomi daerah tersebut, banyak hal yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa program kegiatan yang belum mencapai target pembangunan sesuai yang diharapkan bersama. Indikator kinerja adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah. Pencapaian indikator makro pembangunan memberikan gambaran atas hasil-hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

3.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO

Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah. Pencapaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Indikator makro Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 berdasarkan rilis BPS Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka Tahun 2023 tanggal 28 Februari 2024 lalu, secara umum tumbuh positif atau lebih baik dari Tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan adanya kinerja positif pada sektor ekonomi, sosial dan pemerintahan.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB ADHB Kabupaten Luwu Timur dihasilkan oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian dimana pada tahun 2023 mencapai 50,30 persen yang kemudian disusul oleh sektor pertanian sebesar 22,15 persen. Dengan demikian peranan kedua sektor meliputi 72,45 persen dari pembentuk PDRB ADHB tahun 2023. Sementara Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan atau PDRB ADHK untuk sektor pertambangan dan penggalian sebesar 16,74 persen atau meningkat 15,08 persen dari tahun sebelumnya yang hanya 1,66 persen. Demikian pula pada sektor pertanian terjadi peningkatan sebesar 2,84 persen dari minus 1,65 tahun 2022 menjadi 1,19 ditahun 2023. Sedangkan nilai PDRB ADHK Kabupaten Luwu Timur mencapai 17,92 triliun rupiah meningkat dibandingkan tahun 2022 yang hanya mencapai 16,34 triliun rupiah. Sementara nilai PDRB ADHB mencapai 30,69 Triliun lebih tinggi dari capaian 2022 yaitu sebesar 28,41 Triliun. Kondisi tersebut berimplikasi positif pada peningkatan Laju



pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2023 yang mencapai 9,66 persen. Capaian tersebut merupakan tertinggi sejak Tahun 2019. Capaian pertumbuhan ekonomi seiring dengan perkembangan usaha pada setiap sektor lapangan usaha. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha paling besar didukung oleh sektor pertambangan dan penggalian sebesar 16,74 persen dan kemudian disusul oleh jasa pendidikan sebesar 8,08 persen serta administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 7,67 persen. Ketiga sektor tersebut bertumbuh cukup signifikan ditahun 2023. Disisi lain laju pertumbuhan ekonomi tanpa tambang mencapai 2,8 persen meningkat 0,49 poin dari tahun 2022, dimana hal tersebut dapat dimaklumi karena sektor pertambangan tumbuh positif dengan peranan yang cukup besar, sehingga dengan mengeluarkan sektor pertambangan, pertumbuhan ekonomi Luwu Timur tidak akan terlalu jauh berbeda dengan Pertumbuhan ekonomi keseluruhan.

Dampak positif dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur belum berimplikasi pada menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dimana pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,94 poin atau dengan capaian 5,42 persen dibanding tahun sebelumnya, sebesar 4,48 persen. Berdasarkan data BPS Pada Tahun 2023 terjadi peningkatan penduduk usia kerja 1.330 orang menjadi 227,135 orang. Pemerintah daerah telah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Luwu Timur melalui program strategi peningkatan kapasitas pencari kerja dengan pembekalan keterampilan yang dapat berdaya saing. Strategi pemberian pelatihan keterampilan kepada pencari kerja, mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah serta fasilitasi dan pembinaan terus dilakukan oleh pemerintah daerah agar Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat terus ditekan dari tahun ke tahun. Beberapa pelatihan berbasis kompetensi yang diselenggarakan di Tahun 2023 yang juga merupakan Program Prioritas antara lain Pelatihan kompetensi Kerjasama Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar (jukur ukur/surveyor). Pelatihan kompetensi Kerjasama ATS Soroako (jurusan welder/Las dan otomotif) serta Pelatihan dan Sertifikasi K3/SIO (operator alat berat dan Dump Truk) dengan total Jumlah peserta mencapai 186 orang.

Salah satu indikator kinerja makro yang juga menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah Persentase penduduk miskin dimana pada tahun 2023 sebesar 6,93 persen atau 21,57 ribu jiwa atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 sebesar 6,81 persen atau 20,89 ribu jiwa. Peningkatan persentase penduduk miskin dipengaruhi oleh adanya perbedaan perhitungan garis kemiskinan pada Tahun 2022 dan 2023. Indikator Garis kemiskinan pada tahun 2022 sebesar 394,158 sementara Tahun 2023 naik menjadi 438,178.



Selama sepuluh tahun terakhir, persentase penduduk miskin rata-rata tumbuh negatif 1,06 persen sementara garis kemiskinan setiap tahunnya tumbuh sebesar 6,9%. Meskipun jumlah penduduk miskin tahun 2023 meningkat namun persentasenya tidak terlalu jauh peningkatannya, yang berarti terdapat peningkatan penduduk secara total baik yang miskin maupun tidak miskin. Selain itu Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 masih berada di bawah Provinsi Sulawesi Selatan dimana persentasenya sebesar 8,70 persen dan merupakan persentase paling rendah untuk wilayah Luwu Raya. Kenaikan tingkat kemiskinan ini membutuhkan intervensi dari pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) yang berasal dari Pemerintah Pusat dan beberapa program Pemerintah Kabupaten Luwu Timur antara lain bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), bantuan Kelompok Nelayan berupa alat penangkapan, Bantuan sarana budidaya dan pengolahan perikanan serta bantuan benih dan ternak pada masing-masing sektor tanaman pangan dan peternakan.

Selanjutnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia dari sisi Pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan. Capaian IPM tahun 2023 juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2023 capaian IPM Kabupaten Luwu Timur tetap konsisten berada pada peringkat ke empat dibandingkan seluruh Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan yaitu sebesar 75,84 persen atau kategori tinggi, angka ini meningkat 0,43 poin dibanding tahun 2022 sebesar 75,41. Pencapaian IPM Kabupaten Luwu Timur, ditopang oleh Usia Harapan Hidup (UHH) yang meningkat menjadi 74,32 tahun atau naik 0,24 poin atau 0,32 persen dari capaian 2022 yaitu 74,08, Rata-rata lama sekolah yang juga naik 0.01 poin menjadi 8,93 tahun pada tahun 2023 atau 0,11 persen dari capaian 2022 yaitu 8,92 tahun. Harapan Lama sekolah (HLS) juga tumbuh positif menjadi 13,01 Tahun 2023 atau naik 0.01 poin atau 0,11 persen dibandingkan tahun 2022 sebesar 13 tahun. Pengeluaran Riil perkapita meningkat Rp393.000,00 menjadi Rp13,451,000,00 atau naik 3 persen dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar Rp13,058,000,00. IPM Luwu Timur tumbuh secara konsisten dan semakin membaik. IPM Tahun 2023 mencapai 75,84 (Status tinggi) dan tumbuh 0,57 persen dibandingkan tahun 2022. Pertumbuhan IPM 2023 lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan IPM 2020-2022 (sebesar 0,47%). Peningkatan IPM didukung oleh seluruh indikator pembentuknya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Salah satu indikator tingkat kemakmuran suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh



kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Capaian PDRB perkapita pada tahun 2023 sebesar Rp99,49juta/jiwa, meningkat dibanding tahun 2022 sebesar Rp92,98 juta/jiwa dan jauh melampaui target RPJMD untuk tahun 2022 yaitu Rp72 juta/jiwa.

Capaian Rasio Gini Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 juga menunjukkan tren yang positif dibandingkan tahun sebelumnya, dimana capaian nilai gini ratio Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 sebesar 0,392 atau turun sebesar 0,074 poin dari tahun 2022. Penurunan Gini Ratio tersebut mengindikasikan bahwa selama periode Tahun 2023 terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran penduduk di Kabupaten Luwu Timur.

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Makro
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian (%)	Capaian dibandingkan tahun sebelumnya
				Target RKPD	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pertumbuhan Ekonomi						
	Dengan Tambang Biji Logam	Persen	1,99	2,72	9,66	355,15	Meningkat 7,67 persen
	Tanpa Tambang Biji Logam	Persen	2,31		2,8		Meningkat 0,49 persen
2	Angka Kemiskinan	Persen	6,86	6,44	6,99	92,13	Bertambah 0,13 persen seiring dengan peningkatan garis kemiskinan pada kondisi Maret 2023
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,48	3,05	5,42	56,27	Bertambah 0,94 poin seiring dengan peningkatan penduduk usia kerja pada kondisi Agustus 2023
4	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	73,92	74,1	75,84	102,35	Kategori Tinggi naik 0.58 poin
5	Pendapatan Perkapita						
	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	Juta Rupiah	92,98	72	99,49	138,18	Meningkat
	Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	Juta Rupiah	53,51		58,10		Meningkat
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	Poin	0,394	0,26	0,392	81,25	Menurun 0,002 poin yang berarti tingkat ketimpangan semakin berkurang



3.2 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.2.1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Urusan pelayanan dasar terdiri dari urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Berdasarkan Target RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 Tahun Pelaksanaan 2023, untuk Urusan Wajib Pelayanan Dasar dapat dilihat pada table 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Pelaksanaan Wajib Urusan Dasar
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan Wajib Urusan Dasar											
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan & Kebudayaan									
			Meningkatkan Kuantitas Dan Kualitas Sarana Dan Prasarana Di Setiap Jenjang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun Yang BerPartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Pertama	100 %	97 %	97%	Tidak Tercapai Sesuai Dengan Target Dikarenakan Rendahnya Tingkat Partisipasi Sekolah Pada Jenjang Smp Sederajat Hal Tersebut Dipengaruhi Oleh Beberapa Faktor Diantaranya Masalah Kemiskinan Yang Terjadi Di Sebagian Kecil Warga Luwu Timur Utamanya Bagi Warga Pendatang Yang Sudah	Untuk mengatasi permasalahan tersebut hal yang dilakukan Tersedia Pendidikan yaitu tetap memberikan bantuan berupa Baju seragam bagi siswa baru, memberikan pelayanan di bidang sarana prasarana dengan membangun RKB, melakukan rehabilitasi pada sekolah yang	



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Berdomisili Atau Menetap Di Kabupaten Luwu Timur, Mereka Lebih Memilih Untuk Ikut Bekerja Bersama Org Tuanya Dari Pada Bersekolah, Akses Menuju Ke Sekolah Masih Sulit Bagi Sebagian Penduduk Yang Tinggal Di Daerah Yang Jauh Dari Perkotaan, Selain Itu Faktor Tingginya Kesadaran Org Tua Dengan Pendidikan Agama Sehingga Banyak Org Tua Siswa Yang Lebih Memilih Menyekolahkan Anaknya Di Sekolah Pendidikan Agama Atau Pesantren Yang Berkualitas Di Luar Kabupaten Luwu Timur	memerlukan rehab, selain itu juga telah dilakukan pembangunan akses menuju sekolah agar mudah dijangkau tentunya berkolaborasi dengan OPD Terkait dalam hal ini PUPR.	
					Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang BerPartisipasi Dalam PAUD	100 %	83 %	83%	Dikarenakan Belum Adanya Regulasi Atau Peraturan Pemerintah Yang Mengharuskan Anak Usi Tk Umur 5-6 Tahun Untuk Bersekolah DiTingkat Tk Sehingga Org Tua Masih Ada Yang Enggan Menyekolahkan	Solusinya Agar Dimungkinkan Untuk Dibuatkan Regulasi Tentang Wajib Belajar Paud Dan Adanya Partisipasi Dari Pemerintah Desa Dan Bunda Paud Desa Masing-Masing	



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Anaknya.		
					Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Menengah Yang BerPartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	100 %	57 %	57%			
					Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun Yang BerPartisipasi Dalam Pendidikan Dasar	100 %	94 %	94%	Hal Ini Disebabkan Karena Beberapa Faktor Diantaranya Faktor Ekonomi Dimana Beberapa Org Tua Lebih Memilih Anaknyanya Ikut Bekerja Bersama Org Tuanya Dari Pada Ikut Bersekolah.Selain Itu Faktor Tingginya Kesadaran Org Tua Dengan Pendidikan Agama Sehingga Banyak Org Tua Siswa Yang Lebih Memilih Menyekolahkan Anaknyanya Di Sekolah Pendidikan Agama Atau Pesantren Yang Berkualitas Di Luar Kabupaten Luwu Timur	Pemberian Bantuan Seragam Gratis Bagi Siswa Baru, Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendidikan	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD/Mi Terakreditasi Minimal B	100 %	63 %	63%	Akreditasi Sekolah Adalah Kewenangan Badan Akreditasi Nasional	Melakukan Perbaikan Sarana Prasarana Sekolah Serta Meningkatkan Kualitas Sdm Di Satuan Pendidikan Yang Menjadi	

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Indikator Penilaian Akreditasi Sekolah	
				Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah RKB SD Yang Dibangun	20 Unit	20 Unit	100%			
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Yang Telah Dibangun	3 Rg	3 Rg	100%			
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah Yang Telah Dibangun	1 Rg	1 Rg	100%			
				Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	Panjang Pagar SD Sederajat Yang Dibangun	592 Mtr	592 Mtr	100%			
					Jumlah Halaman SD Yang Di Tata	23 Pkt	23 Pkt	100%			
					Jumlah Wc SD Yang Dibangun	7 Unit	7 Unit	100%			
				Pembangunan Rumah Tersedia Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Tersedia Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	100%			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas Yang Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Rg	8 Rg	100%			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah Yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Rg	1 Rg	100%			
				Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah Yang Tersedia	40 Pkt	40 Pkt	100%			
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah Yang Tersedia	5 Pkt	5 Pkt	100%			
				Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik Yang Tersedia	5.761 Unit	5761 Unit	100%			
				Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik Dan Peraga Siswa Yang Tersedia	4 Plt	4 Plt	100%			
				Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa	Jumlah Lomba Minat Bakat Tingkat Sekolah Dasar Yang	3 Lom ba	3 Lom ba	100%			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Dilaksanakan						
				Penyediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Yang Tersedia Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	421 Org	421 Org	100%			
				Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi Dan Kualifikasi	35 Org	35 Org	100%			
				Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar Yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah	800 SP	800 SP	100%			
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Yang Menerima Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Sederajat	172 Sekolah	172 Sekolah	100%			
				Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar Yang Telah Dibangun	6 Rg	6 Rg	100%			
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Presentase SMP/Mts Terakreditasi Minimal B	84,05 %	49 %	58%	Akreditasi Sekolah Adalah Kewenangan Badan Akreditasi Nasional	Melakukan Perbaikan Sarana Prasarana Sekolah Serta Meningkatkan Kualitas Sdm Di Satuan Pendidikan Yang Menjadi Indikator Penilaian Akreditasi Sekolah	
				Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah RKB SMP Yang Dibangun	1 Unit	1 Unit	100%			
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SMP Yang Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SMP Yang Dibangun	2 Unit	1 Unit	50%	Ada Satu Kegiatan Yang Tidak Terealisasi Karena	Akan Menjadi Retensi Tahun Berikutnya	

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Dok Yang Tidak Dilengkapi		
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah (Uks) SMP Yang Dibangun	3 Unit	3 Unit	100%			
				Pembangunan Laboratorium	Jumlah Laboratorium Komputer SMP Yang Dibangun	3 Unit	3 Unit	100%			
				Pembangunan Rumah Tersedia Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Tersedia Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Yang Telah Dibangun	2 Unit	2 Unit	100%			
				Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	Jumlah Wc Peserta Didik SMP Yang Dibangun	0 Unit	0 Unit	0%	Tidak Ada Usulan Pembangunan Wc Untuk Smp Tahun 2023		
					Jumlah Pagar SMP Sederajat Yang Dibangun	440 Mtr	440 Mtr	100%			
					Jumlah Halaman Sekolah SMP Yang Ditata	20 Pkt	20 Pkt	100%			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah bangunan Kantor SMP Yang Direhab	1 Unit	1 Unit	100%			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas SMP Yang Direhab	2 Unit	2 Unit	100%			
				Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel SMP Yang Diadakan	6 Pkt	6 Pkt	100%			
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah Yang Tersedia	2 Pkt	1 Pkt	50%	Keg Ini Tidak Terealisasi Sesuai Target Dikarenakan Ada Kesalahan Pada Saat Pengimputan Yaitu Doubel Pengimputan Pada Nama Penerima (Sekolah).		
				Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Seragam Peserta Didik SMP Sederajat Yang Diadakan	5.276 Psg	527 6 Psg	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik Dan Peraga Siswa SMP Yang Diadakan	1 Pkt	1 Pkt	100%			
				Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa	Jumlah Minat,Bakat Dan Kreativitas Siswa	3 Lomba	3 Lomba	100%			
				Penyediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik Dan Tenaga Kependidikan SMP Yang Disediakan	218 Org	218 Org	100%			
				Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Guru Yang Mengikuti Lomba Olimpiade Guru Nasional	245 Org	245 Org	100%			
					Jumlah Guru,Kepala Sekolah,Dan Pengawas Yang Mengikuti Lomba Guru Berprestasi	49 Org	49 Org	100%			
					Jumlah Mgmp Yang Terbina	11 MG MP	11 MG MP	100%			
				Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah	Jumlah Peserta Binaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah	735 Org	735 Org	100%			
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	49 Sekolah	49 Sekolah	100%			
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Tk Terakreditasi Minimal B	68,78 %	45 %	65%	Akreditasi Sekolah Adalah Kewenangan Badan Akreditasi Nasional	Melakukan Perbaikan Sarana Prasarana Sekolah Serta Meningkatkan Kualitas Sdm Di Satuan Pendidikan Yang Menjadi Indikator Penilaian Akreditasi Sekolah	
				Pembangunan	Jumlah Gedung/Ruang	3 Unit	3 Unit	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kelas/Ruang Guru PAUD Yang Dibangun						
				Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas PAUD	Jumlah Wc Tk Yang Dibangun	1 Unit	1 Unit	100%			
					Jumlah Uks Tk Yang Dibangun	2 Unit	2 Unit	100%			
				Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Yang Dipelihara	11 Sek olah	11 Sek olah	100%			
				Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD Yang Diadakan	2 Pkt	2 Pkt	100%			
				Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Siswa Tk Yang Diadakan	8.547 Eks	854 7 Eks	100%			
				Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik Dan Peraga Siswa Tk Yang Diadakan	3 Pkt	3 Pkt	100%			
				Penyediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Tk Yang Disediakan	206 Org	200, 75 Org	97%			
				Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Guru, Kepala Sekolah, Dan Pengawas Yang Mengikuti Lomba Guru Berprestasi	15 Org	15 Org	100%			
					Jumlah KKg Tk Yang Dibina	23 KKG	23 KKG	100%			
				Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen PAUD	Jumlah Lomba Gebyar PAUD Yg Dilaksanakan	6 Lom ba	6 Lom ba	100%			
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tk Yang Menerima BOP PAUD	182 Sek olah	177 Sek olah	97%	Realisasi Kinerja Tidak Mencapai Target Dikarenakan Ada 5 Satuan Pendidikan Yang Tidak Melengkapi Datanya Di Aplikasi Dapodik, Sehingga Tidak Dapat Diberikan Bantuan Operasional Sekolah Paud (Dasar		

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Pembayaran Bosp Bersumber Dari Dapodik)		
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan							
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Kelulusan Warga Belajar Paket A, B, Dan C	96,45 %	88 %	91%			
				Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga Yang Menerima BOP Kesetaraan	10 PKB M	10 PKB M	100%			
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan							
			Menerapkan Perencanaan Urusan Pendidikan Berbasis Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar Kabupaten/Kota	100 %	97 %	97%	Target Pada Keg Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn Sebanyak 1672 Org Dan Yang Terealisasi Hanya 1615 Org, Hal Ini Dikarenakan Ada Beberapa ASN Yang Meninggal Dan Pensiun.		
			Melakukan Pendampingan Serta Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Program Dan Keg Urusan Pendidikan								
				Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan	100 %	100 %	100%			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun Tepat Waktu						
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	7	7	100%			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Lap	10 Lap	100%			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	99 %	99%	Target Pada Keg Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn Sebanyak 1672 Org Dan Yang Terealisasi Hanya 1615 Org, Hal Ini Dikarenakan Ada Beberapa Asn Yang Meninggal Dan Pensiun.		
				Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	1.626 Org/ Bln	162 6 Org/ Bln	100%			
				Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Lap	18 Lap	100%			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	100%			
				Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dok	2 Dok	100%			
				Monitoring, Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, Dan	3 Dok	3 Dok	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Penilaian Kinerja Pegawai						
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	401 Org	401 Org	100%			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Org	10 Org	100%			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Umum PD	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor Yang Disediakan	11 Pkt	11 Pkt	100%			
				Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	73 Pkt	73 Pkt	100%			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	27 Pkt	27 Pkt	100%			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	3 Pkt	3 Pkt	100%			
				Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	75 Dok	75 Dok	100%			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4,132 Lap	4 Lap	100%			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	1 Lap	1 Lap	100%			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase BMD-PD Penunjang Yang Terpenuhi	100 %	100 %	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Daerah							
				Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	22 Unit	22 Unit	100%			
				Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau bangunan Lainnya Yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100%			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.250 Lap	3250 Lap	100%			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	2 Lap	2 Lap	100%			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	4 Lap	4 Lap	100%			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Tersedia Atau Kendaraan Tersedia Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Tersedia Atau Kendaraan Tersedia Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	67 Unit	67 Unit	100%			
				Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	62 Unit	62 Unit	100%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan									
			Peningkatan Promosi Kesehatan, Penyehatan Lingkungan, Perbaikan Status Gizi Masyarakat Serta Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	100 %	97 %	97%	Tidak Mencapai Target Karena Ada 5 Spm Bidang Kesehatan Tidak Mencapai Target Seperti Cakupan Pelayanan K4 Ibu Hamil, Pelayanan Ibu Bersalin, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita, Dan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia		
			Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase KeTersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	70 %	70 %	100%			
				Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana Dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	100%			
				Pembangunan Rumah Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Tenaga Kesehatan Yang Dibangun	1 Unit	1 Unit	100%			
				Pengembangan PKM	Jumlah PKM Yang DiTingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan Dan SDM Agar Sesuai Standar	14 Unit	14 Unit	100%			
			Peningkatan Upaya Kesiapsiagaan Dan Penanggulangan Bencana / Kedaruratan Di	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana Dan Alat Kesehatan Yang Telah Dilakukan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	10 Unit	10 Unit	100%			
				Pengadaan Prasarana Dan Pendukung Fasilitas	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang	4 Unit	2 Unit	50%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kabupaten Luwu Timur	Pelayanan Kesehatan	Disediakan						
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Disediakan	75 Unit	73 Unit	97%	Tidak Mencapai Target Karena Ada Keg Pengadaan Alat Kesehatan Unit Transfusi Darah Tidak Terlaksana Di Seabkan Adanya Ketidak Sesuaian Spesifikasi Di Dalam Dok Pelaksanaan Keg Sehingga Tidak Dilaksanakan	Dianggarkan Kembali Di Anggaran Pokok Ta.2024	
				Pengadaan Dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan Dan Pemeliharaan Alat Uji Dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintanance Center	435 Unit	411 Unit	94%	Tidak Mencapai Target Karena Kalibrasi Alat Kesehatan PKM Di Pelihahra Sesuai Dengan Anggaran Yang Tersedia Di Dpa PKM Masing - Masing	Alat Yang Belum Dilakukan Kalibrasi Tetap Diusulkan Penganggarannya Pada Tahun Berikutnya	
				Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat Dan Vaksin Yang Disediakan	77 Pkt	75 0	98%	Tidak Mencapai Target Karena Ada Beberapa Obat Yang Tidak Tersedian Di Ekatalog	Dianggarkan Kembali Di Pokok Tahun 2024	
				Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai Yang Disediakan	85 Pkt	85 Pkt	100%			
				Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (Bmhp), Makanan Dan Minuman Ke Puskemas Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (Bmhp), Makanan Dan Minuman Yang Didistribusikan Ke PKM Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	88 Pkt	88 Pkt	100%			
				Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM	Persentase Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan	100 %	98,2 3 %	98%	Tidak Mencapai Target Karena Ada	Pendampingan 1000 Hp, Mulai Dari	



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar				Beberapa Neonatal Yang Tidak Datang Kembali Ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk Control Bayinya, Serta Ada Beberapa Bidan Yang Bidan Desanya Kurang Aktif Melakukan Kunjungan Rumah, Ibu Bayi Pulang Kampung Atau Pindah Domisili Sehingga Tidak Dipantau Kesehatan Bayinya	Ibu Hamil Sampai Bayi Berusia 2 Tahun Oleh Bidan, Jadi Semua Bidan Harus Ada Ibu Hamil/Bayi Yang Didampingi	
					Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	100 %	95,7 3 %	96%	Tidak Mencapai Karena Tidak Semua Ibu Hamil Memeriksa Kehamiannya Secara Lengkap Seperti Adanya Kehamilan Yang Tidak Diinginkan Sehingga Ibu Tidak Segera Memeriksa Kehamilannya, Serta Adanya Kehamilan Pada Usia Dini	Pencegahan Perkawinan Usia Dini Dan Peningkatan Kie Tentang Kesehatan Reproduksi Pada Remaja	
					Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	100 %	99,9 6 %	100%	Tidak Mencapai Targe Karena Masih Ada Persalinan Yang Ditolong Dirumah Karena Si Ibu Tidak Mau Melahirkan Di Fasilitas Kesehatan	Meningkatkan Kie Kepada Ibu Hamil Agar Melahirkan Di Fasilitas Kesehatan Dan Penyediaan Sarana Mobilitas Untuk Menjemput Dan Mengantar Pulang Ibu Yang Bersalin Di PKM.	



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100 %	92,0 % 2	92%	Tidak Mencapai Target Karena Masih Ada Balita Yang Tidak Berkunjung Lagi Ke Posyandu Jika Sudah Lengkap Imunisasinya	Pemberdayaan Kader Untuk Menggerakkan Masyarakat Yang Punya Balita Agar Dibawa Ke Posyandu Setiap Bulannya Dan Bidan Desa Aktif Melakukan Kunjungan Rumah Balita Yang Tidak Datang Ke Posyandu	
					Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 %	100 %	100%			
					Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	100 %	100 %	100%			
					Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	100 %	83,2 % 5	83%	Tidak Mencapai Target Karena Kurangnya Strip Pemeriksaan Kolesterol Yang Merupakan Salah Satu Indikator Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar Serta Ada Beberapa Lansia Yang Tidak Berkunjung Ke Posyandu Lansia	Pengadaan Strip Kolesterol Sesuai Jumlah Warga Lanjut Usia Serta Petugas Kesehatan Melakukan Kunjungan Rumah Terhadap Lansia Yang Tidak Berkunjung Ke Posyandu Lansia	
					Persentase Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan	100 %	100 %	100%			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Kesehatan Sesuai Standar						
					Persentase Penderita DM Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 %	100 %	100%			
					Persentase ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	100 %	100 %	100%			
					Persentase Orang Dengan Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar	100 %	100 %	100%			
					Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi HIV Sesuai Standar	100 %	130 %	130%			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5.130 Org	5 Org	0%	Tidak Mencapai Target Karena Ada Beberapa Neonatal Yang Tidak Datang Kembali Ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk Control Bayinya, Serta Ada Beberapa Bidan Yang Bidan Desanya Kurang Aktif Melakukan Kunjungan Rumah, Ibu Bayi Pulang Kampung Atau Pindah Domisili Sehingga Tidak Dipantau Kesehatan Bayinya	Pendampingan 1000 Hp, Mulai Dari Ibu Hamil Sampai Bayi Berusia 2 Tahun Oleh Bidan, Jadi Semua Bidan Harus Ada Ibu Hamil/Bayi Yang Didampingi	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.910 Org	5 Org	0%	Tidak Mencapai Karena Tidak Semua Ibu Hamil	Pencegahan Perkawinan Usia Dini Dan	

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Memeriksa Kehamiannya Secara Lengkap Seperti Adanya Kehamilan Yang Tidak Diinginkan Sehingga Ibu Tidak Segera Memeriksa Kehamilannya, Serta Adanya Kehamilan Pada Usia Dini	Peningkatan Kie Tentang Kesehatan Reproduksi Pada Remaja	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.906 Org	5 Org	0%	Tidak Mencapai Targe Karena Masih Ada Persalinan Yang Ditolong Dirumah Karena Si Ibu Tidak Mau Melahirkan Di Fasilitas Kesehatan	Meningkatkan Kie Kepada Ibu Hamil Agar Melahirkan Di Fasilitas Kesehatan Dan Penyediaan Sarana Mobilitas Untuk Menjemput Dan Mengantar Pulang Ibu Yang Bersalin Di PKM.	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	29.650 Org	272 83 Org	92%	Tidak Mencapai Target Karena Masih Ada Balita Yang Tidak Berkunjung Lagi Ke Posyandu Jika Sudah Lengkap Imunisasinya	Pemberdayaan Kader Untuk Menggerakkan Masyarakat Yang Punya Balita Agar Dibawa Ke Posyandu Setiap Bulannya Dan Bidan Desa Aktif Melakukan Kunjungan Rumah Balita Yang Tidak Datang Ke Posyandu	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.616 Org	116 16 Org	100%			
				Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Penduduk Usia	119.16 Org	119 Org	100%			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kesehatan Pada Usia Produktif	Produktif Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2	162				
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18.809 Org	156 Org 59	83%	Tidak Mencapai Target Karena Kurangnya Strip Pemeriksaan Kolesterol Yang Merupakan Salah Satu Indikator Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar Serta Ada Beberapa Lansia Yang Tidak Berkunjung Ke Posyandu Lansia	Pengadaan Strip Kolesterol Sesuai Jumlah Warga Lanjut Usia Serta Petugas Kesehatan Melakukan Kunjungan Rumah Terhadap Lansia Yang Tidak Berkunjung Ke Posyandu Lansia	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	47.465 Org	474 Org 65	100%			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5.262 Org	526 Org 2	100%			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	553 Org	553 Org	100%			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3.488 Org	348 Org 8	100%			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Dengan ReSIKo Terinfeksi HIV Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5.804 Org	580 Org 4	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Jumlah Orang Terduga Menderita HIV Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.480 Org	548 Org 0	100%			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasca Bencana	100 Jiwa	100 Jiwa	100%			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	618 Dok	530 Dok	86%	Tidak Mencapai Target Karena Perubahan Indikator Setelah Pemuktahiran Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tentang Hasil Verifikasi Validasi Tetapi Lupa Tidak Menyesuaikan Target	Melakukan Perbaikan Target	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Dan Olahraga	Jumlah PKM Yang Melaksanakan Kesehatan Olahraga	18 Unit	18 Unit	100%			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	80 Dok	80 Dok	100%			
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah KK Yang Ber-PHBS	54 KK	58 KK	107%			
					Jumlah Desa / Kelurahan Yang Menerapkan Kebijakan Germas	80 Des a/Ke I	85 Des a/Ke I	106%			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional,	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	18 Dok	18 Dok	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				AkupunTUR, Asuhan Mandiri Dan Tradisional Lainnya	Kesehatan Tradisional, AkupunTUR, Asuhan Mandiri Dan Tradisional Lainnya						
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Desa/Kel Mengalami Klb Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam	5 Des a/Ke l	5 Des a/Ke l	100%			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMk)	Jumlah Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMk) Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	600 Org	600 Org	100%			
				Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	160 Dok	160 Dok	100%			
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular	Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan Yang Melaksanakan Penanganan Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies Sesuai Standar	19 Sara na	19 Sara na	100%			
					Jumlah Penanganan Kasus Dbd	286 Kas us	206 Kas us	72%			
					Jumlah Anak Usia 0-11 Bln Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap	5.797 Ana k	580 7 Ana k	100%			
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Masyarakat Mengikuti Kegiatan Advokasi/ Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) Pada Lintas Sektor Dan Lintas Program Di Kabupaten	57.221 Org	585 39 Org	102%			
					Jumlah Masyarakat Miskin Yang Mempunyai Jaminan Pelayanan Kesehatan (Peserta JamkeSDa Yang Terintegrasi Dengan Jkn)	69.279 Org	692 79 Org	100%			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	11 Dok	11 Dok	100%			
				Operasional Pelayanan PKM	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan PKM	18 Dok	18 Dok	100%			
				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten/Kota	Jumlah PKM Yang Di Re-Akreditasi	17 PKM	17 PKM	100%			
					Jumlah PKM Yang Di Akreditasi	1 PKM	1 PKM	100%			
				Penyediaan Dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (Spgdt)	Jumlah Fktp Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Standar	18 PKM	18 PKM	100%			
					Persentase Kegiatanawatdaruratan Yang Tertangani	100 %	100 %	100%			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Malaria	330 Org	170 Org	515%	Capaian Melebihi Target Karena 1 Kasus 25 Kontak Pasien Di Skrining Dan Di Periksa		
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Data Sarana Dan Prasarana Fktp Yang DimutakhiRKAn	65 %	65 %	100%			
				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dok	1 Dok	100%			
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Izin Rumah Sakit Kelas C, D Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Yang Diterbitkan	50 %	50 %	100%			
				Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Surat Rek Izin Operasional Rumah Sakit Yang Diterbitkan	2 Srt	2 Srt	100%			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya							
				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	18 Unit	18 Unit	100%			
			Peningkatan Akses Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Serta Sumber Daya Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan Yang Berkompeten	81,66 %	95 %	116%			
				Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Kepemilikan SIK/ SIP Bagi Tenaga Kesehatan Yang Memberikan Pelayanan	100 %	100 %	100%			
				Pembinaan Dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	746 Dok	746 Dok	100%			
				Perencanaan Kebutuhan Dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKP Dan UKM Di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Rata - Rata Distribusi PemeRataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100 %	100 %	100%			
				Perencanaan Dan Distribusi Serta PemeRataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Dan Distribusi Serta PemeRataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	312 Dok	312 Dok	100%			
				Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis	Persentase SDMk Yang DiTingkatkan Kompetensinya	100 %	95 %	95%			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
				Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Yang DiTingkatkan Mutu Dan Kompetensinya	40 Org	38 Org	95%	Tidak Mencapi Target Karena Keg Ini Diikuti Berdasarkan Srt Pemanggilan Peserta Untuk Mengikuti Bimbingan Tehnis Ataupun Pelatihan-Pelatihan Singkat	Tetap Di Anggarkan Tahun Berikutnya Jika Ada Pemanggilan Peserta Akan Diikutkan Peserta Sesuai Dengan Ketentuan	
			Penyediaan Dan Peningkatan Mutu Kefarmasian Dan Alat Kesehatan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian Dan Sarana Produksi Irtp Yang Memenuhi KetenTUan Dan PersyaRatan Perizinan	70,01 %	70 %	100%			
				Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan Dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (Umot)	Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasian Yang Memenuhi Standar Dan PersyaRatan Perizinan	95 %	95 %	100%			
				Penyediaan Dan Pengelolaan Data Perizinan Dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan Dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (Umot)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (Umot) Yang Dikendalikan Dan Diawasi Dalam Rangka Penerbitan Dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (Umot)	52 Sara na	52 Sara na	100%			
				Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor P-Irt Sebagai	Persentase Sarana Produksi Irtp Yang Memenuhi KetenTUan	42 %	42 P0	100%			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga							
				Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor P-Irt Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor P-Irt Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	80 Dok	80 Dok	100%			
				Pemeriksaan Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market Pada Produksi Dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian Dan Sarana Produksi Irt Yang Memenuhi Ketertuan Dan Persyaratan Perizinan	100 %	100 %	100%			
				Pemeriksaan Post Market Pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Yang Beredar Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk Dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar Yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market Dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan	70 Unit	70 Unit	100%			
			Peningkatan Promosi Kesehatan, Penyehatan Lingkungan, Perbaikan Status Gizi Masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Desa/Kel Siaga Aktif	100 %	100 %	100%			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Serta Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak								
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa/Kel Siaga Aktif	100 %	100 %	100%			
				Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan Dan Pemberdayaan Masyarakat	30 Dok	30 Dok	100%			
				Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kel Yang Melaksanakan UKBM 127 Desa/Kel	127 Des a/Ke l	127 Des a/Ke l	100%			
				Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis Dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	275	282	103%			
			Peningkatan Kapabilitas Kelembagaan, Koordinasi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	94,01 %	100 %	106%			
				Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang	100 %	100 %	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Disusun Tepat Waktu						
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	2 Dok	100%			
				Koordinas Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dok	2 Dok	100%			
				Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok	2 Dok	100%			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Lap	10 Lap	100%			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	846 Org/ Bln	841 Org/ Bln	99%			
				Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Lap	18 Lap	100%			
				Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Barang Milik Daerah Yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	100%			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	4 Lap	4 Lap	100%			
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat	Persentase Realisasi Pendapatan Kewenangan PD	100 %	100 %	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Daerah							
				PeLaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Lap	4 Lap	100%			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	100%			
				Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dok	12 Dok	100%			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	13 Org	13 Org	100%			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Umum PD	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor Yang Disediakan	5 Pkt	5 Pkt	100%			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	3 Pkt	3 Pkt	100%			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	15 Pkt	15 Pkt	100%			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	3 Pkt	3 Pkt	100%			
				Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	96 Dok	96 Dok	100%			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	165 Lap	165 Lap	100%			
				Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan	441 Lap	441 Lap	100%			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD						
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD Penunjang Yang Terpenuhi	100 %	100 %	100%			
				Pengadaan Kendaraan Tersedia Operasional Atau Laporanangan	Jumlah Unit Kendaraan Tersedia Operasional Atau Laporanangan Yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	100%			
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	100%			
				Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	11 Unit	11 Unit	100%			
				Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau bangunan Lainnya Yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	100%			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.444 Lap	444 . 4 Lap	100%			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	60 Lap	60 0 Lap	100%			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	229 Lap	229 Lap	100%			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Daerah	Yang Dipelihara						
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Tersedia Atau Kendaraan Tersedia Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Tersedia Atau Kendaraan Tersedia Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	23 Unit	23 Unit	100%			
				Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	43 Unit	43 Unit	100%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%			
3	Kesehatan	RSUD I LAGALIGO									
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan	24,50 %	30 %	122%			
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase KeTersediaan Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Rumah Sakit	100 %	100 %	100%			
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat - Alat Kesehatan / Penunjang Rumah Sakit	14 Unit	14 Unit	100%			
				Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pasien Rujukan Yang Dilayani	100 %	100 %	100%			
				Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Mou Kemitraan Rumah Sakit	5 Spe sialis	4 Spe sialis	80%			
					Jumlah Pasien Pasca Rawat	866	1 Org	0%	Ada Peningkatan	Melakukan	



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Inap Rumah Sakit Yang Diantar Pulang	Org			Pelayan Pengantaran	Perhitungan Lebih Baik Untuk Peletakan Target	
					Jumlah Shift Tenaga Yang BerTugas Du Luar Jam Kerja Dirumah Sakit	33 Shift	27 Shift	81%	Target Tidak Capai Karena Ada Pemeriksaan Bpk Yang MeRekkan Perbaikan Pembayaran Shift Jaga Makam (Lembur) Petugas	Melakukan Konsultasi Ke Bagian Anggaran Kabupaten, Membuatkan Sk Direktur Terkait Jam Kerja Wajib Dan Kembur Pelayanan	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100 %	91 %	91%			
				Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	100 %	100%			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	8 Dok	8 Dok	100%			
				Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Layanan Administrasi Perangkat Daerah Yang Tertangani	1 Jns	1 Jns	100%			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan	230 Org	230 Org	100%			
				Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest	7 Lap	7 Lap	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					eran SKPD						
				Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	100%			
				Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis Yang Tertata	5 Arsip	5 Arsip	100%			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Kebersihan Umum Rumah Sakit Yang Terbayarkan	10 Bln	10 0 Bln	100%			
					Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	280 Org	280 0 Org	100%			
				Peningkatan Pelayanan BLUD							
				Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah PAD BLUD	83.000 .000.0 00 Rp	817 979 814 24 Rp	99%	Realisasi Tidak Tercapai Karena Sesuai Tarif Dari Bpjs (Klaim Sesuai Diagnose Pasien)		
					Jumlah Kunjungan Pasien BLUD	112.50 0 (Org /Pas ien)	100 510 (Org /Pas ien)	89%			
4	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang									
			Membangun dan memelihara infrastruktur untuk mengendalikan daya rusak Air(Sungai dan pantai)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Infrastruktur Pengendali Daya Rusak Air	47,28 %	49 %	104%			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Mengembalikan dan memelihara fungsi jaringan yang sudah ada (33 Daerah irigasi)		Rasio Jaringan Irigasi	8,84	13	144%			
				Pengelolaan SDA Dan bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (Ws) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Infrastruktur Pengaman Sungai Dan Pantai	76,01 Km	76,01 Km	100%			
				Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai Yang Dibangun	0,28 Km	0,28 Km	100%			
				Pembangunan bangunan Perkuatan Tebing	Panjang bangunan Perkuatan Tebing Yang Dibangun	3,02 Km	3,02 Km	100%			
				Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Yang Dibangun	1 Unit	1 Unit	100%			
				Pembangunan Seawall Dan bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall Dan bangunan Pengaman Pantai Lainnya Yang Dibangun	32,7 M	32,7 M	100%			
				Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai Yang Direhabilitasi	3,69 M	4 M	100%			
				Rehabilitasi bangunan Perkuatan Tebing	Panjang bangunan Perkuatan Tebing Yang Direhabilitasi	0,33 Km	0 Km	100%			
				Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	100%			
				Rehabilitasi Seawall Dan bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall Dan bangunan Pengaman Pantai Lainnya Yang Dipelihara	0,08 Km	0,08 Km	100%			
				Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai/Saluran Pembuang Yang Dinormalisasi	30 Km	23,43 Km	78%	Target Dilaksanakan Berdasarkan Pengajuan Dari Masyarakat Dan Hasil	Lebih Memaksimalkan Pengalokasian Anggaran Sehingga	



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Peninjauan Lapangan Terhadap Kondisi Sungai Yang Ada	Bisa Maksimal Dan Melakukan Koordinasi Yang Baik Ke Stakeholder Terkait	
				Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang LuASnya Dibawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi Kondisi Baik	80,66 Km	80,35 Km	100%			
				Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Yang DiTingkatkan	0,29 Km	0,29 Km	100%			
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Yang DiTingkatkan	0,71 Km	0,71 Km	100%			
				Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Yang Dipelihara	1,61 Km	1,61 Km	100%			
				Operasi Dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi Yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	100%			
				Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Laporan Pengelolaan Irigasi	2 Lap	2 Lap	100%			
				Pengelolaan Dan Pengawasan ALokasi Air Irigasi	Jumlah Laporan Informasi Musim Tanam	2 Lap	2 Lap	100%			
			Pembangunan, peningkatan, perluasan dan operasi dan pemeliharaan SPAM perkotaan dan perDesaan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Spam Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi	60,18 %	63 %	104%			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Spam Jaringan Perpipaan	38 Rt	38 Rt	100%			
				Pembangunan Spam Jaringan Perpipaan Di Kawasan PerDesaan	Panjang Spam Jaringan Perpipaan Kawasan PerDesaan Yang Dibangun	2,17 Km	2,17 Km	100%			
				Peningkatan Spam Jaringan Perpipaan Di Kawasan Perkotaan	Panjang Spam Jaringan Perpipaan Kawasan Perkotaan Yang DiTingkatkan	2,36 Km	2,36 Km	100%			
				Peningkatan Spam Jaringan Perpipaan Di Kawasan PerDesaan	Panjang Spam Jaringan Perpipaan Kawasan PerDesaan Yang DiTingkatkan	4,28 Km	4,28 Km	100%			
				Perluasan Spam Jaringan Perpipaan Di Kawasan Perkotaan	Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses (SR) Melalui Spam Jaringan Perpipaan Di Kawasan Perkotaan	0 Sr	0 Sr	0%	Keg Dibatalkan Karena Peralihan Hibah Ke Keuangan		
				Operasi Dan Pemeliharaan Spam Di Kawasan PerDesaan	Jumlah Kegiatan Spam Jaringan Perpipaan Kawasan PeDesaan Yang Dipelihara	7 Keg	7 Keg	100%			
				Perluasan Spam Jaringan Perpipaan Di Kawasan PerDesaan	Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses (SR) Melalui Spam Jaringan Perpipaan Di Kawasan PerDesaan	750 Sr	555 Sr	74%	Target Dilaksanakan Berdasarkan Pengajuan Dari Masyarakat Dan Hasil Peninjauan Lapangan Terhadap Kebutuhan Perluasan Spam	Lebih Memaksimalkan Pengalokasikan Anggaran Sehingga Bisa Maksimal Dan Melakukan Koordinasi Yang Baik Ke Stakeholder Terkait	
			Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Persentase Infrastruktur Persampahan Yang Dibangun	54,16 %	0 %	0%	Jumlah Sarana/Prasarana Persampahan Yang Disediakan Lebih	Agar Kedepannya Lebih Berhati-Hati Dalam Menentukan Proyeksi Target	

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			prasarana persampahan						Rendah Dari Target Yang Telah Ditetapkan. Terdapat Beberapa Keg Yang Masih Membutuhkan Tambahan Anggaran Untuk Pelaksanaan Keg	Agar Dapat Memenuhi PenCapaian Sasaran Yang Telah Ditentukan Berdasarkan Anggaran Yang Disediakan	
				Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana / Prasarana Persampahan Yang Disediakan	22 Unit	22 Unit	100%			
				Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Truk Sampah Yang Diadakan	1 Unit	1 Unit	100%			
					Jumlah Tempat Sampah Yang Terpilah	80 Unit	80 0 Unit	100%			
					Jumlah Kontainer Sampah Yang Diadakan	4 Unit	4 Unit	100%			
					Jumlah Motor Sampah Yang Diadakan	1 Unit	1 Unit	100%			
			Pembangunan sarana/prasarana serta pengelolaan SPALD	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air LIMBah	Kinerja Penyediaan Pelayanan Spald-S Akses Aman	0,86 %	5 %	530%			
				Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air LIMBah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Yang Memiliki Spald-S Akses Aman 8.721 Rt	8.721 RT	872 1 RT	100%			
				Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Sarana Dan Prasarana Air LIMBah Yang Dibangun 688 SR	688 Sr	688 Sr	100%			
				Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Terlaksananya Penyedotan Lumpur Tinja	12 Bln	0 Bln	0%			
			Pembangunan dan pemeliharaan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik	85,30 %	92 %	108%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			drainase								
				Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Drainase Tidak Tersumbat Pembuangan Aliran Air	377,97 Km	377, 97 Km	100%			
				Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Drainase Yang Dibangun	4,36 Km	4,36 Km	100%			
				Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Drainase Yang Dipelihara 1,29 Km	1,29 Km	1,29 Km	100%			
			Pembangunan dan pemeliharaan bangunan Gedung	Program Penataan bangunan Gedung	Persentase bangunan Gedung Daerah Kabupaten Yang Dibangun	100 %	143 %	143%			
				Penyelenggaraan bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan bangunan (IMB) Dan Sertifikat Laik Fungsi bangunan Gedung	Jumlah bangunan Yang Ber-IMB	5.108 Unit	510 8 Unit	100%			
					Jumlah bangunan Gedung Daerah Kabupaten Yang Dibangun	10 Unit	10 Unit	100%			
				Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (Slf), Peran Tenaga Ahli bangunan Gedung (Tabg), Pendataan bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBg	Jumlah Rek IMB Yang Diberikan Oleh Pemda	75 Rek	75 Rek	100%			
				Perencanaan,	Jumlah bangunan Gedung	6 Unit	6 Unit	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pembangunan, Pengawasan, Dan Pemanfaatan bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten Yang Dibangun						
				Pemeliharaan Dan Perawatan bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan Gedung Negara Milik Pemerintah Kabupaten Yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	100%			
			Pembangunan dan pemeliharaan bangunan/Gedung layanan publik, keagamaan dan lingkungan publik Prioritas pembangunan islamic centre	Program Penataan bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Luas RTH Publik Yang Ditata	0,26 %	0 %	108%			
				Penyelenggaraan Penataan bangunan Dan Lingkungannya Di Daerah Kabupaten/Kota	Luas RTH Publik Yang Ditata	70,79 Ha	70,79 Ha	100%			
				Penataan bangunan Dan Lingkungan	Jumlah RTH Publik Yang Ditata	6 Unit	6 Unit	100%			
					Jumlah bangunan Publik Yang Di Bangun	4 Unit	4 Unit	100%			
			Membangun dan memelihara jalan/jembatan kondisi rusak ringan dan rusak berat	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik	42,94 %	30 %	69%	Adanya Perubahan Sk Status Jalan Pada Tahun 2023 Serta Penyesuaian Klasifikasi Jalan Berdasarkan Asistensi Dari Kementerian PUPR	Diharapkan Tahun Berikutnya Ruas Jalan Yang Masuk Dalam Dok Pelaksanaan Anggaran Adalah Ruas Jalan Yang Masuk Dalam Sk Jalan Kabupaten	



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Kondisi Baik	671,41 Km	665,01 Km	99%	Adanya Perubahan Sk Status Jalan Pada Tahun 2023 Serta Penyesuaian Klasifikasi Jalan Berdasarkan Asistensi Dari Kementerian PUPR	Lebih Memaksimalkan Pengalokasikan Anggaran Sehingga Bisa Maksimal Dan Melakukan Koordinasi Yang Baik Ke Stakeholder Terkait	
					Jumlah Jembatan Kondisi Baik	380 Unit	380 Unit	100%			
				Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen Database Jalan/Jembatan Yang DiUpdate	2 Dok	2 Dok	100%			
				Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Yang DiTingkatkan Menjadi Jalan Aspal	10 Km	9 Km	90%	Adanya Perubahan Sk Status Jalan Pada Tahun 2023 Serta Penyesuaian Klasifikasi Jalan Berdasarkan Asistensi Dari Kementerian PUPR	Lebih Memaksimalkan Pengalokasikan Anggaran Sehingga Bisa Maksimal Dan Melakukan Koordinasi Yang Baik Ke Stakeholder Terkait	
					Panjang Jalan Yang DiTingkatkan Menjadi Jalan Kerikil	24,08 Km	24,08 Km	100%			
					Panjang Jalan Yang DiTingkatkan Menjadi Jalan Beton	1 Km	1 Km	100%			
				Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan Yang Dilebarkan Menjadi Jalan Kerikil	15 Km	24,08 Km	161%			
					Panjang Jalan Yang Dilebarkan Menjadi Jalan Aspal	0,5 Km	0,5 Km	100%			
					Panjang Jalan Yang Dilebarkan Menjadi Jalan Beton	0,7 Km	0,7 Km	100%			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Yang Dipelihara	7,5 Km	7,5 Km	100%			
				Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan Yang Dibangun	16 Unit	16 Unit	100%			
				Pelebaran Jembatan	Jumlah Jembatan Yang Dilebarkan	1 Unit	1 Unit	100%			
				Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan Yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	100%			
			Melakukan pelatihan bagi SDM jasa konstruksi, menjamin keTersediaan dan tersosialisasi informasi jasa konstruksi serta melakukan monitoring pelaksanaan fisik jasa konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Teknis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	52,42	73	139%			
				Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Teknis Yang Terlatih Bersertifikat	727 Org	694 Org	95%			
				Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi Yang Dilatih	150 Org	43 Org	29%	Disaat Rekrutmen Peserta, Kuota Peserta Tidak Tercapai Sesuai Target Dikarenakan Persyaratan Yang Tidak Mampu Dipenuhi Oleh Peserta.	Menyesuaikan Dengan Jadwal Pelaksanaan Keg Yang Telah Ditetapan Oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah Vi Makassar	
				Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi Yang Dilatih / Difasilitasi	135 Org	135 Org	100%			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pembinaan Dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Jasa Konstruksi	150 Org	150 Org	100%			
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SIPjaki Cakupan Kabupaten Yang TerUpdate	28.571 %	285 71 %	100%			
				Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan SIPjaki Yang Update	7 Layan nan	7 Laya nan	100%			
				Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan Dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah SDM Yang Terlatih Bersertifikat	229 Org	229 Org	100%			
				Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, Dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Penyedia Dan Pengguna Jasa Yang Mengikuti Bimtek	100 Org	59 Org	59%			
				Pengawasan Dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, Dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Kegiatan Jasa Konstruksi Yang Dimonitoring	100 Pkt	100 Pkt	100%			
			Menyusun dan menetapkan peraturan tata ruang serta mengoptimalkan pengendalian pemanfaatan ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Penataan Ruang	49,24 %	40 %	81%	Adanya Beberapa Keg Yang Tidak Terlaksana Baik Akibat Gagal Lelang Maupun Narasumber Yang Tidak Tersedia	Agar Kedepannya Lebih Berhati-Hati Dalam Menentukan Proyeksi Target Agar Dapat Memenuhi PenCapaian Sasaran Yang Telah Ditentukan Serta Lebih Proaktif Dalam Melakukan Koordinasi Terkait PerBup RDTR	



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Dengan Pemerintah Pusat	
				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Dan Rencana Rinci Tata Ruang (Rrtr) Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Rencana Tata Daerah/Rencana Rinci Tata Ruang	100 %	100 %	100%			
				Pelaksanaan PerseTUjuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi Dan Penetapan Rrtr Kabupaten/Kota	PerBup RDTR Yang Dihasilkan	2 Dok	2 Dok	100%			
				Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen RDTR Yang Dihasilkan	1 Dok	0 Dok	0%	Keg Dibatalkan Karena Gagal Lelang Dikarenakan Spesifikasi Tenaga Ahli Yang Dibutuhkan Kurang Sesuai	Lebih Memaksimalkan PengaLokasikan Anggaran Sehingga Bisa Maksimal Dan Melakukan Koordinasi Yang Baik Ke Stakeholder Terkait	
				Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Sosialisasi Yang Dilaksanakan	100 %	0 %	0%	Sosialisasi Tidak Terlaksana Dikarenakan Pemateri/Tenaga Ahli (Penyusun RDTR) Tidak Ada	Lebih Memaksimalkan PengaLokasikan Anggaran Sehingga Bisa Maksimal Dan Melakukan Koordinasi Yang Baik Ke Stakeholder Terkait	
				Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi	150 Org	0 Org	0%	Sosialisasi Tidak Terlaksana Dikarenakan Pemateri/Tenaga Ahli (Penyusun RDTR) Tidak Ada	Lebih Memaksimalkan PengaLokasikan Anggaran Sehingga Bisa Maksimal Dan Melakukan Koordinasi Yang Baik Ke Stakeholder	



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Terkait	
				Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi Tentang Penataan Ruang	100 %	100 %	100%			
				Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Papan HIMBauan/Papan Informasi Penataan Ruang	3 Unit	3 Unit	100%			
				Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penertiban Dan Penegakan Hukum Bidang Tata Ruang	100 %	100 %	100%			
				Koordinasi Dan Sinkronisasi Penertiban Dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pengawasan Penataan Ruang Yang Dihasilkan	4 Lap	4 Lap	100%			
				Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Keterangan Kesesuaian Ruang Yang Diterbitkan	123 Srt	123 Srt	100%			
			Mengoptimalkan penyusunan Dok dan peLap perencanaan, dan penganggaran berbasis kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100 %	96 %	96%			
				Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	100%			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	2 Dok	100%			
				Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Dan Laporan Hasil	2 Dok	2 Dok	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				RKA-SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						
				Koordinas Dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok	2 Dok	100%			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Lap	16 Lap	100%			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	87 Org/ Bln	87 Org/ Bln	100%			
				Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	1 Lap	100%			
				Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Lap	18 Lap	100%			
				Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Barang Milik Daerah Yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	100%			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	4 Lap	4 Lap	100%			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian	100 %	62 %	62%			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Perangkat Daerah						
				Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kpegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kpegawaian	2 Dok	2 Dok	100%			
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Org	2 Org	25%			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Org	15 Org	100%			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Umum PD	100 %	96 %	96%			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor Yang Disediakan	42 Pkt	25 Pkt	60%	Target Dilaksanakan Berdasarkan Kebutuhan Perbaikan Komponen Instalasi Listrik Yang Rusak	Lebih Memaksimalkan PengaLokasikan Anggaran Sehingga Bisa Maksimal Dan Melakukan Koordinasi Yang Baik Ke Stakeholder Terkait	
				Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	36 Pkt	29 Pkt	81%	Adanya Beberapa Item Yang Tidak Sesuai Spesifikasi Yang Diharapkan	Lebih Memaksimalkan PengaLokasikan Anggaran Sehingga Bisa Maksimal Dan Melakukan Koordinasi Yang Baik Ke Stakeholder Terkait	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	33 Pkt	33 Pkt	100%			
				Penyediaan Barang Cetakan Dan	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan	11 Pkt	11 Pkt	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penggandaan	Yang Disediakan						
				Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	72 Dok	64 Dok	89%			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	760 Kali	745 Kali	98%			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Yang Dilaksanakan	199 Kali	199 Kali	100%			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD-PD Penunjang Yang Terpenuhi	100 %	78 %	78%			
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Tersedia Atau Kendaraan Tersedia Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Tersedia Atau Kendaraan Tersedia Jabatan Yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	100%			
				Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar Yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	100%			
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	71 Unit	71 Unit	100%			
				Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	16 Unit	16 Unit	100%			
				Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau bangunan Lainnya Yang Disediakan	2 Unit	1 Unit	50%			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	98 %	98%			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Layanan Surat Menyurat Yang Tertangani	1.427 Jns	142 Jns 7	100%			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik Dan Lainnya Yang Terpenuhi	96 Jns	69 Jns	72%	Terealisasi 24 Rekening Dari 24 Rekening. Ada Perhitungan Jumlah Rekening Yang Kurang Tepat Saat Penentuan Target. Hasrusnya 4 Rekening Listrik Dan 2 2 Air Pdam.Di Tw 1 Pembayaran Air Tidak Terbayar	Lebih Memaksimalkan PengaLokasikan Anggaran Sehingga Bisa Maksimal Dan Melakukan Koordinasi Yang Baik Ke Stakeholder Terkait	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	19 Org	19 Org	100%			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	100 %	76 %	76%			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Tersedia Atau Kendaraan Tersedia Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Tersedia Atau Kendaraan Tersedia Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit	20 Unit	91%			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Tersedia Operasional Atau Laporanangan	Jumlah Kendaraan Tersedia Operasional Atau Laporanangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	100%			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	100%			
				Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	111 Unit	43 Unit	39%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor Dan	2 Unit	2 Unit	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Gedung Kantor Dan bangunan Lainnya	bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi						
5	Urusan Perumahan Dan kwsn Permukiman	Dinas Perumahan, kwsn Permukiman Dan Pertanahan									
			Standar Pelayanan Minimal Perumahan	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Jumlah Rumah Yang Dibangun Oleh Pengembang	100 %	100 %	100%			
					Persentase Rumah Warga Negara Korban Bencana Atau Terkena ReLokasi Yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100 %	100 %	100%			
				Identifikasi Perumahan Di Lokasi Rawan Bencana Atau Terkena ReLokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pendataan Perumahan Di Lokasi Rawan Bencana Atau Terkena ReLokasi Program Kabupaten	1 Lap	1 Lap	100%			
				Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun Dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, Dan Rumah Khusus	1 Dok	1 Dok	100%			
				Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau ReLokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Korban Bencana Atau ReLokasi Program Kabupaten/Kot A Yang Direhabilitasi Dan Dibangun	0 %	0 %	0%	Dilakukan Pergeseran Anggaran Untuk Keg Ini, Hal Ini Dikarenakan Pada Tahun 2023 Tidak Ada Sk Penetapan Bencana, Yang Merupakan Salah Satu PersyaRatan Untuk Merealisasikan Pembangunan Atau Rehabilitasi Pada		



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Daerah Yang Terkena Bencana Atau Yang Berdampak ReLokasi Program Pemerintah'		
				Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Yang Terehabilitasi	0 unit	0 unit	0%	Dilakukan Pergeseran Anggaran Untuk Keg Ini, Hal Ini Dikarenakan Pada Tahun 2023 Tidak Ada Sk Penetapan Bencana, Yang Merupakan Salah Satu PersyaRatan Untuk Merealisasikan Pembangunan Atau Rehabilitasi Pada Daerah Yang Terkena Bencana Atau Yang Berdampak ReLokasi Program Pemerintah'		
				Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Yang Terbangun	0 unit	0 unit	0%	Dilakukan Pergeseran Anggaran Untuk Keg Ini, Hal Ini Dikarenakan Pada Tahun 2023 Tidak Ada Sk Penetapan Bencana, Yang Merupakan Salah Satu PersyaRatan Untuk Merealisasikan Pembangunan Atau Rehabilitasi Pada Daerah Yang Terkena Bencana Atau Yang Berdampak ReLokasi Program Pemerintah'		
				Pembangunan Rumah Khusus Beserta PSU Bagi Korban Bencana Atau	Jumlah Rumah Terbangun	0 Unit	0 Unit	0%	Dilakukan Pergeseran Anggaran Untuk Keg Ini, Hal Ini		



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				ReLokasi Program Kabupaten/Kota					Dikarenakan Pada Tahun 2023 Tidak Ada Sk Penetapan Bencana, Yang Merupakan Salah Satu Persyaratan Untuk Merealisasikan Pembangunan Atau Rehabilitasi Pada Daerah Yang Terkena Bencana Atau Yang Berdampak ReLokasi Program Pemerintah'		
				Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum Dan/Atau Rumah Khusus	Persentase Rumah Susun Umum Dan/Atau Rumah Khusus Yang Dikelola	100 %	88 %	88%			
				Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum Dan/Atau Rumah Khusus	Jumlah Rumah Susun Umum Dan/Atau Rumah Khusus Yang Dikelola	8 Lok	7 Lok	88%	Terkendala Pada Penanganan Pengelolaan Rusunawa Sumasang Desa Soroako Kec. Nuha	diperlukan revisi SK Pengelola dengan memasukkan sdm dari Desa dan Kecamatan sebagai anggota, direncanakan pada tahun 2024 untuk pengusulan UPTD sehingga dapat lebih terorganisir dengan baik	
				Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Rek Perizinan Perumahan Yang Diterbitkan	3 Rek	3 Rek	100%			
				Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan	3 Lap	3 Lap	100%			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penataan Dan	Program Kawasan Permukiman	Rasio Rumah Layak Huni	18,94	19	98%			
			Peningkatan Kualitas		Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha Yang Ditangani	18,94	3	14%	Belum Adanya Anggaran Yang Diprioritaskan Untuk Penanganan kwsn Kumuh Berdasarkan Sk Kumuh Yang Ada	Revisi Kebijakan Terkait kwsn Kumuh Berdasarkan Dok Rp2kpkpk Yang Telah Ada Dan Sosialisasi Terkait Dok tersebut	
			Hunian kwsn	Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Pendukung Terkait Izin Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman Yang Difasilitasi	3 Dok	3 Dok	100%			
			Permukiman Yang Layakdan Perbaikan Rumah	Penyusunan Dan/Atau Review Serta Legalisasi Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman Dan Permukiman Kumuh				0%			
			Tidak Layak Huni	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman Dan Permukiman Kumuh	Jumlah Kegiatan Pengendalian Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman Yang Difasilitasi	3 Keg	3 Keg	100%			
			(Rtlh) Khususnya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yangterjangkau	18,94 %	19 %	100%			
			Pada kwsn		Luas Penanganan Infrastruktur Kawasan Kumuh	16,1 Ha	2,2 Ha	14%			
			Permukiman Kumuh	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) Dan Detail Engineering Design (Ded)							



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh							
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang Diperbaiki	1.701 Unit	170 Unit 1	100%	Terlaksana Dengan Menggunakan Anggaran Pusat Melalui Bantuan Stimulan Bedah Rumah Yang Ditargetkan Di Kab. Luwu Timur 471 Unit, Terealisasi 471 Unit. Selain Itu Juga Menggunakan Bantuan Keuangan Khusus (Bkk), Yang Ditargetkan 10 Unit Per Desa Yang Terealisasi Pada 123 Desa (Sumber Dpmd), Terealisasi 1230 Sehingga Total Keseluruhan 1701 Unit		
				Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Kawasan Yang Dilakukan Pembangunan Pemugaran/Pere Majaan Permukiman Kumuh Kewenangan Kabupaten	13 kws n	13 kws n	100%	Terlaksana Pada 13 kwsn Antara Lain kwsn Watangpanua, Pattengko, Pekaloea, Wasuponda, Lampenai, Maleku, Burau Pantai, Wewangriu, Balantang, Mabonta, Balo-Balo, Lakawali, Pekaloea, Hanya Saja Luasan Untuk Penanganan Pemugaran Dan Peremajaan Pada kwsn Tersebut Sangat		

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Kecil, Sehingga Sangat Berpengaruh Pada Capaian Luasan Penanganan kwsn Kumuh		
			Penyediaan Infrastruktur kwsn	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Aman Di Dukung Dengan PSU	70,87 %	80 %	112%			
			Perumahan	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Lingkungan Perumahan Yang Didukung PSU	11 Ling kun gan	11 Ling kun gan	100%			
				Penyediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Perumahan Dengan PSU Terbangun	11 Unit/ kws n/De sa	11 Unit/ kws n/De sa	100%			
6	Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja									
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini Dan Cegah Dini , Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan Perda	100 %	100 %	100%			
					Persentase Gangguan	100 %	100 %	100%			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Trantibum Yang Dapat Diselesaikan						
					Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda Dan Perkada	100 %	100 %	100%			
				Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peresentase Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Ditangani	100 %	100 %	100%			
				Pencegahan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini Dan Cegah Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, Dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Yang Dicegah Melalui Deteksi Dini Dan Cegah Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, Dan Pengawasan	150 Kas us	150 Kas us	100%			
				Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum BerdasaRKAn Perda Dan Perkada Melalui Penertiban Dan Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum BerdasaRKAn Perda Dan Perkada Melalui Penertiban Dan Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa Yang Dilakukan Penindakan	225 Kas us	225 Kas us	100%			
			Peningkatan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Dan Unsur Rakyat Terlatih Lainnya	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	15 Dok	15 Dok	100%			
			Pemberdayaan Perlindungan	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Yang Memuat Hasil	26 Dok	26 Dok	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Masyarakat Dalam Rangka Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Dalam Rangka Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketenteraman Dan Ketertiban Umum						
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia(Sdm) Polisi Pamong Praja Dan Satuan Perlindungan Masyarakat TerMasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja Dan Satuan Perlindungan Masyarakat TerMasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja Dan Satuan Perlindungan Masyarakat Yang DiTingkatkan Kapasitasnya	200 Org	200 Org	100%			
			Peningkatan Koordinasi Dengan Provinsi Lain Dan Kabupaten/Kota Dan Instansi Vertikal Lainnya Terkait	Kerjasama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan Dan Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan	1 Dok	1 Dok	100%			
			Pengadaan Sarana Dan Prasarana	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana Dan Prasarana Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Yang Tersedia	306 Unit	306 Unit	100%			
			Peningkatan Kualitas Teknis Anggota Satpol Pp	Penyusunan SOP Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum Dan Ketertiban Masyarakat Yang Telah Dibuat Dan DimuktahIRKAN	20 Dok	20 Dok	100%			
				Penyediaan Layanan	Jumlah Laporan Penyediaan	4 Lap	4 Lap	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah Dan Perkada	Layanan Dampak Penegakan Perda Dan Perkada Yang Terlayani						
				Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda	100 %	100 %	100%			
					Persentase Penegakan Perda Yang Responsif Gender	100 %	100 %	100%			
					Persentase Perda Dan Perkada Yang Di Tegakan	100 %	100 %	100%			
			Peningkatan Kemampuan Dan Pemahaman Masyarakat Terkait Produk Hukum Daerah Melalui Keg Sosialisasi Dan Penyuluhan Peraturan	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	26 Lap	26 Lap	100%			
				Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Wali Kota	56 Lap	56 Lap	100%			
				Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur Yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	7 Kasus	7 Kasus	100%			
			Peningkatan Kemampuan	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Persentase Pelanggaran Perda Yang Tertangani	100 %	100 %	100%			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyidik Pns Dan Anggota Satpol Pp Dalam Penegakan Peraturan Daerah	(PPNS) Kabupaten/Kota	Dengan Baik Oleh PPNS						
					Persentase PPNS Yang Berkompeten	100 %	100 %	100%			
				Pengembangan Kapasitas Dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Penegakan Perda Dan Perkada	2 Lap	2 Lap	100%			
			Meningkatkan Pelayanan Dan Tertib Administrasi Perencanaan, Keuangan, Barang Milik Daerah, Kepegawaian, Umum Dan Sarana Dan Prasarana Penunjang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100 %	100 %	100%			
				Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	100%			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	2 Dok	2 Dok	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	100%			
				Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	100%			
				Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	100%			
				Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	100%			
				Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Lap	3 Lap	100%			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Lap	8 Lap	100%			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	39 Org/ Bln	39 Org/ Bln	100%			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dok	4 Dok	100%			
				Pelaksanaan	Jumlah Dokumen	4 Dok	4 Dok	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
				Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dok	4 Dok	100%			
				Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan Dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dok	4 Dok	100%			
				Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Lap	12 Lap	100%			
				Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Barang Milik Daerah Yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	100%			
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dok	2 Dok	100%			
				Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1 Lap	1 Lap	100%			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	12 Lap	12 Lap	100%			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	100%			
				Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dok	4 Dok	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Monitoring, Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dok	4 Dok	100%			
				Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai BerdasaRKA Tugas Dan Fungsi	Jumlah Pegawai BerdasaRKA Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	3 Org	3 Org	100%			
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	39 Org	39 Org	100%			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Org	7 Org	100%			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor Yang Disediakan	166 Pkt	165 Pkt	99%			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	191 Pkt	191 Pkt	100%			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	4 Pkt	4 Pkt	100%			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	3 Pkt	3 Pkt	100%			
				Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	72 Dok	72 Dok	100%			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap	12 Lap	100%			
				Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan	12 Lap	12 Lap	100%			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD						
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD Penunjang Yang Terpenuhi	100 %	100 %	100%			
				Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	14 Unit	14 Unit	100%			
				Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau bangunan Lainnya Yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100%			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap	12 Lap	100%			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	60 Lap	60 Lap	100%			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	100%			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Tersedia Atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Tersedia Atau Kendaraan Tersedia Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Tersedia Jabatan							
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Tersedia Operasional Atau Laporanangan	Jumlah Kendaraan Tersedia Operasional Atau Laporanangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya	36 Unit	36 Unit	100%			
				Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	31 Unit	31 Unit	100%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	100%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit	100%			
7	Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah									
			(1).Penetapan Regulasi Dalam Mendukung Penyelenggara n		Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	100 %	91 %	91%	Capaian Kinerja Indikator Spm "%tase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana" Sebesar 91,46%. Capaian Tersebut Berasal Dari Pelaksanaan Layanan Informasi Kebencanaan Melalui Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi	Telah Dianggarkan Pada Dpa-Skpd Ta. 2024, Pengadaan Papan HIMBauan Peringatan Dini Bencana Untuk Kec. Wotu, Nuha Dan Towuti	



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Dan Edukasi (Kie) Rawan Bencana Kabupaten/Kota Dengan Peserta Sebanyak 250 Org, Penyebarluasan Informasi Kebencanaan Melalui Media Sosial 1.895 Org, Papan HIMBauan Informasi Bencana Dan Rambu Peringatan Dini Bencana Di 10 Kecamatan 274.369 Org Dengan Akumulasi Secara Keseluruhan Sebesar 276.254 Org Dibagi Jumlah Penduduk Kab. Luwu Timur 302.039 Jiwa (Baseline Data) Realisasi Yang Tidak Sesuai Dengan Target Karena Terdapat 3 Kecamatan Yang Belum Memiliki Papan HIMBauan Karena Kondisi Papan HIMBauan Yang Sebelumnya Rusak Berat		
			Penanggulang an Bencana, (2).Menyelengga rakan	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara	100 %	100 %	100%			
			Pembentukan Desa Tangguh		Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan	100 %	100 %				

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Bencana, (3).Pemenuhan Informasi		Dan Evakuasi Korban Bencana Yang Responsif Gender						
			Kebencanaan Sebagai Early Warning Sistem Terhadap Ancaman Bencana Yang Ada, (4).Peningkatan Upaya		Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	100 %	100%			
			Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana, (5).Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pada Saat Tanggap Darurat Bencana, (6).Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Pasca Bencana, (7).Mengoptimalkan Bimbingan, Pendidikan Dan Pelatihan Serta Pembinaan Teknis Bagi Aparatur Dan Masyarakat Tentang Penanggulangan	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	0,08 %	0 %	100%			
			Bencana	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana Yang	1 Dok	1 Dok	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Dilegalisasi						
				Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (Kie) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jns Bencana)	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (Kie) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jns Bencana) Secara Tatap Muka Kepada Penduduk Yang Tinggal Di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jns Ancaman Yang Ada Di Kawasan Tempat Tinggalnya	250 Org	250 Org	100%			
				Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Cakupan Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2.656 , %	265 6 , %	100%			
				Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Yang Dilegalisasi	1 Dok	1 Dok	100%			
				Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Dan Aparatur Yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana	50 Org	50 Org	100%			
				Pengendalian Operasi Dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Perlindungan Dan Kesiapsiagaan Bencana Yang Di Beli	21 Unit	21 Unit	100%			
				Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan Yang DiTingkatkan KapasitASNya Dalam Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana	4 kws n	4 kws n	100%			
				Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC Yang Dikembangkan Kapasitas Teknis Dan Manajerialnya	43 Org	43 Org	100%			
				Penyusunan Rencana	Jumlah Dokumen Rencana	1 Dok	0 Dok	0%	Target Kinerja Adalah	Bidang Terkait	



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kontijensi	Kontinjensi Yang Dilegalisasi				Jumlah Dok Renkon Yang Disusun Sampai Dinyatakan Sah/Legal, Target 1 Dok Namun Tidak Realisasi. Keg Tersebut Tidak Terlaksana Karena Rencana Awal Pelaksanaan Keg Yang Telah Disepakati Dengan Tenaga Ahli Mengalami Pergeseran Jadwal, Dimana Pada Saat Penentuan Jadwal Ulang Pelaksanaan Dari Bpbd BerTepatan Dengan Jadwal Keg Tenaga Ahli Pada Daerah Lain, Hanya Belanja Perjalanan Tersedia Luar Daerah Yang Digunakan Sebesar Rp. 6.230.000,- Karena Dilaksanakan Koordinasi Dengan Bpbd Provinsi Terkait Tenaga Ahli Tim Penyusun	Untuk Melakukan Koordinasi Dengan Bpbd Provinsi Maupun Bnpb Kemungkinan Untuk Difasilitasi Penyusunan Dok Tersebut Dan Telah Diusulkan Penyusunan Renkon Longsor Melalui Forum Opd Bpbd Provinsi Sulawesi Selatan.	
				Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur Dan Warga Negara Yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	250 Org	250 Org	100%			
				Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	Cakupan Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Yang Responsif Gender	100 %	100 %	100%			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Sk Penetapan StaTUs Darurat Bencana Dan SKPDb Yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam BerdasaRKAn Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dok	1 Dok	100%			
				Pencarian, Pertolongan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, Dan Dievakuasi Per Jns Kejadian Bencana	1.283 Org	1283 Org	100%			
				Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	1.283 Org	1283 Org	100%			
				Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Lap	1 Lap	100%			
				Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Sk Penetapan StaTUs Darurat Bencana Dan SKPDb Yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam BerdasaRKAn Hasil Dokumen Laporan Investigasi Klb Dan Epidemiologi Terpadu	1 Dok	1 Dok	100%			
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Cakupan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Sesuai SOP Kebencanaan 100 %	100 %	100 %	100%			
				Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Daerah	3 Dok	3 Dok	100%			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dok	1 Dok	100%			
				Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JiTu PASNa) Rencana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana (r3p)	4 Dok	4 Dok	100%			
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	95 %	99 %	104%			
				Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	100%			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun Tepat Waktu	2 Dok	2 Dok	100%			
				Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Yang Disusun Tepat Waktu	2 Dok	2 Dok	100%			
				Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Yang Disusun Tepat Waktu	2 Dok	2 Dok	100%			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Yang Disusun	10 Lap	10 0 Lap	100%			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Yang Terselenggara Dengan Baik	100 %	91 %	91%	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Hanya		



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Sebesar 90,62%, Hal Ini Disebabkan Karena Salah Satu Sub Keg Yaitu Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Realisasinya Hanya 81,25%, Penyebabnya Adalah Terdapat Jabatan Struktural Eselon II, Fungsional Penyetaraan Dan Jabatan Pelaksana Yang Belum Terisi Personil Sehingga Berpengaruh Terhadap Realisasi Kinerja Dan Keuangan.		
				Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang Gaji Dan Tunjangan Terbayarkan	16 Org/ Bln	13 Org/ Bln	81%	Target Kinerja Adalah Jumlah Asn Yang Gaji Dan Tunjangan Terbayarkan Sebanyak 16 Org Dan Terealisasi Hanya 13 Org Sehingga Capaian Kinerja 81,25 %. Hal Ini Disebabkan Karena Adanya Struktural Eselon II, Jabatan Fungsional Penyetaraan Dan Jabatan Pelaksana Yang Belum Terisi Personil.	Mengajukan Persuratan Terkait Permintaan/ Pengusulan Penambahan Staf	
				Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semest	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semest eran SKPD Yang Disusun	18 Lap	18 Lap	100%			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				eran SKPD	Tepat Waktu						
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase BMD Yang DiAdministrasiKan Sesuai Standar	100 %	100 %	100%			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD Yang Disusun	4 Lap	4 Lap	100%			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	100%			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	18 Org	18 Org	100%			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor Yang Di Sediakan	8 Jns	8 Jns	100%			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	20 Jns	20 Jns	100%			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan/Atau Penggandaan Yang Disediakan	3 Jns	3 Jns	100%			
				Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- Undangan	60 Dok	60 Dok	100%			
				Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Yang Difasilitasi	350 Kali	345 Kali	99%			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD Yang Diikuti (Kali)	60 Kali	60 Kali	100%			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-Perangkat Daerah Penunjang Yang Terpenuhi	100 %	91 %	91%	Realisasi Kinerja Keg Tidak Sesuai Dengan Target Yang Direncanakan Karena Dari 4 Sub Keg Pengampuh, Terdapat 1 Sub Keg Yang Realisasinya Kurang Maksimal Yaitu Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya Sehingga Mempengaruhi Realisasi Kinerja Dan Keuangan		
				Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Diadakan	6 Unit	6 Unit	100%			
				Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya Yang Diadakan	8 Unit	5 Unit	63%	Target Kinerja Adalah Jumlah Peralatan Dan Mesin Yang Diadakan Sebanyak 8 Unit Dan Realisasi 5 Unit Dengan Capaian Kinerja 62,50%. Adapun Peralatan Dan Mesin Yang Diadakan Yaitu Printer 3 Unit, Scanner 1 Unit Dan Notebook 1 Unit. Sedangkan Bm. Pengadaan Komputer Pc Sebanyak 3 Unit Tidak Realisasi Karena Harga Di E-Catalog Lebih Tinggi Dari Harga Yang Tersedia Di Dpa-Skpd.	Kedepannya Untuk Mencermati Harga Di E-Catalog	
				Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	1 Unit	1 Unit	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Atau bangunan Lainnya	Atau bangunan Lainnya Yang Diadakan						
				Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau bangunan Lainnya Yang Diadakan	3 Unit	3 Unit	100%			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	91 %	107%			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk Dan Keluar Yang DiAdministrasiKan	400 Srt	466 Srt	107%			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon, Listrik Dan Air Yang Terbayarkan	1 Lap	1 Lap	100%			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor Yang Dibayarkan	2 Org	2 Org	100%			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Terpelihara Dengan Baik	100 %	103 %	103%			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Tersedia Operasional Atau Laporanangan	Jumlah Kendaraan Operasional Atau Laporanangan Yang Dipelihara	13 Unit	13 Unit	100%			
				Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	34 Unit	37 Unit	109%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan/Atau bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	100%			
8	Urusan	Dinas									



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan									
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %	100 %	100%			
						100 %	100 %				
				Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, Dan Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Tanggap (Respon Time) Penanganan Kebakaran	14 Menit	14 Menit	100%			
				Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dok	1 Dok	100%			
				Pemadaman Dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebakaran Yang Dapat Di Tangani	100 Kali	100 Kali	100%			
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket Dan Pemadaman Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	4 Lap	4 Lap	100%			
				Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran Dan Non Kebakaran	Jumlah Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran Dan Non Kebakaran Yang	100 Kali	100 Kali	100%			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Di Tangani						
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan PeTUGas Piket Dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran Dan Non Kebakaran	1 Dok	1 Dok	100%			
				Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Yang Di Tangani	2 Kali	2 Kali	100%			
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Penanganan Kebakaran Yang Disebabkan B3 Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	100%			
				Standarisasi Sarana Dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran Dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana Dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran Dan Alat Pelindung Diri Secara BerKAla (Setiap Tahun), Sah, Dan Legal	1 Dok	1 Dok	100%			
				Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran Dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pencegahan , Penanggulangan Kebakaran Dan Alat Pelindung Diri Yang Diadakan	14 Jns	14 Jns	100%			
					Jumlah Sarana Dan Prasarana Untuk Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran	64 Unit	64 Unit	100%			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Dan Alat Pelindung Diri Yang Sah Dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait						
				Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis Dan Analisis Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran	11 Org	11 Org	100%			
				Pengelolaan Sistem Komunikasi Dan Informasi Kebakaran Dan Penyelamatan (Skik)	Jumlah Laporan Informasi Kebakaran Dan Penyelamatan Yang Di Tangani	100 Lap	100 Lap	100%			
					Jumlah Desa/Kel Yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran Dan Penyelamatan (Skikp) Yang Bisa Di Secara Perbaharui Atau DimutakhiRKAn Secara BeRKAla (Setiap Tahun), Berkelanjutan Dan Real Time Yang Dimiliki Oleh Desa/Kel Setiap Tahunnya	0 Des a/Ke l	0 Des a/Ke l	0%			
				Penyelenggaraan Kerjasama Dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, Dan Kemitraan Dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama Dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota Dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kebakaran Dan Non Kebakaran	1 Dok	1 Dok	100%			
				Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase bangunan Gedung Yang Memenuhi PersyaraRatan Proteksi Kebakaran	10 %	10 %	100%			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Yang Memuat Data bangunan/Gedung/Lingkungan Yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dok	1 Dok	100%			
				Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Yang Memuat Data bangunan/Gedung/Lingkungan Yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 Dok	1 Dok	100%			
				Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Jumlah Kejadian Kebakaran Yang Diinvestigasi	100 %	100 %	100%			
				Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian Dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Investigasi Kebakaran Yang Dilakukan	12 Kejadian	12 Kejadian	100%			
					Jumlah Dokumen Yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran Yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian Dan Pengujian Dan Penelitian	1 Dok	1 Dok	100%			
				Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Desa/Kel Siaga Kebakaran	34,37 %	34 %	100%			
				Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi Dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat Yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	22 Org	22 Org	100%			
				Pembentukan Dan Pembinaan Relawan	Jumlah Satuan Relawan Kebakaran Yang Dibentuk	11 Unit	11 Unit	100%			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemadam Kebakaran	Dan Dibina						
					Jumlah Desa/Kel Yang TerbenTUK Dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran Pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKI) Setiap Tahunnya	11 Des a/Ke l	11 Des a/Ke l	100%			
				Penyelenggaraan Operasi Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Korban Yang Berhasil Dievakuasi Dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	100 %	100 %	100%			
				Penyelenggaraan Operasi Pencarian Dan Pertolongan Pada Peristiwa Yang Menimpa, Membahayakan, Dan/Atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Operasi Pencarian Dan Pertolongan Pada Peristiwa Yang Menimpa, Membahayakan, Dan/Atau Mengancam Keselamatan Manusia Yang Dilaksanakan	7 Keja dian	7 Keja dian	100%			
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan Yang Mengancam Keselamatan Manusia	1 Lap	1 Lap	100%			
				Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Dan Evakuasi	Jumlah Sarana Dan Prasarana Sar Yang Diadakan	4 Jns	4 Jns	100%			
					Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Untuk Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan	108 Unit	108 Unit	100%			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Manusia/Penyelamatan Dan Evakuasi Sesuai Dengan Standar Teknis						
				Pembinaan Aparatur Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Dan Evakuasi Yang Sah Dan Legal	1 Lap	1 Lap	100%			
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100 %	90 %	111%			
				Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	100%			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	2 Dok	2 Dok	100%			
				Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Yang Disusun	1 Dok	1 Dok	100%			
				Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Yang Disusun	1 Dok	1 Dok	100%			
				Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Kali	1 Kali	100%			
				Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Kali	1 Kali	100%			
				Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi	3 Lap	3 Lap	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Lap	8 Lap	100%			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	22 Org/ Bln	22 Org/ Bln	100%			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	1 Dok	100%			
				Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dok	1 Dok	100%			
				Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	1 Lap	100%			
				Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Lap	12 Lap	100%			
				Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Barang Milik Daerah Yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	100%			
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dok	2 Dok	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Daerah SKPD							
				Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	2 Lap	2 Lap	100%			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	2 Lap	2 Lap	100%			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	100%			
				Pengadaan Pakaian Tersedia Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Tersedia Beserta Atribut Kelengkapan	147 Pkt	147 Pkt	100%			
				Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dok	1 Dok	100%			
				Monitoring, Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dok	4 Dok	100%			
				Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai BerdasARKAn Tugas Dan Fungsi	Jumlah Pegawai BerdasARKAn Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	1 Org	1 Org	100%			
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Org	25 Org	100%			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Org	8 Org	100%			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100 %	96 %	105%			
				Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 Pkt	1 Pkt	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Listrik/Penerangan bangunan Kantor	bangunan Kantor Yang Disediakan						
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	1 Pkt	1 Pkt	100%			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	4 Pkt	4 Pkt	100%			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	10 Pkt	10 Pkt	100%			
				Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	1 Dok	1 Dok	100%			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Lap	1 Lap	100%			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	4 Lap	4 Lap	100%			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD Penunjang Yang Terpenuhi	100 %	100 %	100%			
				Pengadaan Kendaraan Tersedia Operasional Atau Laporanangan	Jumlah Unit Kendaraan Tersedia Operasional Atau Laporanangan Yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100%			
				Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	87 Unit	87 Unit	100%			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan Penyediaan	4 Lap	4 Lap	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Menyurat	Jasa Surat Menyurat						
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	4 Lap	4 Lap	100%			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	4 Lap	4 Lap	100%			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Tersedia Atau Kendaraan Tersedia Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Tersedia Atau Kendaraan Tersedia Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	100%			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Tersedia Operasional Atau Laporanangan	Jumlah Kendaraan Tersedia Operasional Atau Laporanangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	100%			
				Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	88 Unit	88 Unit	100%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	100%			
9	Urusan Bidang Sosial	Dinas Sosial Pemberdayaa n Perempuan									



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dan Perlindungan Anak									
			Meningkatkan Kualitas Hidup Bagi Ppks Terhadap Pelayanan Sosial Dasar Dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Prosentase Pmks Yang Memperoleh Bantuan Sosial	43,93 %	44 %	100%			
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Panti Sosial Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (Kube) Atau Kelompok Sosial Ekonomi SeJns Lainnya	20 %	20 %	100%			
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang DiTingkatkan Kompetensinya	100 Klp	105 Klp	105%			
			Meningkatkan Kualitas Hidup Bagi Ppks Terhadap Pelayanan Sosial Dasar Dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	100 %	100 %	100%			
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta	Prosentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar	100 %	100 %	100%			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial							
				Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Org	90 Org	100%			
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids Dan Napza Di Luar Panti Sosial	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Yang Direhabilitasi	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Org	49 Org	98%			
				Pemberian Bimbingan FISIK, Mental, Spritual, Dan Sosial	Jumlah Bimbingan Sosial Yang Dilaksanakan	1 Kali Keg	1 Kali Keg	100%			
				Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Prosentase Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota Yang Memperoleh Perlindungan Dan Jaminan Sosial	100 %	100 %	100%			
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gepeng Yang Masuk Dalam Data Terpadu Fm Dan Otm	60 Org	60 Org	100%			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek Dprd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Yang Didata	164.27 Org 1	156 Org 556	95%			
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (Kpm) Yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	9.000 Kelu arga	921 . 1 Kelu arga	102%			
				Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100%			
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota	Prosentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Tanggap Darurat	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Makanan	Jumlah Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Dalam 1 Tahun	300 Org	300 Org	100%			
				Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Prosentase Taman Makam Pahlawan Yang Dipelihara	100 %	100 %	100%			
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan Yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	100%			
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan Yang Dipelihara	3 Unit Lok	3 Unit Lok	100%			



3.2.2 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pangan, Bidang Pertanahan, Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Bidang Perhubungan, Bidang Komunikasi dan Informasi Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Penanaman Modal, Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Bidang Persandian, Bidang Statistik, Bidang Kebudayaan, Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan.

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Berdasarkan Target RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 Tahun Pelaksanaan 2023, untuk Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3
Pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
Kab. Luwu Timur Tahun 2023

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar											
1	Urusan Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja									
			Perbaikan iklim investasi dan peluang usaha	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75,60 %	88 %	116%			
			Peningkatan Keterampilan dan Kompetensi Pencari Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasARKAn Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi yang responsif Gender	186 Org	186 Org	100%			
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasARKAn Klaster Kompetensi	Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan	110 Org	110 Org	100%			
					Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan (kerjasama ATS)	60 Org	60 Org	100%			
					Jumlah Calon Tenaga Kerja yang medapatkan Pendidikan da Pelatihan kerjasama BLK	16 Org	16 Org	100%			
			Kerjasama Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja antara Pemerintah Daerah dan Swasta	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	22,47 %	29 %	129%			
				Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesempatan kerja/penempatan tenaga kerja	1.500 Org	166 3 Org	111%			
				Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan	80 Org	80 Org	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pencari Kerja	dan Bimbingan Jabatan						
				Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Kelompok Tenaga Kerja Mandiri yang difasilitasi dan didampingi	5 Klp	5 Klp	100%			
					Jumlah Calon Tenaga Kerja Mandiri yang mengikuti Pelatihan	40 Org	40 Org	100%			
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Informasi Lowongan kerja yang disebarluaskan	100 %	100 %	100%			
				Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Informasi Lowongan Kerja yang disebarluaskan	116 Low ong an Kerj a	116 Low ong an Kerj a	100%			
				Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja Indonesia asal Kab. Luwu Timur yang bermasalah yang difasilitasi	100 %	100 %	100%			
				Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) yang diawasi	20 Org	20 Org	100%			
					Jumlah Tenaga Kerja Indonesia asal Kab. Luwu Timur yang bermasalah yang difasilitasi	2 Org	0 Org	0%	Sampai TW IV belum dan Pekerja Migran Indonesia asal Kab. Luwu Timur yang bermasalah dilaporkan	terap dilakukan Koordinasi dengan Pihak Imigrasi Makassar	
			Pembinaan syarat-syarat kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta Perlindungan	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	22,82 %	22 %	96%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jaminan Sosial Tenaga Kerja								
				Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pekerja/buruh terdaftar yang menjadi peserta program Jamsostek	100 %	100 %	100%			
				Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Dibina dalam pembuatan PP/PKB	15 Perusahaan	15 Perusahaan	100%			
				Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Perusahaan yang Dibina	45 Perusahaan	45 Perusahaan	100%			
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan PenuTupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang difasilitasi dan dimediasi	100 %	100 %	100%			
				Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan PenuTupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Angka Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial yang di Fasilitasi	3 Kasus	3 Kasus	100%			
				Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan	Angka Sengketa Pengusaha dan Pekerja Pertanian yang difasilitasi dan di Mediasi	30 Kasus	30 Kasus	100%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				PenuTupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
				Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Oranganisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Oranganisasi Pekerja/Pengusaha yang Dibina	32 OPP	32 OPP	100%			
				Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rek yang dihasilkan	3 Rek	3 Rek	100%			
				Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Rancangan UMK yang ditetapkan	1 Dok	1 Dok	100%			
			Pengalokan anggaran program dan Keg yang efektif dan efisien	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Daerah KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100 %	100 %	100%			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	100%			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat Daerah	2 Dok	2 Dok	100%			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	2 Dok	2 Dok	100%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				RKA-SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok	2 Dok	100%			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10 Laporan	10 Lap	10 Lap	100%			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi keuangan Perangkat Daerah 100 %	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23 Orang/bulan	23 Org/ Bln	23 Org/ Bln	100%			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Lap	19 Lap	100%			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen barang milik Daerah yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	100%			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Lap	2 Lap	100%			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	100%			
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dok	12 Dok	100%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Org	12 Org	100%			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi umum PD	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor	5 Dok	5 Dok	100%			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Tersedia	15 Dok	15 Dok	100%			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang Tersedia	7 Dok	7 Dok	100%			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dok	72 Dok	100%			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	180 Lap	180 Lap	100%			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	230 Lap	230 Lap	100%			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD Penunjang yang Terpenuhi	100 %	100 %	100%			
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	43 Unit	43 Unit	100%			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	16 Unit	100%			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja	100 %	100 %	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.250 Lap	1250 Lap	100%			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Lap	36 Lap	100%			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Lap	4 Lap	100%			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Tersedia Operasional atau Laporanangan	Jumlah Kendaraan Tersedia Operasional atau Laporanangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	20 Unit	100%			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	27 Unit	100%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%			
2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
			Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN	Prosentase Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	74,69 %	81 %	109%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Gender	PEREMPUAN							
					Prosentase Partisipasi perempuan di lembaga swasta	25,31 %	28 %	112%			
				Pelebagaian Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah prasarat PUG yang Terpenuhi	7 Dok	7 Dok	100%			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD yang memenuhi	41 OPD	41 OPD	100%			
				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keterwakilan perempuan di DPRD	3 Org	3 Org	100%			
				Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah perempuan yang mengikuti sosialisasi dibidang politik, hukum sosial dan ekonom	41 Org	41 Org	100%			
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Partisipasi perempuan dalam bidang hukum, politik, sosial dan ekonom	41 Klp	41 Klp	100%			
			Peningkatan Upaya-Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Prosentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh peTugas terlatih didalam unit	81,82 %	99 %	121%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Anak		pelayanan terpadu						
				Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan / Laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	11 Kasus	12 Kasus	109%			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat/perempuan yang mengikuti rapat korTersedia dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	60 Org	60 0 Org	100%			
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah korban yang mendapatkan layanan Bantuan hukum	11 Org	12 Org	109%			
				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	40 Org	40 Org	100%			
			Peningkatan Upaya-Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS Keluarga	Prosentase layanan pembelajaran Keluarga	0,11 %	0 %	100%			
				Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang diberikan konseling kualitas Keluarga	50 Org	50 Org	100%			
				Pengembangan Kegiatan	Jumlah masyarakat yang	50 Org	50 Org	100%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Masyarakat Untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	diberikan pengembangan dalam hal peningkatan kualitas Keluarga						
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Prosentase KeTersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak di Tk. Kab/Kota	100 %	100 %	100%			
			Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data gender yang diolah	1 Dok	1 Dok	100%			
				Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dok	1 Dok	100%			
			Peningkatan Upaya-Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Prosentase indikator KLA yang Terpenuhi	100 %	100 %	100%			
				Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pendampingan pemenuhan hak atas ana	1 Kali	1 Kali	100%			
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan	Jumlah Oranganisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan	1 Org	1 Org	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha						
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak Tingkat kabupaten	1 Lbg	1 Lbg	100%			
				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak Tingkat kabupaten	1 Lbg	1 Lbg	100%			
			Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Daerah KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100 %	99 %	99%			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	100%			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun	2 Dok	2 Dok	100%			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun	2 Dok	2 Dok	100%			
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Kali	2 Kali	100%			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan kinerja yang Disusun	10 Dok	9 Dok	90%			
				Administrasi Keuangan	Persentase Rata-Rata	100 %	100 %	100%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Perangkat Daerah	Capaian kinerja Administrasi keuangan Perangkat Daerah						
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	19 Org	19 Org	100%			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Lap	16 Lap	100%			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	100%			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	10 Org	8 Org	80%			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor	7 Jns	7 Jns	100%			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Tersedia	1 Jns	1 Jns	100%			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang Tersedia	5 Jns	5 Jns	100%			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	60 Jns	60 Jns	100%			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	110 Kali	110 Kali	100%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang Dilaksanakan	415 Kali	415 Kali	100%			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD Penunjang yang Terpenuhi	100 %	100 %	100%			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	100%			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan Surat Menyurat yang Tertangani	1.200 Jns	120 Jns 0	100%			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Lainnya yang Terpenuhi	48 Jns	48 Jns	100%			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 Org	3 Org	100%			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Tersedia Operasional atau Laporanangan	Tersedianya Jasa Supir, Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Tersedia Operasional atau Laporanangan	11 Bln	11 Bln	100%			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 Unit	33 Unit	80%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang Terpelihara/di Rehab	1 Bgn	1 Bgn	100%			
3	Urusan Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan									
			1. Pengembangan keTersediaan pangan baik hewani maupun nabati dalam Jumlah dan keragaman untuk mendukung konsumsi pangan sesuai kaidah kesehatan dan gizi seimbang.2. Mengembangkan dan memperkuat kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat hingga di Tingkat Desa atau komunitas.3. Pengembangan dan percepatan penganekaraga	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI Untuk KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Cakupan pegelolaan sumber daya ekonomi Untuk kedaulatan dan kemandirian pangan yang di kembangkan	100 %	100 %	100%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			man konsumsi pangan berbasis pangan lokal maupun upaya pengembangkn wsn rumah pangan lestari (KRPL). 4. Pengembangan bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi, gizi dan mutu keTersediaan pangan yang beragam dan bergizi seimbang dan aman melalui penguatan kerja sama pemerintah masyarakat dan swasta. 5. Pengembangan metode sosialisasi dan promosi diversifikasi konsumsi pangan dan gizi kepada Kelompok masyarakat sejak usia dini melalui jalur pendidikan								



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			formal dan non formal. 6. Mendorong masyarakat untuk percepatan pola konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal. 7. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran tentang keamanan pangan pada masyarakat. 8. Penguatan pengawasan dan Pembinaan keamanan pangan dengan melengkapi Perangkat peraturan perundang-undangan di bidang muat dan keamanan panga. 9. Penguatan kelembagaan melalui korTersedia dengan pemangku kepentingan Terkait dalam penanganan								



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			keamanan pangan.								
				Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase keTersediaan Infrastruktur pendukung kemandirian pangan Daerah	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah lumbung pangan yang dibangun	1 Unit	1 Unit	100%			
				Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah lantai jemur yang dibangun	1 Unit	1 Unit	100%			
				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Presentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	100 %	100 %	100%			
					Presentase penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Dokumen hasil analisis neraca bahan makanan yang dihasilkan	1 Dok	1 Dok	100%			
				Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan	27 kali	27 kali	100%			
				Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen stok pasokan dan harga pangan pokok	4 Dok	4 Dok	100%			
				Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah hasil Rek yang ditindak lanjuti	2 Dok	2 Dok	100%			
				Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani indonesia yang dikembangkan	5 GPT	5 GPT	100%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan	100,00 %	108 %	108%			
				Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah Daerah yang Diadakan	3.000 Kg	300 0 Kg	100%			
				Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah peremajaan cadangan pangan pemerintah Daerah	6 Kali	6 Kali	100%			
					Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	16 Ton	16 Ton	100%			
				Pelaksanaan PenCapaian Target Konsumsi Pangan PerKApita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Pelaksanaan PenCapaian Target Konsumsi Pangan PerKApita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	100 %	100 %	100%			
				Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Angka Kecukupan Gizi	92 Nilai	92 Nilai	100%			
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah masyarakat yang mengikuti B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) yang Dilaksanakan	100 Org	100 Org	100%			
				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Kebutuhan Pangan Pokok	31.621 ,42 Ton	31.6 21,4 2 Ton	100%	Kebutuhan pangan pokok (beras) menurun dari target/tahun sebelumnya	Perbaikan dan pemenuhan sarana prasarana dan pasca panen	



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Desa Rentan rawan pangan	2	15	750%	Ditargetkan 2 Desa yang rentan rawan pangan yang berkurang Setiap tahunnya. Namun untuk tahun 2023 Desa rentan rawan pangan berkurang 15 Desa dari awalnya 30 Desa menjadi sisa 15 Desa	Dibutuhkan sinergitas terintegrasi pada semua inidikator oleh OPD Terkait, sehingga dapat menambah nilai skor Desa-Desa tersebut untuk kluar dari kategori rentan rawan pangan . Indikator yang dilakukan adalah pengolahan lahan pertanian maksimal, penyediaan, penyediaan sarana pangan, pedndikan formal/nonformal, lancarnya akses jalab, penyediaan Air bersih (rasio pengguna) dan Tersedianya tenaga kesehatan di Desa-Desa	
				Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten	100 %	100 %	100%			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan	7 kali	7 kali	100%			
				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Jumlah Peserta Pembinaan dan Penyuluhan Keamanan Pangan Segar dan Makanan yang berMutu	100	100 0	100%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah yang Dilaksanakan	100 %	100 %	100%			
				Rek Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pangan segar yang diReKKan aman Untuk dikonsumsi	15 Sam pel	15 Sam pel	100%			
4	Urusan Pertanahan	Dinas Perumahan, kwsn Permukiman dan Pertanahan									
			Memfasilitasi penyelenggaraa n penguatan pendataan dalam pemenuhan pelayanan pertanahan	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian kasus tanah negara	100 %	100 %	100%			
				Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus yang terdaftar	2 Kas us	2 Kas us	100%			
				Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	2 Kec	2 Kec	100%			
				PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH Untuk PEMBangunan	Persentase luas lahan yang dibebaskan	100 %	92 %	92%			
				Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan SanTunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	Luas lahan Kebutuhan pembangunan kabupaten pertahun pada tahun n	2.000 m2	183 5 m2	92%	pembatalan pembangunan pos damkar karna pada saat akan	diharapkan pada Perangkat Daerah yang melakukan pengusulan	



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kabupaten/Kota					direalisasikan ada Srt pembatalan dari Tersedia Damkar yang membutuhkan Lokasi tersebut karena penentuan Lokasi belum jelas menyebabkan target lahan yang dibebaskan belum tercapai	Pengadaan tanah agar pembatalan dilakukan sebelum proses penganggaran, sehingga tidak berdampak pada Capaian kinerja	
				Penetapan Daftar Masyarakat Penerima SanTUnan Tanah dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas lahan yang dibebaskan pada tahun n	2.000 m2	183 5 m2	92%			
				PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase pengamanan tanah kosong aset Pemda	100 %	100 %	100%			
				Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah bidang tanah yang telah dilakukan inventarisasi	20 Bid	20 Bid	100%			
				Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah bidang tanah yang dilakukan pengamanan melalui Pengadaan sarana prasarana	20 Bid	20 Bid	100%			
				PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase izin Lokasi	100 %	100 %	100%			
				Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah permohonan izin Lokasi yang terdaftar	1 Izin	1 Izin	100%			
				Pengendalian Pemanfaatan Tanah	Jumlah izin Lokasi yang ditangani	1 Izin	1 Izin	100%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Negara							
				PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase luas lahan bersertifikat	60 %	61 %	101%			
				Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luas lahan bersertifikat yang difasilitasi	60 %	61 %	101%			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Data Konsolidasi Tanah	200.00 0 Dok	173 790 Dok	87%	Disiapkan untuk persertifikatan tanah asrama mahasiswa di Palu, sebelum melakukan proses Administrasi persertifikatan dilakukan identifikasi terlebih dahulu Terkait tanah yang dihibahkan, ditemukan bahwa tanah tersebut telah menjadi aset pada Kota Palu, sehingga proses persertifikatan tidak dapat diproses lebih lanjut	Melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap tanah yang akan dihibahkan	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Daerah KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	95 %	95 %	100%			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	100%			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun	2 Dok	2 Dok	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun	2 Dok	2 Dok	100%			
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok	2 Dok	100%			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan kinerja yang Disusun	11 Dok	11 Dok	100%			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	20 Org	20 Org	100%			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Lap	18 Lap	100%			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen barang milik Daerah yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	100%			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Lap	4 Lap	100%			
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi pendapatan kewenangan PD	100 %	20 %	20%			
				PeLaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Lap	4 Lap	100%			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja	100 %	100 %	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Daerah	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah						
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Lap	12 Lap	100%			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	22 Org	22 Org	100%			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi umum PD	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	3 Jns	3 Jns	100%			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadakan	5 Jns	5 Jns	100%			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tersedianya Peralatan/perlengkapan Kantor dan rumah tangga Untuk 1 tahun	2 %	2 %	100%			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Pkt	30 Pkt	100%			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang Tersedia	3 Jns	3 Jns	100%			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	72 Jns	72 Jns	100%			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap	12 Lap	100%			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Lap	50 Lap	100%			
				Pengadaan Barang Milik	Persentase BMD-PD	100 %	100 %	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penunjang yang Terpenuhi						
				Pengadaan Kendaraan Tersedia Operasional atau Laporan	Jumlah kendaraan Tersedia operasional atau Laporan yang Tersedia	1 Unit	1 Unit	100%			
				Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	14 Unit	14 Unit	100%			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	8 Unit	8 Unit	100%			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Lap	4 Lap	100%			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Lainnya yang Terpenuhi	2 Jns	2 Jns	100%			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	9 Org	9 Org	100%			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Tersedia atau Kendaraan Tersedia Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Tersedia atau Kendaraan Tersedia Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit	13 Unit	100%			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin dalam Kondisi Baik	67 Unit	67 Unit	100%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana pendukung	2 Unit	1 Unit	50%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Gedung Kantor yang dipelihara						
5	Urusan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup									
				PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen perencanaan lingkungan	100 %	100 %	100%			
				Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Dokumen Perencanaan lingkungan yang Disediakan	1 Dok	1 Dok	100%			
				Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Dokumen Perencanaan Lingkungan yang Disediakan	1 Dok	1 Dok	100%			
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase perbaikan kualitas Air udara dan TUTUpan lahan	1 %	1 %	101%			
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen lingkungan yang di hasilkan	4 Dok	4 Dok	100%			
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen lingkungan yang di hasilkan (Dokumen)	4 Dok	4 Dok	100%			
				Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil uji laboratorium yang dihasilkan	190 Lap	246 Lap	129%			
				Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Luas lahan yang di rehabilitasi	37 Ha	37 Ha	100%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kabupaten/Kota							
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Luas lahan yang direncanakan Untuk direhabilitasi	37 Ha	37 Ha	100%			
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH yang Tertangani dengan baik	100 %	100 %	100%			
				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah RTH yang Tertangani dengan baik	5 RTH	5 RTH	100%			
				Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah RTH yang ditangani	5 RTH	5 RTH	100%			
				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase penghasil IIMBah B3 yang diawasi	100 %	100 %	100%			
				Penyimpanan Sementara LIMBah B3	Usaha yang taat pengelolaan IIMBah B3	30 Usa ha/K eg	31 Usa ha/K eg	103%			
				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara LIMBah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah penghasil LIMBah B3 yang diawasi	40 Usa ha	40 Usa ha	100%			
				PROGRAM Pembinaan DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN	Persentase usaha dan Kegiatan yang taat pada regulasi standar lingkungan	50 %	40 %	80%	Ada beberapa Keg usaha yang ijin lingkungannya sudah beralih ke kementerian KLHK atau Provinsi sehingga peLap	Menginventarisir dan melakukan Pembinaan terhadap semua Keg usaha yang pengurusan	



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					RKL/RPL beralih ke KLHK/Provinsi tanpa mengirimkan tembusan ke DLH Kab. Dari hasil pengawasan terdapat beberapa Keg usaha/Keg yang tidak memiliki staf yang menangani lingkungan sehingga peLap RKL/RPL tidak dilakukan/dibuat	persetujuan kelayakan lingkungannya menjadi kewenangan Kabupaten Melakukan Pembinaan dengan memberikan Srt teguran ke pelaku usaha/Keg untuk membuat peLap RKL/RPL Menginstruksikan pelaku usaha/Keg untuk merekrut tenaga Administrasi untuk membuat peLap RKL/RPL.	
				Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan atau Kegiatan yang di bina dan di awasi	22	Usaha/Keg	100%			
				Fasilitasi Pemenuhan KetenTUan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah usaha dan atau Kegiatan yang difasilitasi	15	Usaha/Keg	220%			
				Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan atau Kegiatan yang diawasi	35	Usaha/Keg	157%			
				Koordinasi dan	Jumlah usaha dan atau	2	0 0	0%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Kegiatan yang diberi sanksi	Usaha/Keg	Usaha/Keg				
				PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN Lokal DAN HAK MHA YANG Terkait DENGAN PPLH	Terverifikasinya MHA dan kearifan Lokal atau pengetahuan tradisonal	3 MA	0 MA	0%	Penyusunan Peraturan Bupati masih dalam tahap proses perbaikan dan verifikasi sehingga pembahasan Rancangan Peraturan Bupati (RanPerBup) PPMHA akan di jadwalkan kembali oleh bagian hukum	Mempercepat proses perbaikan RanPerBup PPMHA untuk mendapatkan Persetujuan Tim Legislasi PerBup PPMHA	
				Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah MHA yang terdata	2 MHA	0 MHA	0%	Masih menunggu pengesahan PerBup PPMHA untuk melakukan pendataan MHA	Mempercepat proses perbaikan RanPerBup PPMHA untuk mendapatkan Persetujuan Tim Legislasi PerBup PPMHA	
				Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah data / Dokumen Terkait PPMHA	3 MHA	3 MHA	100%			
				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP Untuk MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan yang diterima	100 %	100 %	100%			
				Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Persentase Jumlah penghargaan yang di	2 %	2 %	100%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	berikan						
				Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah penghargaan yang diterima	2 Penghargaan	2 Penghargaan	100%			
				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase masalah lingkungan yang diselesaikan	50 %	100 %	200%			
				Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase masalah lingkungan yang teregistrasi	2 %	8 %	400%			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah masalah lingkungan yang diselesaikan	2 Masalah	8 Masalah	400%			
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Jumlah sampah yang Tertangani	72 %	71 %	98%			
				Pengelolaan Sampah	Persentase sampah yang di kelola	70 %	71 %	101%			
				Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	22.576 Ton	225 76 Ton	100%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota							
				Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah bank sampah yang Dibina	127 Bank Sampah	76 Bank Sampah	60%	Bank Sampah dalam proses pergantian kepengurusan lama ke kepengurusan baru. Masih dalam tahap sosialisasi Aplikasi Bank Sampah Luwu Timur (A-Bank Salut). Banyaknya bank sampah yang tutup karena kalah dengan persaingan harga dengan sektor informal. Tidak adanya transportasi pengangkut sampah dari bank sampah • jarak vendor yang terlalu jauh sehingga biaya transportasi melonjak	Percepatan pergantian ke pengurus baru; Percepatan sosialisasi A-Bank Salut, •Mobil pengangkut sampah menjemput di bank sampah unit agar bank sampah tetap aktif dan regulasi perputaran uang untuk hasil penjualan sampah lebih diTingkatkan	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah prasarana dan sarana persampahan yang di sediakan	12 Jns	12 Jns	100%			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Daerah KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100 %	100 %	100%			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi	100 %	100 %	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Perangkat Daerah	kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu						
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun	2 Dok	2 Dok	100%			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Disusun	2 Dok	2 Dok	100%			
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Kali	2 Kali	100%			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan kinerja yang Disusun	10	10 0	100%			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	98 %	98%			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Org/ Bln	24 Org/ Bln	81%			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Lap	16 Lap	89%			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen barang milik Daerah yang Disusun Tepat Waktu	100 %	102 %	102%			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Lap	4 Lap	100%			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	102 %	102%			
				Pengadaan Pakaian	Jumlah pakaian Tersedia	45 Stel	45 Stel	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Tersedia Beserta Atribut Kelengkapannya	beserta atribut kelengkapan yang Tersedia						
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dok	12 Dok	100%			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Org	9 Org	113%			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi umum PD	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor	4 Jns	4 Jns	100%			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Tersedia	17 Jns	17 Jns	100%			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang Tersedia	5 Jns	5 Jns	100%			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	36 Jns	36 Jns	100%			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	196 Kali	196 Kali	100%			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang Dilaksanakan	268 Kali	268 Kali	100%			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD Penunjang yang Terpenuhi	100 %	100 %	100%			
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	27 Unit	27 Unit	100%			
				Pengadaan Peralatan dan	Jumlah Unit Peralatan dan	16 Unit	16 Unit	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Mesin Lainnya	Mesin Lainnya yang Disediakan						
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan Surat Menyurat yang Tertangani	1.000 Jns	100 Jns 0	100%			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Lap	36 Lap	100%			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Org	4 Org	100%			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah yang dipelihara	25 %	25 %	100%			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Tersedia Operasional atau Laporanangan	Jumlah Kendaraan Tersedia Operasional atau Laporanangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit	100%			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	32 Unit	100%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	100%			
6	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Penerbitan KarTU Tanda Penduduk (KTP)	99,85 %	99 %	98%	Meningkatnya Jumlah Wajib KTP yang meningkat		

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									pada semester II Tahun 2023 dimana pada semester I wajib KTP BerJumlah 215.619 jiwa pada semester II menjadi 221,011 Jiwa		
			Peningkatan Jumlah pelayanan ke Desa-Desa dengan sistem jemput bola bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di berbagai penjuru wilayah Kabupaten Luwu Timur	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan KartU Keluarga	98,60 %	100 %	101%			
					Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 (Satu) hari yang memiliki KIA	50 %	53 %	108%			
				Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas pendaftaran Penduduk	4 Dok	4 Dok	100%			
				Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4 Lap	4 Lap	100%			
				Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas PeLaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan Dokumen Atas PeLaporan Peristiwa Kependudukan	2 Dok	2 Dok	100%			
			Peningkatan	PROGRAM	Cakupan penerbitan akta	97,05 %	99 %	102%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah pelayanan ke Desa-Desa dengan sistem jemput bola bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di berbagai penjuru wilayah Kabupaten Luwu Timur	PENCATATAN Sipil	kelahiran						
				Pelayanan Pencatatan Sipil	Kepemilikan Akte Kelahiran	98 %	99 %	101%			
					Persentase Kepemilikan Akta PerKAWinan	50,37 %	54 %	107%			
					Persentase Kepemilikan Akta Kematian	100 %	100 %	100%			
					Persentase Kepemilikan Akta Cerai	100 %	100 %	100%			
				Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah penerbitan akta pencatatan Sipil	4 Lbr	4 Lbr	100%			
				Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang DiTingkatkan	4 Layan	4 Layan	100%			
				Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100 %	100 %	100%			
				Kerja Sama dengan Oranganisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Oranganisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	1 Lap	1 Lap	100%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Melakukan kerjasama dengan OPD, lintas OPD, kerjasama dengan instansi Kesehatan / PKM / Rumah Sakit untuk pasien bersalin, untuk langsung diKoordinasidinir pembuatan akta kelahirannya. Selain itu bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk melakukan perekaman KTP bagi pelajar yang baru berusia 17 Tahun	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI Administrasi KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Informasi Kependudukan yang terintegrasi	50 %	60 %	120%			
				Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase OPD/Lembaga yang telah memanfaatkan data dan layanan kependudukan berdasARKAn perjanjian kerjasama	45 %	60 %	133%			
				Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD yang mengadakan perjanjian kerja sama	5 PKS	4 PKS	80%	karena adanya perubahan permendagri 102 tahun 2019 menjadi permendagri 17 Tahun 2023 mengakibatkan adanya perubahan alur dalam PKS		



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Masyarakat (warga) yang mendapatkan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	100 %	100%			
				Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Lap	1 Lap	100%			
			Melakukan kerjasama dengan OPD, lintas OPD, kerjasama dengan instansi Kesehatan / PKM / Rumah Sakit untuk pasien bersalin, untuk langsung diKoordinasidinir pembuatan akta kelahirannya. Selain itu bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk melakukan perekaman KTP bagi pelajar yang baru berusia 17 Tahun	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan data kependudukan yang Disediakan	100 %	100 %	100%			
				Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil kependudukan yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan kependudukan yang Disusun	3 Lap	3 Lap	100%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Membuka jalur komunikasi saran/aduan/konsultasi melalui berbagai jalur komunikasi, seperti SMS, whatsapp), yang dapat membantu menyelesaikan berbagai Masalah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Daerah KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100 %	100 %	100%			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	100%			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun	3 Dok	3 Dok	100%			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun	2 Dok	2 Dok	100%			
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Kali	2 Kali	100%			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Lap	10 0 Lap	100%			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	18 Org	18 Org	100%			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan persemester	12 Lap	12 Lap	100%			
				Administrasi Barang	Persentase Dokumen	100 %	100 %	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Milik Daerah pada Perangkat Daerah	barang milik Daerah yang Disusun Tepat Waktu						
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Lap	12 Lap	100%			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	100%			
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dok	6 Dok	100%			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Org	10 Org	100%			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi umum PD	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang Disediakan	6 Pkt	6 Pkt	100%			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Pkt	5 Pkt	100%			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Pkt	14 Pkt	100%			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang Tersedia	2 Jns	2 Jns	100%			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	84 Jns	84 Jns	100%			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Kali	5 Kali	100%			
				Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Penyelenggaraan	58 Kali	58 Kali	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang Dilaksanakan						
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD Penunjang yang Terpenuhi	100 %	100 %	100%			
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Tersedia atau Kendaraan Tersedia Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Tersedia atau kendaraan Tersedia jabatan yang Tersedia	1 Unit	1 Unit	100%			
				Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	13 Unit	13 Unit	100%			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	13 Unit	13 Unit	100%			
				Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	100%			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan Surat Menyurat yang Tertangani	600 Jns	700 Jns	117%			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Lainnya yang Terpenuhi	3 Jns	3 Jns	100%			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	5 Org	5 Org	100%			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Tersedia atau Kendaraan Tersedia Jabatan yang Dipelihara dan	5 Unit	5 Unit	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Tersedia atau Kendaraan Tersedia Jabatan	Dibayarkan Pajaknya						
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	83 Unit	31 Unit	37%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%			
7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
			Memberikan pengetahuan dan pendampingan bagi pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan keuangan Desa Memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan	PROGRAM PENATAAN Desa	Persentase Peningkatan penataan Desa	75 %	87 %	116%			
				Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Terlaksananya Penataan Desa	100 %	100 %	100%			
				Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Persentase Fasilitasi Usulan Pemekaran Desa	10 Desa	0 Desa	0%	Realisasi 0 Desa dikarenakan Pemekaran Desa tidak dapat dilakukan. Hal ini disebabkan	Melakukan monitoring dan verifikasi pada 10 (sepuluh) Desa yang mengusulkan	



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia belum mencabut Moratorium tentang Pemuktahiran Kode Wilayah Penataan Administrasi Kecamatan, Desa dan Kelurahan. Sesuai isi moratorium tidak boleh ada pemekaran sebelum pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 karena bisa berpengaruh terhadap daftar pemilih.	pemekaran Desa, namun hanya sebanyak 9 (sembilan) Desa yang memenuhi data pendukung pemekaran Desa. yaitu 1. Desa Jalajja 2. Desa Lampenai 3. Desa Tampinna 4. Desa Puncak Indah 5. Desa Sorowako 6. Desa Manurung 7. Desa Ledu-Ledu 8. Desa Langkea Raya 9. Desa Wawondula	
			Memberikan pengetahuan dan pendampingan bagi pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan keuangan Desa Memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan	PROGRAM Administrasi PEMERINTAHAN Desa	Persentase Desa yang tertib Administrasi Desa	75 %	80 %	107%			
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	Persentase Desa yang Tertib Administrasi dan Tata Kelola Keuangan	100 %	100 %	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Administrasi Pemerintahan Desa	Desa						
				Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Desa	2 Des a	2 Des a	100%			
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah produk Hukum Daerah yang Disusun dan disosialisasikan	5 Des a	6 Des a	120%			
				Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah fasilitasi penyusunan RKP Desa	125 Des a	125 Des a	100%			
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah fasilitasi Penyusunan APBDes (Desa)	125 Des a	125 Des a	100%			
				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Yang Dilaksanakan	124 Des a	124 Des a	100%			
				Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Desa yang membuat LKPJ dan LKPPD Desa Tepat Waktu	125 Des a	125 Des a	100%			
				Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan seleksi Perangkat Desa	25 Des a	25 Des a	100%			
				Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Desa yang mengikuti lomba Desa tk.Kabupaten	11 Des a	0 Des a	0%	Realisasi 0 Desa. Hal ini tidak dapat Dilaksanakan karena adanya perubahan regulasi dari Kemendagri tentang sistem lomba Desa Tingkat kabupaten dan provinsi, Desa yang akan mengikuti lomba berdasarkan daftar nama Desa Hasil Evaluasi Perkembangan Desa	Melakukan monitoring dan Pembinaan Desa	



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									(Epdeskel) yang ditetapkan Srt Keputusan oleh Kemendagri		
				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang di beri Peningkatan Kapasitas	124 Org	124 Org	100%			
					Jumlah Pembinaan, monitoring dan Evaluasi BPD yang dilakukan	124 Org	124 Org	100%			
					Jumlah rapat Koordinasi BPD	1 kali	1 kali	100%			
			Memantapkan peran Lembaga pemerintah Desa dan Lembaga masyarakat dalam pembangunan kwsn perDesaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase peningkatan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan lembaga masyarakat , lembaga ekonomi dan pemanfaatan teknologi Tepat guna	65 %	81 %	124%			
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat, lembaga ekonomi Desa dalam pembangunan Desa	100 %	100 %	100%			
				Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel	Jumlah Kader Posyandu yang Dibina	280 Des a	280 0 Des a	100%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kel dan Masyarakat Hukum Adat							
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Pembinaan dan Evaluasi pelaksanaan Kegiatan BUMDesa	4 Kali	4 Kali	100%			
					Jumlah Pembinaan dan Evaluasi pelaksanaan Kegiatan P2MP	4 Kali	4 Kali	100%			
					Jumlah Pengurus P2MP yang mengikuti peningkatan kapasitas	124 Org	124 Org	100%			
				Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Kelompok masyarakat dalam keikutsertaan pemanfaatan teknologi Tepat guna	11 Klp	0 Klp	0%	Keg Lomba Teknologi Tepat Guna (TTG) yang direncanakan untuk mendapatkan Inovasi dalam rangka mengikuti lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan Tingkat Nasional, namun belum ada informasi dari DPMD Provinsi Sulawesi Selatan	Melakukan monitoring dan Evaluasi terhadap Kelompok TTG di Desa serta Koordinasi dan konsultasi ke DPMD Provinsi	
				Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah pelaksanaan rapat Koordinasi TP-PKK Kabupaten	12 kali	12 kali	100%			
					Jumlah Pembinaan TP-PKK	12 kali	12 kali	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Kabupaten						
					Jumlah TP-PKK yang dimonitoring dan di Evaluasi	139 Klp	139 Klp	100%			
			Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan , aset dan penyusunan Lap kinerja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Daerah KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100 %	99 %	99%			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	100%			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	3 Dok	3 Dok	100%			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun Tepat Waktu	2 Dok	2 Dok	100%			
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang Disusun Tepat Waktu	2 Dok	2 Dok	100%			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	10 Dok	10 Dok	100%			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang yang Gaji dan Tunjangannya Terbayarkan	16 Org	16 Org	100%			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme	Jumlah Laporan keuangan Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	18 Dok	18 Dok	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				steran SKPD							
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen barang milik Daerah yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	100%			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Dok	4 Dok	100%			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	93 %	93%			
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang di muktahiRKAn	12 Dok	12 Dok	100%			
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi Peraturan perundang-undangan	5 Org	4 Org	80%			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi Peraturan perundang-undangan	10 Org	10 Org	100%			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi umum PD	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor yang Disediakan	7 Jns	7 Jns	100%			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 buah	14 buah	100%			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	26 Jns	26 Jns	100%			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang Disediakan	4 Jns	4 Jns	100%			
				Penyediaan Bahan	Jumlah Bahan Bacaan dan	132	131	99%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peraturan Perundang-Undangan	Eks p	eksp				
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang diFasilitasi Kunjungannya	33 Org	33 Org	100%			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	301 OK	301 OK	100%			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD Penunjang yang Terpenuhi	100 %	100 %	100%			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin lainnya yang Diadakan	16 Unit	16 Unit	100%			
				Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Diadakan	2 Unit	2 Unit	100%			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk Surat Keluar yang diagendakan	1.717 Jns	1717 Jns	100%			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Telpn, Listrik dan Air yang Dibayarkan	48 Rek	48 Rek	100%			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Org	4 Org	100%			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	95 %	95%			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Tersedia Operasional atau	Jumlah Kendaraan Tersedia Operasional yang dipelihara dan Dibayarkan pajaknya	14 Unit	12 Unit	86%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Laporan							
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	39 Unit	39 Unit	100%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang Terpelihara/di Rehab	3 Bgn	3 Bgn	100%			
8	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
			"Peningkatan intensitas Pelayanan Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk, di seluruh wilayah (Daerah perkotaan, dan Daerah tertinggal terpencil dan perbatasan/galci tas"	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata Rata Jumlah anak per Keluarga	2,01	2	86%			
				Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengaTUR tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk)	2 Dok	2 Dok	100%			
				Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non	3 Lap	3 Lap	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Formal						
				Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Oranganisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	24 Org	24 Org	100%			
				Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah rapat pengendalian program KKBPK 1 Kali	1 Kali	1 Kali	100%			
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan data mikro Keluarga di Setiap Desa	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	3 Dok	3 Dok	100%			
				Pengolahan dan PeLaporan Data Pengendalian Laporanangan dan Pelayanan KB	Jumlah Kegiatan monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan program Bangsa Kencana	3 Kali	3 Kali	100%			
			Peningkatan intensitas Pelayanan Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk, di seluruh wilayah (Daerah perkotaan, dan Daerah tertinggal terpencil dan perbatasan/galci	PROGRAM Pembinaan Keluarga BERENCANA (KB)	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak Terpenuhi (unmet need)	12,40 %	11 %	92%			
					Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	58,90 %	71 %	121%			
					Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	26,76 .%	35 .%	132%			
					Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	39,14 %	34 %	86%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			tas	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE)	100 %	100 %	100%			
				Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Peserta Advokasi Program KKBPK	40 Org	40 Org	100%			
				Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Peserta KIE	625 Org	625 Org	100%			
				Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program	2 Dok	2 Dok	100%			
				Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokasiakarya (MiniLokasi)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokasiakarya (MiniLokasi)	1.056 Lap	1056 Lap	100%			
				Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Lap	12 Lap	100%			
				Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program	2 Lap	2 Lap	100%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					KKBPK						
				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/PeTUgas Laporanangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah dibidang pengendalian penduduk	100 %	100 %	100%			
				Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK Untuk PeTUgas Keluarga Berencana/Penyuluh Laporanangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah PLKB yang Dibina	100 Org	98 Org	98%			
				Penggerakan Kader InstiTUsi Masyarakat PeDesaan (IMP)	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang diberdayakan	581 Org	581 Org	100%			
				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	100 %	100 %	100%			
				Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan TerMasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Fasilitas kesehatan yang Tersedia alat kontrasepsi	21 Faskes	21 Faskes	100%			
				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka	Jumlah Akseptor yang menggunakan kontrasepsi MKJP	11.500 Akseptor	11500 Akseptor	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Panjang (MKJP)							
				Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	76 Unit	76 Unit	100%			
				Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan terMasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Sarana Penunjang KB yang Tersedia	21 Faskes	21 Faskes	100%			
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Oranganisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Stakholder/ Pemangku kepentingan dan mitra kerja (TerMasuk Oranganisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	100 Jml	100 Jml	100%			
				Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Pembinaan pokja dan rumah data di kampung KB	2 Kali	2 Kali	100%			
			Peningkatan Pembinaan kepada Keluarga, Kelompok Tribina, PIK-R dan Kelompok UPPKA di Setiap Kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN Keluarga SEJAHTERA (KS)	Rata-Rata usia Kawin Pertama	21 Tahun	23 Tahun	107%			
				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Kelompok Kegiatan yang melakukan Pembinaan Keluarga melalui 8 fungsi Keluarga	71,18 %	71 %	100%			
				Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina	Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL, PIK R dan UPPKS yang di benTuk	7 Klp	7 Klp	100%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)							
				Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	30 Unit	30 Unit	100%			
				Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok BKB, BKL, BKR, PIK Remaja, UPPKS yang ikut orientasi/pelatihan	76 Klp	76 Klp	100%			
				Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	45 Org	45 Org	100%			
				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok BKB, BKL, BKR, PIK Remaja, UPPKS yang ikut promosi dan sosialisasi	65 Klp	65 Klp	100%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	80 Org	90 Org	113%			
				Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Oranganisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Peran serta Oranganisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota dalam pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	75,01 %	75 %	100%			
				Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah peserta promosi dan sosialisasi	60 Org	60 Org	100%			
			Peningkatan Kinerja Program Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Daerah KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100 %	100 %	100%			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	100%			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun	3 Dok	3 Dok	100%			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun	2 Dok	2 Dok	100%			
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Kali	2 Kali	100%			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan kinerja yang Disusun	8 Dok	8 Dok	100%			
				Administrasi Keuangan	Persentase Rata-Rata	100 %	100 %	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Perangkat Daerah	Capaian kinerja Administrasi keuangan Perangkat Daerah						
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	20 Org	20 Org	100%			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan persemester	13 Lap	13 Lap	100%			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen barang milik Daerah yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	100%			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Lap	4 Lap	100%			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	100%			
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8 Dok	8 Dok	100%			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	2 Org	2 Org	100%			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi umum PD	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor	2 Jns	2 Jns	100%			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Tersedia	203 Jns	203 Jns	100%			
				Penyediaan Barang Cetak dan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang Tersedia	3 Jns	3 Jns	100%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penggandaan							
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	60 Jns	60 Jns	100%			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	125 Kali	125 Kali	100%			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang Dilaksanakan	411 Kali	411 Kali	100%			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan Surat Menyurat yang Tertangani	400 Jns	400 Jns	100%			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Lainnya yang Terpenuhi	3 Jns	3 Jns	100%			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 Org	3 Org	100%			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Tersedia atau Kendaraan Tersedia Jabatan	Jumlah Kendaraan Tersedia Jabatan Laik Jalan	96 Unit	96 Unit	100%			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin dalam Kondisi Baik	3 Unit	3 Unit	100%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya dalam kondisi baik	2 Bgn	2 Bgn	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Urusan Perhubungan	Dinas Perhubungan									
			Penyediaan prasarana transportasi yang menunjang kelancaran arus transportasi dan keselamatan berlalu lintas	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana dan rasarana LLAJ Yang Disediakan	61,12 %	61 %	100%			
			Pemeliharaan prasarana transportasi yang mendukung kontinuitas pelayanan		Persentase Angkutan umum yang laik jalan	94,41 %	105 %	111%			
			Penyediaan dan pemeliharaan sarana angkutan yang aman dan nyaman guna membantu masyarakat mengakses fasilitas publik	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	100%			
			Meningkatkan Koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi guna mendapatkan Bantuan sarana transportasi	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Jns fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang	2 Jns	2 Jns	100%			
			Peningkatan pengendalian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Jns fasilitas perlengkapan jalan yang	48 Jns	48 Jns	100%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dan pengawasan lalu lintas angkutan dengan memperkuat Koordinasi lintas sektor pemangku kepentingan (kepolisian, BPTD)	Perlengkapan Jalan	Terpelihara						
			Peningkatan edukasi / sosialisasi keselamatan angkutan kepada masyarakat	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Orang (L/P) yang terangkut melalui Terminal	222,80 Org	225 Org	101%			
			Pengembangan layanan pengujian kendaraan bermotor yang berbasis IT	Pembangunan Gedung Terminal	Persentase Capaian bangunan Terminal	72,32 %	72 %	100%			
			Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM teknis perhubungan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah fasilitas Terminal yang Terpelihara	3 Unit	3 Unit	100%			
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah titik parkir yang diselenggarakan / diusahakan	15 Titik	15 Titik	100%			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas	Jumlah pengawasan titik parkir	250 kali	250 kali	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota							
				Pengujian BeRKAla Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan wajib Uji yang laik jalan	2.820 Unit	313 0 Unit	111%			
					Jumlah kendaraan yang diuji	2.987 Unit	313 0 Unit	105%			
				Registrasi Kendaraan Wajib Uji BeRKAla Kendaraan Bermotor	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	3.441 Kali	344 1 . kali	100%			
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian BeRKAla Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana PKB yang dipelihara	11 Unit	11 Unit	100%			
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Rek manajemen lalu lintas yang diKeluarKAN	22 Rek	22 Rek	100%			
				Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan manajemen rekayasa lalu lintas yang Dilaksanakan	18 kali	18 kali	100%			
				Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Lalu Lintas dan angkutan jalan yang Dilaksanakan yang responsive gender	4 kali	4 kali	100%			
				Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang (L/P) yang terangkut angkutan umum yang diusahakan oleh pemda	313.20 0 Org	379 600 Org	121%			
				Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	27 Unit	27 Unit	100%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio ijin trayek	0,01 %	0 %	100%			
					Persentase kepemilikan KIR angkutan Wajib Uji	5,59 %	1 %	19%	Realisasi target sebesar 181% karena Target indikator adalah target menurun sehingga makin kecil realisasi semakin tinggi capaian		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan perizinan angkutan (KIR dan Izin Trayek)	24 kali	24 kali	100%			
			Meningkatkan Koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi guna mendapatkan Bantuan sarana transportasi	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Kapal yang layak berlayar di laut	31,98 %	27 %	84%	Realisasi kapal yang layak berlayar di laut hanya mencapai 26,87% dari target 31,98 % atau sebesar 84% karena dari 300 unit kapal yang rencana akan difasilitasi ijinnya dan terealisasi sebesar 252 unit hal ini karena pihak Syahbandar yang berhak melakukan pengukuran tidak dapat menyelesaikan pengukuran kapal sesuai Dok yang	Terus melakukan Koordinasi dengan pihak Syahbandar untuk mempercepat proses pengukuran kapal	



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									diusulkan karena kurangnya SDM		
			Peningkatan pengendalian dan pengawasan lalu lintas angkutan dengan memperkuat Koordinasi lintas sektor pemangku kepentingan (kepolisian, BPTD)		Persentase Kapal yang layak berlayar di danau	43,75 %	0 %	1%			
			Peningkatan edukasi / sosialisasi keselamatan angkutan kepada masyarakat	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kapal yang laik beroperasi di laut	300 Unit	252 Unit	84%			
			Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM teknis perhubungan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kapal yang difasilitasi Untuk memiliki Dokumen pas kecil	300 unit	252 unit	84%	Realisasi 84% dari 300 unit kapal yang rencana akan difasilitasi ijinnya dan terealisasi sebesar 252 unit hal ini karena pihak Syahbandar yang berhak melakukan pengukuran tidak dapat menyelesaikan pengukuran kapal sesuai Dok yang diusulkan karena kurangnya SDM	Terus melakukan Koordinasi dengan pihak Syahbandar untuk mempercepat proses pengukuran kapal	

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Orang (L/P) / barang yang terangkut melalui dermaga ASDP	52825,000 org/kg	113335 org/kg	215%			
				Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah pelabuhan yang dioperaSikan / dipelihara	3 Unit	3 Unit	100%			
				Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah pengawasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	24 Kali	24 Kali	100%			
			Merencanakan dan melaksanakan program / Keg secara konsisten mengacu kepada Dok perencanaan jangka menengah Tersedia (RENSTRA), dengan harapan seluruh target Bupati – Wakil Bupati yang dibebankan kepada Tersedia Perhubungan dapat dicapai dalam kurun 5 tahun;	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Daerah KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100 %	100 %	100%			
			Mendorong pegawai yang diberi tanggungjawab Keg agar	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	100%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			melaksanakan Keg tersebut sesuai dengan petunjuk dan membuat Lap pertanggungjawaban secara benar dan Tepat Waktu								
			Melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan program / Keg. Jika terdapat permasalahan, hal – hal yang menyimpang, deviasi Capaian target, agar segera dilakukan perbaikan dan revisi target	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun	2 Dok	2 Dok	100%			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun	2 Dok	2 Dok	100%			
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok	2 Dok	100%			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan kinerja yang Disusun	10 Lap	10 Lap	100%			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	95 %	95%			
				Penyediaan Gaji dan	Jumlah ASN yang Menerima	27 Org	27 Org	100%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan						
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan persemester	4 Lap	4 Lap	100%			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen barang milik Daerah yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	100%			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Lap	4 Lap	100%			
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi pendapatan kewenangan PD	100 %	95 %	95%			
				PeLaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Lap	4 Lap	100%			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	95 %	95%			
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dok	12 Dok	100%			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Org	6 Org	120%			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi umum PD	100 %	95 %	95%			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor	5		100%			
				Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Peralatan dan	8		100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang Diadakan						
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Tersedia	2	2	100%			
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang Tersedia	3	3	100%			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	72	72	100%			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Kali	30 0 Kali	100%			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang Dilaksanakan	150 Kali	150 0 Kali	100%			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD Penunjang yang Terpenuhi	1 %	1 %	100%			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	4 Unit	3 Unit	75%			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	95 %	95%			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan Surat Menyurat yang Tertangani	1	1 0	100%			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	24 Bln	24 Bln	100%			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	6 Org	6 Org	100%			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah	100 %	95 %	95%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Daerah	yang dipelihara						
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Tersedia atau Kendaraan Tersedia Jabatan	Jumlah Kendaraan Tersedia Jabatan Laik Jalan	1 Unit	1 Unit	100%			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Tersedia Operasional atau Laporanangan	Jumlah Kendaraan Tersedia Operasional atau Laporanangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 0 Unit	100%			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	38 Unit	100%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	100%			
9	Urusan Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian									
			Menciptakan keterbukaan informasi dan akses informasi kepada masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah Daerah yang terpublikaSIkan	100 %	100 %	100%			
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah Daerah yang dipublikaSIkan Melalui Media dan Kelompok Informasi Masyarakat	100 %	100 %	100%			
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah saluran komunikasi dan informasi yang dikelola	5 saluran	5 saluran	100%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pelayanan Informasi Publik	Jumlah PPID yang mengikuti sosialisasi	166 %	166 %	100%			
				Layanan Hubungan Media	Jumlah mass media yang menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah	30 Media	30 Media	100%			
				Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah pengurus berJns kelamin perempuan dalam Kelompok informasi masyarakat yang Dibina	71 Org	71 Org	100%			
			Memberikan jaminan terhadap kualitas infrastruktur jaringan	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pengelolaan domain, jaringan internet dan e- government pemerintah Daerah	100 %	100 %	100%			
			Menciptakan system informasi komunikasi yang terintegrasi terpadu, dinamis dan terkoordinasi	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan nama domain pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100%			
				Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nama domain dan sub domain yang Dibina dalam pengelolaan konten website	41 OPD	41 OPD	100%			
				Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Jaringan Internet yang dikembangkan dan dipelihara lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur	90 titik	90 titik	100%			
				Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah	Persentase pengelolaan pemerintahan berbasis e-governmnet yang dikelola	100 %	100 %	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kabupaten/Kota							
				Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi E-Government yang dikembangkan	6 aplikasi	13 aplikasi	217%			
				Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah aplikasi yang mendukung program smart city luwu timur	14 aplikasi	14 aplikasi	100%			
			Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Daerah KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100 %	100 %	100%			
			Peningkatan Disiplin Aparatur	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	100%			
			Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat Daerah	2 Dok	2 Dok	100%			
			Penguatan Terhadap Akuntabilitas Keuangan, pengelolaan aset Daerah dan kinerja secara transparan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun	2 Dok	2 Dok	100%			
			Sinergi Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan, pelaksanaan terhadap monev terhadap kinerja	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Dok	2 Dok	100%			
				Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan kinerja	8 Dok	8 Dok	100%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Perangkat Daerah	yang Disusun						
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	22 Org	22 Org	100%			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan persemester	12 Dok	12 Dok	100%			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen barang milik Daerah yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	100%			
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang tersusun	2 Dok	2 Dok	100%			
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi pendapatan kewenangan PD	100 %	100 %	100%			
				Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Retribusi Menara Telekomunikasi yang menjadi obyek retribusi (144 Menara)	144 Dok	144 Dok	100%			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah 100 %	100 %	100 %	100%			
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen	12 Dok	12 Dok	100%			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Karya Tulis IlmiahJumlah ASN yang melaksanakan Bimbingan	8 Org	8 Org	100%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					teknis Impelementasi Peraturan Perundang-Undangan (8 Orang)						
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi umum PD	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Alat Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang Disediakan	8 Jns	8 Jns	100%			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik Kantor yang Disediakan	5 Jns	8 Jns	160%			
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang Disediakan	2 Jns	2 Jns	100%			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	60 eks	60 eks	100%			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi	50 Kali	50 Kali	100%			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Dilaksanakan	45 Kali	45 Kali	100%			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD Penunjang yang Terpenuhi	100 %	100 %	100%			
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Tersedia atau Kendaraan Tersedia Jabatan	Jumlah Kendaraan Tersedia yang Diadakan	1 unit	1 unit	100%			
				Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan	9 Unit	9 Unit	100%			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	100%			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasaran Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang	3 Unit	3 Unit	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Disediakan						
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan Surat Menyurat yang Tertangani	250 Jns	250 Jns	100%			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Lainnya yang Terpenuhi	24 Jns	24 Jns	100%			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	13 Org	13 Org	100%			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah yang dipelihara 100 %	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Tersedia atau Kendaraan Tersedia Jabatan	Jumlah Kendaraan Tersedia yang Terpelihara	7 Unit	7 Unit	100%			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang dipelihara	32 Unit	32 Unit	100%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung dan bangunan Kantor yang Terpelihara	2 Bgn	2 Bgn	100%			
10	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian									
			Pengembangan kemitraan dan jaringan usaha	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN	Persentase Koperasi yang berkualitas	32,63 %	33 %	101%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Koperasi melalui penguatan kelembagaan Koperasi	Koperasi							
				Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan Untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota	75,70 %	84 %	111%			
				Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	148 Unit Usaha	148 Unit Usaha	100%			
			Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik di sektor Koperasi, perdagangan, UMKM dan perindustrian	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi sehat	33,80 %	34 %	100%			
				Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya	51,62 %	54 %	105%			
				Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	15 Koperasi	15 Koperasi	100%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kabupaten/Kota							
			Meningkatkan kemampuan pelaku usaha yang professional dan kompeten	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang meningkat manajemen pengelolaan melalui pendidikan dan pelatihan	12,18 %	13 %	107%			
				Pendidikan dan Latihan PerKoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan Untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/ kota	25,31 %	26 %	103%			
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan PerKoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Koperasi aktif yang diTingkatkan pemahaman dan pengetahuan perKoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi	10 Kop erasi	10 Kop erasi	100%			
			Peningkatan akses pembiayaan dan skema kerjasama	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN Koperasi	Persentase peningkatan	5 %	0 %	1%			
					produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan Koperasi						
				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang diberdayakan dari sisi peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen , standarisasi dan strukTURisasi usaha	3,65 %	4 %	121%			
				Pemberdayaan	Jumlah Koperasi yang	20	20	100%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	difasilitasi pemberdayaan dan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi kewenangan kabupaten/kota (Koperasi)	Koperasi	Koperasi				
			Meningkatkan fasilitas dan iklim usaha	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	45 %	46 %	101%			
				Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah wirausaha baru berskala mikro	108 WUB	116 WUB	107%			
				Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	241 Unit Usaha	241 Unit Usaha	100%			
				Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	100%			
				Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan	120 Unit Usaha	120 Unit Usaha	100%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Mikro	Terhadap Usaha Mikro						
				Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi pengembangan usaha (Usaha Mikro)	90 UM KM	90 UM KM	100%			
			Meningkatkan sarana dan prasarana Keg usaha Koperasi dan UMKM (terMasuk pemanfaatan IT)	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rasio perTumbuhan skala usaha mikro	3,89 %	4 %	106%			
				Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase peningkatan skala usaha mikro	7,05 %	7 %	100%			
				Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	17 UM KM	17 UM KM	100%			
			Peningkatan Evaluasi dan peLap keuangan yang transparan dan akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Daerah KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	95,00 %	95 %	100%			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	100%			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun	3 Dok	3 Dok	100%			
				Koordinasi dan	Jumlah Dokumen RKA-	2 Dok	2 Dok	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok	2 Dok	100%			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Lap	10 Lap	100%			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Org/ Bln	27 Org/ Bln	100%			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Lap	18 Lap	100%			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen barang milik Daerah yang Disusun Tepat Waktu	1 %	1 %	100%			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Lap	2 Lap	100%			
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi pendapatan kewenangan PD	100 %	100 %	100%			
				PeLaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Lap	4 Lap	100%			
				Administrasi	Persentase Rata-Rata	100 %	100 %	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah						
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8 Dok	8 Dok	100%			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai BerdasARKAN Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai BerdasARKAN Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Org	3 Org	100%			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Org	10 Org	100%			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi umum PD	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang Disediakan	10 Pkt	10 Pkt	100%			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Pkt	4 Pkt	100%			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Pkt	20 Pkt	100%			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Pkt	3 Pkt	100%			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	60 Dok	60 Dok	100%			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	320 Lap	110 Lap	34%			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	211 Lap	211 Lap	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50 Dok	50 Dok	100%			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD Penunjang yang Terpenuhi	100 %	100 %	100%			
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	55 Unit	55 Unit	100%			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100%			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100%			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Lap	4 Lap	100%			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Lap	3 Lap	100%			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Org	4 Org	100%			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Tersedia Operasional atau	10 Unit	10 Unit	100%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Tersedia Operasional atau Laporanangan	Laporanangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya						
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	54 Unit	100%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%			
11	Urusan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu									
			Pembuatan Dok kajian/peta potensi yang dapat meningkatkan iklim investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor PMA dan	40	40	100%			
					PMDN Berskala Nasional						
				Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMA dan PMDN yang terfasilitasi	100 %	100 %	100%			
				Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penyusunan Dokumen kebijakan Daerah Terkait penanaman moda	2	2	100%			
				Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman	Jumlah Dokumen kebijakan Daerah Terkait Penanaman Modal yang diEvaluasi	2	2	100%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Modal							
			Menyusun strategi promosi dalam rangka meningkatkan daya tarik investasi	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		3,50E +12	402 443 725 915 0	115%			
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah MOU Penanaman modal yang dihasilkan	5 MoU	5 MoU	100%			
				Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Fasilitasi kerjasama strategis antar usaha besar dan UKM	3 UK M	2 UK M	67%	Keg Pameran APKASI tidak diikuti sehingga 1 media promosi tidak dipublikasikan		
				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Promosi peluang penanaman modal/investasi	3 Kali	2 Kali	67%			
			Penggunaan Pelayanan Perizinan berbasis IT dan penyederhanaan Proses/SOP Perizinan dan nonperizinan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Realisasi Investasi	75 %	94 %	126%			
					PMA dan PMDN						
				Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan perizinan dan Nonperizinan	75 %	83 %	110%			
				Penyediaan Pelayanan	Laporan Survey Kepuasan	6000 Izin	112 Izin	188%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Masyarakat		61				
				Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	6 Org	8 Org	133%			
			Melakukan Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan perusahaan perusahaan PMA/PMDN	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	80 %	84 %	105%			
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha yang taat menyampaikan LKPM	90 %	95 %	106%			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	0	0	0%	sesuai SE DBH CHTTA 2023 dan DAK TA. 2023 sub Keg ini dihilangkan	Anggaran pada sub Keg ini digabungkan pada sub Keg Pembinaan Pelaksanaan PM.	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	244 Kali	244 Kali	100%			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	9 Kali	9 Kali	100%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan data dan informasi bidang Penanaman Modal yang Valid dan kredibel	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Data Base yang Valid	1 Dok	1 Dok	100%			
				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data dan informasi penanaman modal yang dikelola	100 %	100 %	100%			
				Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Laporan Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang telah diolah	2 Lap	2 Lap	100%			
			Peningkatan Evaluasi dan peLap keuangan yang transparan dan akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Daerah KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100 %	99 %	99%			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	100%			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun	2 Dok	2 Dok	100%			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun	2 Dok	2 Dok	100%			
				Koordinasi dan	Jumlah Koordinasi dan	2 Kali	2 Kali	100%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan DPA-SKPD						
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan kinerja yang Disusun	10 Lap	10 Lap	100%			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	64 %	64%			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	21 Org	18 Org	86%			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan persemester	18 Lap	18 Lap	100%			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen barang milik Daerah yang Disusun Tepat Waktu	100 %	75 %	75%			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Lap	4 Lap	100%			
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi pendapatan kewenangan PD	0 %	0 %	0%	Sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2021 Pasal 6 Ayat 2, Sehingga DPMPSTSP tidak dibebani target Penerimaan Retribusi Daerah. Sehingga Sub Keg ini dihapuskan dan Retribusi Daerah dipindahkan ke Tersedia PUPR.		
				PeLaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Lap	Lap	100%			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi kepegawaian	100 %	75 %	75%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Perangkat Daerah						
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dok	12 Dok	100%			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Karya Tulis Ilmiah	13 KTI	17 KTI	131%			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100 %	71 %	71%			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Persentase Tersedianya instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor	15 %	15 %	100%			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tersedianya Peralatan/perlengkapan Kantor dan rumah tangga Untuk 1 tahun	2 %	6 %	300%			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang Tersedia	3 Jns	3 Jns	100%			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	60 Jns	60 Jns	100%			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	150 Kali	130 Kali	87%			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang Dilaksanakan	450 Kali	450 Kali	100%			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
				Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	1 Unit	1 Unit	100%			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	8 Unit	8 Unit	100%			
				Penyediaan Jasa	Persentase Rata-Rata	100 %	69 %	69%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan Surat Menyurat yang Tertangani	1000 Jns	129 7 Jns	130%			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Lainnya yang Terpenuhi	60 Jns	60 Jns	100%			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Org	4 Org	100%			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	63 %	63%			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Tersedia atau Kendaraan Tersedia Jabatan	Jumlah Kendaraan Tersedia Jabatan Laik Jalan	9 Unit	8 Unit	89%			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin dalam Kondisi Baik	47 Unit	47 Unit	100%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya dalam kondisi baik	1 Bgn	1 Bgn	100%			
12	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga									
			Peningkatan Daya Saing di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Tingkat Partisipasi pemuda dalam Kegiatan ekonomi mandiri	37,22 %	38 %	102%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Presentase pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, sukarelawan dan kepeloporan pemuda	90 %	83 %	92%			
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Pemuda yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	20 Org	20 Org	100%			
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda yang ikut serta dalam Kegiatan kepemudaan kapasitas daya saing pemuda kader kabupaten	30 Org	30 Org	100%			
				Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan	4 Pek	3 Pek	75%			
				Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Pembinaan OKP di Kabupaten Luwu Timur	90 %	90 %	100%			
				Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Oranganisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	frekuensi pelaksanaan event pengembangan kapasitas pemuda	20 kali	20 kali	100%			
			Peningkatan Daya Saing di Bidang	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA	Persentase Tingkat prestasi olahraga	71,43 %	72 %	101%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kepemudaan dan Keolahragaan	SAING KEOLAHRAGAAN							
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga di tiap Kecamatan/Sarana dan Prasaran yang terstandarisasi	95 %	95 %	100%			
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Olahraga yang Diadakan	5 unit	5 unit	100%			
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan kejuaraan olahraga Tingkat Daerah kabupaten/kota	95 %	95 %	100%			
				Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cabang olahraga yang diikutsertakan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga	2 cabo r	2 cabo r	100%			
				Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Cabang olahraga yang diikutsertakan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga	80 cabo r	80 cabo r	100%			
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi Tingkat Daerah provinsi	100 %	100 %	100%			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Tersedianya data keolahragaan yang terintegrasi online & offline	1 unit	1 unit	100%			
				Pembinaan dan Pengembangan	Persentase Pembinaan dan pengembangan	100 %	100 %	100%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Orangnisasi Olahraga	Orangnisasi olahraga						
				Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Kegiatan fasilitasi pemberdayaan fungsi dan peran induk Organisasi olahraga dalam Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di Daerah	1 unit	1 unit	100%			
				Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	frekuensi pelaksanaan kerjasama Organisasi keolahragaan yang Dilaksanakan	1 kali	1 kali	100%			
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	95 %	95 %	100%			
				Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	frekuensi / Jns pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1 kali	1 kali	100%			
				Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah cabang olahraga wisata, tantangan dan Petualangan yang Dilaksanakan dan dikembangkan	1 Jns	1 Jns	100%			
				Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Olahraga Tradisional dalam Masyarakat yang dimanfaatkan dan dikembangkan	5 cabo r	5 cabo r	100%			
			Peningkatan Daya Saing di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase gugus depan yang aktif	93 %	93 %	100%			
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Presentase Pembinaan Kepramukaan di Luwu Timur	90 %	90 %	100%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Peningkatan Kapasitas Oranganisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah kwaran dan kwartir pramuka yang mendapatkan Pembinaan	100 unit	100 unit	100%			
13	Urusan Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian									
			Membangun data statistik sektoral yang akuntable	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat	100 %	100 %	100%			
					Daerah yang memanfaatkan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan Daerah						
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data statistik sektoral kabupaten yang tersusun	100 %	100 %	100%			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Publikasi statistik sektoral	210 Dok	210 Dok	100%			
				Membangun Metadata Statistik Sektoral	Metadata statistik sektoral	50 Buk u	50 Buk u	100%			
14	Urusan Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian									
			Menciptakan keamanan sistem informasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN Untuk	Persentase persandian	100 %	100 %	100%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				PENGAMANAN INFORMASI	Untuk pengamanan informasi pemerintahan Daerah yang diselenggarakan						
				Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan pengamanan data dan informasi elektronik	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan layanan keamanan informasi pemerintah Kabupaten	10 Aplik asi	100 Aplik asi	100%			
15	Urusan Kebudayaan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan									
				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kebudayaan Lokal yang dilestarikan	80 %	80 %	100%			
				Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase seni budaya Daerah yang dilestarikan	100% %	1 %	100%			
				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah festival kebudayaan yang diselenggarakan/diikuti	3 even t	3 even t	100%			
				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONALONAL	Persentase Sanggar seni budaya yang Dibina	100 %	100 %	100%			
				Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sanggar seni dan paduan suara yang Dibina	80 %	80 %	100%			
				Peningkatan Pendidikan	Jumlah Sanggar Seni dan	22 SS	22 SS	100%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Paduan Suara yang Dibina dan dikembangkan						
				PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase sejarah dan Tradisi Lokal yang dilestarikan	100 %	100 %	100%			
				Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sejarah Lokal yang Dibina	100 %	100 %	100%			
				Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Persentase Masyarakat yang mengakses data dan informasi sejar	75 %	75 %	100%			
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	pesentase pengelolaan Cagar budaya yang dilestarikan	100 %	100 %	100%			
				Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar budaya yang ditetapkan	4 Lok	4 Lok	100%			
				Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang diregister	4 Lok	4 Lok	100%			
16	Urusan Perpustakaan	Dinas Perpustakaa n dan Kearsipan									
			Pengembangan perpustakaan sebagai destinasi wisata baca	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN							
				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pemustaka	100% %	1 %	100%			
				Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM :	3 Laya nan	3 Laya nan	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Information Technology Service Management)						
				Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	20 Perpustakaan	20 Perpustakaan	100%			
				Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	3 Layanan	3 Layanan	100%			
				Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan Untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	909 Eks	909 Eks	100%			
				Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	100%			
				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembudayaan gemar membaca	100 Org	100 Org	100%			
				Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	24 Org	24 Org	100%			
				Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	20 Perpustakaan	20 Perpustakaan	100%			
				Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6 Org	3 Org	50%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kabupaten/Kota	yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya						
17	Urusan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan									
			Penyelenggaraa n kearsipan yang sesuai standar nasional kearsipan	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah dan Desa yang menerapkan Tata Kelola KeArsipan sesuai dengan Peraturan yang berlaku	100 %	100 %	100%			
				Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan Arsip dinamis Perangkat Daerah dan Desa	100 %	100 %	100%			
				Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Tersedia yang Diciptakan dan Digunakan	6500 Berk as	650 0 Berk as	100%			
				Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Lap	60 Lap	100%			
				Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip statis yang dikelola	100 %	100 %	100%			
				Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1000 Arsi p	100 0 Arsi p	100%			
				Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi KeArsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan simpul jaringan dalam sistem informasi keArsipan	100 %	100 %	100%			
				Pemberdayaan Kapasitas Unit KeArsipan dan Lembaga KeArsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit KeArsipan dan Lembaga KeArsipan Daerah Kabupaten/Kota	2 Lap	2 Lap	100%			
			Penyelenggaraa n kearsipan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang	100 %	100 %	100%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			yang sesuai standar nasional kearsipan	PENYELAMATAN ARSIP	terlindungi dan terselamatkan						
				Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dimusnahkan	100 %	100 %	100%			
				Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	2000 Arsip	2000 Arsip	100%			
				Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	2000 Berkas	2000 Berkas	100%			
			Penyelenggaraa n kearsipan yang sesuai standar nasional kearsipan	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase perijinan penggunaan Arsip yang bersifat terTUTUp	100 %	100 %	100%			
				Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat TerTUTUp di Kabupaten/Kota	Persentase perizinan penggunaan Arsip yang bersifat terTUTUp	100 %	100 %	100%			
				Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat TerTUTUp	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat TerTUTUp yang Disusun dan Ditetapkan	1 SOP	1 SOP	100%			
				Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat TerTUTUp	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat	20 Arsip	20 Arsip	100%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					TerTUTUp						
			Peningkatan kualitas pelayanan SKPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	100%			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun	2 Dok	2 Dok	100%			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dok	2 Dok	100%			
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok	2 Dok	100%			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Lap	10 Lap	100%			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	96 %	96%			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Org/ Bln	28 Org/ Bln	100%			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest	18 Lap	18 Lap	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					eran SKPD						
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen barang milik Daerah yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	100%			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Lap	4 Lap	100%			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	100%			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	13 Org	13 Org	100%			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi umum PD	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang Disediakan	1 Pkt	1 Pkt	100%			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Pkt	2 Pkt	100%			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Pkt	1 Pkt	100%			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dok	1 Dok	100%			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Lap	4 Lap	100%			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Lap	4 Lap	100%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD Penunjang yang Terpenuhi	100 %	98 %	98%			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 Unit	19 Unit	100%			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Disediakan	83 Unit	81 Unit	98%			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Lap	4 Lap	100%			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Lap	4 Lap	100%			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Lap	4 Lap	100%			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Tersedia atau Kendaraan Tersedia Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Tersedia atau Kendaraan Tersedia Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	100%			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit	33 Unit	100%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan	2 Unit	2 Unit	100%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						

3.2.3 URUSAN PILIHAN

Urusan pilihan terdiri dari urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan, bidang Pariwisata, bidang Pertanian, bidang Perdagangan, bidang Perindustri dan bidang Transmigrasi . Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Berdasarkan Target RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 Tahun Pelaksanaan 2023 untuk Urusan Pilihan dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini :

Tabel 3.4
Urusan Pilihan
Kab. Luwu Timur tahun 2023

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



N O	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oraganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Urusan Pilihan											
1	Urusan Kelautan & Perikanan	Dinas Perikanan									
			"Akselerasi Peningkatan Usaha Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan serta Penyesuaian terhadap Perubahan Lingkungan Strategis."	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	10.216 Ton	103 73 Ton	102%			
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pemenuhan sarana prasarana perikanan tangkap 100 Perse	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Dokumen data dan informasi sumber daya perikanan	4 Dok	4 Dok	100%			
				Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah tambatan perahu yang dibangun/rehab	1 Unit	1 Unit	100%			
			Pengembangan usaha perikanan tangkap dan Pembinaan dan pendampingan pada Kelompok	Penjaminan KeTersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana alat tangkap dan alat bantu usaha perikanan ikan yang Disediakan	60 Klp	60 Klp	100%			



N O	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			nelayan								
				Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kelompok nelayan yang diberdayakan	100 %	100 %	100%			
				Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan yang dilatih teknologi penangkapan ikan	40 Org	40 Org	100%			
				Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok nelayan yang mendapatkan pendampingan	25 Klp	25 Klp	100%			
				Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Cakupan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dioperasikan sesuai dengan standar	71 %	71 %	100%			
				Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI/fasilitas pokok TPI yang dibangun/rehab	1 Unit	1 Unit	100%			
			Peningkatan sarana dan Prasarana budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	31571 0 Ton	387 997 Ton	123%			
			dan Pemberdayaan masyarakat pembudidaya ikan	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh Kegiatan pemberdayaan (pendidikan, pelatihan/penyuluhan dan pendampingan kemitraan usaha, kemudahan akses lptek dan informasi dan penguatan kelembagaan)	100 %	100 %	100%			
				Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok pembudidaya yang diberdayakan	27 Klp	27 Klp	100%			
				Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah lahan pembudidaya ikan yang disertifikatkan	50 Persil	50 Persil	100%			



N O	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok yang mendapatkan pendampingan Bantuan/APBN/APBD I	27 Klp	27 Klp	100%			
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Cakupan sarana dan prasarana yang Disediakan kepada pembudidaya ikan	100 %	84 %	84%			
				Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen data dan informasi pembudidaya ikan	4 Dok	4 Dok	100%			
				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana di BBI yang dibangun/rehab	1 Unit	1 Unit	100%			
					Jumlah jembatan tambak yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	100%			
					Jumlah jalan produksi tambak yang dibangun dan diTingkatkan	4 KM	4 KM	111%			
				Penjaminan KeTersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah benih unggul serta sarana pembudidaya ikan yang Tersedia	96 Klp	95 Klp	99%	Terdapat 1 (Satu) Kelompok calon penerima bantuan yang tidak kooperatif dalam pemenuhan kelengkapan berkas Administrasi Lainnya.	Lebih selektif pada saat verifikasi calon penerima bantuan, baik itu dari segi proposal, kelengkapan Administrasi Lainnya dan kesiapan lahan penerima bantuan.	
				Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembudidaya yang mendapatkan informasi hama dan penyakit ikan dengan memperhatikan kesetaraan gender	30 Org	30 Org	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



N O	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah bibit unggul yang dihasilkan	90000 . Ekor	756 40 Ekor	84%	Hal ini disebabkan kondisi Balai Benih Ikan (BBI) tidak maksimal karena pasokan Air dari pengAirin sangat kurang akibat fenomena El nino		
			Penyuluhan hukum terhadap masyarakat mengenai aturan hukum dan UU perikanan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kp Terhadap KetenTUan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku (%)	94 %	94 %	100%			
				Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Cakupan masyarakat/Kelompok masyarakat pengawas yang aktif	100 %	100 %	100%			
				Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan pengawasan terhadap usaha perikanan tangkap	24 Kali	24 Kali	100%			
			Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan dan Dukungan keTersediaan sarana dan prasarana produksi bermutu dan terjangkau	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi Hasil Pengolahan Ikan (Ton)	335 Ton	564 Ton	168%			



N O	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Cakupan Kelompok yang melakukan usaha pengelolaan hasil perikanan (RTP)	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	umlah Dokumen data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	4 Dok	4 Dok	100%			
				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Kelompok usaha perikanan yang meningkat kelASNya	83 %	85 %	102%			
				Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	6 Kali	6 Kali	100%			
				Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kelompok pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil yang berkembang	64 %	75 %	117%			
				Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok/pelaku usaha yang mendapatkan Bantuan sarana dan prasarana pengolahan ikan skala mikro dan kecil	4 Klp	3 Klp	75%	Mesin pengering yang diusulkan Kelompok calon penerima tidak cocok digunakan untuk mengeringkan	Lebih selektif pada saat verifikasi calon penerima bantuan, baik itu dari segi proposal dan kelengkapan Administrasi Lainnya.	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah Daerah	94 %	102 %	108%			



N O	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten/Kota (%)						
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	100%			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun	2 Dok	2 Dok	100%			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun	2 Dok	2 Dok	100%			
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok	2 Dok	100%			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan kinerja yang Disusun	10 Dok	10 Dok	100%			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	94 %	94%			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	26 Org	26 Org	100%			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Lap	18 Lap	100%			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen barang milik Daerah yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	100%			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	4 Lap	4 Lap	100%			



N O	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Daerah pada SKPD						
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi pendapatan kewenangan PD	100 %	13 %	13%	Rendahnya realisasi pada Keg ini disebabkan rendahnya PAD yang dihasil Tersedia Perikanan dimana Target PAD berJumlah Rp 280.000.000 Realisasi berumlah Rp 35.510.000 atau hanya 12.68 %	Lebih mengkaji dan lebih realistis dalam penentuan target PAD	
				PeLaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dok	4 Dok	100%			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	142 %	142%			
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dok	12 Dok	100%			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Org	15 Org	214%			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi umum PD	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor	10 Jns	10 Jns	100%			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	102 Pkt	102 Pkt	100%			
				Penyediaan Bahan	Jumlah Penyediaan Bahan	20 Jns	20 Jns	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



N O	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Logistik Kantor	Logistik Kantor yang Tersedia						
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang Tersedia	7 Jns	7 Jns	100%			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	48 Dok	48 Dok	100%			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	332 Kali	332 Kali	100%			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan Tersedia yang Dilaksanakan	230 kali	230 kali	100%			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD Penunjang yang Terpenuhi	100 %	100 %	100%			
				Pengadaan Kendaraan Tersedia Operasional atau Laporanangan	Jumlah kendaraan Tersedia operasional atau Laporanangan yang Tersedia	1 Unit	1 Unit	100%			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	100%			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	232 %	232%			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000 Lap	473 8 Lap	237%			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Lap	10 Lap	100%			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	10 Org	10 Org	100%			



N O	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Tersedia Operasional atau Laporanangan	Jumlah Kendaraan Tersedia Operasional atau Laporanangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	23 Unit	100%			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	40 Unit	100%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	100%			
2	Urusan Pariwisata	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga									
			Peningkatan Pengembangan Destinasi dan Promosi Pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Meningkatnya Pengembangan Objek Wisata	36,96 %	38 %	103,71%			
				Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Presentase Meningkatnya Penyusunan Dokumen Pegembangan Destinasi pariwisata	80 %	80 %	100%			
				Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan strategis pariwisata yang dikembangkan	1 Lok	1 Lok	100%			
				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Objek Pariwisata	65 %	65 %	100%			
				Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi	Jumlah sarana dan prasarana destinasi yang dipelihara	8 Lok	8 Lok	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



N O	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pariwisata Kabupaten/Kota							
			Peningkatan Pengembangan Destinasi dan Promosi Pariwisata	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Presentase Meningkatnya Pengembangan Objek Wisata	81,82 %	82 %	100%			
				Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Presentase pelaksanaan Kegiatan pemasaran pariwisata	75 %	75 %	100%			
				Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Bertambahnya masa lama tinggal wisatawan	2 hari	2 hari	100%			
				Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Event Pariwisata yang di ikuti/Dilaksanakan tiap Tahun (Event)	3 Event	3 Event	100%			
				Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dok	1 Dok	100%			
				Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kerjasama dan kemitraan Promosi Pariwisata (kerjasama/ kemitraan)	1 kerjasama/ kemitraan	1 kerjasama/ kemitraan	100%			
			Peningkatan Pengembangan	PROGRAM PENGEMBANGAN	Presentase Meningkatnya Pengembangan Ekonomi	29,51 %	79 %	267%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



N O	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Destinasi dan Promosi Pariwisata	SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	kreatif di Luwu Timur						
				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Meningkatnya Pembinaan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	50 %	50 %	100%			
				Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Pokdarwis ikut dalam Kegiatan Promosi di dalam dan luar Daerah (Seperti Expo dan Table Top) (Kelompok)	2 Klp	2 Klp	100%			
				Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	SDM yang tersertifikasi (Orang)	2 Org	2 Org	100%			
				Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Orang)	1 Org	1 Org	100%			
				Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rek Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Dok	1 Dok	100%			
				Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Presentase Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	70 %	70 %	100%			
				Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang Berstandarisasi Usaha dan Bersertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif (usaha)	1 Usaha	1 Usaha	100%			
			Peningkatan Kapasitas SDM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah	97 %	97 %	100%			



N O	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dan Kedisiplinan Aparatur Perangkat Daerah	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Berjalan Sesuai Standar						
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	100%			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun	2 Dok	2 Dok	100%			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun	2 Dok	2 Dok	100%			
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Kali	2 Kali	100%			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah layanan Administrasi Perangkat Daerah yang Tertangani	3 Jns	3 Jns	100%			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan kinerja yang Disusun	10 Dok	10 Dok	100%			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	67 %	67%			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	26 Org	20 Org	77%			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan dan aset Perangkat Daerah yang Disusun	1 Lap	1 Lap	100%			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme	Jumlah Laporan keuangan persemester	18 Lap	18 Lap	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



N O	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				steran SKPD							
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen barang milik Daerah yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	100%			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Lap	4 Lap	100%			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	100%			
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dok	12 Dok	100%			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	7 Org	9 Org	129%			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi umum PD	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor	17 Jns	17 Jns	100%			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadakan	12 Jns	12 Jns	100%			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tersedianya Peralatan/perlengkapan Kantor dan rumah tangga Untuk 1 tahun	20 %	20 %	100%			
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang Tersedia	3 Jns	3 Jns	100%			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	72 Jns	72 Jns	100%			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan	2000 Kali	199 Kali	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



N O	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Tamu		8				
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang Dilaksanakan	50 Kali	50 Kali	100%			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan Surat Menyurat yang Tertangani	1074 Jns	1074 Jns	100%			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Lainnya yang Terpenuhi	96 Jns	96 Jns	100%			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	18 Org	18 Org	100%			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Tersedia atau Kendaraan Tersedia Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Tersedia atau Kendaraan Tersedia Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit	14 Unit	100%			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	45 Unit	100%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya dalam kondisi baik	1 Bgn	1 Bgn	100%			
3	Urusan Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan									
			Penyediaan	PROGRAM	Jumlah Produktifitas	11,95 Ton	17 Ton	138%	1. Harga yang	1. Memperkuat	



N O	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			benih yang berkualitas, Pemberian Bantuan alat dan Mesin pertanian, Perbaikan jaringan irigasi, Percetakan sawah dan optimalisasi lahan, Bantuan bibit buah dan sayur, Pengadaan sarana dan prasarana, Pengendalian OPT, Pengawasan dan sertifikasi benih, Pengadaan ternak, Pemberian dukungan sarana dan prasarana, Pembinaan masyarakat peternakan.	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	KeLaporana Sawit				fluktuatif dan tidak ada jaminan sehingga masyarakat tidak berupaya secara optimal, 2. Input produksi yang tidak Tersedia secara stabil sehingga mempersulit akses bagi petani, 3. Sumber daya manusia petani mengelola belum optimal dalam penerapan Pkt teknologi budidaya sawit, 4. Pengaruh iklim yang ekstrim	kelembagaan petani sawit untuk memperkuat posisi tawar, 2. Mendampingi petani dalam mengakses produk pupuk organik sebagai alternatif, 3. Meningkatkan kapasitas penyuluh dan melakukan pengawasan, monev terhadap target penyuluh	
					Jumlah Produktivitas Jagung	6,51 Ton	5 Ton	80%	Faktor iklim yang ekstrim menyebabkan pertumbuhan pathogen cukup tinggi menyebabkan serangan penyakit yang variative.	Mengoptimalkan SDM petani dalam budidaya lada yang baik dan benar	
					Jumlah Produktivitas lada	0,97 Ton	1 Ton	76%	Faktor iklim yang	Mengoptimalkan	



N O	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									ekstrem menyebabkan pertumbuhan pathogen cukup tinggi menyebabkan serangan penyakit yang variative.	SDM petani dalam berbudidaya lada yang baik dan benar	
					Jumlah Populasi ternak Kecil	28462 ekor	123 39 ekor	43%	Minat masyarakat untuk memelihara ternak kecil skala rumah tangga sangat kecil karena faktor keamanan ternak rawan terhadap pencurian.	Mengusulkan fasilitasi pengembangan ternak kercil	
									Tidak Tersedianya pakan dalam Jumlah uang memadai		
					Jumlah populasi Unggas	94952 9 ekor	421 270 ekor	44%	Tingginya harga pakan dan sangat fluktuatif	Mengusulkan fasilitasi Rek penyediaan pakan alternatif	
									Tidak Tersedia pakan local alternatif		
					Jumlah Produktivitas kakao	0,82 Ton	1 Ton	68%	Faktor iklim yang ekstrem menyebabkan pertumbuhan pathogen cukup tinggi menyebabkan serangan penyakit yang variative.	Mengoptimalkan SDM petani dalam berbudidaya lada yang baik dan benar	
					Jumlah Populasi ternak besar	24109 ekor	182 98 ekor	76%	Penurunan tersebut dipengaruhi oleh Tingkat kelahiran, lalu lintas ternak berupa Keluar dan Masuknya ternak yang tidak terdata secara lengkap dan pengaruh penyakit hewan yang	peningkatan persediaan Obat-obatan dan Pemberian vaksin maupun pelayanan kesehatan Lainnya pada ternak serta peningkatan kapasitas tenaga	



N O	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									menyerang ternak di tahun 2023 sangat tinggi terutama pada ternak besar dan ternak kecil. Populasi ternak besar mengalami penurunan diakibatkan oleh rendahnya Tingkat kelahiran yang dipengaruhi merebaknya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan meningkatnya kematian akibat penyakit Jembrana. Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dapat memberikan dampak pada organ reproduksi ternak atau dapat memberikan masalah gangguan reproduksi. Pada beberapa kasus, sapi yang telah terkena PMK tidak sedikit yang mengalami keguguran dan juga memperlihatkan siklus estrus yang tidak normal.	teknis peternakan.	
									Sangat tingginya factor produksi 70 % factor pakan sangat berpengaruh	Mengusulkan fasilitasi alternatif penyediaan pakan local alternatif	
					Jumlah Produktivitas padi	7,13 Ton	7 Ton	94%	Input produksi tidak Tersedia secara optimal dari segi harga	Mengusulkan fasailitasi alternatif penyediaan pupuk	



N O	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									dan kualitas sesuai Kebutuhan petani .	organic sebagai alternatif	
									Pengaruh iklim yang ekstrim	Melakukan pengawalan pada saat penanaman	
					Presentase Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	100 %	97 %	97%	terdapatnya beberapa Jns alsintan dan Pengadaan bibit tidak dibelanjakan karena kesalahan nomenklatur	Anggaran yang Tersedia tidak dibelanjakan	
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian	100 %	95 %	95%	Terdapatnya usulan Alsintan tidak dapat dibelanjakan dikarenakan kesalahan nomenklatur (tempat dan nama Kelompok tidak terdaftar pada simluhtan dan sebagian penerima traktor roda dua Masuk dalam Kelompok perkebunan.	Anggaran yang Tersedia tidak dibelanjakan	
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	presentase tersalurnya pupuk subsidi sesuai kuota dan Tepat sasaran	95 %	79 %	83%	Pupuk : Sebagian petani tidak melakukan pennebusan utamanya NPK Formula karena tidak sesuai dengan kondisi lahan yang ada, selain itu harganya jauh lebih mahal dibanding NPK Phonska	Sebagian besar petani mengajukan untuk di alihkan dari NPK formula khusus ke NPK Ponska,Perlu adanya penguatan modal pada Kelompok tani	
					Jumlah alsintan yang Diadakan	713 Unit	636 Unit	89%	terdapat 6 unit traktor roda 2, dan 70 unit hand sprayer yang	percepatan proses verifikasi bagi Kelompok penerima	



N O	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									tidak dibelanjakan karena kesalahan nomen klatur, tidak terdaftar di simluhtan maupun Masuk dalam Kelompok perkebunan	manfaat	
				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Kegiatan perkebunan yang didampingi	4 Keg	4 Keg	100%			
					Jumlah Kegiatan TPH yang didampingi	4 Keg	4 Keg	100%			
					Jumlah Kegiatan perternakan yang didampingi	2 Keg	2 Keg	100%			
					Jumlah Kegiatan PSP yang didampingi	2 Keg	2 Keg	100%			
				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Oranganisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Oranganisme Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	96 %	96%	terdapatnya Pkt tidak dapat dibelanjakan karena kesalahan nomenklatur	terdapatnya Pkt tidak dapat dibelanjakan karena kesalahan nomenklatur	
				Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah benih padi yang di produksi IKB	69000 Kg	538 15 Kg	78%	IKB. : Terdapat penyesuaian harga dipasaran dengan harga yang ada di DPA Sehingga terjadi pengurangan volume belanja disesuaikan dengan Jumlah anggaran yang Tersedia	Melakukan penyesuaian harga sesuai di lapangan	
					Jumlah kelahiran ternak Sapi Hasil IB	1000 Ekor	100 0 Ekor	100%			
					Jumlah sarana dan prasarana pendukung IB yang Diadakan	4 Jns	4 Jns	100%			
				Pemanfaatan SDG	Jumlah lahan perkebunan	127,45 Ha	127 Ha	100%			



N O	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Hewan/Tanaman	yang diidentifikasi, direhab dan diremajakan						
					Jumlah kolam perendaman merica yang dibangun	1 Unit	1 Unit	100%			
					Jumlah benih padi yang dibagikan	73000 Kg	73000 Kg	100%			
				Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	presentase penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota lain	100 %	100 %	100%			
				Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah kambing betina yang Diadakan	125 Ekor	125 Ekor	100%			
					Jumlah ternak Unggas yang Diadakan	5061 Ekor	5061 Ekor	100%			
					Jumlah sapi betina yang di adakan	152 Ekor	152 Ekor	100%			
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	presentase Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	100 %	97 %	97%			
				Pembangunan Prasarana Pertanian	presentase pembangunan prasarana pertanian	100 %	112 %	112%			
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	9 Unit	9 Unit	100%			
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah panjang jalan produksi yang dibangun/ditingkatkan	19500 Mtr	19500 Mtr	100%			
					Jumlah panjang jalan usaha tani yang dibangun	25500 Mtr	22396 Mtr	88%	Untuk jalan Produksi ditargetkan lebih banyak pada	Menyesuaian usulan yang Masuk untuk jalan usaha tani dan	



N O	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									peningkatan Jalan, namun pada realisasinya lebih banyak pada pembentukan jalan, sehingga jalan yang dibangun lebih panjang dibandingkan targetnya. Sementara untuk Jalan Usaha Tani ditargetkan sebaliknya.	jalan produksi	
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang dibangun	1 Unit	0 Unit	0%	retensi	Merupakan anggaran yang sifatnya persediaan	
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	presentase pengendalian kesehatan hewan dan masyarakat veteriner	100 %	99 %	99%			
					Presentase penurunan kejadian kasus penyakit hewan menular	1,4 %	1 %	91%			
				Penjaminan Kesehatan Hewan, PenuTupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Penjaminan Kesehatan hewan, PenuTupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menuar Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	99 %	99%			
				Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah hewan yang terlayani kesehatannya	32325 Ekor	321 Ekor 51	99%			
				Penerapan dan Pengawasan PersyaRatan Teknis Kesehatan Masyarakat	presentase Penerapan dan Pengawasan PersyaRatan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	95 %	100 %	105%			



N O	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Veteriner							
				Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	7 Unit	7 Unit	100%			
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	presentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	100 %	84 %	84%	Pengendalian OPT baik tanaman pangan maupun perkebunan masih dilakukan secara mandiri. Selain itu adanya refocusing anggaran AUTP oleh Kementerian sehingga berdampak pada pelaksanaan Keg AUTP diDaerah.	- Peningkatan kapasitas petugas OPT - Sosialisasi Terkait AUTP di masyarakat	
				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	presentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	95 %	84 %	88%			
				Pengendalian Oranganisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, HortikulTura, dan Perkebunan	Persentase luas serangan OPT Tanaman Pangan yang telah dikendalikan	95 %	95 %	100%			
					Luas Lahan pertanian yang diasuransikan	2500 Ha	1285 Ha	51%	AUTP : Adanya refocusing anggaran pada anggaran kementerian pertanian untuk Keg AUTP selain itu sebagian besar data yang diusulkan oleh kecamatan lambat diajukan sehingga melewati batas pengajuan	Dengan adanya refocusing anggaran sehingga data yang diusulkan sesuai lahan yang terdampak	
					Persentase pengendalian	95 %	95 %	100%			



N O	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Tingkat serangan OPT Perkebunan						
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Presentase Penyuluhan Pertanian	100 %	100 %	100%			
					Cakupan Bina Kelompok Tani	58,57 %	24 %	41%	Merujuk kepada permendagri 86 Tahun 2017 Terkait formulasi perhitungan cakupan bina Kelompok tani. Tersedia pertanian hanya mencapai 23,97 % atau hanya 616 Kelompok yang mendapatkan bantuan baik dari APBD, APBD 1, maupun APBN dari total seluruh Jumlah kelompok tani 2.570 Kelompok	Pengusulan proposal untuk APBD 1 dan APBN dan penyaluran bantuan melalui APBD	
				Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Penyuluhan Pertanian yang Dilaksanakan	100 %	100 %	100%			
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang diTingkatkan KapasitASnya	3 Unit	3 Unit	100%			
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah data base kepenyuluhan yang Disusun	2 Dok	2 Dok	100%			
					Jumlah kelembagaan petani Tingkat Desa yang difasilitasi	125 Klp	125 Klp	100%			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							



N O	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				DAERAH KABUPATEN/KOTA							
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	100%			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun	2 Dok	2 Dok	100%			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun	2 Dok	2 Dok	100%			
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok	2 Dok	100%			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Lap	10 Lap	100%			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	198 Org	198 Org	100%			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Lap	18 Lap	100%			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	95 %	95%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



N O	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dok	12 Dok	100%			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	30 Org	30 Org	100%			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100 %	97 %	97%			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor	18 Jns	18 Jns	100%			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadakan	32 Jns	32 Jns	100%			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Tersedia	3 Jns	3 Jns	100%			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang Tersedia	3 Jns	3 Jns	100%			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	70 Dok	70 Dok	100%			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	885 Kali	826 Kali	93%			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang Dilaksanakan	843 Kali	799 Kali	95%			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD Penunjang yang Terpenuhi	100 %	100 %	100%			
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	139 Unit	139 Unit	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



N O	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	3 Unit	3 Unit	100%			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	96 Unit	95 Unit	99%			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	97 %	97%			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2500 . Lap	249 . Lap	100%			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Lainnya yang Terpenuhi	276 Jns	255 Jns	92%			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Org	12 Org	100%			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	93 %	93%			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Tersedia Operasional atau Laporanangan	Jumlah Kendaraan Tersedia Operasional atau Laporanangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	544 Unit	481 Unit	88%			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	136 Unit	125 Unit	92%	Disesuaikan dengan Jumlah kendaraan Tersedia yang mendapat pemeliharaan	Merupakan anggaran yang sifatnya persediaan	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	15 Unit	100%	Disesuaikan dengan Jumlah kendaraan Tersedia yang	Merupakan anggaran yang sifatnya persediaan	



N O	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									mendapat pemeliharaan		
4	Urusan Perdagangan	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian									
			Penguatan sarana/ prasarana	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PerTumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi	10 %	10 %	97%			
			perdagangan dalam negeri dan ekspor								
				Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar/sarana prasarana distribusi perdagangan yang termanfaatkan	9 Psr	9 Psr	100%			
				Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	9 Unit	9 Unit	100%			
				Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase peningkatan kapasitas pengelola sarana distribusi perdagangan	70 %	82 %	100%			
				Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang Dibina (Pengelola Pasar)	4 Penge lola	4 Pen gelol a	100%			
			Peningkatan stabilisasi barang	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitasi dan Jumlah keTersediaan harga barang Kebutuhan pokok	8 %	3 %	35%	Adanya kenaikan harga barang pokok yang mengakibatkan Tingkat kestabilan harga tidak dapat terjaga yang berakibat pada peningkatan nilai inflasi Daerah,hal ini disebabkan antara		
			Kebutuhan pokok dan penguatan jaringan distribusi								

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



N O	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									lain karena kurangnya pasokan akan bahan pokok ataupun tingginya permintaan masyarakat akan bahan pokok		
				Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase harga barang Kebutuhan pokok dan barang penting yang terkendali	44 %	49 %	111%			
				Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Jurnal Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	260 Jurnal	243 Jurnal	93%			
				Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Miskin sasaran dalam Operasi Pasar (RTM)	2000 RTM	2000 RTM	100%			
				Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kinerja pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida	100 %	92 %	92%			
				Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	60 Lap	60 Lap	100%			
			Pemenuhan barang dan jasa sesuai standar nasional dan	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan nilai ekspor	15 %	16 %	107%			



N O	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			internasional								
				Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase produk yang memperoleh fasilitas promosi dagang	40 %	40 %	100%			
				Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	231 Pelaku usaha	231 Pelaku usaha	100%			
				Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	1 Pelaku usaha	1 Pelaku usaha	100%			
				Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	5 Pelaku usaha	5 Pelaku usaha	100%			
			Peningkatan stabilisasi barang	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase penurunan pengaduan konsumen tentang alat UTTP	5 %	4 %	76%			
			Kebutuhan pokok dan penguatan jaringan distribusi								
				Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat ukur, takar, tIMBang dan perlengkapannya yang diawasi	60 %	58 %	97%			
				Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat TIMBang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	915 Unit	888 Unit	97%	Kurangnya sosialisasi tentang pelaksanaan tera pada alat ukur, takar, tIMBang dan perlengkapannya	Tingkatkan sosialisasi agar pedagang mengetahui pentingnya tera	

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



N O	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									sehingga pada saat yang dilakukan kunjungan kepasar banyak pedagang yang tidak datang atau berdagang ditempat lain.	ulang alat TIMBang, takar, ukur dan perlengkapannya agar konsumen tidak dirugikan	
5	Urusan Perindustrian	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian									
			Pengembangan ekonomi kreatif dan berbasis teknologi digital	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Peraturan Bupati (Perbub) Kawasan industri yang ditetapkan	1 Dok	1 Dok	100%			
			Pengembangan ekonomi kreatif dan berbasis teknologi digital	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen revisi siteplan dan amdal Kawasan industri yang diEvaluasi	1 Dok	1 Dok	100%			
			Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik di sektor Koperasi, perdagangan, UMKM dan perindustrian	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM Pangan dan Handycraft yang difasilitasi dan Dibina (IKM)	20 IKM	20 IKM	100%			
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Revisi Dokumen siteplan dan Amdal	1 Dok	1 Dok	100%			
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM Pangan yang mendapatkan binaan good manufacTURING practice/GMP (IKM)	58 IKM	58 IKM	103%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



N O	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Meningkatkan fasilitasi dan iklim usaha	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase pengelolaan data usaha industri ke sistem informasi industri nasional yang dikelola sesuai standar	7% %	0 %	98%			
				Penyediaan Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase usaha industri yang dikelola dalam sistem informasi industri nasional (SINAS)	50% %	1 %	100%			
				Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri lingkup kabupaten/kota yang dipantau dan diEvaluasi dalam penyanpaian data kesistem imformasi industri nasional (SINAS) (usaha industri)	5 Usaha	5 Usa ha	100%			
				Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dok	1 Dok	100%			
6	Urusan Transmigrasi	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja									
			Pengembangan usaha ekonomi dan pendapatan asli Desa	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase penetapan Kawasan transmigrasi	100 %	100 %	100%			
			Peningkatan Kerjasama antar	Pencadangan Tanah Untuk Kawasan	Luas Kawasan transmigrasi yang	30 Ha	30 Ha	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



N O	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Daerah dan Peningkatan Kualitas Calon Warga Transmigran	Transmigrasi	dicanangkan						
				Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang diidentifikasi	1 kwsn	1 kwsn	100%			
				Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Penyediaan Lahan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	30 Ha	30 Ha	100%			
			Peningkatan Kerjasama antar Daerah dan Peningkatan Kualitas Calon Warga Transmigran	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Luas Wilayah Transmigrasi yang dibangun	100 %	100 %	100%			
				Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK warga transmigran yang ditempatkan	15 KK	15 KK	100%			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah MoU yang direalisaSIkan	4 Dok	4 Dok	100%			
				Penyiapan Lingkungan Hunian FiSIK, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Rumah Tangga Jamban Keluarga (RTJK) yang difasilitasi	15 Unit	15 Unit	100%			
				Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Transmigrasi yang diseleksi	150 KK	150 KK	100%			
			Peningkatan	PROGRAM	Persentase masyarakat	100 %	100 %	100%			



N O	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kerjasama antar Daerah dan Peningkatan Kualitas Calon Warga Transmigran	PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	transmigran yang di bina						
				Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Satuan permukiman transmigran yang dikembangkan	1 kwsn	1 kwsn	100%			
				Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Transmigran yang Dibina Usaha Ekonominya	50 Org	50 Org	100%			
				Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Dokumen DED yang dibuat	4 Dok	4 Dok	100%			

3.2.4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Unsur pendukung urusan pemerintahan yaitu unsur Sekretariat Daerah dan unsur Sekretariat DPRD. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Berdasarkan Target RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 Tahun Pelaksanaan 2023, untuk Unsur Pemerintahan Umum dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini :

Tabel 3.5
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
Kab. Luwu Timur Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pemerintahan Umum											
1	Urusan Pemerintahan Umum	Sekretariat Daerah									
			Pemberian pelayanan secara optimal kepada masyarakat.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Rek kebijakan bidang pemerintahan dan keSRa yang ditindaklanjuti dan Dilaksanakan	100 %	100 %	100%			
			Melaksanakan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam Menyusun regulasi yang implementatif di Daerah.	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Rek Administrasi tata pemerintahan yang dihasilkan	4 Rek	4 Rek	100%			
				Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Kelurahan dan Kecamatan yang ditata Administrasi pemerintahannya	14 Kel./Kec	14 Kel./Kec	100%			
				Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Peta yang dihasilkan	25 Peta	30 Peta	120%			
				Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Otonomi Daerah yang di Fasilitasi	3 Lap	3 Lap	100%			
				Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Rek pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang dihasilkan	4 Rek	4 Rek	100%			
				Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Jumlah Kegiatan keagamaan yang Dilaksanakan	4 Keg	4 Keg	100%	Hibah yang tidak realisasi pada rumah ibadah sebanyak 2 (dua) rumah ibadah yakni Mesjid Darussalam Desa Rantemario kec. Tomoni disebabkan	-	



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									berkas pengajuan pencAiran tidak lengkap, dan Mesjid Al Muhajirin Desa Pertasi Kencana Kec. Kalaena karena mendapatkan dana BKK di tahun yang sama.		
				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Kegiatan kesejahteraan Sosial yang Dibina dan diEvaluasi	2 Keg	2 Keg	100%	Kurang optimalnya realisasi kinerja pembayaran beasiswa kurang mampu dari target 400 Org mahasiswa, terealisasi 300 Org disebabkan setelah dilakukan validasi kampus didapatkan informasi bahwa beberapa mahasiswa yang mendaftar terdaftar pada program Kampus Merdeka serta terdapat Mahasiswa yang tertolak karena berkas yang digunakan mendaftar adalah berkas yang tidak sah/dimanipulasi.	Akan diupayakan untuk melakukan sosialisasi lebih awal kepada masyarakat sehingga informasinya akan persyaRatan penerimaan Beasiswa bisa tersampaikan lebih maksimal lagi.	
				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Kegiatan kesejahteraan Masyarakat yang Dibina dan diEvaluasi	2 Keg	2 Keg	100%	Dari Mahasiswa yang mendaftar dan tidak lulus verifikasi kendalanya adalah setelah dilakukan validasi kampus didapatkan informasi bahwa beberapa mahasiswa yang mendaftar terdaftar	Akan diupayakan untuk melakukan sosialisasi lebih awal kepada masyarakat sehingga informasinya akan persyaRatan penerimaan Beasiswa bisa	

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									pada program Kampus merdeka serta terdapat Mahasiswa yang tertolak karena berkas yang digunakan mendaftar adalah berkas yang tidak sah/dimanipulasi.	tersampaikan lebih maksimal lagi.	
				Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Koordinasi hukum yang Dilaksanakan	100 %	100 %	100%			
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan	458 (Perda/Perbup/SK)	507 (Perda/Perbup/SK)	111%	Capaian Kinerja dengan output berupa 507 dari Jumlah yang diusulkan oleh Perangkat Daerah sebanyak 508 Dok produk hukum, terdapat 1 (Satu) Rancangan Perda tentang Pencegahan Narkotika yang diajukan oleh Badan Kesbangpol yang belum selesai ditetapkan karena bergantung pada Agenda DPRD dalam melakukan pembahasan Ranperda.	Meskipun Ranperda yang belum ditetapkan merupakan hal yang tidak dapat dihindari namun tetap perlu diKoordinasi akan dengan Pimpinan DPRD agar kedepan lebih maksimal dengan tetap mempedomani prosedur dan Waktu yang telah ditetapkan untuk pembahasan suatu ranperda.	
				Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah kasus yang didampingi melalui Bantuan hukum	4 Kasus	4 Kasus	100%	Perkara Pemerintah Daerah yang difasilitasi Bantuan Hukum selama Tahun 2023 adalah sebanyak 4 (empat) kasus masih tetap difasilitasi bahkan sampai ke tahun 2024. 2 (dua)	Telah dilakukan rapat pada awal tahun 2024 untuk penyusunan pendapat akhir sidang sengketa pajak. Untuk itu segera rampungkan bahan sidang yang	



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									sengketa diTingkat Kasasi Mahkamah Agung dan 2 (dua) sengketa masih berjalan di Pengadilan Pajak Jakarta, untuk agenda selanjutnya adalah penyampaian kesimpulan akhir tanggal 16 Januari 2024. Dalam penCapaian Output Kinerja subKeg Fasilitasi Bantuan Hukum agak sulit untuk diprediksi karena sangat bergantung terhadap jadwal persidangan. Namun semua perkara telah difasilitasi sampai pada tahapan yang telah diagendakan.	akan disampaikan pada persidangan selanjutnya. Perlu upaya penanganan perkara agar Pemerintah Daerah dapat memenangkan sengketa.	
				PenDokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Desa binaan sadar hukum	11 Desa	11 Desa	100%	Capaian maksimal Output berupa pendokumnetasian sebanyak 507 Dok dari jumlah produk hukum yang ditetapkan seperti rincian: Perda sebanyak 16; PerBup 88 dan SK Bupati 403 serta Pembinaan Desa Sadar Hukum sebanyak 11 Desa.	Pada Perubahan Anggaran dan segera akan diproses Pengadaannya:* Agar aplikasi JDIH yang telah diperbaharui segera dilengkapi dengan seluruh produk h hukum Daerah dan Informasi yang Update: * Untuk tahun selanjutnya agar pendampingan	



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										terhadap Desa/Kel yang didaftarkan untuk mengikuti omba Desa sadar hukum lebih maksimal. Disarankan untuk melaksanakan lomba Desa sadar hukum Tingkat Kabupaten.	
					Jumlah Produk Hukum yang diDokumentasian	458 (Perda/Perbup/SK)	507 (Perda/Perbup/SK)	111%			
				Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Perjanjian Kerjasama yang dihasilkan	60 PKS	60 PKS	100%			
				Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah MOU Dalam Negeri yang dihasilkan	18 MOU	20 MOU	111%		-	
				Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah MOU yang diEvaluasi	6 MOU	8 MOU	133%		-	
			Melaksanakan pengembangan, pengkajian dan Monev terhadap kebijakan perekonomian Daerah.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Rek sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan Dilaksanakan	85 %	105 %	124%			
				Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Rek kebijakan perekonomian yang dihasilkan	12 Rek	12 Rek	100%			
				Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Rek kebijakan pengelolaan BUMD dan	4 Rek	4 Rek	100%	Capaian kinerja maksimal dari target 4	Assesment direncanakan akan	



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	BLUD yang dihasilkan				Rek realisasi 4 Rek namun Assesment tidak sempat Dilaksanakan disebabkan karena Perda Pendirian BUMD PT. Lutim Gemilang, Akte Notaris, SK Pengesahan dari Kemenkumham ditetapkan di akhir tahun.	Dilaksanakan pada Tahun Anggaran berikutnya.	
				Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Rek kebijakan pengendalian dan distribusi perekonomian yang dihasilkan	4 Rek	4 Rek	100%		-	
				Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Rek kebijakan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil yang dihasilkan	4 Rek	4 Rek	100%		-	
				Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Rek pelaksanaan Administrasi pembangunan yang dihasilkan	8 Rek	8 Rek	100%			
				Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Rek pelaksanaan pengendalian dan Evaluasi pembangunan yang dihasilkan	4 Rek	4 Rek	100%	Tidak ada masalah, Capaian kinerja maksimal dari target 4 Rek realisasi 4 Rek.	-	
				Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Rek Pelaksanaan pembangunan fisik	4 Rek	4 Rek	100%	Tidak ada masalah, Capaian kinerja maksimal dari target 4 Rek realisasi 4 Rek.	-	
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	137 %	137%			
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket yang diproses oleh POKJA dan Pejabat	800 Pkt	140 Pkt 4	176%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pengada						
				Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Aplikasi Digital pendukung layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang dapat diakses oleh Perangkat Daerah, Pelaku Usaha, dan UMK	7 Aplikasi	7 Aplikasi	100%			
				Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah OPD yang mendapatkan Pembinaan Pengadaan barang dan Jasa	61 OPD	61 OPD	100%			
				Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Rek kebijakan Sumber Daya Alam yang dihasilkan	8 Rek	8 Rek	100%			
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Rek kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang dihasilkan	4 Rek	4 Rek	100%	Tidak ada masalah, Capaian kinerja maksimal dari target 4 Rek realisasi 4 Rek.	-	
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Rek kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup yang dihasilkan	4 Rek	4 Rek	100%	Tidak ada masalah, Capaian kinerja maksimal dari target 4 Rek realisasi 4 Rek.	-	
			Peningkatan Akuntabilitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Lap Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100 %	92 %	92%			
				Perencanaan, Penganggaran, dan	Persentase Dokumen perencanaan,	100 %	100 %	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu						
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun	2 Dok	2 Dok	100%		-	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun	2 Dok	2 Dok	100%		-	
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok	2 Dok	100%		-	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan kinerja yang Disusun	6 Dok	6 Dok	100%		-	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	99 %	99%			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	82 Org	80 Org	98%	Kurang optimalnya realisasi kinerja disebabkan adanya mutasi pegawai Keluar ke OPD lain.	-	
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Kegiatan yang diverifikasi	21 Keg	21 Keg	100%		-	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Dok	14 Dok	100%		-	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada	Persentase Dokumen barang milik Daerah yang	100 %	100 %	100%			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Perangkat Daerah	Disusun Tepat Waktu						
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Dok	4 Dok	100%		-	
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi pendapatan kewenangan PD	100 %	100 %	100%			
				PeLaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Lap	12 Lap	100%		-	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	100%			
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Lap	12 Lap	100%		-	
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	24 Org	26 Org	108%	Keg ini sifatnya Disediakan berdasarkan Undangan untuk mengikuti Bimtek Capaian kinerja dari target 24 Org realisasi 26 Org	-	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi umum PD	100 %	99 %	99%			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor	9 Jns	9 Jns	100%		-	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadakan	7 Unit	7 Unit	100%		-	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga yang Tersedia	3 Jns	3 Jns	100%		-	

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Tersedia	8 Jns	8 Jns	100%		-	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang Tersedia	8 Jns	8 Jns	100%		-	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1980 Dok	1980 Dok	100%		-	
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	12000 . Kali	11670 . Kali	97%	Realisasi kinerja tidak bisa diprediksi karena sifatnya Disediakan untuk Tamu-Tamu Pemerintah Daerah..	-	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang Dilaksanakan	423 Kali	423 Kali	100%		-	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD-PD Penunjang yang Terpenuhi	100 %	100 %	100%			
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	63 Unit	63 Unit	100%		-	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	66 Unit	66 Unit	100%		-	
				Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	2 Unit	2 Unit	100%		-	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	92 %	92%			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan Surat Menyurat yang Tertangani	6000 Srt	5777 Srt	96%	Capaian kinerja maksimal dari target	-	



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									6000 Srt realisasi 5777 Srt, semua Srt sudah melalui aplikasi Srikandi. Keg ini sifatnya memfasilitasi Srt yang Masuk dan Keluar dari OPD		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Lainnya yang Terpenuhi	114 Jns	114 Jns	100%		-	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	48 Org	38 Org	79%	Tidak tercapainya Kinerja disebabkan terdapat kekosongan 11 Org upah tenaga upah jasa, beberapa diantaranya mengundurkan diri.	-	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	84 %	84%			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Tersedia atau Kendaraan Tersedia Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Tersedia atau Kendaraan Tersedia Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	45 Unit	27 Unit	60%	Kurang optimalnya realisasi kinerja disebabkan beberapa kendaraan membutuhkan biaya pemeliharaan melebihi batas pagu dalam SBU sehingga tidak dapat dilakukan pemeliharaan.	Akan dilakukan perencanaan yang lebih cermat kedepannya.	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Tersedia Operasional atau Laporanangan	Jumlah Kendaraan Tersedia Operasional atau Laporanangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	2 Unit	67%	Tidak ada masalah, Capaian kinerja maksimal dari target 3 unit realisasi 2 unit kendaraan.	-	

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	74 Unit	74 Unit	100%		-	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	166 Unit	145 Unit	87%	Tidak optimalnya realisasi kinerja disebabkan beberapa Peralatan dalam kondisi stabil dan tidak membutuhkan pemeliharaan.	-	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	13 unit	13 unit	100%	Tidak ada masalah, Capaian kinerja maksimal dari target 13 unit realisasi 13 unit Gedung dilakukan pemeliharaan.	-	
				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Laopran Administrasi Dana Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	69 %	69%			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Org/Bln	2 Org/Bln	100%		-	
				Penyediaan Pakaian Tersedia dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakaian dan Atribut kelengkapan yang Tersedia Untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta Ibu	16 stel	16 stel	100%		-	
				Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Dilaksanakan	100 %	50 %	50%	Kurang optimalnya realisasi kinerja disebabkan Wakil Bupati tidak melakukan medical check up dan hanya dilakukan oleh Bupati sebanyak 2 kali.	-	
				Penyediaan Dana	Jumlah Orang yang	2 Org/Bln	2	100%		-	

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Org/ Bln				
				Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan Rujab dan Mess	100 %	82 %	82%			
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang diakomodir	3 Jns	3 Jns	100%		-	
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang diakomodir	3 Jns	2 Jns	67%	Kurang optimalnya realisasi disebabkan terdapat Kekosongan tenaga Cleaning service 1 Org	-	
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang diakomodir	5 Jns	5 Jns	100%		-	
				Penataan Oranganisasi	Persentase OPD yang meningkat nilai SAKIP	65,8 5 %	82 %	125%			
					Persentase OPD yang menghasilkan inovasi pelayanan publik	53,3 3 %	40 %	75%			
				Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah OPD dan UPT yang diEvaluasi	41 OPD/UP T	41 OPD /UP T	100%			
				Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah OPD yang Dibina dalam rangka menghaSikan inovasi pelayanan publik	41 OPD	6 OPD	15%	Dari 15 Perangkat Daerah yang dirtargetkan hanya 6 Perangkat Daerah yang inovasinya memenuhi persyaRatan untuk diikutkan pada kompetisi Inovasi.		
					Jumlah Sosialisasi Tata Laksana yang difasilitasi	1 Keg	1 Keg	100%			
				Peningkatan Kinerja dan	Jumlah Perangkat Daerah	39 Dok	39 Dok	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Reformasi Birokrasi	yang Dibina dalam rangka peningkatan kinerja dan Reformasi						
				Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Lap	2 Lap	100%	Tidak ada masalah, Capaian maksimal dengan Output Dok IKM, Dok Lap Hasil Penilaian. Capaian kinerja maksimal dari target 2 Lap realisasi 2 Lap.	Perbaikan terhadap kelemahan dan kekurangan Kualitas Pelayanan Publik.	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Daerah yang Disusun Tepat Waktu	1 Lap	1 Lap	100%			
				Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Kegiatan keprotokoleran dan komunikasi pimpinan yang hasilkan	756 keg	756 keg	100%			
				Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Kegiatan Keprotokoleran pimpinan yang Dilaksanakan	252 Keg	252 Keg	100%			
				Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah agenda komunikasi pimpinan yang dikomunikaSIkan	252 Keg	252 Keg	100%		-	
				PenDokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah PenDokumentasian Kegiatan Pimpinan yang dihasilkan	252 Keg	252 Keg	100%		-	
2	Urusan Pemerintahan Umum	Sekretariat DPRD									
			Menciptakan upaya-upaya peningkatan mutu administrasi dan fasilitasi Sekretariat	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Kegiatan Legislasi yang difasilitasi	90 %	90 %	100%	Secara Umum Telah di Laksanakan Namun Belum Melakukan Perubahan Target Pada Keg	Akan Melakukan Penyesuain Target Pada Tahun 2024	



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			DPRD yang memadahi dalam menunjang Keg DPRD yang dilandasi dengan komitmen dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kab.Luwu Timur. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD								
				Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	90 %	80 %	89%			
				Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah pembahasan RANPERDA yang difasilitasi	15 Perda	12 Perda	80%	Ada 3 buah Ranperda yaitu Ranperda Zonasi Nilai Jual Harga Tanah, namun dikembalikan oleh pihak eksekutif/tidak dibahas lagi dan Ranperda Penyesuaian Kecamatan Kalaena dan Kecamatan Angkona, namun belum dibahas dengan adanya moratorium pemutakhiran data kode wilayah sesuai Srt edaran Mendagri (Terjadwal di Propemperda Tahun		

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									2024 Tahap III) dan Ranperda tentang Hari Jadi Luwu Timur yang merupakan Ranperda Inisiatif DPRD yang di tarik atau dicabut kembali.		
				Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah kajian perundang-undangan	15 Lap	12 Lap	80%			
				Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 %	93 %	93%			
				Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dok	2 Dok	100%			
				Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dok	2 Dok	100%			
				Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dok	1 Dok	100%			
				Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dok	1 Dok	100%			
				Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dok	1 Dok	100%			
				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	90 %	90 %	100%			
				Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah penyelenggaraan pengawasan per urusan	4 Lap	4 Lap	100%			
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 Lap	4 Lap	100%			
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 Dok	4 Dok	100%			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	3 Dok	3 Dok	100%			
				Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rek Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dok	1 Dok	100%			
				Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase peningkatan kapasitas DPRD	90 %	90 %	100%			
				Pendalaman TUGAS DPRD	Jumlah Bimtek/Diklat	3 Kali	3 Kali	100%			
				Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kelompok pakar dan tim ahli	3 Org	3 Org	100%			
				Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi	6 Org	24 Org	400%			
				Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dok	1 Dok	100%			
				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	90 %	83 %	92%	Keg ini Telah di Laksanakan Namun Belum Melakukan Perubahan Target Pada Sub Keg Sehingga Realisasi Capaian Kinerja tidak mencapai Target.	Akan Melakukan Penyesuain Target Pada Tahun 2024	
				Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	3 Dok	2 Dok	67%			
				Pelaksanaan Reses	Jumlah RESES	3 Kali	3 Kali	100%			
				Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	90 %	67 %	74%	Keg ini Telah di Laksanakan Namun Belum Melakukan Perubahan Target Pada Sub Keg Sehingga Realisasi	Akan Melakukan Penyesuain Target Pada Tahun 2024	



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Capaian Kinerja tidak mencapai Target.		
				Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3 Lap	2 Lap	67%			
				Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Pembahasan Kerja Sama Daerah	90 %	100 %	111%			
				Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	10 Dok	10 Dok	100%			
				Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	90 %	89 %	99%			
				Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	100 Dok	64 Dok	64%	Jumlah Dok Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD dengan Target 100 Dok dan terealisasi 64 Dok Atau sebesar 64 % dikarenakan untuk perjalanan Pimpinan Disediakan Apabila ada undangan pimpinan pada saat mengikuti Rakor	Akan Membuat Buku Kontrol Terkait keg konsultasi dan koordinasi Pimpinan	
					Jumlah perjalanan Tersedia	100 Kali	64 Kali	64%	dikarenakan untuk perjalanan Pimpinan Disediakan Apabila ada undangan pimpinan pada saat mengikuti Rakor		
					Jumlah Rapat-Rapat Paripurna	40 Kali	40 Kali	100%			
				Fasilitasi Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil	4 Dok	4 Dok	100%			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				TUGAS Badan Musyawarah	Fasilitasi Pelaksanaan TUGAS Badan Musyawarah						
			Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	90 %	97 %	108%	Secara Umum Telah di Laksanakan Namun Belum Melakukan Perubahan Target Pada Keg	Akan Melakukan Penyesuaian Target Pada Tahun 2024	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	90 %	100 %	111%			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun	2 Dok	2 Dok	100%			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun	2 Dok	2 Dok	100%			
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Kali	2 Kali	100%			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan kinerja yang Disusun	10 Dok	10 Dok	100%			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	22 Org	22 Org	100%			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	18 Lap	18 Lap	100%			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				steran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen barang milik Daerah yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	100%			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Lap	4 Lap	100%			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	97 %	97%	Secara Umum Telah di Laksanakan Namun Belum Melakukan Perubahan Target Pada Sub Keg	Akan Melakukan Penyesuaian Target Pada Tahun 2024	
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dok	4 Dok	100%			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	22 Org	21 Org	95%			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi umum PD	100 %	96 %	96%			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor	9 Jns	9 Jns	100%			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadakan	5 Jns	5 Jns	100%			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga yang Tersedia	2 Jns	2 Jns	100%			
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Pkt	4 Pkt	100%			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang	6 Jns	6 Jns	100%			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Tersedia						
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang Tersedia	2 Jns	2 Jns	100%			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	141 2 Jns	241 2 Jns	171%			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 0 Kali	800 Kali	80%	Capaian kinerja tidak mencapai 100% di karenakan Tamu yang berkunjung tidak memberikan mengirimkan Srt kunjungan ke sekretariat DPRD		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang Dilaksanakan	120 Kali	103 Kali	86%	Adanya beberapa Keg yang tidak dapat Dilaksanakan , perjalanan Tersedia Luar Provinsi yang tidak Dilaksanakan seperti : Kunjungan Kerja pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi e-planning, e-budgrting dan pertanggungjawaban keuangan dan BMD yang Dilaksanakan di pemkot Malang, Dll		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD Penunjang yang Terpenuhi	100 %	100 %	100%			
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Tersedia atau Kendaraan Tersedia	Jumlah kendaraan Perorangan Tersedia atau kendaraan Tersedia jabatan	4 Unit	4 Unit	100%			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Jabatan	yang Tersedia						
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	41 Unit	37 Unit	90%			
				Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	8 Unit	8 Unit	100%			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	172 Unit	166 Unit	97%			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	98 %	98%			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan Surat Menyurat yang Tertangani	240 Jns	240 Jns	100%			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Lainnya yang Terpenuhi	36 Jns	36 Jns	100%			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	21 Org	21 Org	100%			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	98 %	98%			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Tersedia atau Kendaraan Tersedia Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Tersedia atau Kendaraan Tersedia Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11 Unit	11 Unit	100%			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	190 Unit	167 Unit	88%	Di karenakan adanya rincian objek belanja yang belum terealisasi seperti belanja pemeliharaan Alat		



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Kantordan rumah tangga -alat Kantor- alat Kantor Lainnya, belanja pemeliharaan Alat pembersih (Mesin Cuci) yang sifat Disediakan untuk di Rujab Pimpinan, belanja pemeliharaan komputer dan printer		
				Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	100%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang Terpelihara/di Rehab	3 Bgn	3 Bgn	100%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor yang dipelihara	3 Unit	3 Unit	100%			
				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %	82 %	82%			
				Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30 Org/Bln	30 Org/ Bln	100%			
				Penyediaan Pakaian Tersedia dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian	30 Stel	30 Stel	100%			
				Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Melakukan Medical Ckeck Up	14 Org	14 Org	100%			
				Layanan Administrasi DPRD	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Layanan Administrasi	100 %	100 %	100%			
				Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	2 Lap	2 Lap	100%			
				Penyediaan Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan Rumah	3 Jns	3 Jns	100%			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Rumah Tangga DPRD	Tangga Pimpinan DPRD yang diakomodir						

3.2.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unsur penunjang urusan pemerintahan terdiri dari unsur Keuangan, unsur Perencanaan, unsur Penelitian dan Pengembangan dan unsur Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan serta Kesatuan Bangsa. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Berdasarkan Target RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 Tahun Pelaksanaan 2023, untuk Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut ini :

Tabel 3.6
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
Kab. Luwu Timur Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan											
1	Keuangan	Badan Keuangan									

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dan Aset Daerah									
			1. Peningkatan kapasitas Sistem pengelolaan keuangan dengan pemutakhiran sistem manajemen keuangan yang terintegrasi	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	96,7 %	100 %	103%			
			2. Mendorong Peningkatan Kapasitas Pegelola Keuangan	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Waktu penyusunan Rancangan APBD Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020	10 Minggu	10 Minggu	100%			
			3. Memperkuat sistem pengendalian dan pengawasan internal	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dok	2 Dok	100%			
			4. Memperkuat penerapan defisit dan pembiayaan dalam perencanaan anggaran keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dok	2 Dok	100%			
			5. Meningkatkan perencanaan keuangan Daerah yang terukur dan transparan	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	59 Dok	59 Dok	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	59 Dok	59 Dok	100%			
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	110 Dok	110 Dok	100%			
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dok	2 Dok	100%			
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dok	4 Dok	100%			
				Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	26 Dok	26 Dok	100%			
				Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	4 Dok	4 Dok	100%			
				Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	236 Org	236 Org	100%			
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penatausahaan Keuangan Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	100%			
				Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dok	12 Dok	100%			
				Koordinasi, Fasilitasi,	Jumlah Dokumen Hasil	12 Dok	12 Dok	100%			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya						
				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	240 Dok	240 Dok	100%			
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Yang Terkoordinasi dan Terlaksana	97 %	97 %	100%			
				Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Lap	12 Lap	100%			
				Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	236 Dok	236 Dok	100%			
				Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Lap	18 Lap	100%			
				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	18 Lap	18 Lap	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dok	2 Dok	100%			
				Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dok	1 Dok	100%			
				Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 Dok	2 Dok	100%			
				Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	320 Org	320 Org	100%			
				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan ke Desa dan Pengelolaan Dana Darurat	100 %	100 %	100%			
				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	3 Lap	3 Lap	100%			
				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat	1 Lap	1 Lap	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					dan MenDesak						
				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terkelola Dengan Baik	91 %	91 %	100%			
			1. Pengembangan kapasitas sistem pengelolaan keuangan dengan pemutakhiran sistem manajemen aset/ barang milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan BMD Perangkat Daerah Yang Tertata Dengan Baik	57 Perangk at Daerah	57 Perangk at Daerah	100%			
			2. Mendorong peningkatan kapasitas pengelola penatausahaan aset dan barang milik Daerah	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dok	1 Dok	100%			
			3. menguatkan sistem pengendalian dan pengawasan internal	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dok	2 Dok	100%			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Lap	1 Lap	100%			
				Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Lap	1 Lap	100%			
				Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan barang milik Daerah	2 Dok	2 Dok	100%			
				Penilaian Barang Milik	Jumlah Laporan Hasil	2 Lap	2 Lap	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Daerah	Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah						
				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 Dok	4 Dok	100%			
				Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	118 Lap	118 Lap	100%			
				Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Lap	1 Lap	100%			
				Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	118 Org	118 Org	100%			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	95,3 %	95 %	100%			
			1. Pengembangan sistem Operasional Pelayanan OPD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	100%			
			2. Peningkatan kapasitas SDM dalam pelayanan OPD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat Daerah	2 Dok	2 Dok	100%			
			3. Optimalisasi sarana	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	2 Dok	2 Dok	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelayanan	RKA-SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok	2 Dok	100%			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Lap	10 Lap	100%			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Org/Bln	28 Org/Bln	100%			
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dok	4 Dok	100%			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	1 Lap	100%			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Lap	19 Lap	100%			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen barang milik Daerah yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	100%			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	4 Lap	4 Lap	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Daerah pada SKPD						
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	90 %	90%			
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dok	2 Dok	100%			
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	700 Org	569 Org	81%			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	66 Org	59 Org	89%			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi umum PD	100 %	93 %	93%			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang Disediakan	4 Pkt	4 Pkt	100%			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Pkt	0 Pkt	0%			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Pkt	4 Pkt	100%			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Pkt	5 Pkt	100%			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	144 Dok	141 Dok	98%			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Lap	2 Lap	100%			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175 Lap	160 Lap	91%			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD-PD Penunjang yang Terpenuhi	100 %	99 %	99%			
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 Unit	23 Unit	96%			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 Unit	22 Unit	100%			
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100%			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	100%			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Lap	4 Lap	100%			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	100%			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	100%			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	87 %	87%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Tersedia atau Kendaraan Tersedia Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	9 Unit	90%			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	40 Unit	73%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%			
2	Keuangan	Badan Pendapatan Daerah									
			1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah	97,5 %	114 %	117%			
			2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Bapenda	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	97,5 %	114 %	117%			
				Perencanaan pengelolaan pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4 Dok	4 Dok	100%			
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	6 Dok	6 Dok	100%			
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Lap	12 Lap	100%			
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran	12 Lap	12 Lap	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Daerah	Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah						
				Penilaian Pajak Bumi dan bangunan PerDesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	114 000 Obyek Pajak	124 069 Obyek Pajak	109%			
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	140 Dok	140 Dok	100%			
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	24 Layanan	24 Layanan	100%			
				Penelitian dan Verifikasi Data PeLaporan Pajak Daerah	Jumlah Data PeLaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dok	12 Dok	100%			
				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	98 Dok	98 Dok	100%			
			1.Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur Bapenda	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	96 %	96 %	100%			
			2. Peningkatan Tertib Administrasi PeLap Kinerja Bapen	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	100 %	1 %	100%			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat Daerah	2 Dok	2 Dok	100%			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dok	2 Dok	100%			
				Koordinasi dan	Jumlah Dokumen DPA-	2 Dok	2 Dok	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyusunan DPA-SKPD	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD						
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Lap	10 Lap	100%			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Org/Bln	24 Org/Bln	100%			
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	12 Dok	100%			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Lap	19 Lap	100%			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen barang milik Daerah yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	100%			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Lap	4 Lap	100%			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	100%			
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dok	12 Dok	100%			
				Sosialisasi Peraturan	Jumlah Orang yang	150 Org	150 Org	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Perundang-Undangan	Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45 Org	45 Org	100%			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi umum PD	100 %	99 %	99%			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang Disediakan	15 Pkt	15 Pkt	100%			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Pkt	2 Pkt	100%			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Pkt	18 Pkt	100%			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Pkt	3 Pkt	100%			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	36 Dok	36 Dok	100%			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Lap	4 Lap	100%			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 Lap	156 Lap	98%	Sisa anggaran tidak dapat dicairkan karena ada beberapa keagendakan sidang sengketa pajak yang direncanakan akan dilaksanakan di Pengadilan Pajak Jakarta namun		



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Dilaksanakan via zoom		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD-PD Penunjang yang Terpenuhi	100 %	100 %	100%			
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100%			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	30 Unit	100%			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	100%			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap	12 Lap	100%			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	100%			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	100%			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	98 %	98%			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Tersedia atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Tersedia atau Kendaraan Tersedia Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	8 Unit	100%			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Tersedia Jabatan							
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	50 Unit	71%	Disesuaikan dengan Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	Merupakan anggaran yang sifatnya persediaan	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%			
3	Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia									
			1. Pemberian penghargaan terhadap ASN yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	97 %	95 %	98%			
				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN	95 %	115 %	122%			
			2. Penegakan PP No. 94	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jns dan	Jumlah Rencana Kebutuhan, Jns dan Jumlah	173 Formasi 3	173 Formasi 3	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN yang Disusun						
				Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Calon PNS dan PPPK yang akan diterima	671 Org	715 Org	107%			
				Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pelayanan Pemberhentian ASN tetap Waktu	Jumlah Administrasi Pelayanan Pemberhentian ASN tetap Waktu	78 Org	109 Org	140%			
				Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dikelola	6 Aplikasi	6 Aplikasi	100%			
				Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Rata-Rata Capaian pengelolaan Mutasi dan Promosi ASN	71 %	100 %	141%			
				Pengelolaan Mutasi ASN	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	20 %	23 %	116%			
				Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase SK Kenaikan Pangkat ASN yang terbit	98 %	98 %	100%			
				Pengelolaan Promosi ASN	Persentase Jumlah Pejabat ASN Daerah	95 %	95 %	100%			
				Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Rata-Rata Capaian Pengembangan Kompetensi ASN	62 %	91 %	147%			
				Pengelolaan Assessment Center	Persentase Pejabat Struktural yang mengikuti Assessment	37 %	28 %	75%	Total pejabat yang telah mengikuti assesment (tahun 2021-2023) berjumlah 154 Org dari 407 Org pejabat dengan rincian : Tahun 2021 sejumlah 20 Org, Tahun 2022 sejumlah 40 Org dan Tahun 2023 sejumlah 100 Org (Terdapat 6 Org	Akan dilakukan inventarisir ulang Terkait data-data pejabat yang telah mengikuti assesment selama 3 tahun terakhir. Selain itu akan dilakukan upaya penambahan kuota Assessment pejabat sesuai dengan	



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									peserta yang ikut pada tahun 2023 sudah pernah ikut pada tahun 2021 sehingga tidak dapat dihitung realisasi). Keg Assessment membutuhkan banyak anggaran sehingga pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, selain itu hasil Assessment hanya berlaku 3 tahun	keTersediaan anggaran agar dapat meningkatkan Capaian dari target yang telah ditentukan.	
				Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan Lanjutan	5 Org	5 Org	100%			
				Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak terMasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	50 %	50 %	100%			
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Rata-Rata Capaian Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	95 %	110 %	115%			
				Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Jumlah Pegawai yang Dinilai dan DiEvaluasi Kinerjanya	100 %	99 %	99%			
				Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Persentase Jumlah Piagam Penghargaan Pegawai yang Terbit	100 %	93 %	93%			
				Pembinaan DiSIPlin ASN	Persentase Jumlah Kasus yang Tertangani	95 %	100 %	105%			
				Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Persentase Jumlah Permohonan Proses Izin Perceraian Pegawai yang Terlayani	75 %	100 %	133%			
				Evaluasi DiSIPlin ASN	Persentase Pelanggaran	85 %	100 %	118%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					DiSiPlin ASN yang Terselesaikan						
			Penerapan proses Keg dan program terencana dari tahap proses awal penyusunan, pelaksanaansa mpai dengan Evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	97 %	99 %	102%			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	100%			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang Disusun Tepat Waktu (Dokumen)	10 Dok	10 Dok	100%			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang Disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2 Dok	2 Dok	100%			
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang Disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2 Dok	2 Dok	100%			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu (Dokumen)	14 Lap	14 Lap	100%			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi keuangan Perangkat Daerah	95 %	96 %	102%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan Tunjangannya Terbayarkan (Orang)	28 Org	27 Org	96%			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu (Dokumen)	5 Lap	5 Lap	100%			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen barang milik Daerah yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	100%			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang Disusun (Laporan)	4 Lap	4 Lap	100%			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	100%			
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan data Administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan (Laporan)	4 Dok	4 Dok	100%			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasar RAKan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang lulus Diklat berdasar RAKan TUSI (Orang)	9 Org	9 Org	100%			
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi Peraturan perundang-undangan (Orang)	6 Org	6 Org	100%			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi Peraturan perundang-undangan (Orang)	14 Org	14 Org	100%			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi umum PD	100 %	100 %	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor yang Disediakan (Jns)	12 Jns	12 Jns	100%			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Diadakan (Jns)	19 Jns	19 Jns	100%			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Jns)	24 Jns	24 Jns	100%			
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang Disediakan (Jns)	3 Jns	3 Jns	100%			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang Disediakan (Eksamplar)	46 Eks	48 Eks	104%			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi (Orang)	775 Org	775 Org	100%			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (Kali)	297 kali	297 kali	100%			
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan hasil penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD (Dokumen)	4 Dok	4 Dok	100%			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD Penunjang yang Terpenuhi	100 %	100 %	100%			
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Tersedia atau Kendaraan Tersedia Jabatan	Jumlah Kendaraan Tersedia yang Diadakan (unit)	1 Unit	1 Unit	100%			
				Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang Diadakan (unit)	11 Unit	11 Unit	100%			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	28 Unit	28 Unit	100%			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					(Unit)						
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	87 %	87%			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang diAdministrasiKan (Surat)	200 . Srt 0	148 . Srt 4	74%			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Telepon, Listrik dan Air yang Terbayarkan (Rekening)	27 Rek	27 Rek	100%			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa tenaga pelayanan umum Kantor yang Dibayarkan (Orang)	8 Org	8 Org	100%			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Tersedia atau Kendaraan Tersedia Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Tersedia atau kendaraan yang dipelihara dan Dibayarkan pajaknya (Unit)	4 Unit	4 Unit	100%			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Tersedia Operasional atau Laporanangan	Jumlah kendaraan Tersedia operasional yang dipelihara dan Dibayarkan pajaknya (Unit)	4 Unit	4 Unit	100%			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)	73 Unit	73 Unit	100%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang dipelihara /	1 Unit	1 Unit	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					direhabilitasi (Unit)						
4	Pendidikan & Pelatihan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia									
			1. Pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan bersertifikasi didasarkan prioritas dan hasil analisis Kebutuhan diklat	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang	30 %	40 %	133%			
					telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP/Tahun						
			2. Pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan bersertifikasi didasarkan prioritas dan hasil analisis Kebutuhan diklat manajerial dan fungsional	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Jumlah ASN yang lulus pendidikan dan pelatihan kompetensi teknis melalui BKPSDM	100 %	100 %	100%			
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum,	Jumlah ASN yng mengikut diklat kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan yang	275 Org	275 Org	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	diselenggarakan melalui BKPSDM (Orang)						
				Pembinaan, PengoorTersediaan, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Diklat kompetensi umum, inti, dan pilihan yang Dilaksanakan oleh BKPSDM (Jns)	5 Jns	5 Jns	100%			
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Jumlah ASN yang mengikuti sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	95 %	33 %	35%			
				Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan	Jumlah Kegiatan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional yang Dilaksanakan melalui BKPSDM Kab. Luwu Timur (Jns)	3 Jns	3 Jns	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Fungsional							
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan strukTURal (%)	75 %	68 %	90%			
5	Penelitian & Pengembangan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah									
			Pengembangan dan penguatan inovasi Daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana kelitbangan	100 %	100 %	100%			
			Peningkatan kualitas data hasil penelitian/ pengembangan		Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan diDaerah	20,5 1 %	30 %	146%			
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang termanfaatkan	1 Dok	1 Dok	100%			
				Perumusan Rek Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rek atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	1 Rek	1 Rek	100%			
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1 Dok	1 Dok	100%			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					yang termanfaatkan						
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengkajian Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dok	0 Dok	0%	Sub Keg ini berkaitan dengan kajian dampak sosial dan ekonomi masyarakat Desa terhadap BKK. Telah dilakukan kontrak kerja sama dengan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Terkait penyusunan Dok kajian tersebut, akan tetapi pihak universitas hasanuddin tidak menyelesaikan kajian tersebut sampai batas akhir kontrak kerjasama.	Tidak melakukan kerjasama dengan pihak penyedia sebelumnya selama 2 tahun	
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang termanfaatkan	1 Dok	1 Dok	100%			
				Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen kajian Analisis strategi penguatan UMKM	1 Dok	1 Dok	100%			
				Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dok	1 Dok	100%			
				Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dok	1 Dok	100%			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi dan teknologi	100 %	100 %	100%			
				Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Lap	0 Lap	0%	Pihak Bapelitbangda kabupaten Luwu Timur khususnya bidang penelitian dan pengembangan telah melakukan penyusunan minat, pengambilan data oleh tim Unhas, serta Keg konsultasi untuk melakukan kerjasama mengenai Keg teknologi Tepat guna (TTG) dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Baterai dan Material Maju Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar, akan tetapi sampai akhir Waktu penyelesaian tidak menghasilkan produk.	Untuk selanjutnya akan dilakukan Koordinasi dengan pihak penyedia Terkait kesanggupan dan batas Waktu dalam penyelesaian produk	
				Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Dokumen SIPD	1 Lap	1 Lap	100%			
6	Perencanaan	Badan Perencanaan, Penelitian dan									

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pengembang an Daerah									
			Peningkatan kualitas produk perencanaan	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPd	100 %	100 %	100%			
			Pengembangan kualitas data dan informasi pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Dokumen Perencanaan Yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	100%			
			Peningkatan kualitas Evaluasi dan pengendalian kebijakan pembangunan Daerah	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dok	1 Dok	100%			
				KoordinasiPenelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1 Dok	1 Dok	100%			
				Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 BA	1 BA	100%			
				KoordinasiPelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Laporan Forum SKPD	1 Lap	1 Lap	100%			
				Pelaksanaan MuSREnang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara MuSREnang Kabupaten/Kota	1 BA	1 BA	100%			
				Penyiapan Bahan Koordinasi MuSREnang Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi MuSREnang Kecamatan	1 Lap	1 Lap	100%			
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dok	2 Dok	100%			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)						
				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen perencanaan yang dianalisis	100 %	100 %	100%			
				Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data Untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Masukan	1 Masukan	100%			
				Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	41 Org	41 Org	100%			
				Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	1 Buku	100%			
				Pengendalian, Evaluasi dan PeLaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan PeLaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dihasilkan Tepat Waktu	100 %	100 %	100%			
				KoordinasiPengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Lap	2 Lap	100%			
				Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang DiKoordinasikan Pelaksanaannya	1 Kerja Sama	1 Kerja Sama	100%			
				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan BerKAla Pelaksanaan	Jumah Dokumen Evaluasi hasil RKPD	6 Dok	6 Dok	100%			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pembangunan Daerah							
			Memantapkan sistem Koordinasi perencanaan pembangunan Daerah	PROGRAM Koordinasi DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan anggaran responsif gender	100 %	100 %	100%			
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian program Perangkat Daerah dengan sasaran pembangunan Daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 %	100 %	100%			
					Persentase Perangkat Daerah lini Koordinasi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang menerapkan anggaran responsi gender	100 %	100 %	100%			
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan hasil Koordinasi penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Lap	4 Lap	100%			
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang pemerintahan	4 Lap	4 Lap	100%			
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Lap	4 Lap	100%			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen hasil monitoring dan Evaluasi penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Pembangunan Manusia	4 Lap	4 Lap	100%			
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah bidang Pembangunan Manusia	4 Lap	4 Lap	100%			
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase kesesuaian program Perangkat Daerah dengan sasaran pembangunan Daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam (SDA)	100 %	100 %	100%			
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dok	4 Dok	100%			
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan hasil monitoring dan Evaluasi penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Perekonomian	4 Lap	4 Lap	100%			
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah bidang Perekonomian	4 Lap	4 Lap	100%			
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyusunan	4 Dok	4 Dok	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen perencanaan pembangunan bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan hasil Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah Bidang SDA	4 Lap	4 Lap	100%			
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase kesesuaian program Perangkat Daerah dengan sasaran pembangunan Daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %	100%			
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dok	4 Dok	100%			
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	4 Lap	4 Lap	100%			
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dok	4 Dok	100%			
			Pengadaan sarana dan prasarana perKantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Daerah KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100 %	94 %	94%			
			Peningkatan	Perencanaan,	Persentase Dokumen	100 %	100 %	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			akuntabilitas pengelolaan keuangan, asset, dan penyusunan Lap kinerja	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu						
			Peningkatan kualitas dan kompetensi Aparatur melalui pelatihan dan bimtek formal dan fungsional	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangka Daerah	2 Dok	2 Dok	100%			
				Koordinas dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dok	2 Dok	100%			
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok	2 Dok	100%			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap	4 Lap	100%			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Org/Bln	28 Org/Bln	95%			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Lap	14 Lap	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen barang milik Daerah yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	100%			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Lap	2 Lap	100%			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	100%			
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dok	12 Dok	100%			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Org	12 Org	100%			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi umum PD	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang Disediakan	5 Pkt	5 Pkt	100%			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Pkt	4 Pkt	100%			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Pkt	12 Pkt	100%			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	20 Dok	20 Dok	100%			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Lap	4 Lap	100%			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	4 Lap	4 Lap	100%			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD-PD Penunjang yang Terpenuhi	100 %	100 %	100%			
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	100%			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	100%			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Lap	4 Lap	100%			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Lap	4 Lap	100%			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Lap	4 Lap	100%			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Tersedia Operasional atau Laporanangan	Jumlah Kendaraan Tersedia Operasional atau Laporanangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit	100%			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	34 Unit	85%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan	1 Unit	1 Unit	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						
7	Pemerintahan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
			Peningkatan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa berdasarkan ideologi pancasila	PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Jumlah	100 %	100 %	100%			
					kebijakan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang Dilaksanakan						
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Capaian pelaksanaan kooTersedia di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka TUnggal ika dan sejarah kebangsaan	100 %	100 %	100%			
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka TUnggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan pelaksanaan Koordinasi di bidang wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa dan pembauran kebangsaan yang Disusun	4 Dok	4 Dok	100%			
			Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	PROGRAM Peningkatan PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN	Persentase Capaian Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan	100 %	100 %	100%			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dibidang politik	POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	pengembangan etika serta budaya politik						
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan SiTulasi Politik	Persentase Capaian pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, serta pemantauan siTulasi politik	100 %	100 %	100%			
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan SiTulasi Politik di Daerah	Jumlah pengurus parpol dan masyarakat yang mengikuti pendidikan politik	150 Org	150 Org	100%			
				Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Jumlah Laporan partai politik yang diverifikasi	10 Lap	10 Lap	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan SiTulasi Politik Di Daerah							
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan PeLaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan SiTulasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan pemantauan siTulasi politik Daerah	4 Dok	4 Dok	100%			
			Peningkatan peran organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan Daerah	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN Oranganisasi KEMASYARAKATAN	Persentase Jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi	100 %	106 %	106%			
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Oranganisasi Kemasyarakatan	Jumlah ormas yang terdaftar	357 Unit	379 Unit	106%			
				Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan PeLaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang terbit	357 SKT	379 SKT	106%			
			Peningkatan	PROGRAM Pembinaan	Persentase Jumlah	100 %	100 %	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat	DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya						
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Capaian pelaksanaan Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya	100 %	100 %	100%			
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya serta fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika dan kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah	4 Dok	4 Dok	100%			
			Peningkatan dan kewaspadaan dalam rangka cegah dan tangkal dini potensi konflik	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	100 %	100 %	100%			
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Capaian pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social	100 %	100 %	100%			
			Peningkatan	Pelaksanaan Koordinasi di	Jumlah Laporan konflik dan	4 Dok	4 Dok	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			pelaksanaan program, Keg dan sub Keg	Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	kewaspadaan dini di Daerah						
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan PeLaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan pengawasan dan pemantauan Orang asing	4 Dok	4 Dok	100%			
			Peningkatan pelaksanaan program, Keg dan sub Keg	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Daerah KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100 %	100 %	100%			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	100%			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat Daerah 2 Dokumen	2 Dok	2 Dok	100%			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2 Dok	2 Dok	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Dokumen RKA-SKPD						
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Lap	10 Lap	100%			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Org/Bln	12 Org/Bln	100%			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Lap	18 Lap	100%			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen barang milik Daerah yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	100%			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Lap	4 Lap	100%			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	100%			
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase kelengkapan data Administrasi kepegawaian	100 %	100 %	100%			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Org	5 Org	125%			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi umum PD	100 %	100 %	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang Disediakan	8 Pkt	8 Pkt	100%			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Pkt	24 Pkt	100%			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Pkt	23 Pkt	96%			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Pkt	3 Pkt	100%			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dok	60 Dok	100%			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi kunjungan	220 Org	220 Org	100%			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diikuti	366 Kali	366 Kali	100%			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD Penunjang yang Terpenuhi	100 %	100 %	100%			
				Pengadaan Kendaraan Tersedia Operasional atau Laporanangan	Jumlah Unit Kendaraan Tersedia Operasional atau Laporanangan yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	100%			
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	30 Unit	100%			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	9 Unit	100%			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Penyediaan Jasa	100 %	100 %	100%			



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	350 Lap	350 Lap	100%			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Lap	24 Lap	100%			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Lap	4 Lap	100%			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Tersedia Operasional atau Laporanangan	Jumlah Kendaraan Tersedia Operasional atau Laporanangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	100%			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	31 Unit	100%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%			

3.2.6 UNSUR PENGAWASAN



Unsur pengawasan terdiri dari inspektorat daerah. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Berdasarkan Target RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 Tahun Pelaksanaan 2023, untuk Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut ini :

Tabel 3.7
Unsur Pengawasan
Kab. Luwu Timur Tahun 2023

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan											
1	Inspektorat Daerah	Inspektorat									
			1). Meningkatkan Pengawasan Intern SKPD terhadap Pelaksanaan Perencanaan, Pengadaan Barang & Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bansos dan Bantuan Lainnya	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Presentase Pelaksanaan Pengawasan berdasARKan PKPT	95 %	93 %	98,35%	Beberapa pengawasan tidak berjalan sesuai Jadwal PKPT	Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan lebih awal sesuai PKPT	
			2). Meningkatkan Efektifitas Sistem Pengawasan di Tingkat SKPD dan Desa								
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal	95 %	95 %	100,00%			
				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah obrik pengawasan kinerja	41 OPD	41 OPD	100,00%			
				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah obrik pengawasan keuangan	79 OPD	79 OPD	100,00%			



				Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Reviu Laporan Kinerja yang Dilaksanakan	3 Kali	3 Kali	100,00%			
				Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Reviu Laporan Keuangan yang dilakukan	7 Kali	7 Kali	100,00%			
				Pengawasan Desa	Jumlah Pengawasan Desa yang Dilaksanakan	125 Desa	125 Desa	100,00%			
				Kerjasama Pengawasan Internal	Presentase obrik pengawasan yang tersangkut kasus korupsi	3 %	3 %	113,00%			
				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Presentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	90 %	92 %	101,80%			
					Presentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Internal dan Eksternal	88 %	76 %	86,77%	Ada beberapa Rek yang tidak memungkinkan untuk ditindaklanjuti		
				Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Presentase kasus yang ditangani dan diberikan Rek	95 %	95 %	100,00%			
				Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah penanganan penyelesaian kerugian negara/Daerah	12 Kali	12 Kali	100,00%			
				Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Dilaksanakan	33 Kali	33 Kali	100,00%			
			1). Menjadi Mitra SKPD, Pemerintah Desa, Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka asistensi, konsultasi dan reviu	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Presentase Obrik Pemeriksaan yang Dibina	95 %	98 %	103,22%			
			2). Meningkatkan Efektifitas dan efisiensi Penyelenggaraan	Pendampingan dan Asistensi	Presentase obrik binaan yang didampingi	95 %	91 %	95,42%			



			Pemerintahan, Pengelolaan Keuangan, Optimalisasi Pemberdayaan aset Daerah dan Desa serta Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan								
				Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pendampingan dan asistensi urusan pemerintah Daerah yang dilakukan	102 Kali	95 Kali	93,14%	Sifatnya Disediakan untuk pendampingan PHO sesuai permohonan OPD	Melakukan Koordinasi dengan OPD Terkait, mengenai pendampingan PHO yang dapat dilakukan Inspektorat jika OPD menginginkan membutuhkan pendampingan	
				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi yang Dilaksanakan	41 OPD	41 OPD	100,00%			
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah obrik pencegahan dan pemberantasan korupsi	10 Obrik	10 Obrik	100,00%			
			Meningkatkan dan Mengefektifkan sistem pelayanan administrasi PerKantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100 %	97 %	97,36%	Secara umum bahwa program ini terlaksana namun perlu dilakukan beberapa perubahan target di beberapa level Keg pendukung program		
				Perencanaan,	Persentase Dokumen	100 %	100 %	100,00%			



				Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu						
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun	5	Dok	5	Dok	100,00%	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dok	2	Dok	100,00%	
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dok	2	Dok	100,00%	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	Lap	10	Lap	100,00%	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi keuangan Perangkat Daerah	100	%	100	%	100,00%	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	45	Org	45	Org	100,00%	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18	Lap	18	Lap	100,00%	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	84	%	84,31%	
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100	Dok	100	Dok	100,00%	
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai BerdasaRKA	Jumlah Pegawai BerdasaRKA Tugas	99	Org	62	Org	62,63%	Sampai akhir tahun 2023, BPKP selaku Melakukan Koordinasi dengan



				Tugas dan Fungsi	dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				Pembina Fungsional Auditor tidak mengeluarkan kalender pelatihan	BPKP Terkait jadwal pelatihan yang Dilaksanakan oleh BPKP	
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200	Org	173	Org	86,50%	
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12	Org	12	Org	100,00%	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi umum PD	100	%	97	%	96,55%	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang Disediakan	13	Pkt	13	Pkt	100,00%	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Pkt	12	Pkt	100,00%	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16	Pkt	16	Pkt	100,00%	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11	. Pkt	11	. Pkt	100,00%	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dok	60	Dok	100,00%	
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	375	Lap	375	Lap	100,00%	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77	Lap	77	Lap	100,00%	
				Pengadaan Barang Milik	Persentase BMD-PD	100	%	100	%	100,00%	



				Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penunjang yang Terpenuhi						
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100,00%			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	98 %	98,36%			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1300 . Lap	1280 . Lap	98,46%			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Lap	24 Lap	100,00%			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	5 Org	5 Org	100,00%			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	97 %	96,77%			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Tersedia atau Kendaraan Tersedia Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Tersedia atau Kendaraan Tersedia Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	8 Unit	100,00%			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	39 Unit	88,64%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100,00%			



3.2.7 UNSUR KEWILAYAHAN

Unsur kewilayahan terdiri dari seluruh kecamatan yang ada di kabupaten Luwu Timur yang berjumlah sebelas (11) Kecamatan. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Berdasarkan Target RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 Tahun Pelaksanaan 2023, untuk Urusan Kewilayahan dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut ini :

Tabel 3.8
Unsur Kewilayahan
Kab. Luwu Timur Tahun 2023

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Unsur Kewilayahan											
1	Kecamatan	Kecamatan Burau									
			Meningkatkan Kualitas Standar Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	100 %	100%			
				Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase fasilitasi Kegiatan Pembinaan Desa	100 %	100 %	100%			
				Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi yang Dilaksanakan	12 Kali	12 Kali	100%			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Desa DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	100%			
				Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa yang Dilaksanakan	100 %	100 %	100%			
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi masyarakat pada pelaksanaan MuSRenbang Kecamatan	170 Org	170 Org	100%			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kader PKK Desa yang diberdayakan	108 Org	108 Org	100%			
				PROGRAM KETENTRAMAN DAN	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja	100 %	100 %	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				KETERTIBAN UMUM	pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum						
				Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang Dilaksanakan	100 %	100 %	100%			
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Lap	4 Lap	100%			
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah rapat dalam upaya himBauan atau pencegahan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban yang Dilaksanakan	4 kali	4 kali	100%			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan	100 %	100 %	100%			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Rek Forum Koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100%			
				Pelaksanaan Tugas Forum Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rapat forum Koordinasi pimpinan kecamatan yang Dilaksanakan	12 kali	12 kali	100%			
				PROGRAM	Persentase	100 %	100 %	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	penyelenggaraan pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar dan ketenTUan perundangan yang berlaku						
				Fasilitasi, Rek dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, Rek dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang Dilaksanakan	100 %	100 %	100%			
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	36 Dok	36 Dok	100%			
				Pelaksanaan Pembangunan Kawasan PerDesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan PerDesaan di Wilayah Kecamatan	18 Lap	18 Lap	100%			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100 %	98 %	98%			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	100%			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun	2 Dok	2 Dok	100%			
				dan Penyusunan	Jumlah Dokumen RKA-	2 Dok	2 Dok	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Dokumen RKA-SKPD dan Penyusunan DPA-SKPD	SKPD yang Disusun Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok	2 Dok	100%			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Lap	10 Lap	100%			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	96 %	96%			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	25 Org	22 Org	88%			
				dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Lap	12 Lap	100%			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen barang milik Daerah yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	100%			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Lap	4 Lap	100%			
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi pendapatan kewenangan PD	100 %	100 %	100%			
				Perencanaan Pengelolaan Retribusi	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan	4 Dok	4 Dok	100%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Daerah	Retribusi Daerah						
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	89 %	89%			
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dok	12 Dok	100%			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	5 Org	3 Org	60%			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi umum PD	100 %	85 %	85%			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor	9 Jns	9 Jns	100%			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Tersedia	17 Jns	17 Jns	100%			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang Tersedia	4 Jns	4 Jns	100%			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dok	58 Dok	97%			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lapora	12 Lapora	100%			
				Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Perjalanan Tersedia, Rapat-Rapat Koordinasi	900 Kali	887 Kali	99%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					dan Konsultasi Keluar Daerah yang Dilaksanakan						
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD-PD Penunjang yang Terpenuhi	100 %	100 %	100%			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	100%			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap	12 Lap	100%			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	68 Lap	68 Lap	100%			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	2 Unit	2 Unit	100%			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	10 Org	10 Org	100%			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Tersedia atau Kendaraan Tersedia Jabatan yang	6 Unit	6 Unit	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Perorangan Tersedia atau Kendaraan Tersedia Jabatan	Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya						
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	24 Unit	100%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%			
2	Kecamatan	Kecamatan Towuti									
			Meningkatkan Kualitas Standar Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	23 %	23,33%	Pada dasarnya pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik berjalan secara normatif baik di Tingkat kecamatan maupun di Desa		
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang Dilaksanakan	100 %	23 %	23%	Terkait PAD tidak mencapai target karena adanya PerBup yang Terkait pemberhentian penarikan retribusi di Kecamatan, sehingga yang tersisa hanya retribusi Pasar	Tetap dilakukan Sosialisasi dengan adanya aturan baru	
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Ijin Mendirikan bangunan yang diterbitkan	30 Lbr	7 Lbr	23%	Kurangnya Capaian kinerja disebabkan karena adanya Perbub No. 351/F-04/XII/ Tahun 2021 pada tanggal 29 November 2021 tentang	Menunggu regulasi baru nanti akan dipelajari dan di jalan sebagaimana yang termuat dalam aturan tersebut.	



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Pemberhentian Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan bangunan yang digantikan dengan peraturan Daerah kab. Luwu Timur tentang PBG (Persetujuan bangunan Gedung) dan masih menunggu Perda Bupati diterbitkan.		
			Meningkatkan Kualitas Standar Pelayanan Publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Desa DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	122 %	122%			
				Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa yang Dilaksanakan	100 %	122 %	122%			
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi masyarakat pada pelaksanaan MuSRenbang Kecamatan	126 Org	171 Org	136%			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kader PKK Desa yang diberdayakan	90 Org	89 Org	99%			
			Meningkatkan Kualitas Standar Pelayanan Publik	PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum	100 %	96 %	96%			
				Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	Persentase Koordinasi upaya penyelenggaraan	100 %	93 %	93%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Ketertiban Umum	ketenteraman dan ketertiban umum yang Dilaksanakan						
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kasus ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	10 Kasus	6 Kasus	60%			
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah rapat dalam upaya hIMBauan atau pencegahan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban yang Dilaksanakan	4 Kali	4 Kali	100%			
				Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan Koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada	100 %	100 %	100%			
				/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/sinergitas dengan Polri dan atau Perangkat Daerah bidang penegakan Peraturan perundang-undangan yang Dilaksanakan	4 Kali	4 Kali	100%			
			Meningkatkan Kualitas Standar Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan	100 %	100 %	100%			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala	Persentase Rek Forum Koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Daerah							
				Pelaksanaan Tugas Forum Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kehadiran Unsur Aparatur Forkopimcam, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam Rapat-rapat Forkopimcam dan Rakor Lintas Sektor	11 Org	11 Org	100%			
			Meningkatkan Kualitas Standar Pelayanan Publik	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar dan ketenTUan perundangan yang berlaku	100 %	100 %	100%			
				Fasilitasi, Rek dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, Rek dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang Dilaksanakan	100 %	100 %	100%			
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi penyusunannya	18 Dok	36 Dok	200%			
				Pelaksanaan Pembangunan Kawasan PerDesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kawasan PerDesaan yang terpantau perencanaan dan pelaksanaan programnya	18 Desa	18 Desa	100%			
			Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100 %	100 %	100%			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan	100 %	100 %	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Perangkat Daerah	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu						
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun	2 Dok	2 Dok	100%			
				dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun	2 Dok	2 Dok	100%			
				dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok	2 Dok	100%			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan kinerja yang Disusun	10 Dok	10 Dok	100%			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	25 Org	25 Org	100%			
				dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan persemester	16 Lap	16 Lap	100%			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen barang milik Daerah yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	100%			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Lap	12 Lap	100%			
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan	Persentase realisasi pendapatan kewenangan PD	100 %	100 %	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Ururan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Perangkat Daerah							
				PeLaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dok	12 Dok	100%			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	100%			
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dok	12 Dok	100%			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	3 Org	3 Org	100%			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100 %	70 %	70%			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	7 Jns	5 Jns	71%			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tersedianya Peralatan/perlengkapan Kantor dan rumah tangga Untuk 1 tahun	3 Jns	3 Jns	100%			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang Tersedia	5 Jns	5 Jns	100%			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5850 Lap	7100 Lap	121%			
				Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan	570 Kali	566 Kali	99%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Perjalanan Tersedia, Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang Dilaksanakan						
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD Penunjang yang Terpenuhi	100 %	100 %	100%			
				Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	2 Unit	2 Unit	100%			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	1 Unit	1 Unit	100%			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	100%			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	88 %	88%			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan Surat Menyurat yang Tertangani	1200 Jns	1208 Jns	101%			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	36 Bln	36 Bln	100%			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	2 Unit	1 Unit	50%			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	11 Org	11 Org	100%			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Barang milik Daerah penunjang urusan	100 %	100 %	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemerintahan Daerah	pemerintahan Daerah yang dipelihara						
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Tersedia Operasional atau Laporanangan	Jumlah Kendaraan Tersedia Operasional atau Laporanangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	14 Unit	100%			
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	100%			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	36 Unit	124%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	100%			
3	Kecamatan	Kecamatan Nuha									
			Meningkatkan Kualitas Standar Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	0 %	0%	Pada dasarnya pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik berjalan secara normatif baik di Tingkat kecamatan maupun di Desa		
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang Dilaksanakan	100 %	0 %	0%			
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan	Jumlah Izin Mendirikan bangunan yang diterbitkan	40 Lbr	0 Lbr	0%	Tidak tercapainya target indikator Jumlah IMB yang	Terkait penCapaian kinerja, akan	

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pelayanan Perizinan Non Usaha					diterbitkan di Kecamatan karena sejak di Keluarkannya SK Bupati Nomor: 351/F-04?XII/ Tahun 2021 tentang Pemembrhentian Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan bangunan dengan mengacu pada Srt Edaran Menteri no:011/5976/SJ tentang percepatan penyusunan regulasi persyaRatan dasar perizinan berusaha, penyelenggaraan layanan persetujuan bangunan Gedung dan retribusi persetujuan bagunan Gedung serta retribusi penggunaan tenaga kerja asing	dilakukan perubahan indikator untuk mengukur Capaian kinerja. Terkait sisa anggaran akan dilakukan penyesuaian harga di e-katalog pada penyusunan anggaran berikutnya	
			Meningkatkan Kualitas Standar Pelayanan Publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Desa DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	102 %	102%			
				Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa yang Dilaksanakan	100 %	103 %	103%			
				Peningkatan Partisipasi	Jumlah Partisipasi	150 Org	159 Org	106%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	masyarakat pada pelaksanaan muSRembang kecamatan						
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kader PKK Desa yang diberdayakan	35 Org	35 Org	100%			
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	100%			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan kelurahan yang memberdayakan masyarakat	2 keg	2 keg	100%			
			Meningkatkan Kualitas Standar Pelayanan Publik	PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	100 %	85 %	85%			
				Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang Dilaksanakan	100 %	90 %	90%			
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kasus ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	5 Kasus	4 Kasus	80%			
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah rapat dalam upaya himBauan atau pencegahan pelanggaran	5 Kali	5 Kali	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					ketenteraman dan ketertiban yang Dilaksanakan						
				Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan Koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada	100 %	80 %	80%			
				/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5 Lap	4 Lap	80%			
			Meningkatkan Kualitas Standar Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan	100 %	100 %	100%			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Rek Forum Koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100%			
				Pelaksanaan Tugas Forum Pimpinan di Kecamatan	Jumlah rapat forum Koordinasi pimpinan kecamatan yang Dilaksanakan	12 Kali	12 Kali	100%			
			Meningkatkan Kualitas Standar Pelayanan Publik	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar dan ketenTUan perundangan yang	100 %	100 %	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Fasilitasi, Rek dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	berlaku Persentase fasilitasi, Rek dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang Dilaksanakan	100 %	100 %	100%			
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi penyusunannya	4 Dok	4 Dok	100%			
				Pelaksanaan Pembangunan Kawasan PerDesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan PerDesaan di Wilayah Kecamatan	4 Lap	4 Lap	100%			
			Meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100 %	99 %	99%			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	100%			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun	2 Dok	2 Dok	100%			
				dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun	2 Dok	2 Dok	100%			
				dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Kali	2 Kali	100%			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan kinerja yang Disusun	10 Dok	10 Dok	100%			
				Administrasi	Persentase Rata-Rata	100 %	100 %	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja Administrasi keuangan Perangkat Daerah						
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	23 Org	23 Org	100%			
				dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan persemester	4 Lap	4 Lap	100%			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen barang milik Daerah yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	100%			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Lap	4 Lap	100%			
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi pendapatan kewenangan PD	100 %	100 %	100%			
				PeLaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dok	4 Dok	100%			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	100%			
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dok	4 Dok	100%			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	5 Org	5 Org	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Peraturan Perundang-Undangan						
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100 %	99 %	99%			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor	9 Jns	9 Jns	100%			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadakan	2 Jns	2 Jns	100%			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Tersedia	15 Jns	14 Jns	93%			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang Tersedia	5 Jns	5 Jns	100%			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	48 Jns	48 Jns	100%			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	6000 Kali	5990 Kali	100%			
				Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang Dilaksanakan	600 Kali	600 Kali	100%			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	#DIV/0!			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	9 Unit	9 Unit	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	93 %	93%			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan Surat Menyurat yang Tertangani	1500 Jns	1203 Jns	80%			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Lainnya yang Terpenuhi	48 Jns	48 Jns	100%			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	32 Org	32 Org	100%			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Tersedia atau Kendaraan Tersedia Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Tersedia atau Kendaraan Tersedia Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	9 Unit	100%			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	9 Unit	100%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang Terpelihara/di Rehab	2 Bgn	2 Bgn	100%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor yang dipelihara	4 Unit	4 Unit	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Lainnya							
4	Kecamatan	Kecamatan Wotu									
			Meningkatkan Kualitas Standar Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	1 %	1%	Pada dasarnya pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik berjalan secara normatif baik di Tingkat kecamatan maupun di Desa		
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang Dilaksanakan	100 %	1 %	1%			
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	140 Lap	2 Lap	1%	Berdasarkan Lap yang diambil pada Tersedia perizinan pelayan terpadu bahwa untuk tahun ini hanya ada 2 Org yang melakukan pembuatan IMB pada wilayah kecamatan wotu	Agar kiranya Kantor Tersedia perizinan pelayanan terpadu banyak melakukan Koordinasi dengan kecamatan serta melakukan peninjauan langsung ke lapangan bersama dengan penegak perda untuk melihat langsung masyarakat yang membangun pada wilayah kecamatan wotu	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Desa DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	100%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa yang Dilaksanakan	100 %	100 %	100%			
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi masyarakat pada pelaksanaan MuSRenbang Kecamatan	38 Org	38 Org	100%			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Paket Kegiatan	90 Pkt	90 Pkt	100%			
				PROGRAM KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum	100 %	100 %	100%			
				Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang Dilaksanakan	100 %	100 %	100%			
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Aparatur Pemerintah Kabupaten Kecamatan dan Desa, Vertikal dan lintas sektor Lainnya yang hadir dalam rapat rapat Koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kecamatan	100 Org	100 Org	100%			
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Aparatur Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa, Vertikal dan lintas sektor Lainnya yang hadir	12 Org	12 Org	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					dalam rapat-rapat Koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kecamatan						
				Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan Koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada	100 %	100 %	100%			
				/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/sinergitas dengan Polri dan atau Perangkat Daerah bidang penegakan Peraturan perundang-undangan yang Dilaksanakan	4 Kali	4 Kali	100%			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan	100 %	100 %	100%			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Rek Forum Koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100%			
				Pelaksanaan Tugas Forum Pimpinan di Kecamatan	Jumlah rapat forum Koordinasi pimpinan kecamatan yang Dilaksanakan	12 Kali	12 Kali	100%			
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar dan ketenTUan perundangan yang	100 %	100 %	100%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Fasilitasi, Rek dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan DESA	berlaku Persentase fasilitasi, Rek dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang Dilaksanakan	100 %	100 %	100%			
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	34 Dok	34 Dok	100%			
				Pelaksanaan Pembangunan Kawasan PerDesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan PerDesaan di Wilayah Kecamatan	17 Lap	17 Lap	100%			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Daerah KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100 %	96 %	96%			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	100%			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat Daerah	2 Dok	2 Dok	100%			
				dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun	2 Dok	2 Dok	100%			
				dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Kali	2 Kali	100%			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan kinerja yang Disusun	10 Dok	10 Dok	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	20 Org	20 Org	100%			
				dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan persemester	12 Lap	12 Lap	100%			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen barang milik Daerah yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	100%			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Lap	4 Lap	100%			
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi pendapatan kewenangan PD	100 %	100 %	100%			
				PeLaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dok	12 Dok	100%			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	100%			
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dok	12 Dok	100%			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan	2 Org	2 Org	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Perundang-Undangan	teknis implementasi Peraturan perundang - undangan						
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi umum PD	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Persentase Tersedianya instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor	9 %	9 %	100%			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tersedianya Peralatan/perengkapan Kantor dan rumah tangga Untuk 1 tahun	6 Jns	6 Jns	100%			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang Tersedia	3 Jns	3 Jns	100%			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	60 Jns	60 Jns	100%			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	1500 kali	1500 kali	100%			
				Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang Dilaksanakan	743 kali	743 kali	100%			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan Surat Menyurat yang Tertangani	1500 Jns	1500 Jns	100%			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber	60 Jns	45 Jns	75%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Ururan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Daya Air dan Listrik	Daya Air, Listrik dan Lainnya yang Terpenuhi						
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	2 unit	2 unit	100%			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	16 Org	14 Org	88%			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Tersedia Operasional atau Laporanangan	Jumlah Kendaraan Tersedia Operasional/ Laporanangan Laik Jalan	7 unit	7 unit	100%			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin dalam Kondisi Baik	8 unit	8 unit	100%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya dalam kondisi baik	2 Bgn	2 Bgn	100%			
5	Kecamatan	Kecamatan Tomoni									
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	0 %	0%	Pada dasarnya pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik berjalan secara normatif baik di Tingkat kecamatan maupun di Desa		
				Pelaksanaan Urusan	Persentase urusan	100 %	0 %	0%	kecamatan tidak	Menyesuaikan	

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang Dilaksanakan				melayani pelaksanaan perizinan (menunggu peraturan baru Terkait perizinan) dan untuk sementara pelaksanaan perizinan diambil alih langsung oleh kabupaten	kembali indikator sub Keg	
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	180	0	0%	kecamatan tidak melayani pelaksanaan perizinan (menunggu peraturan baru Terkait perizinan) dan untuk sementara pelaksanaan perizinan diambil alih langsung oleh kabupaten		
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Desa DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	100%			
				Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa yang Dilaksanakan	100 %	100 %	100%			
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi masyarakat pada pelaksanaan MuSRenbang Kecamatan	100 Org	100 Org	100%			
				Peningkatan Efektifitas	Jumlah kader PKK Desa	13 desa	13 desa	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	yang diberdayakan						
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	100%			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	100%			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Ormas	3 Ormas	100%			
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	100 %	100 %	100%			
				Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang Dilaksanakan	100 %	100 %	100%			
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi	100 %	100 %	100%			
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama	12 Lap	12 Lap	100%			



NO	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Ururan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	dan Tokoh Masyarakat Persentase pelaksanaan Koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada	100 %	100 %	100%			
				/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/sinergitas dengan Polri dan atau Perangkat Daerah bidang penegakan Peraturan perundang-undangan yang Dilaksanakan	12 Kali	12 Kali	100%			
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan	100 %	100 %	100%			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Rek Forum Koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100%			
				Pelaksanaan Tugas Forum Pimpinan di Kecamatan	Jumlah rapat forum Koordinasi pimpinan kecamatan yang Dilaksanakan	12 Kali	12 Kali	100%			
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar dan ketenTUan perundangan yang berlaku	100 %	100 %	100%			
				Fasilitasi, Rek dan Pembinaan dan Pengawasan	Persentase fasilitasi, Rek dan Koordinasi Pembinaan dan	100 %	100 %	100%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemerintahan Desa	pengawasan Pemerinthan Desa yang Dilaksanakan						
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	48 Dok	48 Dok	100%			
				Pelaksanaan Pembangunan Kawasan PerDesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kawasan PerDesaan yang terpantau perencanaan dan pelaksanaan programnya	12 Desa	12 Desa	100%			
			Peningkatan Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100 %	100 %	100%			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	100%			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun	2 Dok	2 Dok	100%			
				dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun	2 Dok	2 Dok	100%			
				dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Dok	2 Dok	100%			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan kinerja yang Disusun	1 Dok	1 Dok	100%			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	28 Org	28 Org	100%			
				dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Lap	12 Lap	100%			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen barang milik Daerah yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	100%			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Lap	12 Lap	100%			
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi pendapatan kewenangan PD	100 %	100 %	100%			
				PeLaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dok	12 Dok	100%			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	100%			
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dok	12 Dok	100%			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	5 Org	5 Org	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Perundang-Undangan							
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi umum PD	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrk/penerangann bangunan Kantor yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	100%			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga yang Diadakan	3 Unit	0 Unit	0%	Anggaran Keg dialihkan untuk urusan yang lebih urgent pada saat perubahan anggaran sehingga Keg penyediaan alat rumah tangga tidak Dilaksanakan		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Tersedia	3 Jens	3 Jens	100%			
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang Tersedia	3109 Lbr 9	3102 Lbr 0	100%			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	120 Exemplar	119 Exemplar	99%			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	8500 Kotak	8497 Kotak	100%			
				Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan Tersedia yang Dilaksanakan	800 Kali	798 Kali	100%			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD Penunjang yang Terpenuhi	100 %	5 %	5%	Secara Umum Keg ini sudah terlaksana namun terdapat target yang terlampau tinggi pada salah Satu sub		

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Keg sehingga sulit untuk di capai		
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Tersedia atau Kendaraan Tersedia Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Tersedia atau kendaraan Tersedia jabatan yang Tersedia	1 Unit	1 Unit	100%			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	140 Unit	5 Unit	4%	Keg Pengadaan Peralatan dan Mesin sudah terlaksana namun target yang ditetapkan terlampau tinggi sehingga sulit untuk di capai		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan Surat Menyurat yang Tertangani	1500 Lbr	1598 Lbr	107%			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Lainnya yang Terpenuhi	132 Rek	121 Rek	92%			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	2 Jns	2 Jns	100%			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	24 Org	24 Org	100%			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Jasa	Jumlah Kendaraan	12 Unit	12 Unit	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Tersedia Operasional atau Laporanangan	Tersedia Operasional atau Laporanangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya						
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel dalam Kondisi Baik	5 Unit	5 Unit	100%			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin dalam Kondisi Baik	44 Unit	45 Unit	102%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya dalam kondisi baik	4 Unit	4 Unit	100%			
6	Kecamatan	Kecamatan Mangkutan a									
			Meningkatkan Kualitas Standar Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	0%	0%	Pada dasarnya pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik berjalan secara normatif baik di Tingkat kecamatan maupun di Desa		
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang Dilaksanakan	100%	0%	0%			
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Izin Mendirikan bangunan yang diterbitkan	10 Lbr	0 Lbr	0%	Tidak tercapainya target indikator Jumlah IMB yang diterbitkan di Kecamatan diakibatkan karena adanya regulasi peraturan Bupati	Terkait penCapaian kinerja, akan dilakukan perubahan indikator untuk mengukur Capaian kinerja. Terkait sisa	

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Nomor 34/F-05/1/Tahun 2022 tentang pelimpahan kewenangan retribusi IMB ke Tersedia PMPTSP Kab. Luwu Timur , 2. Sisa anggaran adalah selisih harga negosiasi harga barang pada belanja ATK, kertas dan cover di e-katalog dan sisa belanja SPPD	anggaran akan dilakukan penyesuaian harga di e-katalog pada penyusunan anggaran berikutnya	
			Meningkatkan Kualitas Standar Pelayanan Publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Desa DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	100%			
				Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa yang Dilaksanakan	100 %	100 %	100%			
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi masyarakat pada pelaksanaan MuSrenbang Kecamatan	197 Org	197 Org	100%			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kader PKK Desa yang diberdayakan	66 Org	66 Org	100%			
			Meningkatkan Kualitas Standar Pelayanan Publik	PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	100 %	100 %	100%			
				Upaya Penyelenggaraan	Persentase Koordinasi upaya	100 %	100 %	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Ketenteraman dan Ketertiban Umum	penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang Dilaksanakan						
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kasus ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	4 Kasus	4 Kasus	100%			
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah rapat dalam upaya himBauan atau pencegahan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban yang Dilaksanakan	4 Kali	4 Kali	100%			
				Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan Koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada	100 %	100 %	100%			
				/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/sinergitas dengan Polri dan atau Perangkat Daerah bidang penegakan Peraturan perundang-undangan yang Dilaksanakan	4 kali	4 kali	100%			
			Meningkatkan Kualitas Standar Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan	100 %	100 %	100%			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	Persentase Rek Forum Koordinasi pimpinan kecamatan yang	100 %	100 %	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penugasan Kepala Daerah	ditindaklanjuti						
				Pelaksanaan Tugas Forum Pimpinan di Kecamatan	Jumlah rapat forum Koordinasi pimpinan kecamatan yang Dilaksanakan	12 Kali	12 Kali	100%			
			Meningkatkan Kualitas Standar Pelayanan Publik	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar dan ketenTUan perundangan yang berlaku	100 %	100 %	100%			
				Fasilitasi, Rek dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, Rek dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang Dilaksanakan	100 %	100 %	100%			
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi penyusunannya	22 Dok	22 Dok	100%			
				Pelaksanaan Pembangunan Kawasan PerDesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kawasan PerDesaan yang terpantau perencanaan dan pelaksanaan programnya	11 Desa	11 Desa	100%			
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100 %	100 %	100%			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					yang Disusun Tepat Waktu						
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun	2 Dok	2 Dok	100%			
				dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun	2 Dok	2 Dok	100%			
				dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Kali	2 Kali	100%			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan kinerja yang Disusun	10 Dok	10 Dok	100%			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	18 Org	18 Org	100%			
				dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan persemester	18 Lap	18 Lap	100%			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen barang milik Daerah yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	100%			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Lap	4 Lap	100%			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	100%			
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan	12 Dok	12 Dok	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kepegawaian	Administrasi Kepegawaian						
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	4 Org	4 Org	100%			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi umum PD	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Persentase Tersedianya instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor	9 %	9 %	100%			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Tersedia	14 Jns	14 Jns	100%			
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang Tersedia	7 Jns	7 Jns	100%			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	48 Jns	48 Jns	100%			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	9237 Kali	9237 Kali	100%			
				Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang Dilaksanakan	803 Kali	803 Kali	100%			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD Penunjang yang Terpenuhi	100 %	100 %	100%			
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	100%			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	12 Unit	12 Unit	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	10 Unit	10 Unit	100%			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan Surat Menyurat yang Tertangani	1500 Jns	1500 Jns	100%			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Lainnya yang Terpenuhi	96 Jns	96 Jns	100%			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	3 Unit	3 Unit	100%			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	6 Org	6 Org	100%			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Tersedia Operasional atau Laporanangan	Jumlah kendaraan Tersedia operasional/jabatan dalam kondisi baik	3 Unit	3 Unit	100%			
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel dalam Kondisi Baik	0 Unit	0 Unit	0%			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin dalam Kondisi	17 Unit	17 Unit	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Baik Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang Terpelihara/di Rehab	2 Bgn	2 Bgn	100%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor yang dipelihara	10 Unit	10 Unit	100%			
7	Kecamatan	Kecamatan Tomoni Timur									
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	100 %	100%			
				Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase fasilitasi Kegiatan Pembinaan Desa	100 %	100 %	100%			
				/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Lap	4 Lap	100%			
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang Dilaksanakan	100 %	100 %	100%			
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan	Jumlah Ijin Mendirikan bangunan yang diterbitkan	4 Lbr	4 Lbr	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pelayanan Perizinan Non Usaha							
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Desa DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	100%			
				Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa yang Dilaksanakan	100 %	100 %	100%			
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi masyarakat pada pelaksanaan MuSRenbang Kecamatan	100 Org	100 Org	100%			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kader PKK Desa yang diberdayakan	85 Org	85 Org	100%			
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	100 %	100 %	100%			
				Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang Dilaksanakan	100 %	100 %	100%			
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100 Lap	100 Lap	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Lap	4 Lap	100%			
			Meningkatkan Kualitas Standar Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan	100 %	100 %	100%			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Rek Forum Koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100%			
				Pelaksanaan Tugas Forum Pimpinan di Kecamatan	Jumlah rapat forum Koordinasi pimpinan kecamatan yang Dilaksanakan	4 Kali	4 Kali	100%			
			Meningkatkan Kualitas Standar Pelayanan Publik	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar dan ketenTUan perundangan yang berlaku	100 %	100 %	100%			
				Fasilitasi, Rek dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, Rek dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang Dilaksanakan	100 %	100 %	100%			
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi penyusunannya	22 Dok	22 Dok	100%			
				Pelaksanaan Pembangunan Kawasan	Jumlah Kawasan PerDesaan yang	8 Desa	8 Desa	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				PerDesaan di Wilayah Kecamatan	terpantau perencanaan dan pelaksanaan programnya						
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100 %	100 %	100%			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	100%			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun	2 Dok	2 Dok	100%			
				dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun	2 Dok	2 Dok	100%			
				dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok	2 Dok	100%			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan kinerja yang Disusun	10 Dok	10 Dok	100%			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	14 Org	14 Org	100%			
				dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan keuangan persemester	18 Lap	18 Lap	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Ururan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD							
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen barang milik Daerah yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	100%			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Lap	4 Lap	100%			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	100%			
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dok	12 Dok	100%			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	3 Org	3 Org	100%			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi umum PD	100 %	99 %	99%			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor	15 Jns	15 Jns	100%			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Tersedia	3 Jns	3 Jns	100%			
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang Tersedia	2700 Jns	2700 Jns	100%			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	48 Dok	48 Dok	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Ururan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Perundang-undangan	Perundang-Undangan yang Disediakan						
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	3150 Kali	3120 Kali	99%			
				Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan Tersedia yang Dilaksanakan	472 Kali	467 Kali	99%			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD Penunjang yang Terpenuhi	100 %	100 %	100%			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	4 Unit	4 Unit	100%			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	6 Unit	6 Unit	100%			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	99 %	99%			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan Surat Menyurat yang Tertangani	900 Jns	890 Jns	99%			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Lainnya yang Terpenuhi	36 Jns	36 Jns	100%			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	4 Unit	4 Unit	100%			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	8 Org	8 Org	100%			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang milik Daerah	100 %	100 %	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	penunjang urusan pemerintahan Daerah yang dipelihara						
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Tersedia Operasional atau Laporanangan	Jumlah Kendaraan Tersedia Operasional atau Laporanangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	100%			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	100%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	100%			
8	Kecamatan	Kecamatan Kalaena									
			Meningkatkan Kualitas Standar Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	0 %	0%	Pada dasarnya pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik berjalan secara normatif baik di Tingkat kecamatan maupun di Desa		
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang Dilaksanakan	100 %	0 %	0%			
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Ijin Mendirikan bangunan yang diterbitkan	2 Lbr	0 Lbr	0%	Realisasi kinerja sub Keg ini tidak terealisasi dikarenakan adanya peraturan Bupati No.	Untuk Indiaktor kinerja, akan dilakukan reviuw Terkait penetapan indikator kinerja	



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									351/V-04/11/2021 Terkait pemberhentian pemungutan IMB yang ditetapkan pada tanggal 2 agustus 2021. 2. adanya regulasi peraturan Bupati Nomor 34/F-05/1/Tahun 2022 tentang pelimpahan kewenangan retribusi IMB ke Tersedia PMPTSP Kab. Luwu Timur , 2. Anggaran belanja yang tersisa yaitu pada Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp.13.600,-, Belanja Bahan Cetak sebesar Rp.36.000,- dan Belanja Perjalanan Tersedia Biasa sebesar Rp.180.000,-. Untuk belanja Alat Tulis Kantor dan Belanja Bahan Cetak, adanya sisa anggaran diakibatkan oleh Negosiasi harga e-Catalog. Sedangkan untuk Belanja Perjalanan Tersedia Dalam Wilayah Kecamatan,	yang lebih relevan. Untuk anggaran yang tersisa, akan dilakukan penyesuaian harga di e-katalog pada penyusunan anggaran ditahun berikutnya	

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									ditargetkan 10 kali ke Desa untuk Eselon IV dan 10 kali ke Desa untuk Pelaksana dan terealisasi sebanyak 3 kali untuk Eselon IV dan 3 kali untuk pelaksana.		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Desa DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	112 %	112%			
				Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa yang Dilaksanakan	100 %	112 %	112%			
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi masyarakat pada pelaksanaan MuSRenbang Kecamatan	140 Org	163 Org	116%			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kader PKK Desa yang diberdayakan	49 Org	49 Org	100%			
				PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	100 %	100 %	100%			
				Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang Dilaksanakan	100 %	100 %	100%			
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara	Jumlah kasus ketentraman dan	4 Kasus	4 Kasus	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	ketertiban umum yang difasilitasi						
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban yang Dilaksanakan	4 Kali	4 Kali	100%			
				Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan Koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada	100 %	100 %	100%			
				/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/ sinergitas yang Dilaksanakan	4 Kali	4 Kali	100%			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan	100 %	100 %	100%			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Rek Forum Koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100%			
				Pelaksanaan Tugas Forum Pimpinan di Kecamatan	Jumlah rapat forum Koordinasi pimpinan kecamatan yang Dilaksanakan	12 Kali	12 Kali	100%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar dan ketenTUan perundangan yang berlaku	100 %	100 %	100%			
				Fasilitasi, Rek dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, Rek dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang Dilaksanakan	100 %	100 %	100%			
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi penyusunannya	14 Dok	14 Dok	100%			
				Pelaksanaan Pembangunan Kawasan PerDesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang melakukan pembangunan Kawasan perDesaan	7 Desa	7 Desa	100%			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100 %	111 %	111%	Program ini terdiri dari 9 Keg dan 24 Sub Keg dengan Capaian 114,46%. Faktor penyebab tingginya Capaian realisasi pada Program ini sebagai berikut : 1. Pada Keg Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah di Sub Keg Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan		



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Perundang-undangan, indikatornya adalah Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek dengan target sebanyak 5 Org dan terealisasi sebanyak 7 Org dengan %tase Capaian sebesar 140% sehingga %tase akumulasi dari 2 Sub Keg pada Keg ini mencapai 111,76% . 2. Pada Sub Keg Penyediaan Jasa Srt Menyurat, target yang ditetapkan adalah sebanyak 1.542 Srt dan terealisasi sebanyak 1.723 Srt dengan %tase Capaian kinerja sebesar 111,23% dan %tase Capaian Keg Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 111,23% .		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen perencanaan, penganggaran dan	100 %	100 %	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Ururan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Evaluasi Tepat Waktu						
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	2 Dok	2 Dok	100%			
				dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun Tepat Waktu	2 Dok	2 Dok	100%			
				dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Disusun Tepat Waktu	2 Dok	2 Dok	100%			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang Disusun	10 Dok	10 Dok	100%			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100 %	97 %	97%			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan Tunjangan Terbayarkan	17 Org	17 Org	100%			
				dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD yang Disusun Tepat Waktu	18 Lap	18 Lap	100%			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang DiAdministrasiKan sesuai standar	100 %	100 %	100%			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan penatausahaan barang milik Daerah pada SKPD yang Disusun	4 Dok	4 Dok	100%			
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan	Persentase realisasi pendapatan kewenangan PD	100 %	100 %	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Ururan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Perangkat Daerah							
				PeLaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah yang Disusun	12 Dok	12 Dok	100%			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	112 %	112%			
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan data aDMinitrasi kepegawaian yang dimuktahIRKAn	12 Dok	12 Dok	100%			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi Peraturan perundang - undangan	5 Org	7 Org	140%			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi umum PD	100 %	99 %	99%			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor yang Disediakan	7 Jns	7 Jns	100%			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	17 Jns	17 Jns	100%			
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang Disediakan	6 Jns	6 Jns	100%			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	48 Eksemplar	48 Eksemplar	100%			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang Difasilitasi	3015 Org	3012 Org	100%			
				Penyelenggaraan Rapat	Jumlah rapat Koordinasi	1005 Kali	984 Kali	98%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				dan Konsultasi SKPD	dan konsultasi SKPD yang diikuti						
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD-PD Penunjang yang Terpenuhi	100 %	100 %	100%			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	14 Unit	100%			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	111 %	111%			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang diAdministrasiKan	1542 Srt	1723 Srt	112%			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Telepon, Listrik dan Air yang Terbayarkan	48 Rek	48 Rek	100%			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	2 Unit	2 Unit	100%			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum Kantor yang Dibayarkan	11 Org	11 Org	100%			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Tersedia Operasional atau Laporanangan	Jumlah kendaraan Tersedia operasional yang dipelihara dan Dibayarkan pajaknya	7 Unit	7 Unit	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	23 Unit	23 Unit	100%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan/ atau bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	2 Unit	200%			
9	Kecamatan	Kecamatan Angkona									
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	96 %	96%			
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang Dilaksanakan	100 %	96 %	96%			
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Administrasi umum yang diterbitkan	1300 Dok	1251 Dok	96%			
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Desa DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	100%			
				Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa yang Dilaksanakan	100 %	100 %	100%			
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi perempuan pada pelaksanaan MuSRenbang Kecamatan	33 %	32 %	96%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kader PKK Desa yang diberdayakan	70 Org	70 Org	100%			
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	100 %	94 %	94%			
				Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang Dilaksanakan	100 %	91 %	91%			
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase kasus ketenteraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	100 %	100 %	100%			
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah rapat dalam upaya himBauan atau pencegahan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban yang Dilaksanakan	4 Kali	3 Kali	75%			
				Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan Koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada	100 %	100 %	100%			
				/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang TUGas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-	Jumlah Koordinasi/ sinergitas yang Dilaksanakan	6 Kali	6 Kali	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia							
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan	100 %	97 %	97%			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan	100 %	97 %	97%			
				Pelaksanaan Tugas Forum Pimpinan di Kecamatan	Persentase Rek Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang ditindaklanjuti	100 %	97 %	97%			
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar dan ketenTUan perundangan yang berlaku	100 %	100 %	100%			
				Fasilitasi, Rek dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, Rek dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang Dilaksanakan	100 %	100 %	100%			
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi penyusunannya	20 Dok	20 Dok	100%			
				Pelaksanaan Pembangunan Kawasan PerDesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan PerDesaan di Wilayah	10 Lap	10 Lap	100%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100 %	98 %	98%			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	100%			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun	2 Dok	2 Dok	100%			
				dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun	2 Dok	2 Dok	100%			
				dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Dok	2 Dok	100%			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan kinerja yang Disusun	7 Dok	7 Dok	100%			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	98 %	98%			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	20 Org	19 Org	95%			
				dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan persemester	19 Lap	19 Lap	100%			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen barang milik Daerah yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	100%			
				Penatausahaan Barang	Jumlah Laporan	12 Lap	12 Lap	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	96 %	96%			
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dok	3 Dok	75%			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	6 Org	6 Org	100%			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi umum PD	100 %	98 %	98%			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor	9 Jns	9 Jns	100%			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Tersedia	27 Jns	26 Jns	96%			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang Tersedia	4 Jns	4 Jns	100%			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dok	60 Dok	100%			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	2670 Kali	2550 Kali	96%			
				Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan Tersedia yang Dilaksanakan	540 Kali	540 Kali	100%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD Penunjang yang Terpenuhi	100 %	100 %	100%			
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Tersedia atau Kendaraan Tersedia Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Tersedia atau Kendaraan Tersedia Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100%			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	14 Unit	14 Unit	100%			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	98 %	98%			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang diaDMistraSIkan	1000 Srt	986 Srt	99%			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Lap	79 Lap	94%			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	2 Jns	2 Jns	100%			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Org	4 Org	100%			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	98 %	98%			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Tersedia Operasional	2 Unit	2 Unit	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Tersedia Operasional atau Laporanangan	atau Laporanangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya						
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	19 Unit	90%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%			
10	Kecamatan	Kecamatan Malili									
			Meningkatkan Kualitas Standar Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	100 %	100%			
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang Dilaksanakan	100 %	100 %	100%			
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dok	12 Dok	100%			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Desa DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	100%			
				Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang	100% %	1 %	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Dilaksanakan						
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi masyarakat pada pelaksanaan MuSRenbang Kecamatan	40 Org	40 Org	100%			
				Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Paket Kegiatan	100 Pkt	100 Pkt	100%			
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa yang Dilaksanakan	100 %	100 %	100%			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	100%			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	100%			
				PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	100 %	100 %	100%			
				Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang Dilaksanakan	100 %	100 %	100%			
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Jumlah Aparatur Pemerintah Kabupaten Kecamatan dan Desa, Vertikal dan lintas sektor Lainnya yang hadir	4 Org	4 Org	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Vertikal di Wilayah Kecamatan	dalam rapat rapat Koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kecamatan						
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Aparatur Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa, Vertikal dan lintas sektor Lainnya yang hadir dalam rapat-rapat Koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kecamatan	4 Org	4 Org	100%			
				Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan Koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada	100 %	100 %	100%			
				/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/ sinergitas yang Dilaksanakan	4 Kali	4 Kali	100%			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan	100 %	100 %	100%			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Rek Forum Koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100%			
				Pelaksanaan Tugas Forum Pimpinan di	Jumlah rapat forum Koordinasi pimpinan	12 Kali	12 Kali	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kecamatan	kecamatan yang Dilaksanakan						
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar dan ketenTUan perundangan yang berlaku	100 %	100 %	100%			
				Fasilitasi, Rek dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, Rek dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang Dilaksanakan	100 %	100 %	100%			
				Pelaksanaan Pembangunan Kawasan PerDesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan PerDesaan di Wilayah Kecamatan	15 Lap	15 Lap	100%			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100 %	100 %	100%			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan Dokumen perencanaan, penganggaran & Evaluasi Tepat Waktu	100 %	100 %	100%			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun	3 Dok	3 Dok	100%			
				dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun	2 Dok	2 Dok	100%			
				dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Kali	2 Kali	100%			
				Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan kinerja	10 Dok	10 Dok	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Perangkat Daerah	yang Disusun						
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	21 Org	21 Org	100%			
				dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan persemester	12 Lap	12 Lap	100%			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang DiAdministrasiK sesuai standar	100 %	100 %	100%			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Lap	4 Lap	100%			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rara-Rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	100%			
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dok	4 Dok	100%			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi Peraturan perundang - undangan	5 Org	5 Org	100%			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja Administrasi umum PD	100 %	97 %	97%			
				Penyediaan Komponen	Jumlah komponen	15 Jns	12 Jns	80%	Ada beberapa	Akan di lakukan	

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Ururan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor yang di sediakan				komponen yang masih layak digunakan sehingga tidak dilakukan penggantian	inventarisir terhadap Kebutuhan instalasi Listrik Setiap bulannya	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik Kantor yang Disediakan	15 Jns	15 Jns	100%			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang Disediakan	2000 cetak 0	1998 cetak 0	100%	Ada beberapa yang dibuat secara digital yang tidak lagi di cetak dan di gandakan	Akan di lakukan inventarisir terhadap Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Setiap bulannya	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	8 Eks	8 Eks	100%			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi	3540 Org	3498 Org	99%			
				Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	350 kali	350 kali	100%			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah	100 %	99 %	99%			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan Surat Menyurat yang Tertangani	1500 Srt	1497 Srt	100%			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Lainnya yang Terpenuhi	16 Jns	16 Jns	100%			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	35 Org	34 Org	97%	Ada tenaga upahjasa yang mengundurkan diri	Akan dilakukan penyesuaian target kedepan sesuai Jumlah jasa	

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang Terpelihara dengan baik	100 %	100 %	100%		pelayanan umum	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Tersedia Operasional atau Laporanangan	Jumlah Kendaraan Tersedia Operasional/ Laporanangan Laik Jalan	8 Unit	8 Unit	100%			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin dalam Kondisi Baik	17 Unit	17 Unit	100%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya dalam kondisi baik	5 Bgn	5 Bgn	100%			
11	Kecamatan	Kecamatan Wasuponda									
			Peningkatan Kualitas Standar Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	0 %	0%	Pada dasarnya pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik berjalan secara normatif baik di Tingkat kecamatan maupun di Desa		
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang Dilaksanakan	100 %	0 %	0%			
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	0 Dok	0 Dok	0%	Faktor penyebab target kinerja sub Keg ini tidak	Melaksanakan sosialisasi Terkait pentingnya	



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pelayanan Perizinan Non Usaha					teralisasi adalah sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah No : 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No : 28 Tahun 2002 tentang bangunan Gedung dan Peraturan Bupati Luwu Timur No : 351/V-04/11/2021 Terkait peraturan IMB yang berubah menjadi PBG, maka terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2021 penerbitan IMB bukan lagi menjadi kewenangan Kecamatan melainkan oleh Tersedia Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tersedia Terkait Lainnya dan lakukan secara mandiri oleh pemohon secara online atau offline sehingga masyarakat agak kesulitan dalam melakukan pengurusan izin PBG.	perizinan PBG kepada masyarakat serta melakukan Koordinasi dengan Tersedia Terkait tentang data PBG dalam wilayah Kecamatan Kalaena yang telah dan atau dalam proses penerbitan izin.	

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Kualitas Standar Pelayanan Publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Desa DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	100%			
				Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang Dilaksanakan	100 %	100 %	100%			
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi masyarakat pada pelaksanaan MuSRenbang Kecamatan	130 Org	130 Org	100%			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Paket Kegiatan	42 Pkt	42 Pkt	100%			
			Peningkatan Kualitas Standar Pelayanan Publik	PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	100 %	100 %	100%			
				Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang Dilaksanakan	100 %	100 %	100%			
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Aparatur Pemerintah Kabupaten Kecamatan dan Desa, Vertikal dan lintas sektor Lainnya yang hadir dalam rapat rapat Koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat di	5 Org	5 Org	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Jumlah Aparatur Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa, Vertikal dan lintas sektor Lainnya yang hadir dalam rapat-rapat Koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kecamatan	36 Org	36 Org	100%			
				Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan Koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada	100 %	100 %	100%			
				/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/sinergitas dengan Polri dan atau Perangkat Daerah bidang penegakan Peraturan perundang-undangan yang Dilaksanakan	12 Kali	12 Kali	100%			
			Peningkatan Kualitas Standar Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan	100 %	100 %	100%			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Rek Forum Koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100%			
				Pelaksanaan Tugas Forum Pimpinan di Kecamatan	Jumlah rapat forum Koordinasi pimpinan kecamatan yang Dilaksanakan	12 Kali	12 Kali	100%			
			Peningkatan	PROGRAM	Persentase	100 %	100 %	100%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kualitas Standar Pelayanan Publik	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	penyelenggaraan pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar dan ketenTUan perundangan yang berlaku						
				Fasilitasi, Rek dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, Rek dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang Dilaksanakan	100 %	100 %	100%			
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 Dok	12 Dok	100%			
				Pelaksanaan Pembangunan Kawasan PerDesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan PerDesaan di Wilayah Kecamatan	6 Lap	6 Lap	100%			
			Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100 %	100 %	100%			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan Dokumen perencanaan, penganggaran & Evaluasi Tepat Waktu	100 %	100 %	100%			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun Tepat Waktu	2 Dok	2 Dok	100%			
				dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun Tepat Waktu	2 Dok	2 Dok	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Disusun Tepat Waktu	2 Dok	2 Dok	100%			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang Disusun	5 Dok	5 Dok	100%			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100 %	97 %	97%			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan Tunjangan Terbayarkan	17 Org	16 Org	94%			
				dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang Disusun Tepat Waktu	4 Dok	4 Dok	100%			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang DiAdministrasi sesuai standar	100 %	100 %	100%			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan penatausahaan barang milik Daerah pada SKPD yang Disusun	4 Dok	4 Dok	100%			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	96 %	96%			
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan	12 Lap	12 Lap	100%			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan		4 Org	2 Org	50%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Perundang-Undangan							
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja Administrasi umum PD	100 %	95 %	95%			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor yang di sediakan	6 Jns	6 Jns	100%			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik Kantor yang Disediakan	20 Jns	20 Jns	100%			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang Disediakan	5 Jns	5 Jns	100%			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	25 eks	25 eks	100%			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi	2500 Org	2750 Org	110%	Jumlah Tamu yang difasilitasi selama kurun Waktu 1 Januari s.d 29 Desember 2023 adalah sebanyak 2.750 Org yang terdiri dari Tamu rapat sebanyak 700 Org dan Tamu Lainnya sebanyak 2.050 Org .		
				Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	869 Kali	869 Kali	100%			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang Terpenuhi	100 %	100 %	100%			
				Pengadaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan	1 Pkt	1 Pkt	100%			



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				dan Mesin Lainnya	Mesin Lainnya yang Diadakan						
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah	100 %	111 %	111%			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang diAdministrasiKan	600 Srt	1197 Srt	200%	Jumlah Srt yang terAdministrasikan sebanyak 1197 Srt dengan rincian Srt Masuk sebanyak 719 Srt dan Srt Keluar sebanyak 478 Srt.		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Telepon, Listrik dan Air yang Terbayarkan	12 rek	12 rek	100%			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor yang sediakan	2 Jns	2 Jns	100%			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum Kantor yang Dibayarkan	12 Org	12 Org	100%			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang Terpelihara dengan baik	100 %	100 %	100%			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Tersedia atau Kendaraan Tersedia Jabatan	Jumlah kendaraan Tersedia operasional yang dipelihara dan Dibayarkan pajaknya	9 Unit	9 Unit	100%			
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel dalam Kondisi Baik	30 Unit	30 Unit	100%			

LKPJ BUPATI LUWU TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Urusan, Oranganisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rek DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	21 Unit	21 Unit	100%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan/atau bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	2 unit	100%			



3.3 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITERAPKAN

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, guna memperlancar dan keterpaduan pencapaian dan perwujudan sasaran, tujuan, misi dan visi satuan unit kerja pemerintah. Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah mengeluarkan beberapa kebijakan strategis yang dimaksudkan untuk menyelesaikan beberapa masalah yang terjadi di masyarakat. Kebijakan strategis tersebut diperkuat dengan dasar hukum sehingga penerapannya dapat dilaksanakan dengan baik.

Tabel 3.9
Kebijakan Strategis Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/masalah yang diselesaikan
1	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Peraturan Kepala Dinas NOMOR 410/229 TAHUN 2022 Tentang Pedoman Pembuatan Baju Seragam Sekolah Dalam Kegiatan Pemberian Bantuan Operasional Pendamping Penyelenggaraan Pendidikan	Pemberian Seragam sekolah bagi murid baru tingkat sekolah dasar dan Tingkat sekolah menengah pertama untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah dan meringankan beban wali/orangtua siswa
2	Pemulihan ekonomi bagi korban bencana kebakaran, tanah longsor dan angin kencang	SK Bupati Nomor 187/F-04/V/Tahun 2023 tentang Penetapan besaran BTT Bantuan Dana Darurat dan Mendesak Kepada Korban Bencana Kebakaran, Bencana Tanah Longsor dan Bencana Angin Kencang	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan BTT dan anggaran kebencanaan
3	Pemulihan ekonomi bagi korban bencana kebakaran	SK Bupati Nomor 277/F-04/VII/Tahun 2023 tentang Penetapan besaran BTT Bantuan Dana Darurat dan Mendesak Kepada Korban Bencana Kebakaran.	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan BTT dan anggaran penanganan kebencanaan
4	Pemulihan ekonomi bagi korban bencana kebakaran, tanah longsor dan angin kencang	SK Bupati Nomor 391/F-04/XII/Tahun 2023 tentang Penetapan besaran BTT Bantuan Dana Darurat dan Mendesak Kepada Korban Bencana Kebakaran, Bencana Tanah Longsor dan Bencana Angin Kencang	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan BTT dan anggaran penanganan kebencanaan
5	Penggunaan dan Penyelenggaran Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 84 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaran Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
6	Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Waemami	Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Waemami	Optimalisasi PAD
7	Penetapan Kawasan Pengembangan Tambak Udang Windu dan Udang Vannamae di Kabupaten Luwu Timur	Tindak Lanjut Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024	Meningkatkan pertumbuhan ekspor Udang 8 % per tahun
8	Pengendalian Wabah Pasca Kejadian Penyakit African	Surat Edaran Nomor : 100.3.4/2339/Dispdpk Tentang Penetapan Zero Reported Case Penyakit African Swine Fever (Asf) Dan Tindakan Yang Dilakukan Dalam Proses Pemulihan Peternakan Babi Surat Edaran Nomor : 100.3.4.2 / 1999 / Dispdpk Tentang Mekanisme Pengosongan Kandang Pasca Kejadian Penyakit African Swine Fever Dan	Untuk mendorong percepatan pemulihan sektor peternakan babi di wilayah Kabupaten Luwu Timur



NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/masalah yang diselesaikan
		Alur Re-Stocking Peternakan Babi	
9	Optimalisasi Pengelolaan dan Penanganan Lingkungan	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Kegiatan Pelayanan dan Penerimaan Jasa Layanan Laboratorium Lingkungan
		Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Program Kampung Iklim	
		Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 179/D-10/V/TAHUN 2023 tentang Penetapan Wilayah Usulan Lokasi Program Kampung Iklim Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023	
10	Gerakan Penanganan sampah	Surat Edaran Bupati Luwu Timur Nomor 660/0034/BUP tentang Hari Peduli Sampah Nasional Tahun 2022	Mengurangi jumlah timbunan sampah
		Surat Edaran Bupati Luwu Timur Nomor 188.6/0044/BUP tentang Pelaksanaan Program Eco Office Lingkup Kabupaten Luwu Timur	
		Surat Edaran Bupati Luwu Timur Nomor 188.6/0042/BUP tentang Kewajiban Menjadi Nasabah Bank Sampah	
		Surat Bupati Luwu Timur Nomor 600.4.15/0273/DLH/XI/2023 tentang Penyediaan Fasilitas Pemilahan Sampah dan Fasilitas Pengomposan	
11	Gerakan Penanganan sampah plastik	Surat Edaran Bupati Luwu Timur Nomor: 660/0288/BUP/2019 tentang Gerakan Luwu Timur Menangani Sampah Plastik Dengan Ecobrick	Mengurangi jumlah timbunan sampah plastik
		Surat Edaran Bupati Luwu Timur Nomor 451/0141/BUP tentang Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha Tanpa Sampah Plastik	
		Surat Edaran Bupati Luwu Timur Nomor 188.6/0041/BUP tanggal 26 Januari 2023 tentang Gerakan Luwu Timur membawa Kantong Belanja Ramah Lingkungan	
		Surat Edaran Bupati Luwu Timur Nomor 188.6/0043/BUP tentang Gerakan Luwu Timur membawa Botol Minum Berkali Pakai (Tumbler)	
		Surat Edaran Bupati Luwu Timur Nomor 600.4.15.1/0128/BUP tentang Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha tanpa Sampah Plastik	
12	Pengakuan dan Perlindungan MHA	Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat	Menyediakan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk memberikan layanan dasar dalam rangka pemenuhan hak MHA
13	Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Surat Edaran Bupati Luwu Timur Nomor 600.4.20.1/0097/BUP tentang Himbauan Pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS)	
14	Pemberian Bantuan Hibah pada Program Hibah Air Limbah serta Program Hibah Air Minum dan Sanitasi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490)	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan pengelolaan air limbah dengan pemasangan septic tank pada warga yg membutuhkan
15	Pengangkatan Pejabat Project Implementation Unit (PIU) Program Air Limbah Kabupaten Luwu Timur	2. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 215 / XI /2019 Tentang Penetapan Pejabat Project Implementation Unit (PIU) Program Air Limbah	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan



NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/masalah yang diselesaikan
		Kabupaten Luwu Timur	pengelolaan air minum dan sanitasi dengan pemasangan sambungan air minum pada warga yg membutuhkan serta perbaikan sistem sanitasi melalui pembangunan dan pemeliharaan drainase
16	Pemerintah Daerah menyediakan Law Firm Agus Melas and Parner sebagai Jasa Konsultan Hukum Pemerintah Daerah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.	1. Memberikan Layanan Konsultasi Hukum atas Permasalahan Hukum Pemerintah Daerah; 2. Mendampingi penanganan perkara hukum Pemerintah Daerah sampai selesai
17	Penetapan Daftar Penerima Hibah pada Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2023	Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.	1. Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana tempat Ibadah sehingga masyarakat untuk melaksanakan Ibadah.
18	Penetapan Penerima Beasiswa Daerah Hasil Seleksi Tahun 2023	Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Beasiswa Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Beasiswa Daerah	1. Untuk meningkatkan Akses dan Pemerataan Kesempatan Belajar di Perguruan Tinggi bagi Masyarakat Daerah; 2. Untuk membantu Mahasiswa Kurang mampu untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan. 3. Untuk memberikan penghargaan dan Motivasi bagi Mahasiswa Berprestasi agar dapat meraih Prestasi yang lebih tinggi. 4. Untuk memberikan bantuan kepada Mahasiswa Daerah dalam pelaksanaan penelitian dalam rangka tugas Akhir Pendidikannya.
19	Penetapan Pengelola Gerakan Luwu Timur Jum'at Sedekah pada Sekretariat Daerah	Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 13/VIII/Tahun 2021 tentang Penetapan Pengelola Gerakan Luwu Timur Jum'at Sedekah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur.	Meningkatkan kepedulian kepada sesama
20	Pelimpahan Kewenangan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kepada Kepala Perangkat daerah Tahun 2023	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 17/F-05/II/Tahun 2023 tanggal 2 Januari 2023	Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, optimalisasi, efektifitas dan efisiensi pemungutan pendapatan asli daerah dan kelancaran serta tertibnya pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.



NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/masalah yang diselesaikan
21	Pembentukan Tim Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 18/F-05/I/Tahun 2023 tanggal 2 Januari 2023 Tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah	meningkatkan penerimaan PAD yang merupakan salah satu sumber utama untuk membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah, dengan melakukan upaya intensifikasi dan extensifikasi diantara : melaksanakan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;.
22	Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak daerah di Kabupaten Luwu Timur	Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Nomor : KEP-59/PJ.08/2023 Nomor : KEP-24/PK.5/2023 Nomor : 147.543/91/PKS/PEM-LT/VIII/2023 Tanggal 22 Agustus 2023	Mengoptimalkan pelaksanaan pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan serta data perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
23	Pemberian Pengurangan keringanan dan pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan	Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2023 tanggal 2 Oktober 2023 Tentang tata cara Pemberian Pengurangan keringanan dan pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan	Peningkatan pelayanan bagi wajib Pajak BPHTB , Dalam rangka mendukung Program Prioritas Nasional, dan peningkatan pelayanan bagi Wajib Pajak BPHTB diperlukan sinergi kebijakan terkait pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan BPHTB, serta perlu diatur tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan BPHTB

3.4 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Luwu Timur Akhir Tahun Anggaran 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur telah memberikan beberapa rekomendasi dalam rangka menyelesaikan beberapa permasalahan yang terjadi. Rekomendasi tersebut kemudian telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui program dan kegiatan yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2023. Rekomendasi dan tindak lanjut tersebut dapat dilihat pada Table 3.10 dibawah ini :



Tabel 3.10

Rekomendasi DPRD dan Tindak Lanjut Yang Dilakukan Oleh
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD Penanggung Jawab
1	Untuk data yang belum disajikan pada LKPJ 2022 harap segera dilengkapi. Hal ini penting agar DPRD sebagai representasi/keterwakilan rakyat terlihat dapat memberikan penilaian yang obyektif dan dan komprehensif	Telah ditambahkan dalam dokumen perbaikan LKPJ Tahun 2022	Kelengkapan penyajian capaian indikator	Bapelitbangda
2	Dalam proses penentuan arah kebijakan, program dan kegiatan hendaknya benar-benar berbasis pada akar masalah yang secara aktual dihadapi masyarakat, agar benar-benar dapat memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.	Telah ditindaklanjuti sesuai tahapan penyusunan dokumen skala prioritas melalui <i>Focus Group Discussion</i> dan Konsultasi Publik yang melibatkan seluruh OPD	Sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan daerah	Bapelitbangda
3	Terkait dengan masih adanya data tahun 2022 yang belum dilaporkan, utamanya untuk indikator pencapaian misi, agar tetap disusulkan, sehingga setiap pembaca LKPJ 2022 dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif	Telah ditambahkan dalam dokumen perbaikan LKPJ Tahun 2022	Kelengkapan penyajian capaian indikator	Bapelitbangda
4	Untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah, Pemerintah Daerah agar berupaya dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan PAD di tahun-tahun yang akan datang, dengan cara menentukan target yang realistis sesuai dengan potensi PAD yang sesungguhnya. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta diversifikasi retribusi daerah, kiranya menjadi salah satu kebijakan yang perlu diambil, guna menggenjot pendapatan asli daerah, sehingga ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat secara berangsur-angsur dapat dikurangi	Proporsi PAD terhadap Total APBD Tahun 2023 sebesar 22,00% Tahun 2024 menjadi 20,48%,(penurunan tersebut disebabkan tahun 2023 terdapat penerimaan Pajak BPHTB yang wajib dibayarkan oleh pihak ketiga yang jatuh tempo sebesar Rp77,5 Milyar). Dimana rata-rata pertumbuhan PAD dari tahun 2018 s/d 2023 sebesar 7,36% Upaya peningkatan PAD dan mengurangi ketergantungan melalui kegiatan : 1. Penyerbaluasan Elektornifikasi Transaksi Pembayaran Daerah (ETPD) berbasis digital melalui transaksi Non Tunai seluruh pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan melakukan Sosialisasi, Edukasi dan Monitoring terkait pelaksanaan ETPD kepada masyarakat dan aparat Pemerintah Daerah	- Meningkatkan kemampuan fiskal daerah - Meningkatkan pendapatan daerah	Bapenda dan BKAD



No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD Penanggung Jawab
		2. Penggalan seluruh potensi pendapatan daerah baik secara Intensifikasi dan Ekstensifikasi dan Tahun 2024 telah direncanakan untuk menyusun peta potensi pendapatan daerah yang bekerjasama dengan Universitas Hasanudin sebagai salah satu dasar dalam penetapan target pendapatan daerah setiap tahunnya 3. Penguatan pengawasan pengelolaan pendapatan daerah dengan seluruh OPD pengelola PAD dengan melibatkan aparat penegak hukum 4. Pengembangan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat 5. Melakukan Evaluasi dan Monitoring secara berkala untuk mengetahui kendala dan hambatan dalam pengelolaan PAD 6. Melaksanakan Program Gebyar Pajak setiap tahunnya terutama kepada penggunaan alat transaksi QRIS dan MPOS yang hadiah/sovenir dapat ditukarkan langsung. 7. Meningkatkan Kopetensi dan kapasitas pengelola PAD baik dalam bentuk Sosialisasi, Bimtek, workshop dan pelatihan-pelatihan dengan tujuan petugas menjadi lebih professional dan di handalkan dalam pelaksanaan dilapangan.		
5	Pertumbuhan Ekonomi yang sudah positif, agar lebih ditingkatkan lagi untuk tahun – tahun yang akan datang. Hal ini penting dilakukan agar pertumbuhan ekonomi tersebut memiliki	Telah ditindaklanjuti dengan Pelaksanaan beberapa pelatihan berbasis kompetensi yang diselenggarakan di Tahun 2023 yang juga merupakan	- pemberian pelatihan keterampilan kepada pencari kerja, mendorong	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi



No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD Penanggung Jawab
	multiplier effect (dampak pengganda), terutama dalam membuka peluang kerja dan berusaha, serta membuka lebih luas terhadap kesempatan kerja, utamanya bagi para putra putri daerah.	Program Prioritas antara lain Pelatihan kompetensi Kerjasama Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar (jukur ukur/surveyor). Pelatihan kompetensi Kerjasama ATS Soroako (jurusan welder/Las dan otomotif) serta Pelatihan dan Sertifikasi K3/SIO (operator alat berat dan Dump Truk) dengan total Jumlah peserta mencapai 186 orang	pengembangan usaha kecil dan menengah serta fasilitasi dan pembinaan terus dilakukan oleh pemerintah daerah agar Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat terus di tekan dari tahun ke tahun - Memperluas kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal	
6	Mengingat sektor unggulan yang menguasai hajat hidup masyarakat Luwu Timur adalah pertanian (dalam arti luas), maka sudah semestinya sektor unggulan ini, memperoleh alokasi anggaran yang lebih besar dimasa yang akan datang. Mengapa? Karena secara teoritis hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung, berkorelasi positif dengan peningkatan PDRB dan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat daerah.	Telah ditindaklanjuti dengan tetap menetapkan sektor Pertanian dalam arti luas sebagai prioritas utama pembangunan dan peningkatan alokasi anggaran Alokasi Belanja pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebelum Perubahan sebesar Rp46,488,783,600,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp58.188.323.351,00 atau bertambah Rp11.699.539.751,00 atau 25,17%.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB pertumbuhan ekonomi Luwu Timur	Bappelitbangda, Dinas pertanian dan ketahanan pangan dan Dinas Perikanan
7	Guna mengefektifkan penggunaan Bantuan Keuangan Khusus berupa 1 Milyar 1 Desa, hendaknya dalam proses perencanaan program dan kegiatan serta pengalokasian anggarannya, benar-benar dilakukan berbasis pada akar masalah, sehingga dengan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa khususnya, dan masyarakat Luwu Timur pada umumnya, sehingga akan mempercepat tercapainya status desa maju.	Telah ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Bupati No.5 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa	Efektifitas penggunaan Bantuan Keuangan Khusus untuk meningkatkan status desa	Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa
8	Mengingat Luwu Timur merupakan salah satu daerah penghasil nikel dengan jumlah (deposit) yang cukup besar dan kualitas yang cukup baik, sudah seharusnya mendapat Dana Bagi Hasil yang lebih besar dari yang diterima sekarang ini. Misalnya DBH Pajak dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima tahun 2021 sebesar \$ 13,6 juta atau setara Rp 190,4	Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti dengan beberapa hal sebagai berikut : 1. Pembentukan Tim Koordinasi divestasi saham PT Vale kepada Pemerintah Daerah melalui melalui Surat Keputusan Bupati No.203/F-02/VI/Tahun 2023 tentang	Meningkatkan Kontribusi sektor pertambangan terhadap Pendapatan Daerah	Bapelitbangda, Bagian Ekbang Setdakab, DPMDN, Bapenda, DLH



No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD Penanggung Jawab
	Milyar pada kurs Rp 14.000,- dinilai tidak sebanding dengan tingkat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan serta kebutuhan dana untuk memperbaiki mutu lingkungan. Pertanyaanya adalah, bagaimana dengan nasib generasi Luwu Timur yang akan datang, ketika deposit tambang ini sudah habis? berkenaan dengan hal tsb: • Pemerintah Daerah perlu membangun kesepakatan serta kolaborasi dengan pemerintah daerah lain penghasil nikel, baik untuk tingkat kab/kota maupun dengan Pemerintah Provinsi, untuk kemudian secara bersama-sama memperjuangkan maksud tersebut, guna memperoleh bagian dana bagi hasil yang lebih proporsional atau wajar (dari yang sekarang). • Bersama-sama dengan pemerintah daerah lain untuk mengidentifikasi dan merumuskan apa yang menjadi tuntutan daerah, baik berkenaan dengan besaran dana bagi hasil, persentase tenaga kerja lokal yang dipekerjakan di perusahaan, maupun alokasi dengan persentase tertentu divestasi saham perusahaan (baik PMA maupun PMDN) untuk pemerintah daerah penghasil dan masyarakat daerah pada umumnya. Hanya dengan demikian eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam benar-benar akan dapat dirasakan manfaatnya oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat. • Mendukung sikap para Gubernur yang bermaksud untuk menunda IUP yang akan berakhir pada tahun 2025, sampai diperoleh butir butir kesepakatan yang dinilai wajar dan adil untuk semua pihak. • Perusahaan Tambang yang ada di Wilayah Luwu Timur, didorong untuk memanfaatkan Perusahaan Daerah dalam hal ini Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini dikarenakan peranan BUMD bagi Pemerintah Daerah masih kecil atau belum maksimal dalam memberikan kontribusi PAD.	Perubahan atas keputusan Bupati Luwu Timur No.178/F-02/V/Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Divestasi Saham Perseroan Terbatas Vale Indonesia Tbk kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. 2. Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang.		
9	Dalam hal kepedulian Pemerintah Daerah dalam menyikapi keberadaan perusahaan tambang di wilayah Kabupaten Luwu	Pembentukan Tim Negosiasi belum terwujud namun fungsi negosiasi telah dilakukan oleh	- Meningkatkan peran serta perusahaan	Bagian Pemerintahan Setdakab, Dinas



No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD Penanggung Jawab
	Tmur, maka kami Rekomendasikan kepada Saudara Bupati, agar segera membentuk Tim Negosiasi Gabungan yang bertugas melakukan negosiasi kepada semua perusahaan tambang, untuk ikut membangun fasilitas kebutuhan masyarakat Luwu Timur, seperti air bersih, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, pusat perekonomian masyarakat dll	Bapak Bupati dan Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti dengan beberapa hal sebagai berikut : 1. Membentuk Kesepakatan Bersama No. 147.543/46/III/KSB/PEM-LT/2023 : No. 022/BAN-SM Prov/KS/II/2023 Tentang Program Dukungan Pencapaian Target Sustainable Development Goals Desa Dan Pengembangan Kawasan Perdesaan Mandiri Terfokus Tahun 2023-2025 Pada Wilayah Pemberdayaan Masyarakat Perseroan Terbatas Vale Indonesia Terbuka Di Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan 2. Perjanjian Kerja Sama No. 147.543/47/III/PKS/PEM-LT/2023 Tentang Program Integrasi Dukungan Pencapaian Sustainable Development Goals Desa Dan Pengembangan Kawasan Perdesaan Mandiri Terfokus Pada Wilayah Pemberdayaan Masyarakat Perseroan Terbatas Vale Indonesia Terbuka Di Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan 3. Penataan Bundaran Bumi Batara Guru (BBG) kerjasama dengan PT. Vale Indonesia,Tbk 4. Penataan Sport Centre Kerjasama dengan PT.CLM 5. Penataan Skate Part kerjasama dengan IKONVI (Ikatan Kontraktor Nasional PT. Vale Indonesia,Tbk) 6. Pengadaan Mobelier dan Penataan Halaman Kantin PKK kerjasama PT.Aneka Gas Industri, Tbk dan PT Bangunindo Karya	tambang terhadap pemenuhan sarana prasarana umum bagi masyarakat - Tersedianya ruang terbuka hijau kondusif dan nyaman bagi masyarakat - Membantu memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Lingkungan Hidup, Dinas PUPR dan Dinas PMD



No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD Penanggung Jawab
		Lutama		
10	Pemerintah Daerah diminta untuk memenuhi kekurangan Ruang Kelas Baru (RKB) dan merehabilitasi gedung sekolah yang rusak, untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan bagi peserta didik. a. Pemerintah Daerah diminta menyelesaikan lanjutan betonisasi di beberapa ruas dalam wilayah Luwu Timur. b. Diminta Pemerintah Daerah untuk mempertimbangkan pengadaan Armada Damkar di beberapa titik rawan bencana yang sulit dijangkau oleh mobil pemadam kebakaran yang telah ada saat ini.	1. Telah ditindaklanjuti dengan dengan pembangunan 15 RKB di Tahun 2023 2. Ditindaklanjuti dengan pembangunan lanjutan betonisasi sepanjang 1,7 KM di beberapa ruas dalam kecamatan tahun 2023 3. Telah ditindaklanjuti dengan Pengadaan Armada Damkar sebanyak 1 unit pada Tahun 2023.	Pemenuhan kebutuhan dasar dan memperluas akses wilayah dan pelayanan bagi masyarakat	Bapelitbangda, Dinas PUPR, Dinas Damkar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan

Tugas Pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Tugas Pembantuan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Tugas Pembantuan Pusat adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Pada tahun 2023 tugas pembantuan pusat yang dilaksanakan di Kabupaten Luwu Timur sebanyak 6 Program yang berada pada 2 Perangkat daerah yaitu Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Tugas Pembantuan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Tugas Pembantuan Provinsi adalah penugasan dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/ kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Pada tahun 2023 tugas dari provinsi yang dilaksanakan di kabupaten Luwu Timur sebanyak 2 Program yang berada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Adapun Capaian kinerja Pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan pusat dan provinsi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 4.1
Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

NO	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Kementerian Pertanian Cq. Ditjen Sarana dan Prasarana	DIPA PROPINSI DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN No. 018.08.4.199133/2023	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Tersebar di 11 Kecamatan	Dinas Pertanian Kab. Luwu Timur	129,918,500	119,216,450	91,76				Terealisasi sesuai target
			Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian	Tersebar di 11 Kecamatan	Dinas Pertanian dan Kab. Luwu Timur	9,800,000	7,500,000	76.53	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	Terealisasi sesuai target
			Fasilitasi Pupuk dan Pestisida			43,918,500	42.206.650	96,10	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	
			Koordinasi [Base Line]			17,700,000	17.079,900	96,50	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	
			Bimtek/Monitoring dan Evaluasi Lingkup Pupuk dan Pestisida			17,700,000	17.079,900	96,50	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	
			Pelayanan Publik Kepada Masyarakat (Base Line)			26,218,500	25,126,750	95.84	1 Layanan	1 Layanan	100	
			Penerima Pupuk Bersubsidi yang diverifikasi dan divalidasi			26,218,500	25,126,750	95.84	1 Layanan	1 Layanan	100	
			Program Dukungan Manajemen			76,200,000	69,509,800	91.22	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Terealisasi sesuai target
			Layanan Manajemen Keuangan	Malili	Dinas Pertanian	76,200,000	69,509,800	91.22	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Terealisasi sesuai target



NO	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Kab. Luwu Timur							
	Kementerian Pertanian Cq. Ditjen Perkebunan	DIPA PROPINSI DITJEN PERKEBUNAN SP DIPA-018. 05.4.199572/2023 TANGGAL 30 NOP 2022	DIPA PROPINSI DITJEN PERKEBUNAN No. SP DIPA - 018.05.04.1995/ 2023		Dinas Pertanian Kab. Luwu Timur	689,840,000	687,343,817	99.64	100 Ha	100 Ha	100	
			Program Nilai Tambah daya saing Industri	- Burau - Wotu - Tomoni	Dinas Pertanian Kab. Luwu Timur	286,880,000	285,551,060	99.54	100 Ha	100 Ha	100	Terealisasi sesuai target
			pengembangan kawasan tanaman tahunan dan penyegar			286,000,000	284,671,060	99.54	100 Ha	100 Ha	100	
			Kawasan Kakao			286,000,000	284,671,060	99.54	100 Ha	100 Ha	100	
			Intensifikasi Tanaman Kakao			266,000,000	264,900,000	99.59	100 Ha	100 Ha	100	
			Pengawalan dan Pendampingan Kegiatan			20,000,000	19,771,060	98.86	100 Ha	100 Ha	100	
			Penguatan perbenihan tanaman perkebunan			880,000	880,000	100.00	1 Ha	1 Ha	100	
			Sarana Pengembangan Kawasan (Base Line)	- Tomoni (Rencana Awal)	Dinas Pertanian Kab. Luwu Timur	880,000	880,000	100.00	1 Ha	1 Ha	100	Kegiatan Fisik Tidak Dapat Dilaksanakan Karena Anggaran Fisik untuk kegiatan ini difokuskan, sedangkan realisasi tersebut berupa perjalanan dalam rangka monitoring awal Lokasi Calon Penerima
			Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan			880,000	880,000	100.00	1 Ha	1 Ha	100	
			Pemelihara Kebun Sumber Benih Unggul Lokal			880,000	880,000	100.00	1 Ha	1 Ha	100	
						880,000	880,000	100.00	1 Ha	1 Ha	100	



NO	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
												Bantuan.
			Program dukungan manajemen	Dinas Pertanian Kab. Luwu Timur	Dinas Pertanian Kab. Luwu Timur	402,960,000	401,792,757	99.71	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Terealisasi sesuai target
			dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya ditjen perkebunan			402,960,000	401,792,757	99.71	1 Dokumen	1 Dokumen	100	
			Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal			402,960,000	401,792,757	99.71	1 Dokumen	1 Dokumen	100	
			Layanan Manajemen Satker Daerah			402,960,000	401,792,757	99.71	1 Dokumen	1 Dokumen	100	
			Penyusunan Rencana Program dan Penganggaran Satker			402,960,000	401,792,757	99.71	1 Dokumen	1 Dokumen	100	
	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	DIPA NO. 067.07.4.350289/2023, Tgl 30 November 2022	PROGRAM DAERAH TERTINGGAL, KAWASAN PERBATASAN, PER DESAAN DAN TRANSMIGRASI	SKP.C SP1 Koromolai, Desa Mahalona dan SP1 Desa Libukang Mandiri		4.272.265.000	4.247.708.197	99,43				
			Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga			45.100.000	44.830.000	99,40	1 Lembaga	1 Lembaga	100 %	
			Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat			71.100.000	67.007.000	94,24	88 Orang	88 Orang	100 %	
			Fasilitasi dan			77.465.000	66.618.580	86,00	15 Keluarga	15 Keluarga	100 %	



			Pembinaan Keluarga									
			Bantuan Keluarga			677.400.000	677.194.272	99,97	92 Keluarga	92 Keluarga	100 %	
			Bantuan Peralatan / Sarana			527.042.000	526.822.600	99,96	1 Unit	1 Unit	100 %	
			Sarana Pengembangan Kawasan			2.416.323.000	2.411.356.811	99,79	18 Unit	18 Unit	100 %	
			Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)			372.860.000	369.574.734	99,12	1 Km	1 Km	100 %	
			Prasarana Pengembangan Kawasan			84.975.000	84.304.200	99,21	15 km2, bidang, km, hektar	15 km2, bidang, km, hektar	100 %	
			PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			83.210.000	82.407.840	99,04			100 %	
			Layanan Dukungan Manajemen Internal			83.210.000	82.407.840	99,04	1 Layanan	1 Layanan	100 %	



Tabel 4.2
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI
YANG DILAKSANAKAN OLEH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023

NO	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM ,KEGIATAN,OUTPUT , DAN RINCIAN KEGIATAN	KAB/KOTA	SKPD PELAKSANA A	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Pekerjaan Umum	Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1093/VII/Tahun 2023 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023	Pembangunan Ruang Terbuka Publik (Malili River Side)	Desa Wewangriu Kecamatan Malili	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur	7.387.684.463,55	7.387.684.463,55	100	1 Paket	1 Paket	100	
			Jumlah RTH Publik yang di Tata			7.387.684.463,55	7.387.684.463,55	100	1 Paket	1 Paket	100	
2	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1093/VII/Tahun 2023, Tanggal 24 Juli 2023	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Menyebar di 11 kecamatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur	200,000,000.00	146,988,584.00	73,49				
			Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat			200,000,000.00	146,988,584.00	73,49	100 %	100 %	100 %	



NO	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM ,KEGIATAN,OUTPUT , DAN RINCIAN KEGIATAN	KAB/KOTA	SKPD PELAKSANA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah									
			Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			200,000,000.00	146,988,584.00	73,49				
			(#) Peningkatan Derajat Pendidikan Perempuan dan Keluarga			200,000,000.00	146,988,584.00	73,49				
			Belanja Makanan dan minuman pada Sosialisasi Pelayanan Urusan Sosial			36.000.000.00	0.00	0.00	800 Paket	0	0	
			Makanan tambahan stunting			36.000.000.00	0.00	0.00				
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sosialisasi Penanganan dan Pencegahan Stunting dan Gizi Buruk			45.090.000.00	33,430,000.00	74.14				
			Makan			25,050,000.00	21,900,000.00	87.43	876 Kotak	1002 Kotak		
			Snack			20,040,000.00	11,530,000.00	57.53	1153 Kotak	2004 Kotak		
			- Belanja Persediaan untuk di jual/di serahkan ke masyarakat			105.010.000.00	99,758,584.00	95				
			Pemberian Makanan Tambahan			105.010.000.00	99,758,584.00	95				



NO	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM ,KEGIATAN,OUTPUT , DAN RINCIAN KEGIATAN	KAB/KOTA	SKPD PELAKSANA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Balita			92.250.000.00	88,651,840.00	96.10				
			- Susu Bubuk 400 Gram			77,900,000.00	74,711,840.00	95.91	820 Dos	6.560 Dos		
			- Vitamin Becafort			14,350,000.00	13,940,000.00	97.14	410 Botol	820 Botol		
			Bumil			12,760,000.00	11,106,744.00	87.04				
			- Susu Bumil			4,180,000.00	3,912,744.00	93.61	44 Dos	264 Dos		
			- Vitamin			8,580,000.00	7,194,000.00	83.85	44 Botol	1.320 Botol		
			- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor			4,900,000.00	4,900,000.00	100				
			- Bahan Cetak dan Penggandaan									
			Pengadaan Media Kampanye dan Media Pembelajaran			4,900,000.00	4,900,000.00	100				
			Spanduk			4,500,000.00	4,500,000.00	100	90 meter	228 meter		
			Baliho			400,000.00	400,000.00	100	8 meter	192 meter		
			Belanja Modal Alat Kantor Lainnya			3,000,000.00	3.000.000.00	100				
			Papan Nama Rumah Gizi			3.000.000.00	3.000.000.00	100	1 Unit	1 Unit		
			Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat			4.000.000.00	4.000.000.00	100				
			Pengadaan Meja kerja			4.000.000.00	4.000.000.00	100	2 Unit	2 Unit		
			Belanja Modal Kursi Kerja			2.000.000.00	1.900.000.00	95	2 Unit	2 Unit		

Sumber : Laporan Perangkat Daerah Setelah Diolah Tahun 2023



4.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Tabel 4.3

URAIAN CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN PUSAT DAN PROVINSI YANG DILAKSANAKAN OLEH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Capaian Kinerja	Hambatan/ Permasalahan	Upaya Upaya Penyelesaian	Perangkat Daerah yang Melaksanakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PROGRAM DAERAH TERTINGGAL, KAWASAN PERBATASAN, PERDESAAN DAN TRANSMIGRASI				Dinas Transmigrasi, dan Tenaga Kerja
	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1 Lembaga			
	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	88 Orang			
	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	15 Keluarga			
	Bantuan Keluarga	92 Keluarga			
	Bantuan Peralatan / Sarana	1 Unit			
	Sarana Pengembangan Kawasan	18 Unit			
	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	1 Km			
	Prasarana Pengembangan Kawasan	15 km2, bidang, km, hektar			
	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	1 Layanan			
	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1 Layanan			



I	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah	Persentase Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Ekonomi Desa Dalam Pembangunan Desa				
1.1	Sub Kegiatan Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	(1) Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi TP-PKK Kabupaten, (2) Jumlah Pembinaan TP-PKK Kabupaten, (3) Jumlah TP-PKK Yang Di Monitoring dan Di Evaluasi				
	(#) Peningkatan Derajat Pendidikan Perempuan dan Keluarga					
	- Sosialisasi Pelayanan Urusan Sosial					
	Belanja Makanan dan Minuman pada Sosialisasi Pelayanan Urusan Sosial					
	Makanan tambahan stunting		kegiatan ini tidak terealisasi karena mengantisipasi makanan yang akan dibawa ke wilayah yang jaraknya jauh dan/atau sebelah danau sudah tidak layak makan dikarenakan harus memakai catering 1 vendor	Diharapkan pada juknis BKK Stunting selanjutnya belanja makanan langsung diberikan kepada petugas gizi yang ada di desa masing2.		
	Belanja makanan dan minuman rapat Sosialisasi Penanganan dan Pencegahan Stunting dan Gizi buruk					
	Makan					
	Snack					
	- Belanja Persediaan untuk di jual/di serahkan ke masyarakat					
	Pemberian Makanan Tambahan					
	Balita					
	- Susu Bubuk 400 Gram		Susu ibu hamil dan susu balita di	Untuk mendapatkan target dan		



			ekatalog tidak ada dijual perkotak, yang ada atau tersedia hanya dalam bentuk saset. Sehingga yang terealisasi volume saset, namun pemberian susu kepada Balita dan Ibu Hamil tidak berkurang berdasarkan jumlah gram yang dianggarkan	sasaran yang tepat maka dilakukan perubahan harga satuan dan jumlah sasaran sesuai data program dan referensi harga barang di ekatalog LKPP dengan mempertimbangkan nilai TKDN produk maka di lakukan perubahan terhadap anggaran yang terdapat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang termuat dalam JUSTIFIKASI TEKNIS	
	- Vitamin Becafort		Anggaran berdasarkan DPA untuk Pengadaan multi vitamin balita becafort sebesar Rp. 35.000,- perbotol sedangkan di e katalog harga yang ada sebesar Rp. 17.524,- sehingga sangat memungkinkan mendapatkan 2 (dua) botol dan lebih dalam penanganan balita terindikasi stunting.	Untuk mendapatkan target dan sasaran yang tepat maka dilakukan perubahan harga satuan dan jumlah sasaran sesuai data program dan referensi harga barang di ekatalog LKPP dengan mempertimbangkan nilai TKDN produk maka di lakukan perubahan terhadap anggaran yang terdapat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang termuat dalam JUSTIFIKASI TEKNIS	
	Bumil				
	- Susu Bumil		Susu ibu hamil dan susu balita di ekatalog tidak ada dijual perkotak, yang ada atau tersedia hanya dalam bentuk saset. Pemberian susu kepada Balita dan Ibu Hamil tidak berkurang berdasarkan jumlah gram yang dianggarkan	Untuk mendapatkan target dan sasaran yang tepat maka dilakukan perubahan harga satuan dan jumlah sasaran sesuai data program dan referensi harga barang di ekatalog LKPP dengan mempertimbangkan nilai TKDN produk maka di lakukan perubahan terhadap anggaran yang terdapat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang termuat dalam JUSTIFIKASI TEKNIS	
	- Vitamin		Multivitamin ibu hamil yang ada pada e katalog dalam bentuk kapsul, tidak ada tersedia dalam bentuk botol/kotak.	Untuk mendapatkan target dan sasaran yang tepat maka dilakukan perubahan harga satuan dan jumlah sasaran sesuai data program dan referensi harga barang di ekatalog	



				LKPP dengan mempertimbangkan nilai TKDN produk maka di lakukan perubahan terhadap anggaran yang terdapat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang termuat dalam JUSTIFIKASI TEKNIS	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak dan Penggandaan				
	Pengadaan Media Kampanye dan Media Pembelajaran				
	Spanduk				
	Baliho				
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya				
	Papan Nama Rumah Gizi				
	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat				
	Meja Kerja Petugas Gizi				
	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat				
	Kursi Kerja Petugas Gizi				

Sumber : Laporan Perangkat Daerah Setelah Diolah Tahun 2023



BAB V PENUTUP

Hasil penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD Kabupaten Luwu Timur, disajikan dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Luwu Timur Akhir Tahun Anggaran 2023. Harapan terbesar adalah bagaimana proses pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2023 memberi dampak yang baik bagi kehidupan masyarakat Luwu Timur atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi, Urusan Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan, dapat dilihat capaian kinerja program dan kegiatan serta permasalahan dan alternatif solusi, permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2023 menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2024.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh stakeholder pembangunan, segenap Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur dan seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, yang telah memberikan dukungan dan kerja kerasnya dalam melaksanakan urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai urusan masing-masing.

Dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kami menyadari masih ditemukan beberapa permasalahan yang belum terselesaikan secara tuntas, walaupun telah dengan sungguh-sungguh diupayakan langkah-langkah perbaikan, namun pemerintah akan terus melakukan upaya kongkrit untuk mencapai target yang lebih optimal, tentunya didukung oleh seluruh elemen pemerintahan baik ditingkat kabupaten, provinsi dan pusat. Dengan demikian, laporan ini menjadi bahan informasi lengkap bagi DPRD Kabupaten Luwu Timur untuk menilai sejauh mana proses pembangunan berjalan dan memberi masukan demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Semoga Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa meridhoi segala langkah dan upaya kita untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Luwu Timur yang kita cintai.

Sekian dan Terima kasih.



Malili, Maret 2024
BUPATI LUWU TIMUR,

Drs. H. Budiman, M.Pd